



LAPORAN KINERJA (LKj) PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG TAHUN 2016



K
A
B
U
P
A
T
E
N

B
A
N
T
A
E
N
G

T
A
H
U
N

2
0
1
7



2017

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) atau Laporan Kinerja (LKj) Kabupaten Bantaeng Tahun 2016 disusun sebagai perwujudan atas komitmen pemerintah daerah untuk memberikan akuntabilitas kepada para pemangku kepentingan. Komitmen ini juga didasari pada keinginan luhur untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) yang akan memberikan dampak kepada peningkatan kualitas pelayanan kepada publik

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) tidak hanya sebagai media pertanggungjawaban namun lebih dari itu sebagai media untuk terus meningkatkan kinerja pemerintah daerah. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Bantaeng terus mengadakan perbaikan dalam implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Laporan Kinerja (LKj) Pemerintah Kabupaten Bantaeng Tahun 2016 ini Merupakan tahun ketiga pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2013-2018, merupakan dokumen yang menggambarkan hasil-hasil yang telah dicapai dari realisasi pelaksanaan program/kegiatan yang berpedoman pada Indikator Kinerja Sasaran/Utama (IKU) sehingga analisis yang dilakukan menggunakan perbandingan antara target dan realisasi yang telah dicapai..

Kami berharap Laporan Kinerja (LKj) Pemerintah Kabupaten Bantaeng Tahun 2015 ini dapat memberikan gambaran yang objektif tentang kinerja yang telah dicapai pemerintah daerah dan sebagai bahan evaluasi bagi pemangku kepentingan untuk melakukan perbaikan kinerja dimasa yang akan datang. Kami juga berterima kasih kepada Bapak Bupati Bantaeng, atas dukungan dan perhatiannya serta kepada para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang telah membantu menyampaikan dokumen Laporan Kinerja SKPD dengan tepat waktu, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Kabupaten Bantaeng Tahun 2016 ini dapat diselesaikan sesuai target yang telah ditentukan.

Bantaeng, 20 Maret 2017

BUPATI BANTAENG

Prof.DR.H.M. NURDIN ABDULLAH, M.Agr



RINGKASAN EKSKUTIF

Pemerintah Kabupaten Bantaeng telah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bantaeng Tahun 2013 s/d 2018 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 1 Tahun 2014. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bantaeng Tahun 2013 s/d 2018, selanjutnya dijabarkan menjadi Visi dan Misi serta Agenda dan Kebijakan Umum Pembangunan Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2013-2018. Adapun Visi Pembangunan Kabupaten Bantaeng Tahun 2013-2018 adalah **“Menjadi Pusat Pertumbuhan Ekonomi dibagian selatan Sulawesi Selatan Tahun 2018”** Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantaeng sesuai Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang RPJMD Kabupaten Bantaeng 2013-2018, terdapat 5 agenda pembangunan yang ditetapkan dengan 37 sasaran strategis dengan indikator kinerja utama (IKU) sebanyak 130 (seratus tiga puluh) indikator untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran RPJMD dimaksud. Untuk itu, mengingat IKU merupakan komponen yang sangat penting dalam mengukur pencapaian sasaran dalam RPJMD Kabupaten Bantaeng, maka telah ditetapkan dalam Keputusan Bupati Bantaeng Nomor 161/557/XI/2015 tentang Perubahan Keputusan Bupati Bantaeng Nomor 161/557/XI/2014 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantaeng.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) merupakan sistem manajemen pemerintahan berfokus pada peningkatan akuntabilitas yang berorientasi pada hasil (*Outcomes oriented*). Sistem AKIP diimplementasikan secara “*self assesment*” oleh masing-masing instansi pemerintah. *Self assesment* maksudnya, instansi pemerintah membuat perencanaan dan pelaksanaan, serta mengukur/mengevaluasi kinerjanya sendiri dan melaporkannya kepada instansi yang lebih tinggi. Sistem AKIP menghendaki transformasi sektor pemerintahan yang mengubah fokus akuntabilitas dari orientasi pada masukan-masukan (*inputs oriented accountability*) dan proses ke arah akuntabilitas pada hasil (*result oriented accountability*). Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) memuat penjelasan tentang realisasi kegiatan dengan rencana serta keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan, dimulai dari perencanaan strategis sampai pada pengukuran kinerja.

Pengukuran keberhasilan maupun kegagalan capaian kinerja dalam



penyusunan LAKIP Kabupaten Bantaeng telah menggunakan Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU yang sering pula disebut *Key Performance Indicator* merupakan acuan untuk mengukur keberhasilan dan kegagalan capaian kinerja prioritas program yang bersifat strategis. IKU ditetapkan secara mandiri oleh instansi pemerintah pusat maupun daerah dan SKPD di lingkungannya. Dalam ketentuan umum Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 disebutkan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran atau tujuan instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Dalam Perencanaan dan Perjanjian Kinerja Tahun 2014 ditetapkan sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) sasaran strategis dan 133 indikator yang harus dicapai selama Tahun 2014. Dari 37 (tiga puluh tujuh) sasaran yang dirumuskan tersebut, berdasarkan hasil pengukuran indikator kinerja pemerintah Kabupaten Bantaeng Tahun 2015, *rata-rata pencapaian kinerja sebesar 89.87%*. Pencapaian kinerja ini merupakan evaluasi pencapaian kinerja sasaran dalam pelaksanaan tahun pertama RPJMD Kabupaten Bantaeng Tahun 2013-2018.

Disamping keberhasilan pencapaian sasaran berdasarkan hasil pengukuran indikator kinerja, masih terdapat 4 (empat) sasaran kinerja yang belum mencapai 80%. Hal ini disebabkan belum adanya program atau kegiatan yang mendukung pencapaian indikator kinerja dan masih terbatasnya kemampuan pendanaan dalam merealisasikan target kinerja.

Sedangkan analisis pencapaian keuangan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Bantaeng Tahun 2015 dibiayai dengan anggaran yang tertuang dalam APBD Tahun 2014 yang secara garis besar terdiri dari tiga bagian yaitu, pendapatan, belanja dan pembiayaan. Pendapatan diuraikan menurut sumber-sumber perolehan dana, belanja diuraikan menurut penggunaan dana, sedangkan pembiayaan diuraikan menurut penerimaan dan pengeluaran daerah. Garis besar APBD Tahun 2015 dan realisasinya berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran.

Pendapatan Asli Daerah yang ditargetkan sebesar Rp. 54.912.654.327.13,- hanya dapat direalisasikan sebesar Rp. 47.724.743.240.44 atau sebesar 86.91%. Tidak tercapainya target Pendapatan Asli Daerah tersebut disebabkan, karena kurang maksimalnya SKPD yang mengelola pendapatan dalam merealisasikan kegiatan menjadi sumber pendapatan. Kondisi tersebut



2017

mengharuskan Pemerintah Kabupaten Bantaeng lebih intensif melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah.

Sedangkan pendapatan daerah dari dana perimbangan khususnya Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Pada Tahun 2015, Kabupaten Bantaeng menerima DAU sebesar Rp. 444.919.431.000.00,- 424.570.861.000.00 meningkat sebesar Rp. 20.348.570.000,- dari Tahun 2014 yang hanya sebesar Rp. 424.570.861.000.00,- Begitu pula dengan DAK, pada Tahun 2015 Kabupaten Bantaeng menerima sebesar Rp. 162.262.910.000.00,- naik sebanyak Rp. 114.974.950.000,- dari tahun 2013 yang dialokasikan hanya sebesar Rp. 47.287.960.000,-,-. Secara keseluruhan target jumlah pendapatan daerah yang berasal dari PAD, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebanyak Rp. 818.631.057.071.76 atau 95,27 %. Realisasi pendapatan daerah ini meningkat sebesar Rp. 165.108.933.992.00,- dari tahun sebelumnya.

Belanja secara keseluruhan belanja daerah yang dapat direalisasikan sebesar Rp. 775.024.021.801.89 atau 93.81 %. Sedangkan pembiayaan daerah yang ditargetkan sebesar Rp. 7.723.428.531.00,- dapat direalisasikan sebesar Rp. 11.948.056.431.15,- atau sebanyak 154.70 %.



2017

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR GRAFIK	x
DAFTAR SKEMA	xi
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Maksud dan Tujuan Laporan Kinerja (LKj)	1
B. Dasar Hukum Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Kabupaten Bantaeng Tahun 2016	3
C. Profil Kabupaten Bantaeng	4
D. Penduduk	5
E. Struktur Organisasi Pemerintah Kabupaten Bantaeng	31
F. Sistematika Penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Bantaeng 2015	39
BAB II. PERENCANAAN KINERJA	40
A. Perencanaan Kinerja	40
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2016	50
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	58
A. Kerangka Pengukuran Capaian Kinerja	58
B. Analisis Pengukuran	59
C. Analisis Capaian Keuangan	128
BAB IV. PENUTUP	131
4.1 Kesimpulan	131
4.2 Saran-Saran	133



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah Penduduk menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin Kabupaten Bantaeng	6
Tabel 1.2	Jumlah Penduduk ,luas wilayah dan kepadatan penduduk Kabupaten Bantaeng.....	7
Tabel 1.3	Angka Pertambahan Penduduk Kabupaten Bantaeng	8
Tabel 1.4	Jumlah dan Proporsi penduduk berdasarkan kelompok umur dan jenis kelamin kabupaten Bantaeng	9
Tabel 1.5	Rasio Jenis kelamin berdasarkan kecamatan Kabupaten Bantaeng	11
Tabel 1.6	Prosentase penduduk menurut Agama Kabupaten Bantaeng	12
Tabel 1.7	Distribusi penduduk umur 10 tahun ke atas menurut status kawin jenis kelamin dan kecamatan kabupaten Bantaeng	13
Tabel 1.8	Jumlah penduduk, jumlah keluarga, rata-rata jumlah anggota keluarga kabupaten Bantaeng	15
Tabel 1.9	Jumlah Angkatan kerja, Jumlah Tenaga Kerja dan tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	16
Tabel 1.10	Angka penyerapan angkatan kerja (Employment Rate) Kabupaten Bantaeng	18
Tabel 1.11	Jumlah pencari pekerjaan dan angka pengangguran (Unemployment Rate-UER) Kabupaten Bantaeng	18
Tabel 1.12	Jumlah Pencari kerja, jumlah angkatan kerja dan angka pengangguran menurut Jenis Kelamin Kabupaten Bantaeng.....	19
Tabel 1.13	Pertumbuhan Riil setiap sektor di kabupaten Bantaeng	21
Tabel 1.14	Peranan Lapangan Usaha terhadap PDRB Kategori Pertanian, peternakan, perburuan dan jasa pertanian (%), 2011-2015	22
Tabel 1.15	Pertumbuhan dan peranan sublapangan usaha Kategori pertambangan penggalan lainnya (%) 2011-2015	23
Tabel 1.16	Peranan Lapangan Usaha terhadap PDRB Kategori industry	



pengolahan	23
Tabel 1.17 Peranan Lapangan Usaha terhadap PDRB Kategori Listrik dan Gas (%) 2011-2015	24
Tabel 1.18 Peranan Lapangan Usaha terhadap PDRB Kategori Perdagangan besar Dan Eceran Reparasi Mobil & Sepeda Motor (%) 2011-2015	25
Tabel 1.19 Peranan Lapangan Usaha terhadap PDRB Kategori Transportasi dan Perdagangan (%) 2011-2015	26
Tabel 1.20 Peranan Lapangan Usaha terhadap PDRB Kategori Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (%) 2011-2015	27
Tabel 1.21 Peranan Lapangan Usaha terhadap PDRB Kategori Jasa Keuangan dan Asuransi (%) 2011-2015	28
Tabel 1.22 Jumlah Kelurahan/Desa, RW dan RT dalam Wilayah Kabupaten Bantaeng	33
Tabel 1.23 Jumlah Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Bantaeng Menurut Jabatan dan Jenis Kelamin	36
Tabel 1.23 Jumlah PNS Kabupaten Bantaeng Berdasarkan Tingkat Pendidikan	38
Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Tahun 2016	51
Tabel 3.1 Evaluasi Pencapaian Sasaran 1	60
Tabel 3.2 Capaian Kinerja Sasaran Tahun Sebelumnya	60
Tabel 3.3 Jenis Tindakan Kriminalitas/ Kekerasan	61
Tabel 3.4 Evaluasi Pencapaian Sasaran 2	63
Tabel 3.5 Perbandingan Pencapaian Sasaran Tahun Sebelumnya	63
Tabel 3.6 Perbandingan Pencapaian Sasaran dengan Target RPJMD	64
Tabel 3.7 Evaluasi Pencapaian Sasaran 3	65
Tabel 3.8 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja	66
Tabel 3.9 Perbandingan Pencapaian Sasaran Tahun Sebelumnya	67
Tabel 3.10 Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan RPJMD 2013-2018	67



Tabel 3.11 Evaluasi Pencapaian Sasaran 4	68
Tabel 3.12 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja	69
Tabel 3.13 Perbandingan Pencapaian Sasaran Tahun Sebelumnya	69
Tabel 3.14 Evaluasi Pencapaian Sasaran 5	72
Tabel 3.15 Evaluasi Pencapaian Sasaran 6	72
Tabel 3.16 Perbandingan Target dan Realisasi Capaian Sasaran 7	75
Tabel 3.17 Perbandingan Perbandingan Realisasi Capaian Sasaran 7 Tahun -Tahun sebelumnya	76
Tabel 3.18 Jumlah Cabang Olahraga dan Jumlah Atlet Kabupaten Bantaeng	76
Tabel 3.19 Cabang Olahraga Unggulan Kabupaten Bantaeng	77
Tabel 3.20 Data Sarana Dan Prasarana Olahraga Tahun	77
Tabel 3.21 Perbandingan Target Realisasi Capaian Sasaran 8	79
Tabel 3.22 Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Sebelumnya	80
Tabel 3.23 Persentase Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dasar	80
Tabel 3.24 Presentase Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	81
Tabel 3.25 Indikator Keberhasilan Meningkatnya Penyediaan Pelayanan Sarana dan Prasarana Kesehatan	82
Tabel 3.26 Cakupan Status Gizi Masyarakat	83
Tabel 3.27 Perbandingan target dan realisasi kinerja pencapaian sasaran 9 tahun 2016	86
Tabel 3.28 Perbandingan Capaian Realisasi Tahun 2016 dengan tahun-tahun Sebelumnya	86
Tabel 3.29 Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit	87
Tabel 3.30 Peningkatan promosi kesehatan dan pembinaan PSM	88
Tabel 3.31 Perbandingan capaian target dan realisasi kinerja tahun 2016	89
Tabel 3.32 Perbandingan capaian realisasi kinerja dengan tahun sebelumnya.....	90
Tabel 3.33 Pemenuhan Sarana Prasarana Rumah Sakit	91



Tabel 3.34 Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2016	93
Tabel 3.35 Perbandingan realisasi kinerja tahun 2016 dengan tahun sebelumnya	93
Tabel 3.36 Perbandingan antara target dan realisasi kinerja sasaran 12	94
Tabel 3.37 Capaian Kinerja Dinas Pertanian dan Peternakan Tahun 2016	95
Tabel 3.38 Perbandingan antara target dan realisasi kinerja sasaran 13	99
Tabel 3.39 Perbandingan realisasi kinerja tahun 2016 dengan tahun sebelumnya	100
Tabel 3.40 Perbandingan antara target dan realisasi kinerja sasaran 14	101
Tabel 3.41 Perbandingan Pencapaian target dan realisasi kinerja tahun 2016....	102
Tabel 3.42 Perbandingan antara capaian kinerja tahun ini dengan tahun sebelumnya	102
Tabel 3.43 Perbandingan antara target dan realisasi sasaran tahun 2016	103
Tabel 3.44 Perbandingan antara target dan realisasi sasaran tahun 2016	104
Tabel 3.45 Perbandingan realisasi kinerja sasaran tahun 2016 dengan tahun sebelumnya	104
Tabel 3.46 Perbandingan antara target dan realisasi kinerja pencapaian sasaran tahun 2016	106
Tabel 3.47 Perbandingan realisasi kinerja sasaran tahun 2016 dengan tahun sebelumnya	107
Tabel 3.48 Realisasi anggaran pencapaian sasaran Tahun 2016	108
Tabel 3.49 Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2016.....	109
Tabel 3.50 Perbandingan Pencapaian kinerja sasaran 19	110
Tabel 3.51 Evaluasi Pencapaian sasaran 20	111
Tabel 3.52 Evaluasi Pencapaian sasaran 21	112
Tabel 3.53 Evaluasi Pencapaian sasaran 22	112
Tabel 3.54 Evaluasi Pencapaian sasaran 23	113
Tabel 3.55 Evaluasi Pencapaian sasaran 24	116
Tabel 3.56 Evaluasi Pencapaian sasaran 25	116
Tabel 3.57 Evaluasi Pencapaian sasaran 26	117



Tabel 3.58 Data Keadaan Koperasi di Kabupaten Bantaeng	118
Tabel 3.59 Evaluasi Pencapaian sasaran 27	118
Tabel 3.60 Evaluasi Pencapaian sasaran 28	118
Tabel 3.61 Evaluasi Pencapaian sasaran 29	119
Tabel 3.62 Evaluasi Pencapaian sasaran 30	120
Tabel 3.63 Evaluasi Pencapaian sasaran 31	120
Tabel 3.64 Evaluasi Pencapaian sasaran 32	122
Tabel 3.65 Perbandingan Indikator Cakupan Objek Pemeriksaan pada Inspektorat Kabupaten Bantaeng Tahun 2016	122
Tabel 3.66 Evaluasi Pencapaian sasaran 33	124
Tabel 3.67 Evaluasi Pencapaian sasaran 34	124
Tabel 3.68 Evaluasi Pencapaian sasaran 35	125
Tabel 3.69 Evaluasi Pencapaian sasaran 36	126
Tabel 3.70 Evaluasi Pencapaian sasaran 37	127



DAFTAR GAMBAR

Gambar	1.1	Peta Administrasi Kabupaten Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan	5
Gambar	1.1	Piramida Penduduk Kabupaten Bantaeng Tahun 2014.....	10



DAFTAR GRAFIK

Grafik	1	Tingkat Partisipasi angkatan kerja Kabupaten Bantaeng Tahun 2014	17
Grafik	2	Angka pengangguran Kabupaten Bantaeng	20
Grafik	3	Laju Pertumbuhan ekonomi Kategori Penyediaan Akomodasi dan makan minum (%) 2010-2014	27
Grafik	4	Pertumbuhan Riil Kategori Informasi dan Komunikasi (%)	28
Grafik	5	Laju Pertumbuhan Riil Kategori Jasa Perusahaan (%) 2011-2015	29
Grafik	6	Pertumbuhan Riil Kategori Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib (%) 2011-2015	30
Grafik	7	Laju Pertumbuhan Riil Kategori Jasa Perusahaan (%) 2011-2015	30
Grafik	8	Laju Pertumbuhan Riil Kategori Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (%) 2011-2015	31
Grafik	9	Kinerja Bidang Bina Marga Dinas PU & Kimpraswil Kabupaten Bantaeng	109



DAFTAR SKEMA

Skema	1.1	Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bantaeng	35
--------------	------------	---	----



2017

BAB I

Pendahuluan

A. MAKSUD DAN TUJUAN LAPORAN KINERJA (LKj)

Salah satu asas umum penyelenggaraan negara adalah adanya *akuntabilitas* yang lebih berorientasi pada hasil. Hal ini sejalan dengan *best practices* dalam pengelolaan keuangan negara adalah akuntabilitas yang berorientasi pada hasil atau dengan kata lain manajemen pemerintahan kita telah memasuki era *performance-based management*. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah mempertegas bahwa selain akuntabilitas keuangan juga dibutuhkan adanya akuntabilitas kinerja. Peraturan Pemerintah ini mendefinisikan bahwa kinerja sebagai “keluaran/hasil dari kegiatan/program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kualitas dan kuantitas terukur”. Hal ini juga merubah paradigma dari pemerintah yang berorientasi input (*input oriented*) menjadi pemerintahan yang berorientasi hasil (*outcome oriented*).

Secara spesifik Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 menekankan bahwa :

- Pengungkapan informasi tentang kinerja relevan dengan perubahan paradigma penganggaran pemerintah yang ditetapkan dengan mengidentifikasi secara jelas keluaran (*output*) dari setiap kegiatan dan hasil (*outcome*) dari setiap program
- Perlu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang terintegrasi dengan sistem perencanaan strategis, sistem penganggaran dan sistem akuntabilitas pemerintahan
- Selain kewajiban penyusunan Laporan Keuangan, setiap Instansi Pemerintah juga diwajibkan menyusun Laporan Kinerja yang dihasilkan dari suatu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang diselenggarakan oleh masing-masing Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi

Sistem AKIP merupakan sistem manajemen pemerintahan berfokus pada peningkatan akuntabilitas yang berorientasi pada hasil (*Outcomes oriented*). Sistem AKIP diimplementasikan secara “*self assesment*” oleh masing-masing instansi pemerintah. *Self assesment* maksudnya, instansi pemerintah membuat perencanaan dan pelaksanaan, serta mengukur/mengevaluasi kinerjanya sendiri dan melaporkannya kepada instansi yang lebih tinggi.

Sistem AKIP juga adalah manajemen kinerja instansi pemerintah dan berdasarkan manajemen kinerja tersebut, proses perencanaan, penganggaran, pengelolaan dan pertanggungjawaban penggunaan uang negara harus didasarkan pada kinerja (*performance-based management*). Sebagai suatu manajemen, Sistem AKIP merupakan siklus dari proses perencanaan, penganggaran, pengukuran, pelaporan dan evaluasi kinerja yang terintegrasi dengan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan. Dari siklus ini penerapan akuntabilitas kinerja akan menjadi umpan balik perbaikan manajemen kinerja pemerintah secara berkelanjutan, sehingga terwujud pemerintah yang efisien, efektif dan akuntabel.

Penerapan manajemen pemerintahan berbasis kinerja pada dasarnya adalah mengubah *mind-set* para birokrat dari sistem yang birokratis ke arah sistem yang bertujuan untuk lebih mewirausahakan birokrasi pemerintah. Dalam



bahasa lain, transformasi sektor pemerintahan yang mengubah fokus akuntabilitas dari orientasi pada masukan-masukan (*inputs oriented accountability*) dan proses ke arah akuntabilitas pada hasil (*result oriented accountability*), terutama berupa *outcomes*.

Salah satu cara yang tepat untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan manajemen pemerintahan adalah dengan melakukan reformasi pengelolaan dan pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah. Prioritas strategis pemerintah harus ditetapkan didasarkan kebutuhan masyarakat. Instansi pemerintah menetapkan sasaran strategis di instansi masing-masing dengan ukuran-ukuran kinerja yang jelas dan terukur. Berbagai peraturan perundang-undangan yang saat ini telah mengharuskan penerapan manajemen berbasis kinerja, seperti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, serta berbagai peraturan pelaksanaannya. Sementara itu kondisi global serta tuntutan agar suatu instansi pemerintah mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat juga mengharuskan pemerintah menerapkan manajemen pemerintahan yang lebih berorientasi pada hasil.

Untuk mengukur keberhasilan maupun kegagalan dalam melaksanakan Rencana Pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bantaeng perlu adanya Indikator Kinerja Utama (IKU). Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana amanat Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tanggal 31 Mei 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama. IKU merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran atau tujuan instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Oleh karena itu dalam penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Bantaeng Tahun 2016 ini, pengukuran kinerja menggunakan Indikator Kinerja Utama (IKU) sudah diformalkan dalam bentuk Keputusan Bupati Bantaeng Nomor 161/543/IX/ 2015 tentang Perubahan Keputusan Bupati Bantaeng Nomor Nomor 161/543/XI/ 2014 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantaeng yang memuat 37 (tiga puluh tujuh) sasaran dengan 89 (delapan puluh sembilan) indikator kinerja sasaran/utama.

Laporan Akuntabilitas Kinerja atau Laporan Kinerja (LKj) Pemerintah Kabupaten memiliki 2 (dua) fungsi utama yaitu:

- a. Sebagai sarana menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh *stakeholders* (Bupati, DPRD dan masyarakat).
- b. Sebagai sarana evaluasi atas pencapaian kinerja, sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa datang.

Dengan demikian, maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Bantaeng Tahun 2016 mencakup hal-hal berikut ini:

- a. **Aspek Akuntabilitas Kinerja**, bagi keperluan eksternal organisasi dengan menjadikan Laporan Kinerja (LKj) 2016 sebagai sarana pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten Bantaeng atas capaian kinerja yang diperoleh selama tahun 2016. Esensi capaian kinerja yang dilaporkan merujuk pada sampai sejauh mana visi, misi dan tujuan/sasaran strategis dalam RPJMD Tahun 2013-2018 telah dicapai khususnya pada akhir periode tahun 2016.



- b. **Aspek Manajemen Kinerja** bagi keperluan internal organisasi dengan menjadikan Laporan Kinerja (LKj) 2016 sebagai sarana evaluasi pencapaian kinerja oleh manajemen Pemerintah Kabupaten Bantaeng untuk upaya perbaikan kinerja di masa datang. Untuk setiap celah kinerja yang ditemukan, manajemen Pemerintah Kabupaten Bantaeng dapat merumuskan strategi pemecahan masalahnya sehingga capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Bantaeng dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.

B. DASAR HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA (LKj) KABUPATEN BANTAENG TAHUN 2016

Laporan Kinerja (LKj) Kabupaten Bantaeng sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban kegiatan tahunan yang telah disusun dalam Rencana Kerja (Renja) dan perjanjian kinerja dipakai sebagai salah satu tolok ukur untuk mengukur keberhasilan maupun kegagalan dalam melaksanakan kegiatan pembangunan. Laporan Kinerja (LKj) Kabupaten Bantaeng Tahun 2016 disusun berdasarkan beberapa landasan sebagai berikut :

- a. Landasan Idiil yaitu Pancasila Pancasila,
- b. Landasan Konstitusional yaitu UUD 1945,
- c. Landasan Operasional:
 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi ;
 2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2000 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ;
 3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
 4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara ;
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman penyusunan dan penerapan standar pelayanan minimal;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 13. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
 14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian



- Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 24 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantaeng;
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 26 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Bantaeng sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 2 Tahun 2009;
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bantaeng Tahun 2013-2018.
 19. Keputusan Bupati Bantaeng Nomor 161/543/IX/2015 tentang Perubahan Keputusan Bupati Bantaeng Nomor Nomor 161/543/XI/2014 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantaeng.

C. PROFIL KABUPATEN BANTAENG

Sebagai salah satu kabupaten yang terletak di bagian pesisir selatan Provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Bantaeng merupakan kabupaten tertua dari kabupaten-kabupaten lain dibagian selatan. Kabupaten Bantaeng berjarak 120 km dari Kota Makassar, Ibukota Provinsi Sulawesi Selatan dengan luas wilayah tercatat 395,83 km² (39.583 ha) yang terbagi atas 8 kecamatan, 21 kelurahan dan 46 desa. Secara geografis berada pada posisi 5° 21'13" - 5° 35'26" Lintang Selatan dan 119° 51'42" - 120° 05'27" Bujur Timur, memiliki wilayah pantai yang memanjang pada bagian barat ke timur kota dan wilayah daratannya mulai dari tepi laut Flores sampai pegunungan sekitar Gunung Lompobattang dengan ketinggian tempat dari permukaan laut 0-25 m sampai ketinggian lebih dari 1.000m diatas permukaan laut.

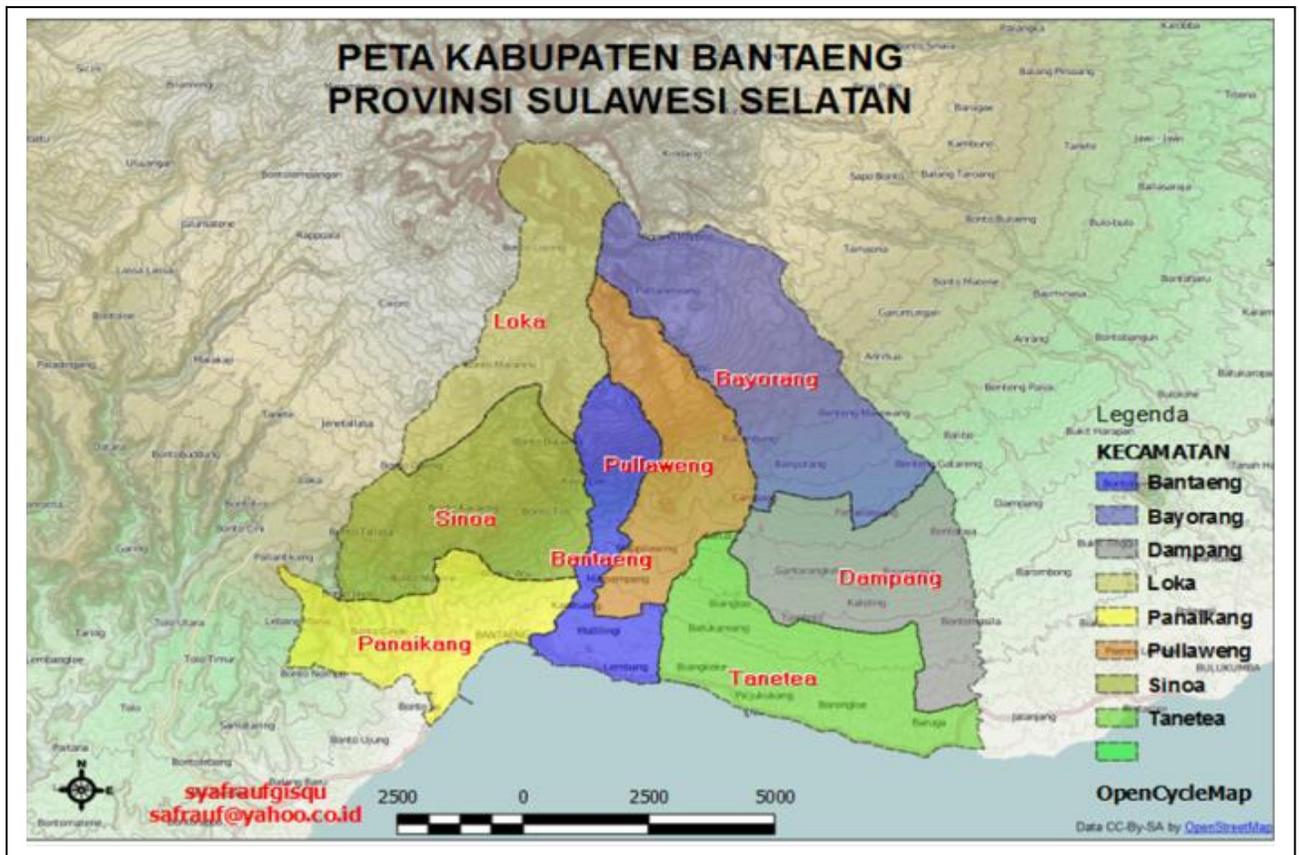
Pada ketinggian 100-500 m dari permukaan laut, Kabupaten Bantaeng merupakan wilayah terluas atau 29,6 % dari luas wilayah seluruhnya dan terkecil adalah wilayah dengan ketinggian dari permukaan laut 0 - 25 m atau hanya 10,3 % dari luas wilayahnya.

Secara administratif Wilayah Kabupaten Bantaeng berbatasan dengan :

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kabupaten Gowa dan Bulukumba
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kabupaten Bulukumba
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Laut Flores
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kabupaten Jeneponto

Dalam peta Sulawesi, wilayah Kabupaten Bantaeng berada tepat di kaki Sulawesi Selatan, dan dijuluki sebagai Tanah Toa atau Tanah Tua, karena secara histori Kabupaten Bantaeng merupakan Kabupaten tertua di wilayah Sulawesi Selatan. Adapun wilayah administrasi Kabupaten Bantaeng dapat dilihat pada gambar 1.1 dibawah ini :

Gambar 1.1
Peta Adminitrasi Kabupaten Bantaeng
Provinsi Sulawesi Selatan



Kabupaten Bantaeng biasanya disebut juga Butta Toa oleh penduduk kabupaten-kabupaten dan sekitarnya, karena kabupaten ini dulunya menjadi pusat kerajaan Bantaeng. Pada jaman kemerdekaan, Kabupaten Bantaeng menjadi pusat dari kresidenan Wilayah Selatan selatan, dan ketika masa pemerintahan Orde Baru, status Kabupaten Bantaeng tidak lagi menjadi pusat Kresidenan karena dihapus oleh pemerintah. Sampai sekarang sebutan tersebut masih ada dan masih menjadi pusat budaya maupun spiritual bagi masyarakat Kabupaten Bantaeng dan sekitarnya

D. PENDUDUK

Jumlah penduduk pada tahun 2015 adalah 194.183 jiwa, terdiri dari 95.989 laki-laki dan 98.194 perempuan. Rasio jenis kelamin 97,98 persen, ini menunjukkan bahwa penduduk laki-laki lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan. Jika dikaitkan dengan kelompok umur nampak bahwa proporsi penduduk perempuan yang lebih besar berada pada kelompok-kelompok umur Intermediate. Sehingga untuk perencanaan pembangunan kependudukan di bidang kesehatan, kelompok intermediate perempuan ini menjadi penting mengingat pada umumnya intermediate perempuan lebih tidak sejahtera dibandingkan intermediate laki-laki.

Penduduk terbesar di Kecamatan Bantaeng yaitu 40.132 jiwa dan terkecil di Kecamatan Uluere 10.672 jiwa. Kepadatan penduduk juga tergolong rendah yaitu 482 jiwa/km², namun demikian jika laju pertumbuhan penduduk tidak dikendalikan maka Kabupaten Bantaeng akan menjadi semakin padat. Angka ketergantungan penduduknya sebesar 38,62 persen.



Jumlah penduduk tahun 2015 jika dibandingkan dengan jumlah penduduk tahun 2013 yang sebesar 188.409 jiwa, berarti dalam setahun mengalami kenaikan sebanyak 2.251 jiwa. Kenaikan jumlah penduduk ini diduga disebabkan oleh kelahiran dan migrasi penduduk.

Kabupaten Bantaeng terletak didaerah pantai yang memanjang pada bagian barat ke timur kota yang salah satunya berpotensi untuk perikanan. Potensi lainnya adalah sektor pertanian oleh karena wilayah daratannya mulai dari tepi Laut Flores sampai kepegunungan sekitar Gunung Lompo Battang dengan ketinggian tempat dari permukaan laut 0 - 25 m sampai dengan ketinggian lebih dari 1.000 m diatas permukaan laut.

Disamping itu Kabupaten Bantaeng memiliki alam tiga dimensi yakni bukit pegunungan, lembah daratan dan pasir pantai, dengan dua musim. Iklim didaerah ini tergolong iklim tropis basah dengan curah hujan rata-rata setiap bulan 14 mm.

Kabupaten Bantaeng dengan luas wilayah 395,83 km² didiami penduduk sebanyak 194.183 jiwa, terdiri dari 95.989 jiwa laki-laki dan 98.194 jiwa perempuan, Penduduk ini tersebar di 8 (Delapan) kecamatan yaitu Kecamatan Bissappu, Kecamatan Bantaeng, Kecamatan Eremerasa, Kecamatan Tompobulu, Kecamatan Pajukukang, Kecamatan Uluere, Kecamatan Gantarangkeke dan Kecamatan Sinoa. Dari tabel 1 terlihat bahwa jumlah penduduk terbesar terdapat di Kecamatan Bantaeng yaitu 40.668 jiwa (21.05%), sedangkan Kecamatan Uluere memiliki jumlah penduduk terkecil yaitu 10.562 Jiwa (5,60%).

Tabel 1.1
Jumlah Penduduk menurut
Kecamatan dan Jenis Kelamin Kabupaten Bantaeng

NAMA KECAMATAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH PENDUDUK
BISSAPPU	16.676	16.946	33.622
BANTAENG	19.396	19.761	39.157
EREMERASA	9.560	9.874	19.434
TOMPOBULU	12.323	12.972	25.295
PAJUKUKANG	16.589	16.891	33.480
ULUERE	5.630	5.643	11.273
GANTARANG KEKE	9.582	9.816	19.398
SINOA	6.514	6.623	13.137
TOTAL	96.270	98.526	194.796

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bantaeng, Tahun 2015, diolah 2016

Berdasarkan tabel jumlah penduduk tersebut, bahwa jumlah penduduk lebih banyak di Kecamatan Bantaeng sekitar 21% dari jumlah penduduk. Sedangkan Kecamatan Uluere merupakan wilayah yang penduduknya paling sedikit. Dari tabel tersebut juga diketahui penduduk jenis kelamin laki-laki lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan. Gambaran ini terlihat hampir diseluruh kecamatan.



a. Kepadatan Penduduk

Kabupaten Bantaeng tergolong kabupaten yang tidak padat, hal ini dapat dilihat pada tabel 2.1 dibawah ini. Tabel 2 memperlihatkan kepadatan penduduk di Kabupaten Bantaeng dengan luas 395,83 km², Kabupaten Bantaeng didiami oleh 194.183 jiwa atau dengan kepadatan sebesar 482 jiwa/km². Dengan kata lain rata-rata setiap km² Kabupaten Bantaeng didiami sebanyak 481 jiwa.

Tabel 1.2
Jumlah Penduduk, Luas Wilayah dan
Kepadatan Penduduk Kabupaten Bantaeng

NO	KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK	LUAS WILAYAH	KEPADATAN PENDUDUK
1.	BISSAPPU	34.663	32,84 km ²	1.020,62
2.	BANTAENG	40.668	28,85 km ²	1.391,06
3.	EREMERASA	20.510	76,99 km ²	257,53
4.	TOMPOBULU	24.884	45,01 km ²	542,35
5.	PAJUKUKANG	33.117	67,29 km ²	470,56
6.	ULUERE	10.562	48,9 km ²	218,24
7.	GANTARANG KEKE	17.573	52,95 km ²	336,71
8.	SINOA	12.206	43 km ²	293,21
TOTAL		194.183	395,83	481,67

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bantaeng, Tahun 2015, diolah 2016

Jika dilihat persebaran di setiap kecamatan nampak bahwa Kecamatan Bantaeng merupakan wilayah terpadat dengan kepadatan sebesar 1.391,06 jiwa/km², diikuti oleh Kecamatan Bissappu sebesar 1.020 jiwa/km², Kecamatan Tompobulu sebesar 542,35 jiwa/km², dan Kecamatan Pajukukang sebesar 470,56 jiwa/km², sedangkan wilayah dengan kepadatan terendah di Kecamatan Uluere yaitu sebesar 218,24 jiwa/km².

Kepadatan penduduk per wilayah di Kabupaten Bantaeng perlu mulai diperhatikan, terutama dalam perencanaan persebaran penduduk, tata ruang dan tata guna tanah. Jika ketiga hal ini tidak diperhatikan dengan baik, maka ke depan, Kabupaten Bantaeng akan menjadi Kabupaten yang padat dengan implikasi pada penurunan daya dukung dan daya tampung lingkungan perkotaan. Pemanfaatan lahan yang lebih cenderung pada pembangunan fisik akan menyebabkan kabupaten ini mengalami nasib yang sama dengan kabupaten-kabupaten di wilayah Kalimantan dan Jawa.

b. Pertumbuhan Penduduk

Pertumbuhan penduduk merupakan angka yang menggambarkan penambahan penduduk yang dipengaruhi oleh pertumbuhan alamiah maupun migrasi penduduk. Angka pertumbuhan penduduk dapat digunakan untuk memperkirakan jumlah dan struktur penduduk beberapa tahun kedepan. Angka penambahan penduduk di wilayah Kabupaten Bantaeng dapat dilihat pada Tabel 1.3. Data penduduk tahun 2014 yang digunakan adalah data Bulan Desember 2015 sedangkan data penduduk tahun 2015 menggunakan data Bulan Desember 2015. Pertumbuhan penduduk yang dihitung merupakan penambahan penduduk dalam kurun waktu satu tahun.



Tabel 1.3
Angka Pertambahan Penduduk Kabupaten Bantaeng

Kecamatan	Penduduk Tahun 2014		Penduduk Tahun 2015		Angka Pertumbuhan Penduduk
	n (Jiwa)	%	n (Jiwa)	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Bissappu	33.517	17,40	34.663	17,58	2.23%
Bantaeng	40.132	21,23	40.668	21,05	0,34%
Eremerasa	19.827	10,41	20.51	10,40	1,05%
Tompobulu	24.411	12,94	24.884	12,80	0,15%
Pa'jukukang	31.664	16,61	33.117	16,61	1,15%
Uluere	10.672	5,47	10.562	5,60	0%
Gantarangkeke	17.829	9,42	17.673	9,35	0,48%
Sinoa	12.608	6,52	12.206	6,61	2,55%
Jumlah	190.660	100,00	205.865	100,00	1,19%

Sumber :Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bantaeng, Tahun 2015,diolah Tahun 2016

Angka pertumbuhan penduduk Kabupaten Bantaeng tergolong rendah selama kurun waktu Desember 2014 sampai dengan Desember 2015, pertumbuhan penduduk Kabupaten Bantaeng mencapai 1,19 persen. Angka pertumbuhan penduduk ini dihitung berdasarkan data hasil SIAK. Olehnya itu apabila pertumbuhan penduduk tidak terkendali, maka implikasi dari hal tersebut adalah munculnya berbagai masalah sosial ekonomi seperti kemiskinan, pertumbuhan daerah kumuh, kriminalitas dan lain sebagainya. Tingginya pertumbuhan penduduk diduga bukan disebabkan tingkat kelahiran yang cukup tinggi, tapi lebih banyak disebabkan faktor migrasi karena Kabupaten Bantaeng menjadi kawasan industri dan kegiatan wisata menyebabkan daerah ini menarik bagi migran untuk datang dan menetap di wilayah ini.

c. Jumlah dan Proporsi Penduduk menurut Umur dan Jenis Kelamin

Karakteristik penduduk menurut umur dan jenis kelamin berguna dalam membantu menyusun perencanaan pemenuhan kebutuhan dasar bagi penduduk sesuai dengan kebutuhan kelompok umur masing-masing, baik kebutuhan pangan, sandang, papan, pendidikan, kesehatan, pekerjaan dan lain sebagainya. Setiap kelompok umur memiliki kebutuhan yang berbeda-beda, misalnya kelompok bayi dan balita, mereka lebih membutuhkan asupan gizi yang baik dan perawatan kesehatan. Bagi penduduk perempuan remaja misalnya, mempunyai kebutuhan untuk meningkatkan status kesehatan .

Tabel 1.4 menunjukkan bahwa penduduk Kabupaten Bantaeng sebagian besar merupakan penduduk usia produktif yaitu pada kelompok umur antara 15-64 tahun (72,14%) dengan komposisi terbesar berada pada penduduk berumur 10-14 tahun. Demikian pula dengan komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin, nampak bahwa penduduk laki-laki yang terbesar berada pada kelompok umur 10-14 tahun, sedangkan penduduk perempuan berada pada kelompok umur 25-29 tahun. Kondisi ini sangat menguntungkan karena sebagian besar (diatas 50%) merupakan penduduk usia kerja (usia produktif), dan sisanya



sebanyak 22,50 persen merupakan penduduk usia muda (berusia dibawah 15 tahun) dan 5,36 persen merupakan penduduk lanjut usia (65 tahun ke atas).

Tabel 1.4.
Jumlah dan Proporsi Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Kabupaten Bantaeng

Kelompok Umur	Laki – Laki		Perempuan		L + P	
	n (Jiwa)	%	n (Jiwa)	%	n (Jiwa)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
0 – 4	5.598	2,88	5.304	2,73	10.902	5,61
5 – 9	8.905	4,59	8.656	4,46	17.561	9,04
10 – 14	10.264	5,29	9.595	4,94	19.859	10,23
15 – 19	9.289	4,78	9.275	4,78	18.564	9,56
20 – 24	8.013	4,13	8.038	4,14	16.051	8,27
25 – 29	8.839	4,55	9.084	4,68	17.923	9,23
30 – 34	9.026	4,65	9.234	4,76	18,26	9,40
35 – 39	7.914	4,08	8.357	4,30	16.271	8,38
40 – 44	7.267	3,74	7.397	3,81	14.664	7,55
45 – 49	5.99	3,08	6.682	3,44	12.672	6,53
50 – 54	4.559	2,35	4.769	2,46	9.328	4,80
55 – 59	3.344	1,72	3.655	1,88	6.999	3,60
60 – 64	2.558	1,33	2.588	1,33	5.176	2,67
65 – 69	1.77	0,91	2.171	1,12	3.941	2,03
70 – 74	1.274	0,66	1.527	0,79	2.801	1,44
➤ 75	1.349	0,69	1.862	0,96	3.211	1,65
Jumlah	96.270	49,43	98.194	50,57	194.183	100,00

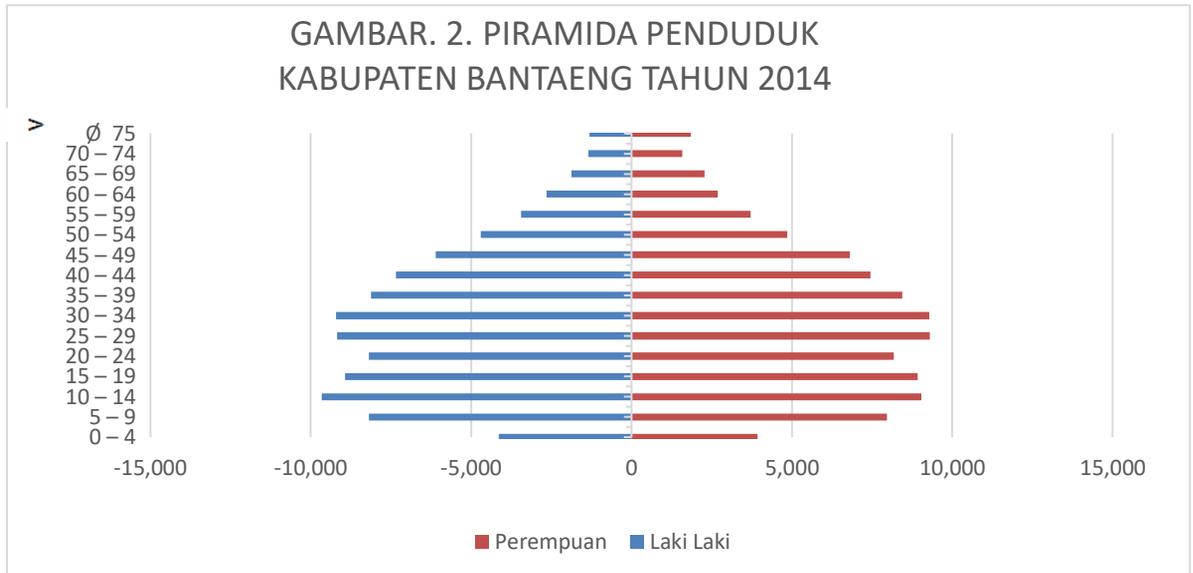
Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bantaeng, Tahun 2015, diolah Tahun 2016

Penduduk berusia kurang dari 15 tahun cukup besar pula yaitu hampir seperempat penduduk Kabupaten Bantaeng (24,45%). Hal ini harus menjadi perhatian karena 5 tahun mendatang kelompok ini akan menjadi entry tenaga kerja baru, yang memerlukan skill dan kualitas SDM yang memadai baik ketrampilan maupun etos kerja dan kepribadian. Untuk memperoleh hal tersebut, diperlukan asupan gizi yang cukup, pendidikan yang memadai serta lingkungan pergaulan yang cukup, baik di rumah maupun di masyarakat. Sehingga ketika mereka memasuki pasar kerja, mampu memperoleh peluang kerja yang tersedia. Disisi yang lain pemerintah Kabupaten Bantaeng harus mampu pula menciptakan pasar kerja yang dapat menyerap tenaga kerja lebih banyak lagi.

Jika dicermati lebih lanjut, ternyata 4,24% penduduk Kabupaten Bantaeng merupakan balita. Kondisi ini menuntut perhatian Pemerintah Kabupaten Bantaeng dalam penanganan penduduk balita terutama dari segi kesehatan dan investasi bidang pendidikan

Struktur umur penduduk menurut jenis kelamin dapat digambarkan dalam bentuk piramida penduduk. Dasar piramida penduduk menunjukkan jumlah penduduk, dan badan piramida penduduk bagian kiri dan kanan

Gambar 2



Piramida penduduk Kabupaten Bantaeng menunjukkan struktur penduduk konstriktif (*constrictive*), dengan struktur penduduk usia produktif lebih besar dibandingkan kelompok umur di atasnya. Pada piramida ini terlihat bahwa jumlah penduduk kelompok umur 0-4 tahun yang terletak pada dasar piramida mulai mengecil. Ini berarti angka kelahiran mulai menurun dibanding tahun-tahun sebelumnya, walaupun dari segi jumlah absolut tidak kecil. Demikian juga dengan jumlah penduduk kelompok umur 5-9 tahun masih terlihat lebar, berarti lima tahun ke depan dibutuhkan fasilitas pendidikan dasar dan menengah yang cukup untuk menampung penduduk kelompok ini.

Demikian pula jumlah penduduk pada kelompok umur 30-34 tahun menunjukkan jumlah kedua yang paling besar. Diduga penduduk kelompok umur ini adalah kelompok yang lahir pada tahun 1980an yang mulai memasuki usia tersebut ditambah dengan migran yang masuk ke Kabupaten Bantaeng. Penduduk umur lansia (65 tahun ke atas), menunjukkan proporsi yang masih kecil yaitu 5,36 persen. Namun dimasa depan proporsi penduduk lansia akan terus merambat naik, karena pergeseran umur penduduk serta usia harapan hidup yang semakin meningkat. Pertambahan jumlah penduduk lansia ini harus mulai diantisipasi dari sekarang, karena kelompok ini akan terus membesar di masa depan, sehingga diperlukan kebijakan seperti ketenaga kerjaan, kesehatan, pelayanan lansia serta kebutuhan sosial dasar lainnya

Bila dikaitkan dengan umur median penduduk, maka penduduk Kabupaten Bantaeng termasuk dalam kategori penduduk *intermediate*. Dimana umur median penduduk Kabupaten Bantaeng tahun 2015 adalah 30,00 tahun, yang berarti setengah penduduk Kabupaten Bantaeng pada tahun 2014 berusia di bawah 30 tahun dan setengahnya lagi berusia lebih tua dari 30 tahun. Dengan kata lain, penduduk Kabupaten Bantaeng dikategorikan sebagai penduduk *intermediate (intermediate population)*.

Jika dilihat menurut wilayah kecamatan, bahwa rasio jenis kelamin (*sex ratio*) hampir disetiap kecamatan di bawah 100, hal ini berarti bahwa jumlah penduduk laki-laki disetiap kecamatan lebih sedikit daripada perempuan. Jika diamati masing-masing wilayah Kecamatan, maka terlihat bahwa Kecamatan



Uluere memiliki Rasio jenis kelamin tertinggi yaitu 99.77, diikuti Kecamatan Bantaeng sebesar 98,15, sedangkan Rasio jenis kelamin terendah 95,46 terdapat di Kecamatan Tompobulu.

d. Komposisi Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan

Tingkat pendidikan merupakan salah satu ukuran untuk kualitas penduduk. Semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan semakin baik kualitas SDM di wilayah tersebut. Namun ukuran ini masih harus ditambah dengan etos kerja dan ketrampilan baik *hard skill* maupun *soft skill*. Beberapa pelaku usaha menyatakan bahwa yang dibutuhkan tidak saja ketrampilan tetapi juga kepribadian, karena ketrampilan bisa ditingkatkan melalui pelatihan-pelatihan.

Tamat sekolah didefinisikan sebagai jenjang pendidikan yang telah berhasil diselesaikan oleh seseorang dengan dibuktikan adanya ijazah atau surat tanda tamat belajar. Tetapi jika menggunakan ukuran menurut jenjang tertinggi merupakan jenjang atau kelas tertinggi yang pernah ditempuh oleh seseorang.

Tabel 1.5
Rasio Jenis Kelamin Berdasarkan Kecamatan
Kabupaten Bantaeng Tahun 2016

KECAMATAN	JENIS KELAMIN				PENDUDUK		RASIO
	LAKI-LAKI		PEREMPUAN				JENIS
	n(JIWA)	(%)	n(JIWA)	(%)	n(JIWA)	(%)	KELAMIN
BISSAPPU	16,676	8.56	16,946	8.7	33,622	17.26	98.41
BANTAENG	19,396	9.96	19,761	10.14	39,157	20.1	98.15
EREMERASA	9,560	4.91	9,874	5.07	19,434	9.98	96.82
TOMPOBULU	12,323	6.33	12,972	6.66	25,295	12.99	95.46
PAJUKUKANG	16,589	8.52	16,891	8.67	33,480	17.19	98.21
ULUERE	5,630	2.89	5,643	2.9	11,273	5.79	99.77
GANTARANG KEKE	9,582	4.92	9,816	5.04	19,398	9.96	97.62
SINOA	6,514	3.34	6,623	3.4	13,137	6.74	98.35
JUMLAH	96,270	49.42	98,526	50.58	194,796	100	97.71

Data SIAK menunjukkan bahwa tingkat pendidikan terbanyak penduduk kabupaten bantaeng jika melihat tabel diatas yang tertinggi yaitu Tidak sekolah atau Belum sekolah. Kurang dari sepertiga penduduk Kabupaten Bantaeng (28,14%) Tidak/Belum Sekolah. Jika dilihat menurut jenis kelamin, persentase penduduk yang Tidak/Belum Sekolah untuk penduduk perempuan lebih tinggi dibandingkan penduduk laki-laki. Permintaan pasar tenaga kerja yang mensyaratkan minimal pendidikan SLTA, tidak banyak mempengaruhi masyarakat



Kabupaten Bantaeng yang mana lapangan kerja kebanyakan di kebun, bertani dan beternak.

Sedangkan persentase penduduk yang tamat SLTP untuk perempuan lebih tinggi dibanding dengan persentase penduduk laki-laki. Begitu pula Pada jenjang pendidikan dasar, proporsi penduduk yang tamat SD untuk penduduk perempuan lebih tinggi daripada penduduk laki-laki. Ini mengubah pandangan bahwa semakin tinggi pendidikan, semakin sedikit perempuan yang berhasil menamatkan pendidikannya. Sehingga Kabupaten Bantaeng tidak sama dengan gambaran pendidikan nasional, dimana angka melanjutkan sekolah ke jenjang pendidikan perempuan lebih rendah dibanding laki-laki, terutama pada kelompok penduduk miskin.

Pemerintah Kabupaten Bantaeng perlu memperhatikan kondisi diatas mengingat bahwa era globalisasi sebentar lagi akan berlangsung dan persaingan untuk memperoleh lapangan pekerjaan. Peningkatan pendidikan *vocasional*, akses ke pendidikan terutama untuk penduduk miskin, perlu dilakukan mengingat bahwa sebagian besar peluang kerja membutuhkan tenaga terdidik yang memiliki ketrampilan khusus.

e. Komposisi Penduduk menurut Agama

Informasi tentang jumlah penduduk berdasarkan agama diperlukan untuk merencanakan penyediaan sarana dan prasarana peribadatan serta merencanakan suatu program kegiatan yang berkaitan dengan kerukunan antar umat beragama. Penduduk Kabupaten Bantaeng pada umumnya memeluk agama Islam (99,04 persen), disusul kemudian pemeluk agama Kristen dan Katholik (0,43 persen). Sedangkan Hindu, Budha dan Konghucu serta aliran kepercayaan masih sangat sedikit (0,53 persen).

Tabel 1.6
Prosentase Penduduk menurut Agama Kabupaten Bantaeng

NAMA KEC	ISLAM	%	KRIS TEN	%	KHAT OLIK	%	HIND U	%	BUD HA	%	KON GHU CU	%	KEPERC AYAAN	%	JLHDUK
BISSAPPU	34,426	99	106	0	68	0	13	0	13	0	0	0	50	0	43.663
BANTAENG	39,442	97	437	1	169	0	7	0	101	0	1	0	511	1	40.668
EREMERASA	20,500	100	7	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	20,510
TOMPO BULU	24,865	100	6	0	3	0	1	0	0	0	0	0	9	0	24.884
PAJUKUKANG	33.062	100	19	0	2	0	1	0	0	0	0	0	33	0	33,117
ULU ERE	10,512	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	0	10,562
GANTARANG KEKE	17,478	99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95	1	17,473
SINOA	12,171	100	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	33	0	12,206
TOTAL	193.456	99%	576	0%	244	0%	9	0%	114	0%	1	0%	783	1%	194.183

Sumber : Dinas Dukcapil Kab.Bantaeng Tahun 2015, diolah Tahun 2016

Jika dikaitkan dengan wilayah kecamatan, maka agama islam mendominasi semua wilayah kecamatan di Kabupaten Bantaeng. Kecamatan Bantaeng merupakan wilayah agama Islam terbesar yaitu 38.876 jiwa, diikuti Kecamatan Bissappu yaitu 33.281 jiwa, dan Kecamatan Pajukukang yaitu 31.615



jiwa. Sedangkan sebaran agama Islam terkecil berada di Kecamatan Uluere yaitu 10.619 jiwa.

Aliran Kepercayaan merupakan kedua terbesar setelah Agama Islam yang tersebar disetiap kecamatan. Kecamatan Bantaeng merupakan wilayah dengan aliran kepercayaan terbesar. Karena Kabupaten Bantaeng merupakan kabupaten yang didominasi agama islam, maka sedikit yang menganut agama Kristen, Khatolik, Hindu, Budha, Konghucu dan Aliran Kepercayaan.

f. Komposisi Penduduk Menurut Status Perkawinan

Informasi tentang struktur perkawinan penduduk pada waktu tertentu berguna bagi para penentu kebijakan dan pelaksana program kependudukan. Terutama dalam hal pembangunan keluarga, kelahiran dan upaya-upaya peningkatan kualitas keluarga. Dari informasi penduduk berstatus kawin, Umur Perkawinan Pertama, lama kawin akan berguna untuk mengestimasi angka kelahiran yang akan terjadi.

Umur perkawinan pertama misalnya berkaitan dengan lamanya seseorang perempuan beresiko untuk hamil dan melahirkan. Perkawinan umur dini juga akan berakibat pada besarnya angka perceraian, ketidaksiapan orang tua untuk pengasuhan anak serta kurang matangnya perempuan menjalankan tugas dan fungsinya dalam rumah tangga.

Tabel 1.7
Distribusi Penduduk Umur 10 Tahun ke atas menurut
Status Kawin Jenis Kelamin dan Kecamatan Kabupaten Bantaeng

Jenis Kelamin / Kecamatan	Belum Kawin		Kawin		Cerai Hidup		Cerai Mati		Grand Total	
	N	%	n	%	n	%	N	%	N	%
Laki – Laki (L)										
Kec.Bissappu	5.691	16,83	8.267	17,86	71	18,29	252	19,87	14.281	17,47
Kec.Bantaeng	7.533	22,28	9.207	19,89	88	22,68	240	18,93	17.068	20,88
Kec.Eremerasa	3.739	11,06	4.622	9,99	44	11,34	126	9,94	8.531	10,44
Kec.Tompobulu	4.361	12,90	5.855	12,65	58	14,95	202	15,93	10.476	12,81
Kec.Pa'jukukang	5.497	16,26	7.761	16,77	52	13,40	170	13,41	13.480	16,49
Kec.Uluere	1.811	5,36	2.781	6,01	22	5,67	71	5,59	4.685	5,73
Kec.Gantarangeke	3.049	9,02	4.578	9,89	39	10,05	120	9,46	7.786	9,52
Kec.Sinoa	2.124	6,28	3.220	6,96	14	3,61	87	6,86	5.445	6,66
Total	33.805	100,00	46.291	100,00	388	100,00	1.268	100,00	81.752	100,00
Perempuan (p)										
Kec.Bissappu	5.218	16,75	8.372	17,97	170	19,54	942	15,51	14.702	17,36
Kec.Bantaeng	6.842	21,96	9.248	19,85	190	21,84	1.276	21,01	17.556	20,73
Kec.Eremerasa	3.509	11,26	4.741	10,17	94	10,80	616	10,14	8.960	10,58
Kec.Tompobulu	4.118	13,22	5.925	12,72	120	13,79	965	15,89	11.128	13,14
Kec.Pa'jukukang	5.067	16,27	7.727	16,58	133	15,29	989	16,28	13.916	16,43
Kec.Uluere	1.617	5,19	2.806	6,02	34	3,91	281	4,63	4.728	5,58
Kec.Gantarangeke	2.793	8,97	4.554	9,77	87	10,00	632	10,41	8.066	9,52
Kec.Sinoa	1.987	6,38	3.233	6,94	42	4,83	373	6,14	5.625	6,64
Total	31.151	100,00	46.596	100,00	870	100,00	6.074	100,00	84.691	100,00
L + P										
Kec.Bissappu	10.909	16,79	16.639	17,91	241	19,16	1.194	16,26	28.983	17,41
Kec.Bantaeng	14.375	22,13	18.455	19,87	278	22,09	1.516	20,65	34.624	20,80
Kec.Eremerasa	7.248	11,16	9.363	10,08	138	10,97	742	10,11	17.491	10,51
Kec.Tompobulu	8.479	13,05	11.780	12,68	178	14,15	1.167	15,89	21.604	12,98
Kec.Pa'jukukang	10.564	16,26	15.488	16,67	185	14,71	1.159	15,79	27.396	16,46
Kec.Uluere	3.428	5,28	5.587	6,01	56	4,45	352	4,79	9.423	5,66
Kec.Gantarangeke	5.842	8,99	9.132	9,83	126	10,02	752	10,24	15.852	9,52
Kec.Sinoa	4.111	6,33	6.453	6,95	56	4,45	460	6,27	11.080	6,66
Total	64.956	100,00	92.897	100,00	1.258	100,00	7.342	100,00	166.453	100,00

Sumber :Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bantaeng, Tahun 2015, diolah Tahun 2016



Berdasarkan Tabel 1.7 di atas, yang menyajikan komposisi penduduk menurut status kawin penduduk Kabupaten Bantaeng yang berumur 10 tahun ke atas. Tabel tersebut menunjukkan bahwa penduduk Kabupaten Bantaeng didominasi oleh penduduk berstatus kawin yakni 55,81 persen. Hal ini terlihat, baik untuk penduduk laki-laki maupun perempuan.

Proporsi penduduk laki-laki yang berstatus kawin lebih rendah dibanding dengan perempuan. Sementara, penduduk laki-laki berstatus belum kawin lebih tinggi dibandingkan perempuan, karena biasanya laki-laki masih meneruskan pendidikan atau baru mulai bekerja, sehingga menunda perkawinan. Begitu juga laki-laki yang dikonstruksikan sebagai kepala keluarga yang harus membiayai kebutuhan keluarga, mempunyai keinginan mapan secara ekonomi sebelum memasuki kehidupan rumah tangga.

Proporsi penduduk dengan status cerai hidup dan cerai mati lebih tinggi pada perempuan dibandingkan laki-laki. Hal ini disebabkan laki-laki yang bercerai baik karena perceraian maupun karena ditinggal meninggal istri lebih cepat melakukan perkawinan kembali dibandingkan perempuan. Perempuan lebih banyak pertimbangan untuk menikah kembali terutama apabila perempuan tersebut mandiri secara ekonomi.

Menarik untuk diperhatikan pada status cerai hidup, bahwa proporsi penduduk berstatus cerai hidup lebih besar pada perempuan daripada laki-laki. Kemandirian perempuan secara ekonomi serta peningkatan kesadaran tentang hak-hak perempuan dalam rumah tangga, seringkali menjadi penyebab keberanian perempuan menggugat cerai.

Jika dikaitkan dengan umur nampak bahwa proporsi penduduk yang berstatus belum kawin pada kelompok umur 10-29 tahun cukup tinggi yakni, sedangkan yang berstatus kawin proporsi tertinggi pada kelompok umur 30-54 tahun. Banyaknya proporsi penduduk muda yang belum kawin diduga disebabkan oleh besarnya jumlah penduduk yang berada pada umur sekolah ditambah dengan mereka yang berstatus bekerja.

Menarik untuk diperhatikan adalah mereka yang berstatus cerai baik cerai hidup maupun cerai mati. Proporsi penduduk yang berstatus cerai hidup lebih banyak berada pada umur 30-54 tahun, sementara penduduk yang berstatus cerai mati lebih banyak berada pada kelompok umur di atasnya yakni 55 tahun ke atas. Penduduk berumur muda yang cerai hidup biasanya segera melakukan perkawinan kembali sehingga proporsi mereka lebih rendah dibandingkan dengan penduduk yang berstatus cerai mati.

Menarik untuk diperhatikan adalah adanya penduduk usia remaja (10-29 Tahun) yang sudah berstatus kawin yang jumlahnya cukup tinggi yakni 15.571 orang, Ini menunjukkan bahwa usia muda Kabupaten Bantaeng rata-rata cepat berkeluarga (menikah) meskipun masih dibawah umur atau belum cukup umur untuk menikah adapun berstatus cerai hidup sebesar 168 orang dan cerai mati sebesar 104 orang. Hal ini memerlukan perhatian pemerintah Kabupaten Bantaeng yang berkaitan masalah kehamilan, persalinan dan paska melahirkan (kesehatan reproduksi) dan pelayanan KB tanpa mengesampingkan prinsip hidup orang islam yaitu "Banyak Anak Banyak Rezeki", Adapun yang harus jadi perhatian serius bagi pemerintah yaitu cerai hidup yang mencapai 1.258 orang dari keseluruhan penduduk kabupaten Bantaeng, terutama dari kalangan ulama, ustadz/pengajar dari kalangan umat Islam agar sekiranya dapat lebih giat menda'wahkan tentang larangan cerai hidup tanpa alasan yang kuat, karena hal semacam itu sangat di benci dalam ajaran Islam itu sendiri.



g. Jumlah Keluarga dan Rata-Rata Jumlah Anggota Keluarga

Keluarga dibentuk dari sekelompok orang yang terikat dan mempunyai hubungan kekerabatan karena perkawinan, kelahiran, adopsi dan lain sebagainya. Unit keluarga menjadi hal penting untuk berbagai intervensi seperti penanganan kemiskinan, keluarga berencana, kesehatan dan lain sebagainya. Keluarga terbagi menjadi dua yaitu keluarga inti (*nuclear family*) dan keluarga luas (*extended family*). Besarnya jumlah anggota keluarga biasanya digunakan untuk menggambarkan kesejahteraan keluarga, dimana semakin kecil jumlah anggota keluarga diasumsikan akan semakin tinggi tingkat kesejahteraannya.

Pada saat sekarang ini sudah mulai muncul adanya keluarga yang terdiri dari 3 generasi yaitu generasi orang tua, anak dan menantu dan cucu atau yang biasa disebut dengan *sandwiches family*, dimana pasangan suami istri harus menanggung orang tua/mertua dan anak-anak mereka sendiri. Persoalan yang muncul adalah bagaimana dengan kesejahteraan mereka, bagaimana dengan beban yang mereka tanggung dan bagaimana sistem pengasuhan baik orang tua maupun anak bisa berlangsung dalam keluarga semacam ini.

Tabel 1.8
Jumlah Penduduk, Jumlah Keluarga,
Rata-Rata Jumlah Anggota Keluarga Kabupaten Bantaeng

KECAMATAN	Penduduk		Keluarga		Rata-Rata Jumlah Anggota Keluarga
	n	%	n	%	
Bissappu	34.663	17,85	10.476	17,63	3,31
Bantaeng	40.668	20,94	11.993	20,18	3,39
Eremerasa	20.510	10,56	6.111	10,28	3,36
Tompobulu	24.884	12,81	7.976	13,42	3,12
Pajukukang	33.117	17,05	10.083	16,97	3,28
Uluere	10.562	5,44	3.273	5,51	3,23
Gantarangkeke	17.573	9,05	5.696	9,58	3,09
Sinoa	12.206	6,29	3.824	6,43	3,19
TOTAL	194.183	100,00	59.363	100,00	3,27

Sumber : Dinas Dukcapil Kab. Bantaeng Tahun 2015, diolah Tahun 2016

Jumlah keluarga di Kabupaten Bantaeng sebanyak 59.432 keluarga yang tersebar di 8 kecamatan. Kecamatan Bantaeng memiliki jumlah keluarga terbesar yaitu 11.993 keluarga (20,18%) kemudian disusul oleh kecamatan Bissappu sebanyak 10.476 keluarga (17,63%) dan Kecamatan Pajukukang sebanyak 10.083 keluarga (16,97%), dan Kecamatan Tompobulu sebanyak 7.976 keluarga (13,42%). Sedangkan jumlah keluarga terkecil berada di Kecamatan Uluere yaitu 3.273 keluarga (5,51%).

Rata-rata jumlah anggota keluarga di Kabupaten Bantaeng sebanyak 3,21 per keluarga. Ini menunjukkan bahwa keluarga di Kabupaten Bantaeng lebih banyak merupakan keluarga inti dengan jumlah anggota keluarga sebanyak 3-4 orang. Bila diperhatikan menurut kecamatan, rata-rata jumlah anggota keluarga di setiap Kecamatan juga terdiri dari 3-4 orang per keluarga.

Informasi tentang rata-rata jumlah anggota keluarga ini dapat digunakan sebagai tolok ukur keberhasilan program keluarga berencana di wilayah Kabupaten Bantaeng dan dapat digunakan pemerintah kabupaten dalam merencanakan kebutuhan perumahan, seperti untuk menentukan ukuran rumah



dengan berbagai tipe agar dapat memenuhi kebutuhan perumahan bagi masyarakat yang beranggota 3-4 orang.

h. Komposisi Penduduk berdasarkan Angkatan Kerja menurut Umur, Jenis Kelamin, Pendidikan dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Angkatan Kerja (labour force) adalah penduduk usia 15 tahun keatas (tenaga kerja/man power) dan tidak termasuk didalamnya penduduk yang sekolah, pensiunan, mengurus rumah tangga dan lainnya.

Angkatan kerja dibagi 2 (dua) yaitu bekerja (employed) dan mencari pekerjaan/menganggur (*unemployed*).

Tabel 1.9
Jumlah Angkatan Kerja, Jumlah Tenaga Kerja dan
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Bantaeng

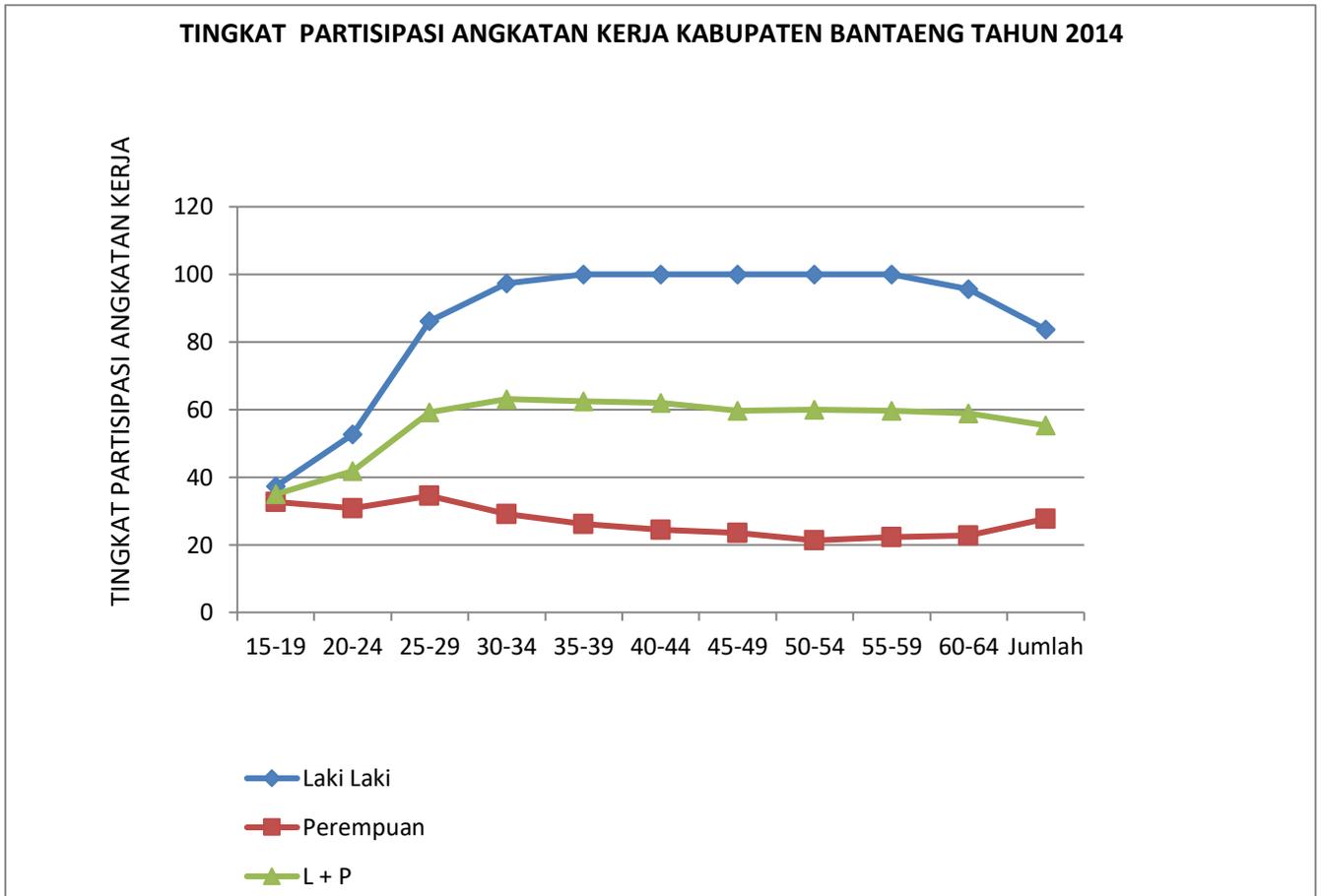
Kelompok Umur	Jumlah Angkatan Kerja			Jumlah Tenaga Kerja			Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja		
	Laki-laki	Perempuan	L+P	Laki-laki	Perempuan	L+P	Laki-laki	Prp	L+P
15-19	3.331	2.909	6.240	8.933	8.918	17.851	37,29	32,62	34,96
20-24	4.314	2.524	6.838	8.185	8.179	16.364	52,71	30,86	41,79
25-29	7.913	3.029	10.942	9.182	9.305	18.487	86,18	34,49	59,19
30-34	8.965	2.710	11.675	9.209	9.288	18.497	97,35	29,18	63,12
35-39	8.118	2.216	10.334	8.118	8.445	16.563	100,0	26,24	62,39
40-44	7.340	1.829	9.169	7.340	7.454	14.794	100,0	24,54	61,98
45-49	6.109	1.608	7.717	6.109	6.813	12.922	100,0	23,60	59,72
50-54	4.700	1.036	5.736	4.700	4.861	9.561	100,0	21,31	59,99
55-59	3.447	828	4.275	3.447	3.713	7.160	100,0	22,30	59,71
60-64	2.534	612	3.146	2.648	2.695	5.343	95,69	22,71	58,88
Jumlah	56.771	19.301	76.072	67.871	69.671	137.542	83,65	27,70	55,31

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bantaeng Tahun 2015, diolah Tahun 2016

Dari tabel 1.10, nampak bahwa jumlah angkatan kerja tertinggi berada pada kelompok umur 30 – 34 tahun yaitu 11.675 orang, diikuti kelompok umur 25 – 29 tahun sebesar 10.942 orang dan terendah pada kelompok umur 60 – 64 tahun yaitu sebesar 3.146 orang. Tabel 26 tersebut juga menunjukkan bahwa 55,31 persen dari angkatan kerja di Kabupaten Bantaeng telah berpartisipasi dalam pasar kerja. Nampak pula bahwa partisipasi angkatan kerja penduduk laki-laki lebih tinggi (83,65 %) dari pada partisipasi angkatan kerja penduduk perempuan (27,70 %). Jika digambarkan dalam bentuk grafik, APAK menurut umur berbentuk u terbalik dengan puncak berada pada kelompok umur 30 – 34 tahun

Grafik 1

**TINGKAT PARTISIPASI ANGKATAN KERJA
KABUPATEN BANTAENG TAHUN 2014**



Perlu diperhatikan adalah sebanyak 34,96 persen angkatan kerja berusia muda yaitu 15 – 19 tahun. Kelompok ini seharusnya masih duduk dibangku sekolah. Mereka terpaksa berhenti sekolah dan masuk ke pasar kerja, jika kelompok ini tidak memperoleh perhatian, maka mereka akan menjadi tenaga kerja yang rendah kualitasnya sehingga berpengaruh terhadap penghasilan mereka.

Secara keseluruhan, pola partisipasi angkatan kerja menurut umur ini berbeda antara laki-laki dan perempuan, seperti terlihat pada grafik 1 diatas.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan jauh berada dibawah TPAK laki-laki sejak usia 15 tahun. Partisipasi perempuan di pasar kerja hanya sekitar 27,70 persen dari seluruh penduduk perempuan pada usia yang sama. Kemungkinan hal ini terkait dengan kesibukan perempuan sebagai pengelola rumah tangga. Akan tetapi, keadaan ini mungkin juga terkait dengan budaya yang menganggap bahwa tempat perempuan adalah di dalam rumah dan laki-laki di luar rumah.

Tabel 1.10
Angka Penyerapan Angkatan Kerja
(Employment Rate) Kabupaten Bantaeng

Kelompok Umur	Jumlah Angkatan Kerja Yang Bekerja			Jumlah Angkatan Kerja			Angka Penyerapan Angkatan Kerja		
	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
15-19	246	48	294	3.331	2.909	6.240	7,39	1,65	4,71
20-24	1.496	223	1.719	4.314	2.524	6.838	34,68	8,84	25,14
25-29	5.350	933	6.283	7.913	3.029	10.942	67,61	30,80	57,42
30-34	7.620	1.260	8.880	8.965	2.710	11.675	84,99	46,69	76,06
35-39	7.659	1.198	8.857	8.118	2.216	10.334	94,35	54,06	85,71
40-44	7.065	1.175	8.240	7.340	1.829	9.169	96,25	64,24	89,87
45-49	6.109	1.019	7.128	6.109	1.608	7.717	100,00	63,37	92,37
50-54	4.619	720	5.339	4.700	1.036	5.736	98,28	69,49	93,08
55-59	3.447	545	3.992	3.447	828	4.275	100,00	65,82	93,38
60-64	2.479	383	2.862	2.534	612	3.146	97,83	62,58	90,97
Jumlah	46.090	7.504	53.594	56.771	19.301	76.072	81,19	38,88	70,45

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bantaeng Tahun 2015, diolah Tahun 2016

Angka penyerapan angkatan kerja di Kabupaten Bantaeng tergolong baik yaitu 70,45 persen, penyerapan angkatan kerja laki-laki lebih tinggi dibandingkan perempuan. Hal ini membuktikan bahwa pemerintah kabupaten masih perlu menyediakan lapangan kerja yang cukup untuk menampung (29,55 %) sisa angkatan kerja.

Tabel 1.11
Jumlah Pencari Pekerjaan dan Angka Pengangguran
(Unemployment Rate-UER) Kabupaten Bantaeng

Kelompok Umur	Laki-Laki		Perempuan		Jumlah	
	Jumlah Mencari Pekerjaan	% Pengangguran Terbuka	Jumlah Mencari Pekerjaan	% Pengangguran Terbuka	Jumlah Mencari Pekerjaan	% Pengangguran Terbuka
15-19	3.085	92,62	2.861	98,35	5.946	95,29
20-24	2.818	65,32	2.301	91,17	5.119	74,86
25-29	2.563	32,39	2.096	69,20	4.659	42,58
30-34	1.345	15,00	1.450	53,51	2.795	23,94
35-39	459	5,65	1.018	45,94	1.477	14,29
40-44	275	3,75	654	35,76	929	10,13
45-49	0	0	589	36,63	589	7,63
50-54	81	1,72	316	30,50	397	6,92
55-59	0	0	283	34,18	283	6,62
60-64	55	2,17	229	37,42	284	9,03
Jumlah	10.681	18,81	11.797	61,12	22.478	29,55

Sumber : Dinas Dukcapil Kab.Bantaeng Tahun 2015, diolah Tahun 2016

Pengangguran merupakan bagian dari angkatan kerja yang tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan (baik yang belum pernah bekerja maupun yang sudah pernah bekerja), atau sedang mempersiapkan suatu usaha, mereka yang



tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin untuk mendapatkan pekerjaan atau mereka yang sudah memiliki pekerjaan tetapi belum mulai bekerja dan mereka yang putus asa untuk memperoleh pekerjaan.

Tabel diatas menunjukkan angkatan kerja yang menganggur menurut pengelompokan umur lima tahunan. Dari tabel tersebut terlihat bahwa pengangguran tertinggi berada di kelompok umur 15-19 tahun yakni 95,29 persen, diikuti kelompok umur 20-24 tahun yakni 74,86 persen dan 25-29 tahun yakni 42,58 persen. Pengangguran pada kelompok umur 15-24 tahun menunjukkan bahwa mereka tidak lagi dapat melanjutkan pendidikan sehingga terpaksa mencari pekerjaan pada umur sekolah.

Angka pengangguran terendah berada pada kelompok umur 55-59 tahun yakni 6,62 persen. Apabila diperhatikan menurut jenis kelamin, angka pengangguran perempuan pada kelompok umur 15-19 tahun lebih tinggi (98,35%) dibandingkan laki-laki (92,62%). Penduduk kelompok umur 15-19 tahun ini seharusnya masih duduk di bangku pendidikan, dan juga belum masuk ke pasar kerja. Hal ini perlu perhatian khusus dari pemerintah Kabupaten Bantaeng untuk menyediakan sarana dan prasarana pendidikan serta meningkatkan akses masyarakat untuk memperoleh pendidikan dan ketrampilan.

Hal yang perlu diperhatikan adalah bahwa angka pengangguran pada kelompok umur muda ini harus ditangani dengan baik seperti misalnya memberikan bekal ketrampilan khusus melalui Balai Latihan Kerja (BLK) maupun training-training sesuai permintaan pasar sehingga mereka dapat terserap di pasar kerja. Jika angka pengangguran ini tidak ditangani dengan baik dikhawatirkan akan mempunyai implikasi sosial yang luas disebabkan mereka tidak bekerja dan tidak mempunyai penghasilan, sebagai contoh kriminalitas. Indikator ini sangat penting sebagai tolak ukur keberhasilan pembangunan.

Tabel 1.12
Jumlah Pencari Kerja, Jumlah Angkatan Kerja
dan Angka Pengangguran menurut Jenis Kelamin Kabupaten Bantaeng

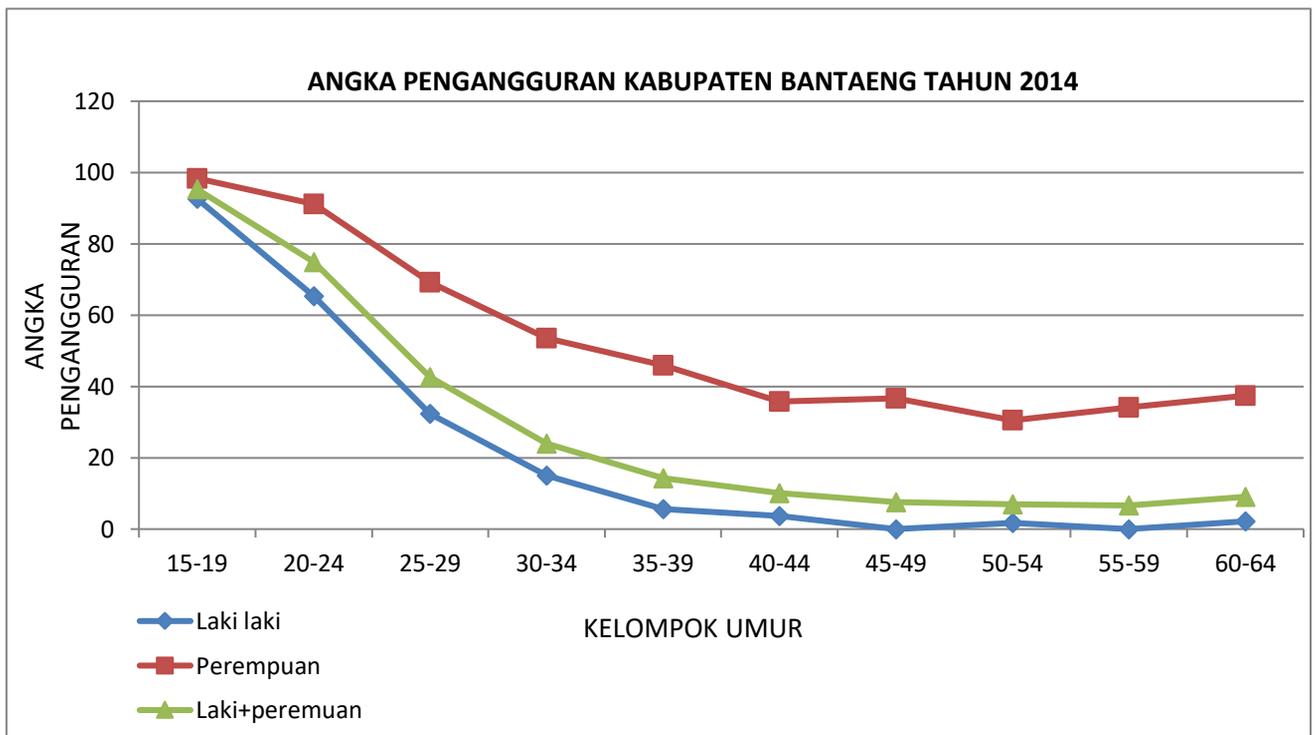
Kecamatan	Jumlah Pencari Kerja			Jumlah Angkatan Kerja			Angka Pengangguran		
	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
Bissappu	1.883	2.066	3.949	10.014	3.378	13.392	18,80	61,16	29,49
Bantaeng	2.261	2.470	4.731	12.006	4.043	16.049	18,83	61,09	29,48
Eremerasa	1.102	1.238	2.340	5.860	2.023	7.883	18,81	61,19	29,68
Tompobulu	1.345	1.530	2.875	7.169	2.501	9.670	18,76	61,18	29,73
Pajukukang	1.778	1.956	3.734	9.447	3.200	12.647	18,82	61,13	29,53
Uluere	606	653	1.259	3.213	1.069	4.282	18,86	61,09	29,40
Gantarangeke	1.001	1.104	2.105	5.308	1.807	7.115	18,86	61,10	29,59
Sinoa	705	780	1.485	3.754	1.280	5.034	18,78	60,94	29,50
Jumlah	10.681	11.797	22.478	56.771	19.301	76.072	18,81	61,12	29,55

Sumber : Dinas Dukcapil Kab. Bantaeng Tahun 2015, diolah Tahun 2016

Jika diperhatikan menurut kecamatan, dari tabel 31 nampak bahwa tingkat pengangguran di Kabupaten Bantaeng sebesar 29,55 persen. Angka pengangguran angkatan kerja perempuan (61,12 %) lebih tinggi daripada angka laki-laki (18,81 %). Angka pengangguran tertinggi berada di Kecamatan Tompobulu yaitu 29,73 persen sedangkan tingkat pengangguran terendah berada di Kecamatan Uluere yaitu 29,40 persen.

Apabila pencari pekerjaan ini dikaitkan dengan pendidikan yang ditamatkan, maka terlihat bahwa lebih dari setengah angkatan kerja yang mencari pekerjaan (53,60%) SLTA/Sederajat, Tamat SD / Sederajat (6,69 %) dan SLTP / Sederajat (17,56 %). Lebih memprihatinkan adalah 22,15 persen yang mencari pekerjaan adalah lulusan perguruan tinggi. Dengan kualitas pendidikan yang rendah tersebut, perlu adanya perhatian pemerintah berkaitan dengan penyediaan lapangan pekerjaan yang sesuai dan perlunya memberikan keterampilan agar mereka mampu bersaing di pasar kerja.

Grafik 2
ANGKA PENGANGGURAN KABUPATEN BANTAENG



Grafik diatas menggambarkan angka pengangguran di Kabupaten Bantaeng. Dari gambar tersebut terlihat bahwa angka pengangguran semakin menurun jika dilihat dari kelompok umur. Pengangguran terbesar berada pada kelompok umur 15-19 tahun yaitu mencapai 95,25 persen dan yang terendah pada kelompok umur 60-64 tahun yaitu 6,62 persen.

GAMBARAN EKONOMI KABUPATEN BANTAENG

1. Struktur Ekonomi

Sebagai wilayah agraris struktur lapangan usaha sebagian masyarakat Bantaeng tidak mengalami pergeseran dari lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan ke lapangan usaha ekonomilainnya yang terlihat dari besarnya peranan masing-masing lapangan usaha ini terhadap pertumbuhan ekonomi dan pembentukan PDRB Bantaeng. Sumbangan terbesar pada tahun 2015, sama seperti tahun-tahun sebelumnya yang dihasilkan oleh lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, kemudian Konstruksi, Perdagangan Besar dan Eceran; lapangan usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib dan lapangan usaha Jasa Pendidikan. Sementara peranan lapangan usaha lainnya di bawah 5 persen.



2. Pertumbuhan Ekonomi

Perekonomian Bantaeng pada tahun 2016 mengalami perlambatan dibandingkan pertumbuhan tahun-tahun sebelumnya. Laju pertumbuhan PDRB Bantaeng tahun 2015 mencapai 6,64 persen, sedangkan tahun 2014 sebesar 8,34 persen. Pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh lapangan usahapertambahan dan penggalian sebesar 29,42 persen. Sedangkan seluruh lapangan usaha ekonomi PDRB yang lain pada tahun 2014 mencatat pertumbuhan yang positif,kecuali susektor tanaman pangan.

Adapun lapangan usaha-lapangan usaha lainnya berturut-turut mencatat pertumbuhan yang positif, di antaranya lapangan usaha Industri Pengolahan sebesar 17,21 persen, lapangan usaha Real Estat sebesar 13,74 persen, lapangan usaha pertambangan dan penggalian 12,80 persen, lapangan usaha, Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 11,75 persen, lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 11,20 persen, Pengadaan Listrik dan Gas mencatat sebesar 10,85 persen, lapangan usaha Jasa Lainnya sebesar 10,57 persen, lapangan usaha, transportasi dan Pergudangan sebesar 9,14 persen, lapangan usaha Konstruksi 8,72 persen, lapangan usaha Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 7,50 persen, lapangan usaha Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang sebesar 7.37 persen, lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 5,47 persen, ,lapangan usaha Informasi dan Komunikasi sebesar 5,44 persen, lapangan usaha Jasa Perusahaan sebesar 4,64 persen, lapangan usaha Jasa Pendidikan sebesar 3,13 persen dan lapangan usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 1,71 persen.

Tabel 1.13
Pertumbuhan Riil Setiap Sektor di Kabupaten Bantaeng

NO.	LAPANGAN USAHA	TAHUN				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Pertanian, Kehutanan dan Pertanian	37.35	35.60	34.92	34.23	32.12
2	Pertambangan dan Penggalian	2.23	2.34	2.50	2.93	3.89
3	Industri Pengolahan	3.62	3.90	4.22	4.70	4.94
4	Listrik, Gas, Air Bersih	0.11	0.10	0.08	0.07	0.06
5	Pengadaan Air, Pengelolaan sampah dan daur ulang	0.08	0.09	0.08	0.07	0.07
6	Jasa Kontrukai	16.94	17.77	17.45	17.29	16.75
7	Perdagangan besar dan eceran, reperasi mobil/mtr	12.78	12.69	13.13	12.91	13.51
8	Jasa Transfortasi dan Perdagangan	1.06	1.04	1.02	1.11	1.32
9	Penyediaan Jasa Akomodasi dan Makanan	0.59	0.65	0.70	0.81	0.91
10	Irfomasi dan Komunikasi	2.19	2.34	2.38	2.26	2.18
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	2.07	2.35	2.41	2.43	2.37
12	Jasa Real Estate	4.57	4.86	4.75	5.07	5.41
13	Jasa Perusahaan	0.17	0.16	0.16	0.17	0.17
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan social wajib	7.52	6.96	6.60	6.51	6.56
15	Jasa Pendidikan	5.50	5.77	5.67	5.42	5.30
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2.01	2.15	2.46	2.47	2.81
17	Jasa Jasa	1.21	1.23	1.46	1.55	1.66
	PDRB	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

Sumber : BPS Kabupaten Bantaeng Tahun 2015



a. PERTANIAN, KEHUTANAN, DAN PERIKANAN

Lapangan usaha ini mencakup Sub lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang terdiri atas tanaman pangan, tanaman hortikultura, tanaman perkebunan, peternakan, dan jasa pertaniandan perburuan, Sublapangan Usaha kehutanan dan Penebangan Kayu, dan Sub lapangan Usaha Perikanan. Lapangan usaha ini masih menjadi tumpuan dan harapan dalam penyerapan tenaga kerja.

Pada tahun 2015 Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan memberi kontribusi terhadap PDRB atas dasar harga berlaku sebesar 34,12 persen. Sub lapangan usaha tanaman pangan merupakan penyumbang terbesar terhadap Lapangan usaha pertanian yaitu tercatat sebesar 11,57 persen dari seluruh nilai tambah pertanian. Namun pertumbuhan Sub lapangan usaha ini mengalami perlambatan dari 0,18 persen pada tahun 2014 menjadi -3,94 persen pada tahun 2015. Kontribusi Sub lapangan usaha tanaman hortikultura terhadap total PDRB pada tahun 2015 sedikit turun menjadi 3,93 persen dibanding tahun 2014 sebesar 3,87 persen.

Pertumbuhan ekonomi tahun 2015 pada kategori ini terbesar adalah pada lapangan usaha peternakan yaitu sebesar 14,73 persen yang diikuti oleh lapangan usaha perkebunan tahunan sebesar 10,27 persen. Sedangkan lapangan usaha-lapangan usaha lainnya tetap mencetak laju pertumbuhan yang positif diatas 1,5 persen, kecuali tanaman pangan yang mengalami perlambatan. Berturut-turut lapangan usaha Tanaman Pangan, Tanaman Hortikultura, Tanaman Perkebunan, Jasa Pertanian dan Perburuan, serta Kehutanan dan Penebangan Kayu mencetak laju pertumbuhan ekonomi sebesar -3,94 persen, 6,35persen, 8,38 persen, 8,3 persen, 12,94 persen, 0,35 persen, dan 1,44 persen.

Tabel 1.14

Peranan Lapangan Usaha terhadap PDRB kategori Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian (Persen), 2011-2015

NO.	LAPANGAN USAHA	TAHUN				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa pertanian	70,62	70,04	67,81	64,31	63,87
	a. Tanaman Pangan	45,77	45,47	43,78	39,49	36,00
	b. Tanaman Holtikultura	5,07	5,04	4,63	4,72	4,79
	c. Tanaman Perkebunan	0,35	0,32	0,32	0,33	0,38
	d. Tanaman Hortikultura	7,31	6,86	6,61	6,60	7,46
	e. Jasa Perkebunan	2,98	2,83	2,70	2,96	3,41
	f. jasa Peternakan	7,04	7,45	7,78	8,28	9,91
	g. jasa pertanian dan perburuan	2,09	2,08	1,99	1,93	1,91
2.	Kehutanan	0,13	0,13	0,13	0,14	0,14
3.	Perikanan	29,26	29,83	32,06	35,56	36,00
	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Sumber : BPS Kabupaten Bantaeng Tahun 2015



b. Pertambangan dan Penggalian

Pada Kategori Pertambangan dan Penggalian di Kabupaten Bantaeng hanya ada sublapangan usaha pertambangan dan penggalian lainnya. Kontribusinya terus mengalami peningkatan selama tahun 2011-2015, dengan kontribusi sebesar 2,23 persen, 2,34 persen, 2,50 persen dan 2,93 persen secara berturut-turut untuk tahun 2011-2014. Dan meningkat lagi pada tahun 2015 menjadi 3,89 persen.

Tabel 1.15
Pertumbuhan dan Peranan Sublapangan Usaha kategori
Pertambangan dan Penggalian lainnya (persen) 2011-2015

NO.	URAIAN	TAHUN				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Pertumbuhan sublapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian lainnya	12,00	14,38	10,01	12,80	29,42
2	Peranan sublapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian lainnya	2,23	2,34	2,50	2,93	3,89

Sumber : BPS Kabupaten Bantaeng Tahun 2015

c. Industri Pengolahan

Pada Kategori Industri Pengolahan, lapangan usaha yang menyumbang peranan terbesar adalah Industri Barang Galian bukan Logam sebesar 15,76 persen pada tahun 2015, kemudian diikuti oleh Industri Makanan dan Minuman yaitu sebesar 71,22 persen. Sedangkan peranan lapangan usaha yang lain berturut-turut mulai dari yang terbesar hingga terkecil adalah Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik, lapangan usaha Industri Pengolahan Tembakau, lapangan usaha Industri Furnitur, Industri Kertas dan Barang dari Kertas, Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Industri Tekstil dan Pakaian, Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki, Industri Pengolahan Lainnya, Industri Alat Angkutan, Industri Kimia, Farmasi, dan Obat Tradisional dan Industri barang logam, komputer, barang elektronik, optik dan peralatan listrik. Secara keseluruhan, laju pertumbuhan kategori Industri Pengolahan pada tahun 2015 adalah sebesar 17,21 persen

Tabel 1.16
Peranan Lapangan Usaha terhadap PDRB
Kategori Industri Pengolahan (%) 2011-2015

NO.	LAPANGAN USAHA	TAHUN				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Industri Batu Bara dan Penggilingan	-	-	-	-	-
2	Industri Makanan dan Minuman	64,15	68,64	69,87	71,84	71,22
3	Industri Pengolahan Tembakau	0,03	0,03	0,03	0,02	0,02
4	Industri Tekstil dan Pakaian jadi	0,94	0,84	0,75	0,68	0,67
5	Industri Kulit, Barang dari kulit dan alas	0,06	0,05	0,05	0,04	0,04

6	Industri Kayu, Barang dari kayu dan Gabus dan barang anyaman dari bamboo	8,57	7,09	6,26	5,64	5,99
7	Industri Kertas dan Barang dari Kertas, Percetakan dan Reproduksi Media rekaman	4,58	4,06	3,58	3,28	3,16
8	Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional	0,28	0,23	0,20	0,17	0,16
9	Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik	-	-	-	-	-
10	Industri Barang Galian bukan Logam	17,16	15,44	15,98	15,38	15,76
11	Industri Logam Dasar	-	-	-	-	-
12	Industri Barang Logam, Komputer, Barang elektronik, Optick dan peralatan listrik	0,76	0,59	0,55	0,46	0,44
13	Industri Mesin dan Perlengkapan	-	-	-	-	-
14	Industri Alat Angkutan	1,47	1,37	1,31	1,13	1,13
15	Industri Furnitur	1,60	1,30	1,13	1,06	1,14
16	Industri pengolahan lainnya, Jasa reoperasi dan pemasangan mesin dan peralatan	0,40	0,36	0,32	0,28	0,27
	Industri Pengolahan	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Sumber : BPS Kabupaten Bantaeng Tahun 2015

d. Pengadaan Listrik dan Gas

Kategori Pengadaan Listrik dan Gas berkontribusi sebesar 0,06 persen terhadap perekonomian provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2015. Dari kontribusi tersebut, sebanyak 90,79 persennya di sumbangkan oleh lapangan usaha Ketenaga listrikan, dan 9,21 persen oleh Pengadaan Gas dan Produksi Es.

Sedangkan laju pertumbuhan ekonomi kategori ini pada tahun 2015 adalah sebesar 7,47 persen. Masing-masing lapangan usaha juga mencatatkan pertumbuhan yang tinggi, di mana lapangan usaha Ketenagalistrikian sebesar 7,07 persen dan Pengadaan Gas dan Produksi Es sebesar 16,33 persen. Pertumbuhan ketenagalistrikian, gas dan industri es batu berfluktuasi dari tahun 2011 sampai tahun 2015.

Tabel 1.17
Peranan Lapangan Usaha terhadap PDRB Kategori
Pengadaan Listrik dan Gas (%) 2011-2015

NO.	LAPANGAN USAHA	TAHUN				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Ketenagalistrikian	95,99	95,80	94,19	92,72	90,79
2	Pengadaan Gas dan Produksi ES	4,01	4,39	5,81	7,28	9,21

Sumber : BPS Kabupaten Bantaeng Tahun 2015



e. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang

Kategori ini mencakup kegiatan ekonomi pengumpulan, pengolahan dan pendistribusian air melalui berbagai saluran pipa untuk kebutuhan rumah tangga dan industri. Termasuk juga kegiatan pengumpulan, penjernihan dan pengolahan air dan sungai, danau, mata air, hujan dll. Tidak termasuk pengoperasian peralatan irigasi untuk keperluan pertanian. Peranan kategori ini terhadap perekonomian di Kabupaten Bantaeng selama tahun 2010-2014 besarnya dikisaran 0.08 persen hanya pada tahun 2012 sedikit tinggi yaitu 0.09 persen. Sedangkan laju pertumbuhan yaitu sebesar 14,22 persen, 18,29 persen, 2,55 persen, dan 7,37 persen berturut-turut untuk tahun 2011-2015.

f. Konstruksi

Pada tahun 2015 kategori konstruksi menyumbang sebesar 16,75 persen terhadap total perekonomian Kabupaten Bantaeng, meningkat dibandingkan pada tahun 2011 sebesar 16,94 persen. Tren peningkatan kontribusi kategori ini juga terlihat pada tahun-tahun di antaranya (2011-2012) yaitu sebesar berturut-turut 16,94 persen, 17,77 persen.

Dengan penghitungan atas dasar harga konstan 2010, laju pertumbuhan konstruksi Kabupaten Bantaeng mengalami perlambatan dari 8,66 persen pada tahun 2011 menjadi 4,11 persen pada tahun 2015.

g. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor

Selama 5 tahun terakhir, Kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor menyumbang di atas 12 persen. Pada tahun 2015, kontribusi kategori ini sebesar 13,51 persen, dengan sebesar 1,02 persen (7,57 persen terhadap kategori) disumbangkan oleh Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan Reparasinya. Sedangkan sebesar 12,49 persen (92,20 persen terhadap kategori) disumbangkan oleh lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, bukan mobil dan Sepeda Motor.

Tabel 1.18
Peranan Lapangan Usaha terhadap PDRB kategori Perdagangan besar dan eceran Reparasi mobil dan sepeda motor (persen) 2011 -2015

NO.	LAPANGAN USAHA	TAHUN				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan Reparasinya	7,44	7,73	7,68	7,80	7,57
2	Perdagangan Besar dan eceran, bukan mobil dan sepeda motor	92,55	92,26	92,31	92,19	92,42
	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Sumber : BPS Kabupaten Bantaeng Tahun 2015



h. Transportasi dan Pergudangan

Kategori Transportasi dan Pergudangan terdiri dari 6 lapangan usaha, yaitu Angkutan Rel, Angkutan Darat, Angkutan Laut, Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan, Angkutan Udara, serta Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan. Di Bantaeng Lapangan usaha yang ada hanya angkutan darat, angkutan laut dan Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan. Angkutan Darat dengan nilai kontribusi tertinggi terhadap kategori ini sebesar 93,98 persen pada tahun 2015. Sedangkan penyumbang terbesar berikutnya adalah Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan sebesar 5,34 persen dan Angkutan Laut sebesar 0,68 persen pada tahun 2015.

Tabel 1.19
Peranan Lapangan Usaha terhadap PDRB kategori
Transportasi dan Pergudangan (Persen) 2011 – 2015

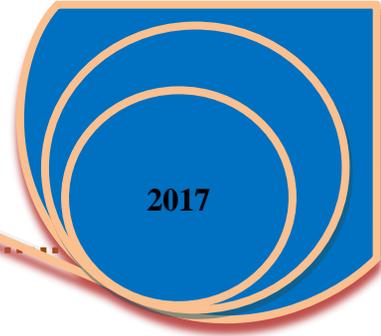
NO.	LAPANGAN USAHA	TAHUN				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Angkutan Rel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Angkutan Darat	91,99	92,03	91,92	92,90	93,98
3	Angkutan Laut	0,58	0,61	0,63	0,67	0,68
4	Angkutan Sungai	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Angkutan Udara	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan, Pos dan Kurir	7,43	7,35	7,45	6,43	5,34
	Transportasi dan Pergudangan	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Sumber : BPS Kabupaten Bantaeng Tahun 2015

i. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum

Pada tahun 2015, kategori Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum berkontribusi terhadap PDRB Kabupaten Bantaeng masih di bawah 1 persen sebesar 0,91 persen, di mana sebesar 0,76 persennya (83,54 persen terhadap kategori) merupakan kontribusi dari lapangan usaha Penyediaan Makan Minum dan sebesar 0,15 persen (16,46 persen terhadap kategori) disumbangkan oleh lapangan usaha Penyediaan Akomodasi.

Secara keseluruhan, kategori ini mencatatkan laju pertumbuhan positif sebesar 11,44 persen pada tahun 2015, mengalami penurunan di dibandingkan pada tahun 2011 yang hanya tumbuh sebesar 12,05 persen. Masing-masing lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan penyediaan Makan Minum juga menunjukkan pertumbuhan positif pada tahun 2015 sebesar 2,84 persen dan 13,38 persen

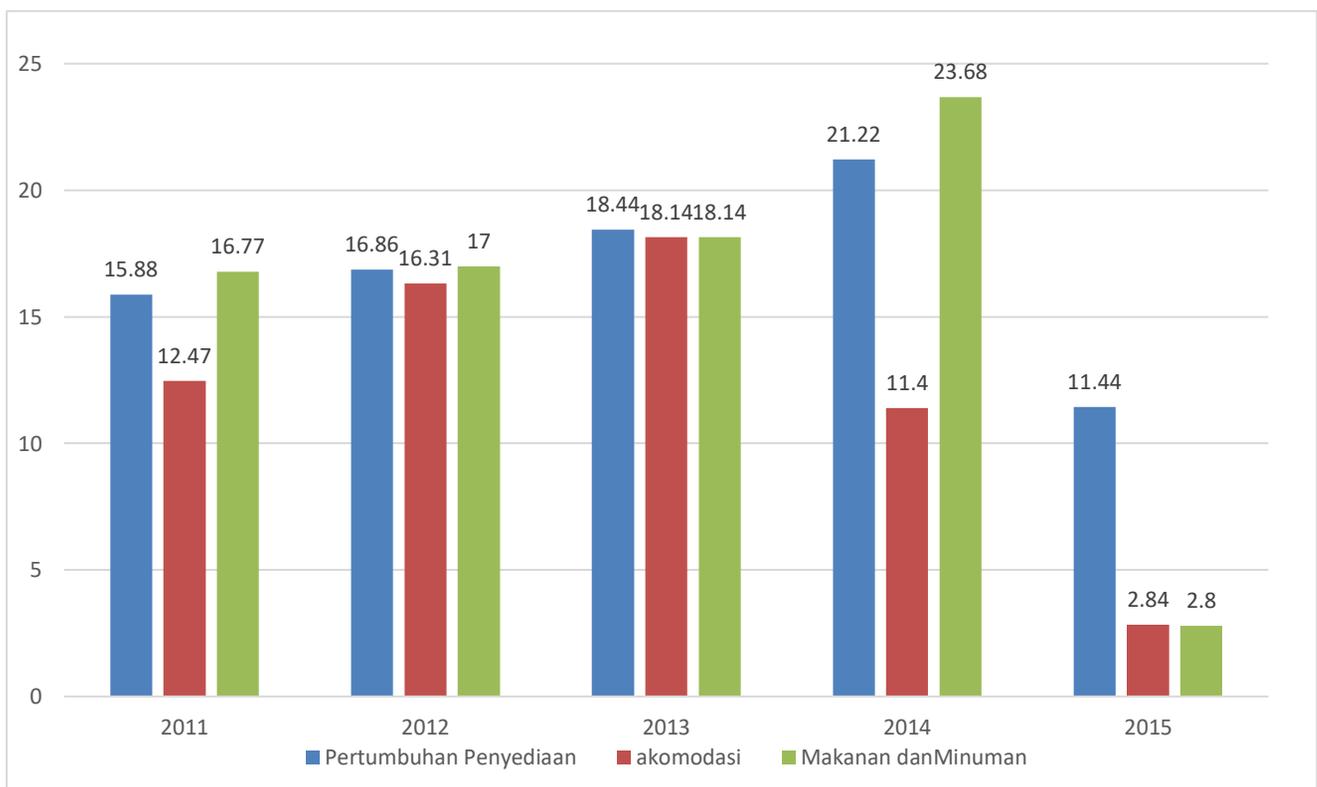


Tabel 1.20
Peranan Lapangan Usaha terhadap PDRB kategori Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (Persen) 2011-2015

NO.	LAPANGAN USAHA	TAHUN				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Penyediaan Akomodasi	21,06	20,84	19,97	19,18	16,46
2	Penyediaan Makan Minum	78,94	79,16	80,03	80,82	83,54
	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Sumber : BPS Kabupaten Bantaeng Tahun 2015

Grafik 3
Laju Pertumbuhan Ekenomi Kategori Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (%) 2010-2014

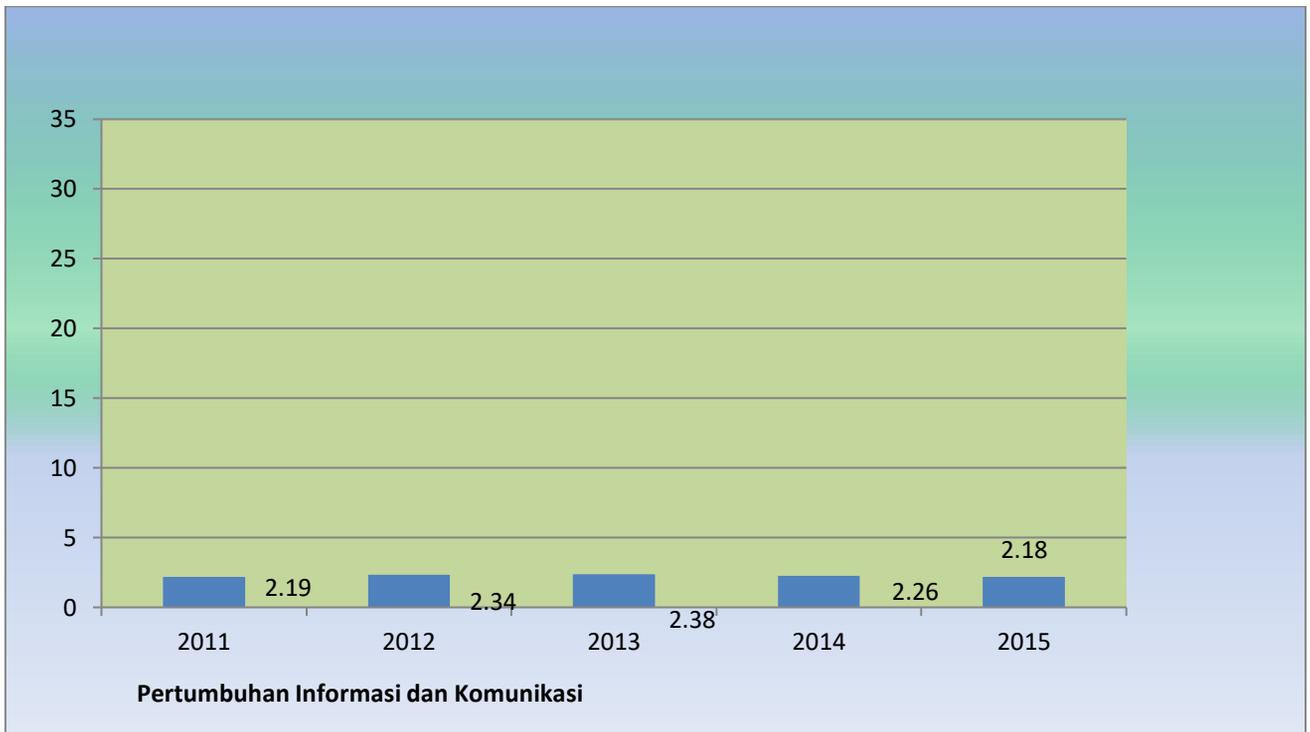


j. Informasi dan Komunikasi

Kategori informasi dan komunikasi memiliki peranan sebagai penunjang aktivitas di setiap bidang ekonomi. Dalam era globalisasi, peranan kategori ini sangat vital dan menjadi indikator kemajuan suatu bangsa, terutama jasa telekomunikasi. Peranan kategori ini terhadap perekonomian di Kabupaten Bantaeng selama tahun 2011-2015 sebesar 2,19 persen, 2,34 persen, 2,38 persen, 2,26 persen, dan 2,18 persen. Sedangkan Laju pertumbuhan menunjukkan peningkatan, yaitu sebesar 8,43 persen, 13,50 persen, 8,30 persen, 9,12 persen dan 18,33 persen berturut-turut untuk tahun 2011-2015.

Grafik 4

Pertumbuhan Riil Kategori Informasi dan Komunikasi (%) 2011-2015



k. Jasa Keuangan dan Asuransi

Kegiatan ekonomi pada Lapangan usaha jasa perantara keuangan menjadi penyumbang mayoritas Kontribusi perekonomian pada kategori jasa keuangan dan asuransi ini. Selama tahun 2011-2015, kontribusinya mendominasi dengan lebih dari 55 persen terhadap PDRB kategori jasa keuangan dan asuransi. Hanya pada tahun 2015 sedikit turun peranannya menjadi 55,73 persen. Penyumbang terbesar berikutnya adalah lapangan usaha Jasa Keuangan Lainnya pada kisaran di atas 30 persen, Asuransi dan Dana Pensiun dengan sumbangan rata-rata diatas 9 persen, dan terakhir adalah Jasa Penunjang Keuangan dengan nilai kontribusi terhadap kategori ini kurang dari 2 persen.

Tabel 1.21
Peranan Lapangan Usaha terhadap PDRB Kategori
Jasa Keuangan dan Asuransi (%) 2011-2015

NO.	LAPANGAN USAHA	TAHUN				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Jasa Perantara Keuangan	62,95	60,44	58,81	55,92	55,73
2	Asuransi dan Dana Pensiun	7,88	8,94	9,28	10,27	10,60
3	Jasa Keuangan Lainnya	27,42	28,86	30,14	32,00	31,85
4	Jasa Penunjang Kaungan	1,75	1,76	1,77	1,80	1,82
	Jasa Keuangan dan Asuransi	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Sumber : BPS Kabupaten Bantaeng Tahun 2015

i. Real Estate

Kategori real estate memberikan kontribusi yang relatif stabil bagi PDRB Kabupaten Bantaeng dengan peranan mencapai lebih 5 persen. Selama tahun 2011-2015, secara berturut-turut sumbangan kategori real estate sebesar 4,75 persen, 4,86 persen, 4,75 persen, 5,07 persen, dan 5,41 persen. Sedangkan Laju pertumbuhan ekonomi kategori ini mengalami fluktuasi di tahun 2011-2015 yaitu bersikar 9,38 persen, 16,68 persen, 9,00 persen, 13,74 persen dan 10,78 persen.

j. Jasa Perusahaan

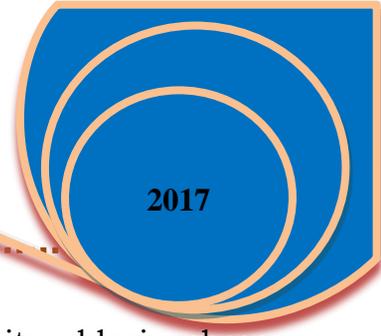
.Selama 5 tahun terakhir, kontribusi kegiatan ekonomi ada kategori jasa perusahaan relatif tidak banyak berubah, yaitu dari 0,17 persen pada tahun 2011, menjadi 0,16 persen, 0,16 persen, 0,17 persen, dan 0,17 persen untuk tahun 2011-2015. Hal ini menunjukkan pula peranan kategori ini relatif kecil dibandingkan peranan kategori-kategori lainnya pada perekonomian Bantaeng. Sedangkan laju pertumbuhannya mengalami perlambatan dari 7,53 persen pada tahun 2011 menjadi 6,29 persen pada tahun 2015. Pada tahun 2012-2014 pertumbuhannya kategori jasa perusahaan adalah sebesar 9,02 persen, 6,43 persen, dan 6,43 persen.

Grafik 5
Laju Pertumbuhan Riil Kategori Jasa Perusahaan (%) 2011-2015



k. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib

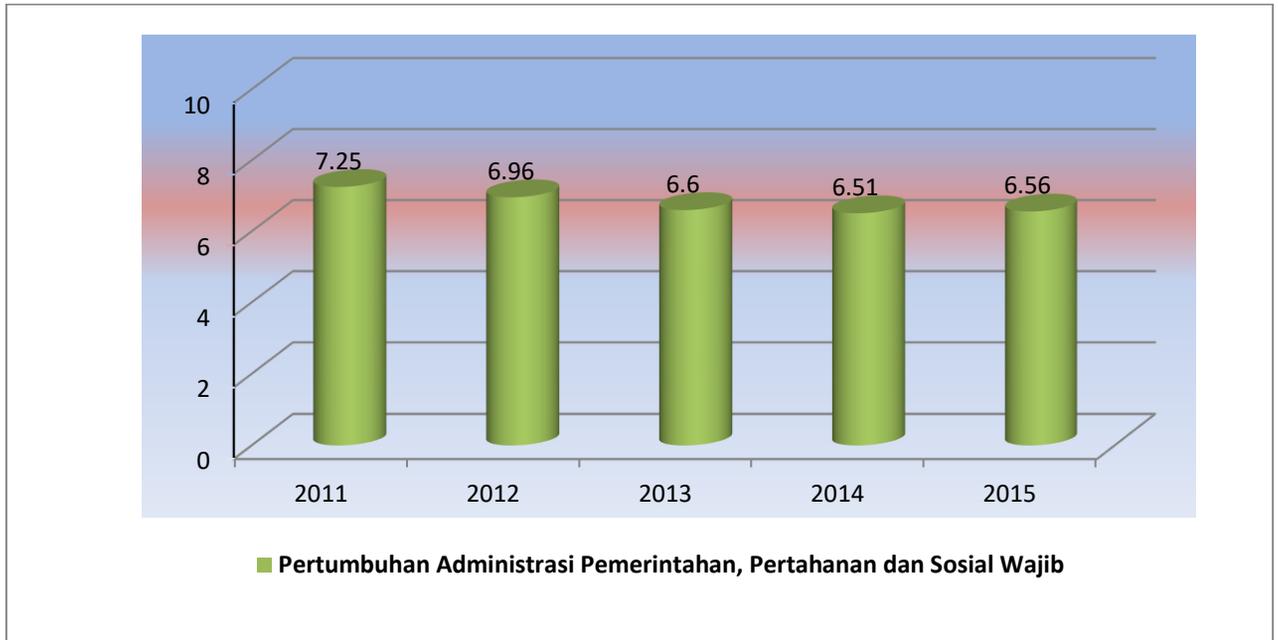
Kategori ini meliputi kegiatan yang sifatnya pemerintahan, yang umumnya dilakukan oleh administrasi pemerintahan termasuk juga perundang-undangan dan penterjemahan hukum yang berkaitan dengan pengadilan dan menurut peraturannya. Selama tahun 2011-2015 peranannya tidak mengalami banyak perubahan, yaitu dengan nilai kontribusi diatas 6 persenya 7,52 persen, 6,96 persen, 6,60 persen dan 6,51 persen, dan 6,56 persen. Sedangkan laju



pertumbuhannya selalu positif dengan tren perlambatan, yaitu dari sebesar 9,46 persen di tahun 2011 menjadi 3,81 persen di tahun 2015

Grafik 6

Pertumbuhan Riil Kategori Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib (%) 2011 - 2015

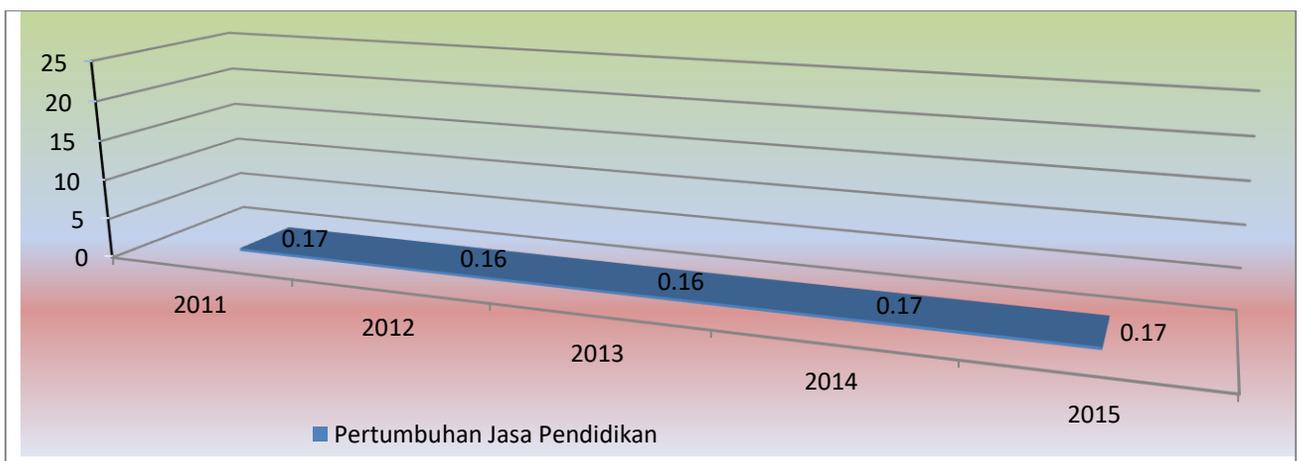


1. Jasa Pendidikan

Pada tahun 2015 jasa pendidikan menyumbang sebesar 5,30 persen terhadap total perekonomian Kabupaten Bantaeng, menurun dibandingkan pada tahun 2011 sebesar 5,50 persen. Kontribusi kategori ini relatif tidak mengalami perubahan pada tahun 2012-2014 yaitu sebesar berturut-turut 5,77 persen, 4,67 persen, dan 5,42 persen. Dengan penghitungan atas dasar harga konstan 2010, laju pertumbuhan jasa pendidikan Kabupaten Bantaeng mengalami perlambatan dari 11,98 persen pada tahun 2011 menjadi 4,50 persen pada tahun 2015.

Grafik 7

Laju Pertumbuhan Riil Kategori Jasa Perusahaan (%) 2011-2015



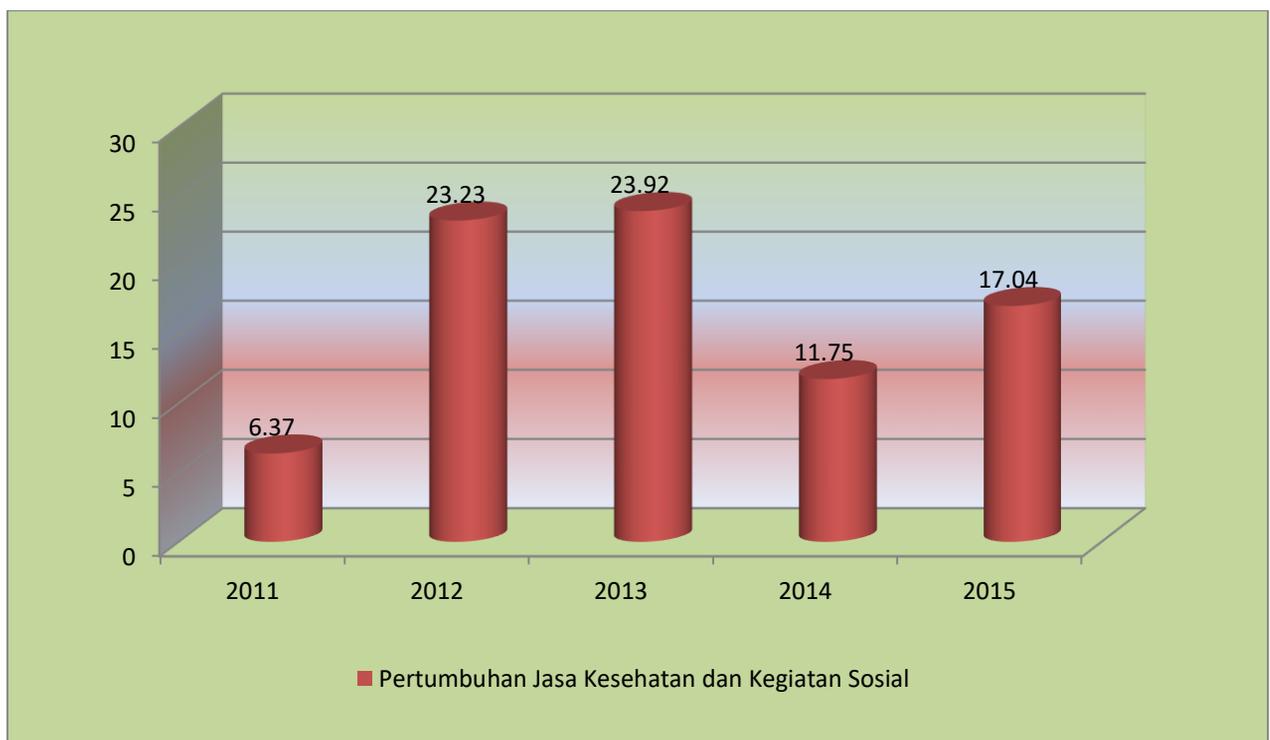


m. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial

Kategori ini mencakup kegiatan penyediaan jasa kesehatan dan kegiatan sosial yang cukup luas cakupannya. Pada tahun 2015, kontribusinya terhadap perekonomian Kabupaten Bantaeng sebesar 2,81 persen dengan laju pertumbuhan sebesar 17,04 persen. Selama tahun 2011-2015 peranannya relatif stabil dengan menunjukkan sedikit peningkatan, yaitu dengan nilai kontribusi sebesar 2,01 persen, 2,15 persen, 2,46 persen, dan 2,47 persen, dan 2,81 persen. Sedangkan laju pertumbuhannya selalu di atas 6 persen.

Grafik 8

Laju Pertumbuhan Riil Kategori Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (%) 2011-2015



n. Jasa lainnya

Kontribusi Jasa Lainnya terhadap perekonomian Kabupaten Bantaeng relatif kecil yaitu berturut-turut sejak 2011-2015 sebesar 1,21 persen, 1,23 persen, 1,46 persen, dan 1,55 persen, dan 1,66 persen. Sedangkan laju pertumbuhan selalu positif dan lebih dari 8 persen, yaitu 9,16 persen, 8,10 persen, 15,54 persen, 10,57 persen, dan 10,34 persen sepanjang tahun 2011-2015.

E. STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG

Untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi pemerintahan, Pemerintah Kabupaten Bantaeng telah menetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) instansi pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantaeng dengan Peraturan Daerah (Perda) yaitu:



1. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 24 Tahun 2007, tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantaeng.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 25 Tahun 2007, tentang Pembentukan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantaeng;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 26 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Bantaeng.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bantaeng.
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 4 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Pemerintah Kabupaten Bantaeng.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 2 Tahun 2013 tentang Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantaeng

Peraturan-peraturan daerah tersebut, menetapkan kewenangan dan tugas dari masing-masing organisasi perangkat daerah. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, berikut ini diuraikan masing-masing sebagai berikut :

1. Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah Kabupaten Bantaeng mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan tugas pokok penyelenggaraan pemerintahan, administrasi, organisasi dan tatalaksana serta memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh perangkat daerah, dengan susunan organisasi sebagai berikut:

- 1) Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.
 - a. Bagian Pemerintahan
 - b. Bagian Organisasi.
 - c. Bagian Hukum
- 2) Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan.
 - a. Bagian Administrasi Pembangunan
 - b. Bagian Perekonomian
 - c. Bagian Kesejahteraan Rakyat
- 3) Asisten Bidang Administrasi Umum
 - a. Bagian Umum
 - b. Bagian Keuangan
 - c. Bagian Humas dan Protokol

2. Sekretariat DPRD

Sekretariat DPRD mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan administratif kepada anggota DPRD dalam menyelenggarakan tugas dan kewenangannya, dengan struktur organisasi sebagai berikut :

- 1) Bagian Umum
- 2) Bagian Persidangan dan Risalah
- 3) Bagian Keuangan



3. Dinas-Dinas Daerah

Dinas Daerah merupakan unsur pelaksana pemerintah kabupaten yang dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah. Dinas daerah ini melaksanakan tugas dan fungsi operasional untuk bidang-bidang tertentu.

Jumlah dinas yang ada di Kabupaten Bantaeng sebanyak 13 SKPD dengan rincian sebagai berikut :

- a. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
- b. Dinas Kesehatan
- c. Dinas Pekerjaan Umum dan Kimpraswil
- d. Dinas Perhubungan dan Infokom
- e. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
- f. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
- g. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
- h. Dinas Perdagangan, Perindustrian, Pertambangan dan Energi
- i. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah
- j. Dinas Perikanan dan Kelautan
- k. Dinas Pertanian dan Peternakan
- l. Dinas Kehutanan dan Perkebunan
- m. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

4. Badan – Badan

Badan sebagai lembaga teknis daerah merupakan unsur penunjang pemerintah kabupaten dipimpin oleh seorang kepala badan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada bupati melalui sekretaris daerah. Badan-badan daerah di Kabupaten Bantaeng berjumlah 7 SKPD dengan rincian masing-masing Badan sebagai berikut :

- a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)
- b. Badan Kepegawaian Daerah (BKD)
- c. Inspektorat Kabupaten
- d. Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan
- e. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
- f. Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan
- g. Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup Daerah (Bapedalda)

5. Kantor – Kantor

Kantor sebagai lembaga teknis daerah merupakan unsur penunjang pemerintah kabupaten, dipimpin oleh seorang kepala kantor yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui sekretaris daerah. Kantor-kantor di Kabupaten Bantaeng berjumlah 5 SKPD dengan rincian sebagai berikut:

- a. Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
- b. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
- c. Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah
- d. RSUD Prof. DR. dr. Anwar Makkatutu
- e. Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

6. Lembaga Lainnya

Lembaga lainnya dibentuk atas tuntutan Undang-undang, dimana di Kabupaten Bantaeng terdapat 2 (dua) lembaga lain yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yang secara *ex officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah. Kepala Pelaksana merupakan eselon II B. sedangkan lembaga lain yang dibentuk adalah Sekretariat KORPRI, eselon IIIB.



7. Kecamatan dan Kelurahan

Kecamatan merupakan perangkat daerah yang dipimpin seorang camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah. Organisasi kecamatan terdiri atas camat, sekretaris camat dan seksi-seksi. Jumlah kecamatan di Kabupaten Bantaeng ada 8 kecamatan.

Adapun jumlah kelurahan, desa, RW dan RT yang dimiliki masing-masing kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.22
Jumlah Kelurahan/Desa, RW dan RT
dalam Wilayah Kabupaten Bantaeng

No	Nama Kecamatan	Kelurahan/Desa	RW/RK	RT
1	Bissappu	11	64	163
2	Uluere	6	45	92
3	Sinoa	6	50	100
4	Bantaeng	9	76	186
5	Eremerasa	9	65	141
6	Tompobulu	10	75	190
7	Pajukukang	10	94	178
8	Gantarang Keke	6	53	120
	Jumlah	67	522	1.170

Sumber: Kabupaten Bantaeng dalam Angka Tahun 2016

8. Staf Ahli

Berdasarkan Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kedudukan, Tata Kerja, tugas Pokok dan Uraian Tugas Staf Ahli Bupati Bantaeng, disebutkan bahwa jumlah staf ahli Bupati sebanyak 5 (lima) staf ahli dengan nomenklatur sebagai berikut :

- 1) Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik;
- 2) Staf Ahli Bidang Ekonomi, Pembangunan, dan Keuangan;
- 3) Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia.
- 4) Staf Ahli Bidang Pendidikan dan Kesehatan.
- 5) Staf Ahli Bidang Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan Kelautan

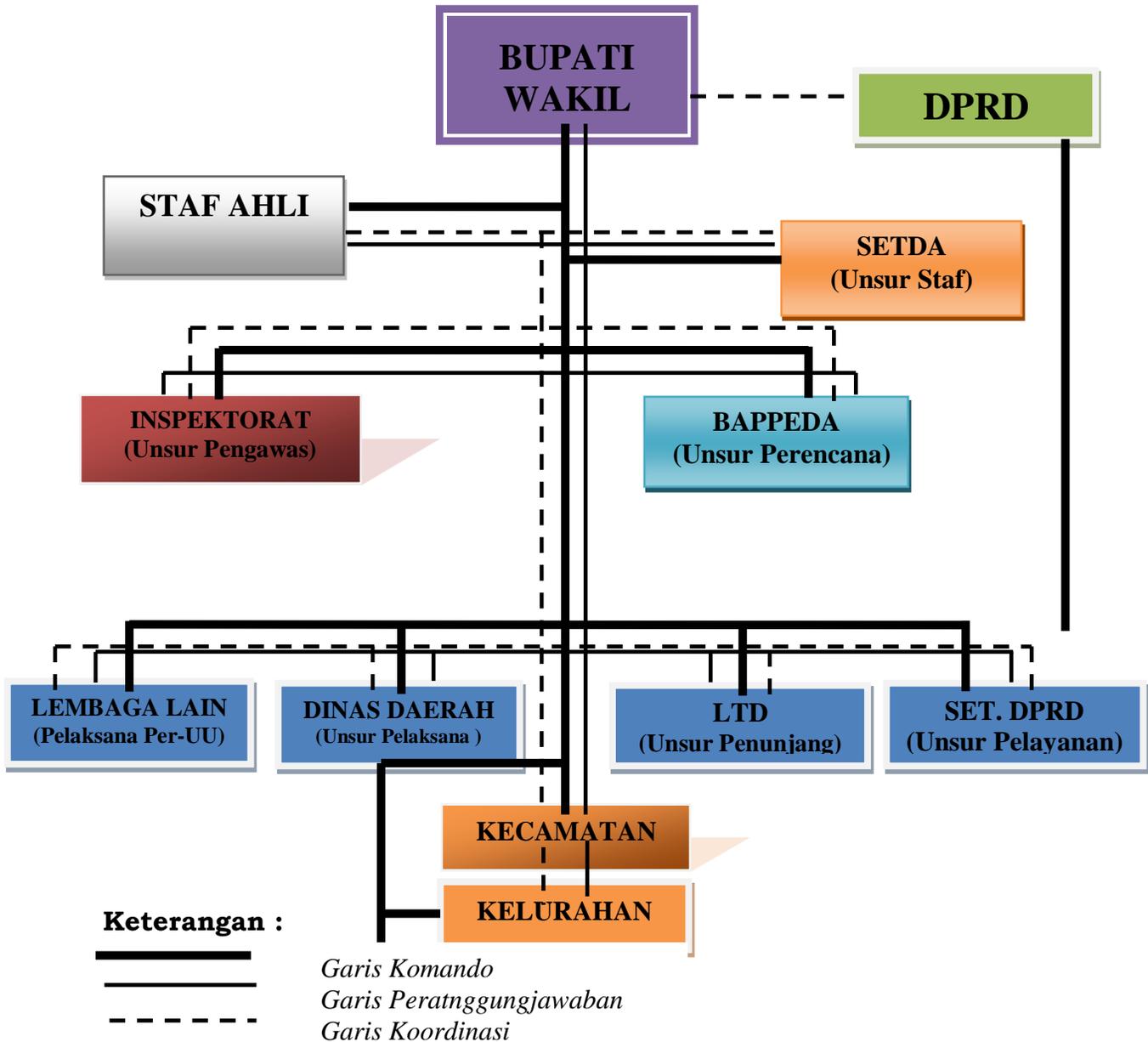
Selain struktur organisasi perangkat daerah, Pemerintah Kabupaten Bantaeng juga membentuk unit pelaksana teknis yang menjadi ikon/percontohan bagi daerah-daerah lain yakni unit **Brigade Siaga Bencana**. Unit ini merupakan salah satu unit kesiagaan pada *emergency service* yang dibentuk untuk memberikan pelayanan pertama/darurat yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan, kecelakaan lalu lintas, bencana alam, trauma, kebakaran dan sebagainya. Unit ini terdiri dari Ambulance, Pemadam Kebakaran, Tanggap Bencana (TAGANA), Search And Rescue (SAR), Palang Merah Indonesia (PMI) dan Organisasi Radio Amatir Republik Indonesia (ORARI) dan Satuan Pengamanan. Namun secara kelembagaan Brigade Siaga Bencana (BSB) Kabupaten Bantaeng masih ditangani oleh beberapa SKPD antara lain Dinas PU dan Kimpraswil, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Badan Penanggulangan



Bencana Daerah serta Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup Kabupaten Bantaeng.

Adapun keseluruhan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bantaeng dapat di gambarkan sebagaimana skema 1.1 berikut ini :

Skema 1.1
Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bantaeng



Selanjutnya jumlah aparatur Pemerintah sebagai Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di Intansi Pemerintah Kabupaten Bantaeng pada akhir Tahun 2016 sebanyak 4810 orang. Hal ini dapat dilihat pada tabel 1.22 berikut ini :



2017

Tabel 1.23
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Bantaeng
Menurut Jabatan dan Jenis Kelamin

SKPD	Pejabat Struktural			Pejabat Fungsional			STAFF		
	L	P	JLH	L	P	JLH	L	P	JLH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Sekretariat Daerah	29	17	46	0	0	0	58	47	105
Sekretariat DPRD	8	5	13	0	0	0	9	9	18
Dinas									
a Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	12	6	18	0	0	0	3	7	10
b Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	13	7	20	0	0	0	41	13	54
c Dinas Perhubungan dan Infokom	15	2	17	2	0	2	36	16	52
d Dinas Pertanian dan Peternakan	18	11	29	0	0	0	23	15	38
e Dinas Kehutanan dan Perkebunan	11	3	14	0	0	0	15	12	27
f Dinas Pekerjaan Umum dan Kimpraswil	13	10	23	0	0	0	49	17	66
g Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	11	9	20	0	0	0	12	5	17
h Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	20	9	29	718	1331	2049	213	371	584
i Dinas Perdagangan, Perindustrian, Pertambangan dan Energi	8	11	19	0	0	0	3	4	7
j Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	8	8	16	0	0	0	9	11	20
k Dinas Perikanan dan Kelautan	12	5	17	0	0	0	10	9	19
l Dinas Kesehatan	11	10	21	6	6	12	16	11	27
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	11	10	21	0	0	0	6	7	13
Puskesmas									
a Puskesmas Banyorang	2	1	3	7	36	43	2	3	5
b Puskesmas Baruga	0	0	0	4	17	21	1	2	3
c Puskesmas Bisappu	0	1	1	4	22	26	3	6	9
d Puskesmas Campagaloe	0	1	1	3	16	19	1	4	5
e Puskesmas Dampang	0	1	1	1	8	9	0	6	6
f Puskesmas Kassi-Kassi	1	0	1	5	12	17	1	7	8
g Puskesmas Kota	1	0	1	1	23	24	1	6	7
h Puskesmas Lasepang	0	1	1	3	11	14	1	3	4
I Puskesmas Loka	1	0	1	2	7	9	0	1	1
J Puskesmas Moti	1	0	1	2	9	11	3	3	6
K Puskesmas Pa' bentengan	0	1	1	0	5	5	0	3	3
L Puskesmas Sinoa	0	0	0	2	7	9	2	5	7
M Puskesmas Ulugalung	1	0	1	3	11	14	0	4	4
Badan									
a Badan Kepegawaian Daerah	11	6	17	0	0	0	10	14	24
b Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	8	9	17	0	0	0	14	11	25
c Badan Pengendalian Dampak Lingkungan	10	9	19	0	0	0	23	3	26
d Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan	7	15	22	10	12	22	8	11	19
e Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan	6	10	16	33	23	56	13	21	34



f	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	12	5	17	0	0	0	13	11	24
g	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	10	2	12	0	0	0	7	4	11
h	Inspektorat	5	3	8	6	3	9	7	11	18
Kantor										
a	Kantor Kesbang dan Linmas	3	1	4	0	0	0	3	5	8
b	Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah	1	4	5	1	0	1	1	8	9
c	Kantor RSUD Prof Anwar Makkatutu	4	3	7	37	123	160	17	24	41
d	Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2	3	5	0	0	0	5	6	11
e	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja	3	1	4	0	0	0	34	5	39
f	Sekretariat Dewan Pengurus Korpri	3	1	4	0	0	0	0	0	0
Kecamatan										
a	Kecamatan Bissappu	19	20	39	0	0	0	29	29	58
b	Kecamatan Ulu Ere	5	1	6	0	0	0	11	7	18
c	Kecamatan Sinoa	5	1	6	0	0	0	9	6	15
d	Kecamatan Bantaeng	18	21	39	0	0	0	31	28	59
e	Kecamatan Eremerasa	6	2	8	0	0	0	17	14	31
f	Kecamatan Tompobulu	14	4	18	0	0	0	14	20	34
g	Kecamatan Pa'jukukang	6	2	8	0	0	0	12	13	25
h	Kecamatan Gantarang Keke	10	4	14	0	0	0	12	8	20
JUMLAH		374	255	629	845	1662	2507	807	867	1674

Sumber : BKD, bulan Desember 2016

Berdasarkan jumlah Pegawai Negeri Sipil pada tabel 1.22 di atas, dapat dijelaskan bahwa komposisi Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan fungsional (tenaga pendidik dan tenaga kesehatan) berjumlah 2.628 orang (59,95 %), jabatan fungsional umum/staff sebanyak 1.153 orang (26.30%) dan sisanya sebanyak 602 orang adalah Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural baik eselon II, III dan IV.

Dilihat dari penyebaran jumlah Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Bantaeng, SKPD Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga dan SKPD Sekretariat Daerah memiliki jumlah Pegawai Negeri Sipil yang relatif cukup banyak. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga lebih didominasi oleh PNS Fungsional Guru sebanyak 2.173 orang PNS dan PNS Fungsional Umum (Staff) sebanyak 184 orang PNS, sedangkan pada Sekretariat Daerah didominasi oleh PNS Fungsional Umum (Staff) sebanyak 107 orang PNS. Selanjutnya SKPD Rumah Sakit Umum Daerah Prof.Dr. H.M. Makkatutu Kabupaten Bantaeng memiliki jumlah Pegawai Negeri Sipil sebanyak 153 orang PNS Fungsional Kesehatan (Dokter, Perawat, Bidan, Apoteker, Sanitarian).

Adapun komposisi Pegawai Negeri Sipil berdasarkan tingkat pendidikan mulai dari tingkat Pendidikan Strata 3 (S3) sampai tingkat pendidikan SD dapat dilihat pada Tabel berikut ini



Tabel 1.24
Jumlah PNS Kabupaten Bantaeng
Berdasarkan Tingkat Pendidikan

SKPD	Tingkat Pendidikan Yang Ditamatkan							JUMLAH
	SD	SLTP	SLTA	D I-IV	S1	S2	S3	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Sekretariat Daerah	1	10	40	9	70	20	1	151
Sekretariat DPRD	0	1	8	1	19	2	0	31
Dinas								
a Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	0	0	9	4	11	4	0	28
b Dinas PPKAD	0	2	29	5	31	7	0	74
c Dinas Perhubungan dan Infokom	1	0	30	3	33	4	0	71
d Dinas Pertanian dan Peternakan	0	2	25	1	30	9	0	67
e Dinas Kehutanan dan Perkebunan	0	1	6	8	20	6	0	41
f Dinas Pekerjaan Umum dan Kimpraswil	6	5	27	2	42	7	0	89
g Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	0	0	11	2	23	1	0	37
h Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	11	29	546	200	1802	74	0	2662
i Dinas Perindag	0	0	4	3	17	2	0	26
j Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	0	0	11	1	21	3	0	36
k Dinas Perikanan dan Kelautan	0	1	8	6	18	3	0	36
l Dinas Kesehatan	1	1	12	11	22	13	0	60
m Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	0	0	6	3	20	5	0	34
Puskesmas								
a Puskesmas Banyorang	0	1	5	7	11	0	0	24
b Puskesmas Baruga	0	1	1	12	9	1	0	24
c Puskesmas Bisappu	0	0	2	20	13	1	0	36
d Puskesmas Campagaloe	1	0	2	16	5	1	0	25
e Puskesmas Dampang	0	0	3	5	6	2	0	16
f Puskesmas Kassi-Kassi	0	0	5	10	9	2	0	26
g Puskesmas Kota	0	0	3	14	13	2	0	32
h Puskesmas Lasepang	0	0	2	8	8	1	0	19
i Puskesmas Loka	0	0	1	9	1	0	0	11
j Puskesmas Moti	0	0	4	9	4	1	0	18
k Puskesmas Pa'bentengan	0	0	0	5	2	2	0	9
l Puskesmas Sinoa	0	0	1	12	1	2	0	16
m Puskesmas Ulugalung	0	0	2	10	5	2	0	19
Badan								
a Badan Kepegawaian Daerah	0	0	6	4	8	3	0	41
b Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1	0	6	1	27	6	1	42
c Bapedalda	3	4	14	0	19	5	0	45
d Badan Keluarga Berencana dan PP	0	1	16	3	38	5	0	63
e Badan Ketahanan Pangan dan PP	0	0	19	8	68	11	0	106
f Badan PMD	0	0	7	3	26	5	0	41
g Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0	1	2	0	16	4	0	23
h Inspektorat	1	0	4	4	23	3	0	35



Kantor									
a	Kantor Kesbang dan Linmas	0	0	3	0	8	1	0	12
b	Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah	0	0	2	2	9	2	0	15
c	Kantor RSUD Prof Anwar Makkatutu	1	0	15	77	95	20	0	208
d	Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0	0	6	0	9	1	0	16
e	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja	0	3	15	10	13	2	0	43
f	Sekretariat Dewan Pengurus Korpri	0	0	1	1	2	0	0	4
Kecamatan									
a	Kecamatan Bissappu	0	2	50	5	39	1	0	97
b	Kecamatan Ulu Ere	0	1	12	0	9	2	0	24
c	Kecamatan Sinoa	0	0	7	1	12	1	0	21
d	Kecamatan Bantaeng	0	3	46	6	40	3	0	98
e	Kecamatan Eremerasa	0	1	15	3	20	0	0	39
f	Kecamatan Tompobulu	0	0	20	0	31	1	0	52
g	Kecamatan Pa'jukukang	0	0	8	2	22	1	0	33
h	Kecamatan Gantarang Keke	0	1	14	1	17	1	0	34
JUMLAH		27	71	1091	527	2837	255	2	4810

Dari komposisi PNS berdasarkan tingkat pendidikan sebagaimana pada tabel tersebut diatas, dapat diketahui bahwa sebanyak 2.347 orang PNS (53.54%) sudah menempuh pendidikan Strata Satu (S1) dan sebanyak 134 orang PNS sudah berijazah S2. Adapun penyebaran PNS berdasarkan tingkat pendidikan dapat digambarkan bahwa sebagian besar PNS yang berijazah S2 bekerja pada Sekretariat Daerah yakni sebanyak 16 orang PNS, Dinas Pendidikan dan Olah raga sebanyak 17 orang dan 13 orang PNS bekerja pada Kantor RSUD Prof,Dr.H.Anwar Makkatutu.

F. SISTEMATIKA PENYAJIAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG TAHUN 2015

Laporan Akuntabilitas Kinerja pada dasarnya mengkomunikasikan pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Bantaeng selama tahun 2015. Capaian kinerja (*performance results*) 2015 tersebut diperbandingkan dengan Rencana Kinerja (*performance plan*) 2014 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa datang.

Adapun sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Bantaeng tahun 2015 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan secara ringkas tentang Maksud dan Tujuan Penyusunan LAKIP Tahun 2016, Dasar Hukum Penyusunan LAKIP Tahun 2016, Profil Pemerintah Kabupaten Bantaeng, Struktur Organisasi Pemerintah Kabupaten Bantaeng



BAB II PERENCANAAN KINERJA

Bab ini diuraikan mengenai perencanaan kinerja terdiri dari RPJMD Kabupaten Bantaeng 2013-2018 yang memuat Visi, Misi, Tujuan Sasaran, Kebijakan dan indikator kinerja sasaran dan perjanjian kinerja tahun 2016 Pemerintah Kabupaten Bantaeng yang merupakan uraian sasaran dan indicator kinerja serta target dari perencanaan kinerja masing-masing Sasaran dalam RPJMD. Didalam Bab ini juga diuraikan Perjanjian Kinerja Tahun 2016.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Bab Akuntabilitas Kinerja memuat pencapaian kinerja masing-masing sasaran dan indikator kinerja, pengukuran dan analisis serta evaluasi analisis, realisasi yang berkaitan dengan sasaran yang telah ditetapkan dan evaluasi atas capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Bantaeng untuk masa tahun 2016 dalam kaitannya dengan pertanggungjawaban publik terhadap pencapaian sasaran stratejik.

BAB IV PENUTUP

Bab Penutup memuat kesimpulan LAKIP Pemerintah Kabupaten Bantaeng tahun 2016 dan saran/rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa yang akan datang.



Perencanaan Kinerja

A. PERENCANAAN KINERJA

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantaeng sesuai Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang RPJMD Kabupaten Bantaeng 2013-2018, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2106 terdapat 5 agenda pembangunan yang ditetapkan dengan 37 sasaran strategis dengan indikator kinerja utama (IKU) sebanyak 55 (delapan puluh sembilan) indikator untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran RPJMD dimaksud. Untuk itu, mengingat IKU merupakan komponen yang sangat penting dalam mengukur pencapaian sasaran dalam RPJMD Kabupaten Bantaeng, maka telah ditetapkan dalam Keputusan Bupati Bantaeng Nomor 161/527/XII/2016 tentang Perubahan Keputusan Bupati Bantaeng Nomor 161/557/XI/2015 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantaeng.

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategik, yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Didalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu sesuai visi, misi, tujuan dan sasaran.

Adapun visi Kabupaten Bantaeng yang ingin dicapai pada tahun 2013 - 2018 yang akan datang adalah :

“Menjadi Pusat Pertumbuhan Ekonomi dibagian selatan Sulawesi Selatan Tahun 2018”

Dari pernyataan visi tersebut, mengandung makna bahwa dalam rangka mewujudkan Sulawesi Selatan sebagai pilar utama pembangunan nasional dan simpul jejaring akselerasi kesejahteraan tahun 2018, Kabupaten Bantaeng dengan memanfaatkan segala potensi ditargetkan menjadi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi yang berarti bahwa Kabupaten Bantaeng sebagai titik pandang dan pilihan utama para investor untuk menanamkan modalnya, para wisatawan untuk berkunjung ke Bantaeng, para petani yang butuh benih unggul, dan sebagai pusat layanan kesehatan, serta pusat keunggulan lainnya.

Bantaeng sebagai pusat pertumbuhan ekonomi tahun 2018 ditandai dengan :

1. Angka Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bantaeng peringkat pertama untuk kabupaten yang masuk dalam Assosiasi Kabupaten Selatan Sulawesi Selatan (AKSESS) antara lain Kabupaten Takalar, Jeneponto, Bulukumba, Sinjai dan Kepulauan Selayar, sedangkan untuk tingkat provinsi Sulawesi Selatan Kabupaten Bantaeng masuk peringkat 5 besar. Pertumbuhan ekonomi tersebut diiringi dengan menurunnya angka kemiskinan hingga dibawah 5%, demikian pula angka pengangguran dibawah 3% dan meningkatnya pendapatan perkapita penduduk Bantaeng tertinggi kedua setelah Kota Makassar atau mencapai sebesar Rp. 35 juta lebih.



2. Terwujudnya kemitraan / interkoneksi dengan Kabupaten / Kota di Sulawesi Selatan pada khususnya dan Indonesia pada umumnya terkait pemanfaatan dan pengelolaan potensi sumber daya alam, kerjasama dalam bidang ketenagakerjaan dalam rangka memenuhi kebutuhan industry, terselenggaranya event-event tingkat provinsi dan tingkat nasional serta kerjasama dibidang pengembangan wirausaha benih.

Sebagai penjabaran dari Visi tersebut diatas, maka selama periode 2013– 2018 direncanakan misi sebagai berikut :

1. Peningkatan wawasan dan kapasitas manusia
2. Optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam bidang pertanian, kehutanan serta perikanan dan kelautan.
3. Peningkatan Jaringan Perdagangan, Industri dan Pariwisata.
4. Pengembangan lembaga ekonomi masyarakat secara terpadu.
5. Penguatan kelembagaan pemerintah.

TUJUAN DAN SASARAN

TUJUAN

Tujuan adalah penjabaran dari pernyataan misi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah sekaligus menjadi dasar dalam penyusunan pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan-pilihan tersebut. Tujuan juga dirumuskan sebagai sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan selain dinyatakan dalam bentuk kuantitatif juga menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang.

Tujuan pembangunan Kabupaten Bantaeng adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan Manusia yang berkualitas, dan berpengetahuan serta memiliki wawasan yang luas
2. Meningkatkan akses dan kualitas layanan pendidikan dan optimalisasi penerapan teknologi informasi (e-learning)
3. Meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan
4. Mempercepat pewujudan Bantaeng sebagai Kabupaten Benih Terkemuka dan Model *Smart & Green Region* di Sulawesi Selatan melalui penguatan sistem inovasi (BPPT)
5. Meningkatkan kelestarian lingkungan hidup dan sumber daya alam
6. Mengembangkan infrastruktur Pendukung Perdagangan, Industri dan Pariwisata untuk semakin memantapkan *The New Bantaeng*.
7. Meningkatkan daya saing daerah
8. Mengoptimalkan peran Lembaga Ekonomi dalam mendorong peningkatan usaha kecil menengah
9. Meningkatkan peran swasta dalam pembinaan usaha-usaha ekonomi
10. Mewujudkan pemerintah daerah yang mampu melakukan peran secara efisien dan efektif dengan mempraktikkan prinsip- prinsip good governance secara konsisten
11. Meningkatkan kualitas SDM aparatur yang diiringi dengan peningkatan kesejahteraan aparat
12. Meningkatkan kualitas layanan pemerintah desa

SASARAN

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan seperti tahunan, semesteran, triwulan, atau bulanan.



Sasaran pembangunan yang hendak dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Bantaeng selama 5 (lima) tahun, masing-masing berdasarkan tujuan pembangunan adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan Manusia yang berkualitas, dan berpengetahuan serta memiliki wawasan yang luas

Ditetapkannya tujuan ini diharapkan dapat dicapai melalui pencapaian sasaran sebagai berikut :

a. *Meningkatnya pembinaan mental dan spiritual bagi segenap generasi muda.*
Sasaran ini diharapkan dapat dicapai melalui pencapaian beberapa indikator kinerja sebagai berikut :

1) Menurunnya angka masalah sosial dibawah 40 kali

b. *Optimalnya peran majelis taklim desa / kelurahan dalam mendorong penguatan bina mental dan spiritual penduduk Bantaeng yang responsif gender.*

Sasaran ini diharapkan dapat dicapai melalui pencapaian beberapa indikator kinerja sebagai berikut :

1) Persentase Dea/Kelurahan yang memiliki kelompok Majelis Taklim sebesar 70%

2) Persentase Penduduk Perempuan >17 tahun yang Melek Huruf (Baca Tulis Alquran) sebesar 60%

c. *Optimalnya pelaksanaan program pendidikan diniyah, madrasah dan pesantren.*

Sasaran ini diharapkan dapat dicapai melalui pencapaian beberapa indikator kinerja sebagai berikut :

1) Meningkatnya Angka Partisipasi Pendidikan Anak Usia Dini sebesar 60%

2) Persentase Guru PAUD yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV sebesar 75%

3) Guru PAUD yang bersertifikat Pendidik sebesar 50%

4) Angka kelulusan Sekolah SD/ MI sebesar 100%

d. *Meningkatnya pendidikan kejuruan (skill) yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja dan sesuai dengan potensi lokal daerah.*

Sasaran ini diharapkan dapat dicapai melalui pencapaian beberapa indikator kinerja sebagai berikut :

1) Jumlah sekolah kejuruan yang menyelenggarakan pendidikan berbasis pertanian, kehutanan dan kelautan sebanyak 3 sekolah

2) Persentase anak sekolah yang lulus melalui pendidikan kejuruan sebesar 100%

2. Meningkatkan akses dan kualitas layanan pendidikan dan optimalisasi penerapan teknologi informasi (e-learning)

Penetapan tujuan ini diharapkan dapat dicapai melalui pencapaian sasaran sebagai berikut :

a. *Meningkatnya sarana dan prasarana pendidikan berbasis IPTEK*

Sasaran ini diharapkan dapat dicapai melalui pencapaian beberapa indikator kinerja sebagai berikut :

1) Persentase Peningkatan Kompetensi lulusan program kecakapan hidup sebesar 2%

b. *Tersedianya kawasan free WiFi pada kawasan strategis Ibu Kota Kecamatan*
Sasaran ini diharapkan dapat dicapai melalui pencapaian beberapa indikator kinerja sebagai berikut :

1) Persentase kawasan strategis yang telah memiliki akses internet sebesar 75%

2) Jumlah sarana jaringan internet yang telah dibangun di ibukota kecamatan sebanyak 8 unit

c. *Meningkatnya peran dan prestasi pemuda dalam keolahragaan.*

Sasaran ini diharapkan dapat dicapai melalui pencapaian beberapa indikator kinerja sebagai berikut :

- 1) Persentase tersedianya sarana dan prasarana olahraga dalam meningkatkan prestasi olahraga sebesar 75%
- 2) Jumlah pemuda yang meraih prestasi olahraga dalam kegiatan olahraga tingkat regional dan nasional sebanyak 120 orang
- 3) Jumlah cabang olah olahraga yang diikuti di tingkat regional, nasional dan internasional sebanyak 21 cabang.

3. Meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan

Penetapan tujuan ini diharapkan dapat dicapai melalui pencapaian sasaran sebagai berikut :

a. *Meningkatnya pelayanan kesehatan berdasarkan zonasi wilayah untuk peningkatan layanan kesehatan ibu dan anak serta gizi*

Sasaran ini diharapkan dapat dicapai melalui pencapaian beberapa indikator kinerja sebagai berikut :

- 1) Persentase peningkatan pelayanan kesehatan dasar sebesar 100%, artinya masyarakat terlayani dengan pelayanan kesehatan dasar.
- 2) Persentase peningkatan pelayanan kesehatan gigi, mulut serta kesehatan pra sekolah dan remaja sebesar 80%
- 3) Persentase peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan anak sebesar 89%
- 4) Persentase peningkatan penyediaan pelayanan sarana dan prasarana kesehatan sebesar 80%
- 5) Meningkatnya status gizi masyarakat

b. *Terwujudnya pola hidup bersih dan sehat berbasis pemberdayaan sebagai upaya preventif di bidang kesehatan*

Sasaran ini diharapkan dapat dicapai melalui pencapaian beberapa indikator kinerja sebagai berikut :

- 1) Persentase pencegahan dan pemberantasan penyakit sebesar 98,78%
- 2) Persentase cakupan peningkatan gizi masyarakat sebesar 93,33%
- 3) Persentase peningkatan promosi kesehatan dan pembinaan peran serta masyarakat sebesar 82,5%

c. *Berkembangnya layanan rumah sakit bertaraf internasional dalam mewujudkan Bantaeng sebagai pusat Jasa Layanan Kesehatan*

Sasaran ini diharapkan dapat dicapai melalui pencapaian beberapa indikator kinerja sebagai berikut :

- 1) Indeks peningkatan jumlah kunjungan 10% pertahun sebanyak 53.430 orang
- 2) Persentase pencapaian peralatan kesehatan sesuai SPM sebesar 54,56%
- 3) Jumlah complain pelayanan jasa rumah sakit kurang dari 10 kali

d. *Terkendalinya pertumbuhan penduduk*

Sasaran ini diharapkan dapat dicapai melalui pencapaian beberapa indikator kinerja sebagai berikut :

- 1) Jumlah pencapaian Akseptor KB Baru sebesar 6.742 orang
- 2) Persentase penurunan angka kelahiran total sebesar 2,89%
- 3) Persentase Cakupan Peserta KB Aktif sebesar 80%
- 4) Persentase evaluasi kegiatan kependudukan sebesar 85%
- 5) Persentase pelaksanaan koordinasi antar sektor dan kebijakan kependudukan sebesar 95%



4. Mempercepat pewujudan Bantaeng sebagai Kabupaten Benih Terkemuka dan Model *Smart & Green Region* di Sulawesi Selatan melalui penguatan sistem inovasi.

Penetapan tujuan ini diharapkan dapat dicapai melalui pencapaian sasaran sebagai berikut :

a. Meningkatkan produktivitas hasil-hasil pertanian, kehutanan serta perikanan dan kelautan

Sasaran ini diharapkan dapat dicapai melalui pencapaian beberapa indikator kinerja sebagai berikut :

- 1) Jumlah Produksi Pertanian Tanaman Pangan Padi dan Jagung sebesar 281.000 Ton
- 2) Jumlah Produksi Pertanian Holtikultura Unggulan 7 komoditi sebesar 33.906 Ton
- 3) Peningkatan Keamanan Pangan sebanyak 137.076 Ton
- 4) Jumlah Produksi Hasil Perkebunan sebesar 8.346 Ton
- 5) Persentase peningkatan produktifitas hasil perkebunan sebesar 20 %
- 6) Jumlah produktifitas hasil-hasil pertanian, kehutanan, perikanan dan kelautan sebesar 95.994 ton

b. Berkembangnya Usaha Perbenihan Masyarakat

Sasaran ini diharapkan dapat dicapai melalui pencapaian beberapa indikator kinerja sebagai berikut :

- 1) Jumlah produksi benih berbasis teknologi yang dihasilkan melalui UPTD Tanaman Pangan sebanyak 17 varietas
- 2) Jumlah produksi peternakan yang dihasilkan melalui UPTD Peternakan sebanyak 4 produk

c. Berkembangnya Penguasaan dan Pendayagunaan IPTEKIN secara bersistem.

Sasaran ini diharapkan dapat dicapai melalui pencapaian beberapa indikator kinerja sebagai berikut :

- 1) Persentase pemanfaatan teknologi dalam pengembangan pertanian sebesar 75%
- 2) Jumlah kegiatan pengembangan teknologi dengan pihak ketiga dalam menunjang usaha pertanian sebanyak 7 kegiatan
- 3) Jumlah produk unggulan yang telah menggunakan teknologi sebanyak 15 produk

d. Berkembangnya wirausaha benih.

Sasaran ini diharapkan dapat dicapai melalui pencapaian beberapa indikator kinerja sebagai berikut :

- 1) Jumlah Produk Olahan Hasil Pertanian dan Peternakan yang dihasilkan melalui Unit Pengolahan sebanyak 15 Produk
- 2) Jumlah sarana pendukung unit pengolahan Hasil Pertanian dan Peternakan sebanyak 3 unit

e. Berkurangnya penduduk miskin yang bekerja di sektor pertanian.

Sasaran ini diharapkan dapat dicapai melalui pencapaian beberapa indikator kinerja sebagai berikut :

- 1) Persentase kenaikan pendapatan rata-rata petani perkebunan sebesar 25%
- 2) Jumlah pelaku utama dan pelaku usaha pertanian dalam meningkatkan kesejahteraannya sebanyak 365 kelompok di 35 desa
- 3) Jumlah pelaku utama dan pelaku usaha pertanian yang dapat melakukan akses ke lembaga keuangan, informasi dan sarana produksi



5. Meningkatkan kelestarian lingkungan hidup dan sumber daya alam

Penetapan tujuan ini diharapkan dapat dicapai melalui pencapaian sasaran sebagai berikut :

a. *Meningkatnya konservasi, dan rehabilitasi hutan dan lahan berbasis pemberdayaan*

Sasaran ini diharapkan dapat dicapai melalui pencapaian beberapa indikator kinerja sebagai berikut :

- 1) Persentase luas lahan kritis terhadap luas wilayah sebesar 15%
- 2) Persentase luas lahan kritis yang direhabilitasi sebesar 3,25%
- 3) Persentase jumlah pohon yang tumbuh terhadap jumlah pohon yang ditanam sebesar 90%
- 4) Jumlah pembangunan DAM Pengendali dan DAM Penahan sebanyak 5 unit.

b. *Meningkatnya fungsi hutan non kayu untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar kawasan hutan*

Sasaran ini diharapkan dapat dicapai melalui pencapaian beberapa indikator kinerja sebagai berikut :

- 1) Persentase kenaikan pendapatan rata-rata petani perkebunan sebesar 30%
- 2) Persentase kenaikan rata-rata pendapatan masyarakat pengelola hutan desa sebesar 25%
- 3) Persentase kenaikan rata-rata pendapatan masyarakat pengelola Hutan Kemasyarakatan (HKm) sebesar 6%

6. Mengembangkan infrastruktur Pendukung Perdagangan, Industri dan Pariwisata untuk semakin memantapkan *The New Bantaeng*.

Penetapan tujuan ini diharapkan dapat dicapai melalui pencapaian sasaran sebagai berikut :

a. *Meningkatnya kapasitas jalan dan jembatan*

Sasaran ini diharapkan dapat dicapai melalui pencapaian beberapa indikator kinerja sebagai berikut :

- 1) Panjang Kondisi Jalan Rusak yang diperbaiki sepanjang 12.000 Meter
- 2) Panjang Jenis Permukaan jalan batu/kerikil/tanah yang diaspal sepanjang 1.600 Meter
- 3) Jumlah Jembatan yang dibangun sebanyak 5 Unit
- 4) Panjang Jalan dan Jembatan yang dipelihara sepanjang 9.000 Meter

b. *Optimalnya pelaksanaan pembangunan pelabuhan Bantaeng.*

Sasaran ini diharapkan dapat dicapai melalui pencapaian beberapa indikator kinerja sebagai berikut :

- 1) Jumlah dokumen Perencanaan Pengembangan Pelabuhan Bantaeng sebanyak 8 dok
- 2) Jumlah terminal sebanyak 12 terminal

c. *Berkembangnya pasar berbasis Kecamatan pada kawasan strategis*

Sasaran ini diharapkan dapat dicapai melalui pencapaian beberapa indikator kinerja sebagai berikut :

- 1) Jumlah desa yang telah memiliki pasar desa sebanyak 25 desa
- 2) Persentase pengembangan pasar dan distribusi barang sebesar 85%

d. *Berkembangnya usaha-usaha berbasis home industry olahan hasil-hasil sumber daya alam, berbasis karakteristik desa/kelurahan.*

Sasaran ini diharapkan dapat dicapai melalui pencapaian beberapa indikator kinerja sebagai berikut :



- 1) Pertumbuhan usaha sektor industri sebanyak 474 unit
 - 2) Pertumbuhan sentra IKM baru sebanyak 1 sentra
 - 3) Jumlah ijin usaha Industri Kecil Menengah (IKM) yang diterbitkan sebanyak 35 IKM
- e. *Terwujudnya Bantaeng menjadi Daerah tujuan wisata di bagian selatan Sulawesi Selatan*
Sasaran ini diharapkan dapat dicapai melalui pencapaian beberapa indikator kinerja sebagai berikut :
- 1) Jumlah pembangunan sarana penunjang pariwisata sebanyak 8 unit
 - 2) Kegiatan sarana promosi wisata sebanyak 2 kegiatan
 - 3) Jumlah festival dan event daerah dalam menukung promosi wisata sebanyak 4 event

7. Meningkatkan daya saing daerah

Penetapan tujuan ini diharapkan dapat dicapai melalui pencapaian sasaran sebagai berikut :

- a. *Meningkatnya kualitas dan fasilitasi layanan investasi untuk menjaga iklim investasi Sulawesi Selatan untuk memaksimalkan Bantaeng sebagai pusat pengembangan Industri di bagian Selatan Sulawesi Selatan.*
Sasaran ini diharapkan dapat dicapai melalui pencapaian beberapa indikator kinerja sebagai berikut :
- 1) Jumlah perusahaan yang berinvestasi dan telah menandatangani MOU sebanyak 26 Perusahaan
 - 2) Persentase pertumbuhan industri yang mampu menciptakan lapangan kerja sebesar 10%
 - 3) Persentase investasi di bidang industri sebesar 10%
- b. *Berkembangnya wawasan dan perilaku masyarakat dalam mewujudkan kondisi tertib dan aman dalam pelaksanaan pembangunan dan era globalisasi serta Asean Community 2015*
Sasaran ini diharapkan dapat dicapai melalui pencapaian beberapa indikator kinerja sebagai berikut :
- 1) Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan sebesar 100%
 - 2) Pemeliharaan Kantratribmas dan pencegahan tindakan kriminal sebesar 100%

8. Mengoptimalkan peran Lembaga Ekonomi dalam mendorong peningkatan usaha kecil menengah

Penetapan tujuan ini diharapkan dapat dicapai melalui pencapaian sasaran sebagai berikut :

- a. *Meningkatnya kualitas dan peran koperasi / BUMDES dalam mendorong usaha UMKM*
Sasaran ini diharapkan dapat dicapai melalui pencapaian beberapa indikator kinerja sebagai berikut :
- 1) Jumlah pengurus Bumdes yang mengikuti peningkatan kapasitas tentang pengelolaan BUMDES sebanyak 46 orang
 - 2) Peningkatan jumlah koperasi sebanyak 10 unit
 - 3) Persentase Koperasi Sehat sebesar 65%
 - 4) Jumlah Pengelola KUKM yang terlatih dan memanfaatkan IT sebanyak 40 orang
- b. *Berkembangnya usaha home industry yang memberikan nilai tambah hasil-hasil pertanian*
Sasaran ini diharapkan dapat dicapai melalui pencapaian beberapa indikator kinerja sebagai berikut :



- 1) PDRB sektor industri sebesar Rp. 35.000
- 2) Persentase pemanfaatan lembaga pemasaran industri dan pengolahan hasil industri melalui UPTD Rumah Kemasan dan Show Room Hasil Industri sebesar 70%
- c. *Berkembangnya kerjasama antar desa dalam pemanfaatan dan pengelolaan Potensi Desa*
Sasaran ini diharapkan dapat dicapai melalui pencapaian beberapa indikator kinerja sebagai berikut :
 - 1) Kemitraan swasta dan UKM di pedesaan sebanyak 46 desa
 - 2) Persentase desa yang memanfaatkan potensi desa dalam membangun desa mandiri sebesar 43%
 - 3) Persentase desa yang telah melakukan kemitraan dengan pihak swasta dan UKM dalam pembangunan ekonomi desa sebesar 60%
 - 4) Jumlah Kelompok masyarakat yang mengelolal dan memanfaatkan SDA dan TTG sebanyak 15 kelompok
 - 5) Jumlah usaha ekonomi produktif masyarakat yang dikembangkan kelembagaannya sebanyak 50 kelompok

9. Meningkatkan peran swasta dalam pembinaan usaha-usaha ekonomi

Penetapan tujuan ini diharapkan dapat dicapai melalui pencapaian sasaran sebagai berikut :

a. *Meningkatnya kontribusi swasta / masyarakat dalam upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat*

Sasaran ini diharapkan dapat dicapai melalui pencapaian beberapa indikator kinerja sebagai berikut :

- 1) Persentase kontribusi swasta dalam upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat sebesar 60%
- 2) Persentase kontribusi pengelolaan BUMDES dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat sebesar 90%

b. *Terbangunnya kemitraan dengan organisasi social masyarakat dalam pemanfaatan Dana Corporate Sosial Responsibility (CSR)*

Sasaran ini diharapkan dapat dicapai melalui pencapaian beberapa indikator kinerja sebagai berikut :

- 1) Realisasi penerimaan infaq, sedekah dan zakat sebesar 1 Milyar
- 2) Jumlah penerimaan bantuan swasta dalam penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bantaeng sebanyak 5 Milyar
- 3) Persentase SKPD yang bekerjasama dengan pihak swasta dalam penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bantaeng sebanyak 28 SKPD

10. Mewujudkan pemerintah daerah yang mampu melakukan peran secara efisien dan efektif dengan mempraktikkan prinsip-prinsip good governance secara konsisten

Penetapan tujuan ini diharapkan dapat dicapai melalui pencapaian sasaran sebagai berikut :

a. *Terwujudnya Kelembagaan Pemerintah Daerah Yang Sesuai dengan Semangat Reformasi Birokrasi*

Sasaran ini diharapkan dapat dicapai melalui pencapaian beberapa indikator kinerja sebagai berikut :

- 1) Jumlah SKPD yang kelembagaannya sesuai dengan ketentuan
- 2) Jumlah SKPD yang sudah memiliki Job Description
- 3) Persentase pemeriksaan SKPD dan desa

- 4) Persentase Hasil pemeriksaan APIP dan BPK RI yang ditindaklanjuti
- b. *Terwujudnya pengendalian dan perencanaan pembangunan yang berkualitas berbasis Teknologi.*
Sasaran ini diharapkan dapat dicapai melalui pencapaian beberapa indikator kinerja sebagai berikut :
 - 1) Jumlah dokumen data-data statistic pembangunan daerah
 - 2) Presentase Program RPJMD yang diakomodir dalam RKPD
 - 3) Persentase Program RKPD yang diakomodir dalam APBD
 - 4) Persentase Program Usulan Musrembang Kabupaten yang diakomodir dalam APBD
- c. *Terwujudnya pelayanan publik dan pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel dan innovative berbasis Teknologi*
Sasaran ini diharapkan dapat dicapai melalui pencapaian beberapa indikator kinerja sebagai berikut :
 - 1) Jumlah aparatur / PNS yang mengikuti Diklat Teknis sebanyak 50 orang
 - 2) Jumlah SKPD yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebanyak 36 SKPD
 - 3) Jumlah SKPD yang telah menyusun dokumen Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang di upload secara online sebanyak 12 SKPD
 - 4) Presentase pelayanan yang terselenggara sesuai standar sebesar 100%

11. Meningkatkan kualitas SDM aparatur yang diiringi dengan peningkatan kesejahteraan aparat

Penetapan tujuan ini diharapkan dapat dicapai melalui pencapaian sasaran sebagai berikut :

- a. *Terwujudnya peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah yang berkelanjutan*
Sasaran ini diharapkan dapat dicapai melalui pencapaian beberapa indikator kinerja sebagai berikut :
 - 1) Jumlah PNS yang mengikuti Pendidikan Tugas belajar S2 dan pendidikan spesialis sebanyak 12 orang.
 - 2) Jumlah aparatur pemerintah daerah yang diberikan Bantuan Pendidikan Ikatan Dinas sebanyak 24 orang
 - 3) Jumlah pengadaan PNS Kabupaten Bantaeng sebanyak 54 orang
 - 4) Jumlah CPNS yang diangkat menjadi PNS sebanyak 144 orang
- b. *Meningkatnya kinerja aparat termasuk dalam pemberian pelayanan yang professional kepada pihak-pihak yang membutuhkan pelayanan*
Sasaran ini diharapkan dapat dicapai melalui pencapaian beberapa indikator kinerja sebagai berikut :
 - 1) Jumlah SKPD yang telah menyusun SOP Pelayanan sebanyak 36 SKPD
 - 2) Persentase kepuasan pengguna layanan terhadap penyelenggara pelayanan sebesar 80%

12. Meningkatkan kualitas layanan pemerintah desa

Penetapan tujuan ini diharapkan dapat dicapai melalui pencapaian sasaran sebagai berikut :

- a. *Terwujudnya peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa yang professional dalam menyusun perencanaan dan pengelolaan keuangan desa.*
Sasaran ini diharapkan dapat dicapai melalui pencapaian beberapa indikator kinerja sebagai berikut :
 - 1) Cakupan desa/kelurahan yang menyusun sistem perencanaan



- pembangunan partisipatif sebanyak 67 desa/kelurahan
- 2) Cakupan desa yang telah menyusun RPJMDes sebanyak 46 desa
 - 3) Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan Musrembang dengan tepat waktu sebesar 100%
- b. *Meningkatnya kekuatan kelembagaan dan kemampuan pemerintah desa melalui proses pemilihan Kepala Desa berbasis Teknologi*
- Sasaran ini diharapkan dapat dicapai melalui pencapaian beberapa indikator kinerja sebagai berikut :
- 1) Koordinasi dan sinkronisasi Pemerintah Daerah dengan BPPT terhadap pelaksanaan E-voting Kepala Desa
 - 2) Jumlah peserta pelatihan penyusun pendayagunaan data profil desa dan kelurahan
 - 3) Jumlah desa/kelurahan yang membentuk BARUGA SAYANG

KEBIJAKAN

Kebijakan adalah ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman/pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program dan kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam, perwujudan sasaran, tujuan serta visi dan misi instansi pemerintah.

Perumusan kebijakan umum dan program pembangunan daerah bertujuan untuk menggambarkan keterkaitan antara bidang urusan pemerintahan daerah dengan rumusan indikator kinerja sasaran yang menjadi acuan penyusunan program pembangunan jangka menengah daerah berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan. Melalui kebijakan umum diperoleh strategi melalui program- program yang saling terkait dan rasional dalam mendukung pencapaian indikator dan target sasaran yang ditetapkan. Keberhasilan capaian satu program mendukung atau memicu keberhasilan program lainnya.

Kriteria suatu rumusan kebijakan umum antara lain:

1. Menjelaskan strategi lebih spesifik, konkrit, operasional dan fokus;
2. Mengarahkan pemilihan program yang lebih tepat dan rasional berdasarkan strategi yang dipilih dengan mempertimbangkan faktor-faktor penentu keberhasilan untuk mencapai sasaran; dan
3. Mengarahkan pemilihan program agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan kepentingan umum.

Melalui rumusan kebijakan umum, diperoleh sarana untuk menghasilkan atau diperolehnya berbagai program yang paling efektif mencapai sasaran. Untuk itu, dibutuhkan kebijakan umum agar dapat merangkai program-program prioritas yang *inherent*. Agar kebijakan umum dapat dijadikan pedoman dalam menentukan program prioritas yang tepat, kebijakan umum dibuat dalam empat perspektif sesuai strateginya, sebagai berikut:

1. Kebijakan pada perspektif peningkatan wawasan dan kapasitas manusia adalah kebijakan yang diarahkan pada pembinaan mental dan spiritual dilakukan secara terpadu mulai dari jenjang pendidikan dasar hingga menengah bahkan bagi para kelompok pemuda dengan melakukan pembinaan-pembinaan dibidang spiritual;



2. Kebijakan pada perspektif Optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam bidang pertanian, kelautan adalah kebijakan Perwujudan Kabupaten Benih Berbasis Teknologi yang diarahkan pada pengembangan SDM Petani penangkar, pemberian bantuan benih/bibit unggul untuk pengembangan dan pendampingan tenaga ahli bidang pertanian, perkebunan dan kehutanan, kegiatan promosi dan indentifikasi pasar baik dalam skala regional, nasional bahkan international untuk komoditi ekspor kemudian Pengembangan Infrastruktur Pertanian berupa pembangunan sarana dan prasarana irigasi serta Pembangunan jalan usaha tani
3. Kebijakan pada perspektif Peningkatan Jaringan Perdagangan, Industri dan Pariwisata adalah kebijakan yang mengarah pada Pengembangan Infrastruktur Pendukung Perdagangan, Industri dan Pariwisata, berupa pembangunan jalan dan jembatan, pembangunan jalan strategis ke kawasan obyek wisata dan kawasan strategis lainnya tetap dilanjutkan pengembangannya, pembangunan pasar desar pada kawasan strategis, pembangunan sarana dan prasarana pendukung pelabuhan, pembangunan obyek wisata unggulan daerah selain itu Pengembangan Jaminan 3 S (*service, specific dan security*) berupa peningkatan kualitas dan fasilitasi layanan terhadap investor yang akan menanamkan modalnya di Kabupaten Bantaeng. Serta pembentukan dan penguatan kapasitas forum-forum kerukunan masyarakat, forum pembauran dan pemberdayaan kelompok-kelompok masyarakat dalam menciptakan ketertiban dan keamanan
4. Kebijakan pada perspektif memaksimalkan berkembangnya lembaga ekonomi masyarakat secara terpadu adalah kebijakan yang diarahkan pada sinergitas swasta dengan pemerintah dalam pembinaan usaha- usaha ekonomi kreatif masyarakat, dalam mengolah dan memberikan nilai tambah terhadap hasil - hasil pertanian dan sumber daya alam lainnya;
5. Kebijakan pada perspektif Penguatan kelembagaan pemerintah diarahkan agar pemerintah daerah yang mampu melakukan peran secara efisien dan efektif dengan mempraktikkan prinsip-prinsip *good governance* secara konsisten, serta mengoptimalkan pemanfaatan teknologi, khususnya teknologi informasi (menuju *e-Government*).

Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bantaeng Tahun 2014 disusun dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Bantaeng 2013-2018. Ini berarti, dokumen RKPD Tahun 2014 merupakan tahun Pertama penjabaran pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bantaeng 2013-2018.

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

Dalam RPJMD Kabupaten Bantaeng 2013-2018, ada 5 (lima) tujuan dan 37 (tiga puluh tujuh) sasaran yang hendak dicapai oleh pemerintah Kabupaten Bantaeng. Pada tahun 2015 tujuan dan sasaran pembangunan daerah diharapkan dapat terwujud melalui pencapaian target **indikator kinerja utama**.

Sejumlah sasaran strategis yang termuat dalam RPJMD Kabupaten Bantaeng dapat dicapai melalui pencapaian target indikator program dan kegiatan berdasarkan tugas, pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Selanjutnya, keberhasilan pencapaian sasaran diukur lewat pencapaian indikator sasaran. Indikator sasaran adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Setiap indikator



sasaran memiliki rencana tingkat capaian (target) masing-masing yang diupayakan untuk dicapai dalam kurun waktu tahunan melalui pencapaian indikator kinerja utama. Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Bantaeng tahun 2016 ditetapkan melalui Keputusan Bupati Bantaeng Nomor 161/557/XI/2015 tentang Perubahan Keputusan Bupati Bantaeng Nomor 161/557/XI/2014 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantaeng.

**TABEL 2.1 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016
PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG**

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET
1	<i>Meningkatnya pembinaan mental dan spiritual bagi segenap generasi muda</i>	1 Menurunnya angka masalah sosial	Kali	<40
2	<i>Optimalnya peran majelis taklim desa / kelurahan dalam mendorong penguatan bina mental dan spiritual penduduk Bantaeng yang responsif gender</i>	1 Persentase Dea/Kelurahan yang memiliki kelompok Majelis Taklim	%	70
		2 Persentase Penduduk Perempuan >17 tahun yang Melek Huruf (Baca Tulis Alquran)	%	60
3	<i>Optimalnya pelaksanaan program pendidikan diniyah, madrasah dan pesantren.</i>	1 Meningkatkan Angka Partisipasi Pendidikan Anak Usia Dini	%	60
		2 Persentase Guru PAUD yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	%	75
		3 Guru PAUD yang bersertifikat Pendidik	%	50
		4 Angka kelulusan Sekolah SD/MI	%	100
4	<i>Meningkatnya pendidikan kejuruan (skill) yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja dan sesuai dengan potensi lokal daerah.</i>	1 Jumlah sekolah kejuruan yang menyelenggarakan pendidikan berbasis pertanian, kehutanan dan kelautan	Sekolah	3
		2 Persentase anak sekolah yang lulus melalui pendidikan kejuruan	%	100
5	<i>Meningkatnya sarana dan prasarana pendidikan berbasis IPTEK</i>	1 Persentase Peningkatan Kompetensi lulusab program kecakapan hidup	%	2
6	<i>Tersedianya kawasan free WiFi pada kawasan strategis Ibu Kota Kecamatan</i>	1 Persentase kawasan strategis yang telah memiliki akses internet	%	75
		2 Jumlah sarana jaringan internet yang telah dibangun diibukota kecamatan	Unit	8
7	<i>Meningkatnya peran dan prestasi pemuda dalam keolahragaan.</i>	1 Persentase tersedianya sarana dan prasarana olahraga dalam meningkatkan prestasi olahraga	%	75

		2	Jumlah pemuda yang meraih prestasi olahraga dalam kegiatan olahraga tingkat regional dan nasional	Orang	120
		3	Persentase terbinanya atlet berbakat dan berprestasi tingkat kabupaten	%	21
8	<i>Meningkatnya pelayanan kesehatan berdasarkan zonasi wilayah untuk peningkatan layanan kesehatan ibu dan anak serta gizi</i>	1	Persentase peningkatan pelayanan kesehatan dasar	%	100
		2	Persentase peningkatan pelayanan kesehatan gigi, mulut serta kesehatan pra sekolah dan remaja	%	80
		3	Persentase peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan anak	%	89
		4	Persentase peningkatan penyediaan pelayanan sarana dan prasarana kesehatan	%	80
		5	Meningkatnya status gizi masyarakat	%	75
9	<i>Merwujudnya pola hidup bersih dan sehat berbasis pemberdayaan sebagai upaya preventif di bidang kesehatan</i>	1	Persentase pencegahan dan pemberantasan penyakit	%	98
		2	Persentase cakupan peningkatan status gizi masyarakat	%	93
		3	Persentase peningkatan promosi kesehatan dan pembinaan peran serta masyarakat	%	82
10	<i>Berkembangnya layanan rumah sakit bertaraf international dalam mewujudkan Bantaeng sebagai pusat Jasa Layanan Kesehatan</i>	1	Indeks Peningkatan Jumlah kunjungan 10% pertahun	Orang	53.430
		2	Persentase Pencapaian peralatan kesehatan sesuai SPM	%	55
		3	Jumlah complain jasa pelayanan rumah sakit	Kali	<10
11	<i>Terkendalinya pertumbuhan penduduk</i>	1	Jumlah pencapaian Akseptor KB Baru	Orang	6.742
		2	Persentase penurunan angka kelahiran total	%	2,89
		3	Persentase Cakupan Peserta KB Aktif	%	80
		4	Persentase evaluasi kegiatan kependudukan	%	85
		5	Persentase pelaksanaan koordinasi antar sektor dan kebijakan kependudukan	%	95
12	<i>Meningkatnya produktivitas hasil-hasil pertanian, kehutanan serta perikanan dan kelautan</i>	1	Jumlah Produksi Pertanian Tanaman Pangan Padi dan Jagung	Ton	281.000
		2	Jumlah Produksi Pertanian Holtikultura Unggulan 7 komoditi	Ton	33.906

		3	Peningkatan Keamanan Pangan	Ton	137.076
		4	Jumlah Produksi Hasil Perkebunan	Ton	8.346
		5	Persentase peningkatan produktifitas hasil perkebunan	%	20
		6	Jumlah Peningkatan produktifitas hasil-hasil pertanian, kehutanan serta perikanan dan kelautan	Ton	95,994
13	<i>Berkembangnya Usaha Perbenihan Masyarakat</i>	1	Jumlah produksi benih berbasis teknologi yang dihasilkan melalui UPTD Tanaman Pangan	Varietas	17
		2	Jumlah produksi peternakan yang dihasilkan melalui UPTD Peternakan	Produk	4
14	<i>Berkembangnya Penguasaan dan Pendayagunaan IPTEKIN secara bersistem.</i>	1	Persentase pemanfaatan teknologi dalam pengembangan pertanian	%	75
		2	Jumlah kegiatan pengembangan teknologi dengan pihak ketiga dalam menunjang usaha pertanian	Kegiatan	7
		3	Jumlah produk unggulan yang telah menggunakan teknologi	Produk	15
15	<i>Berkembangnya wirausaha benih.</i>	1	Jumlah Produk Olahan Hasil Pertanian dan Peternakan yang dihasilkan melalui Unit Pengolahan	Produk	15
		2	Jumlah sarana pendukung unit pengolahan Hasil Pertanian dan Peternakan	Unit	3
16	<i>Berkurangnya penduduk miskin yang bekerja di sektor pertanian..</i>	1	Persentase kenaikan pendapatan rata-rata petani perkebunan	%	25
		2	Jumlah pelaku utama dan pelaku usaha pertanian dalam meningkatkan kesejahteraannya di 35 desa	Klp	365
		3	Jumlah pelaku utama dan pelaku usaha pertanian yang dapat melakukan akses ke lembaga keuangan, informasi dan sarana produksi	Klp	15
17	<i>Meningkatnya konservasi, dan rehabilitasi hutan dan lahan berbasis pemberdayaan</i>	1	Persentase luas lahan kritis terhadap luas wilayah	%	15
		2	Persentase luas lahan kritis yang direhabilitasi	%	3.25
		3	Persentase jumlah pohon yang tumbuh terhadap jumlah pohon yang ditanam	%	90
		4	Jumlah pembangunan DAM Pengendali dan DAM Penahan	Unit	5



18	<i>Meningkatnya fungsi hutan non kayu untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar kawasan hutan.</i>	1	Persentase kenaikan pendapatan rata-rata petani perkebunan	%	30
		2	Persentase kenaikan rata-rata pendapatan masyarakat pengelola hutan desa	%	25
		3	Persentase kenaikan rata-rata pendapatan masyarakat pengelola Hutan Kemasyarakatan (HKm)	%	6
19	<i>Meningkatnya kapasitas jalan dan jembatan.</i>	1	Panjang Kondisi Jalan Rusak yang diperbaiki	Meter	12.000
		2	Panjang Jenis Permukaan jalan batu/kerikil/tanah yang diaspal	Meter	1600
		3	Jumlah Jembatan yang dibangun	Unit	5
		4	Panjang Jalan dan Jembatan yang dipelihara	Meter	9000
20	<i>Optimalnya pelaksanaan pembangunan pelabuhan Bantaeng</i>	1	Jumlah dokumen Perencanaan Pengembangan Pelabuhan Laut	Dok	8
		2	Jumlah Terminal	%	12.57
21	<i>Berkembangnya pasar berbasis Kecamatan pada kawasan strategis</i>	1	Jumlah desa yang telah memiliki pasar desa	Desa	25
		2	Persentase pengembangan pasar dan distribusi barang/produk	%	85
22	<i>Berkembangnya usaha-usaha berbasis home industry olahan hasil-hasil sumber daya alam, berbasis karakteristik desa/kelurahan.</i>	1	Pertumbuhan usaha sektor industri	Unit	474
		2	Pertumbuhan sentra IKM baru	Sentra	1
		3	Jumlah Jenis Produk yang telah memiliki kemasan	Unit	35
23	<i>Terwujudnya Bantaeng menjadi Daerah tujuan wisata di bagian selatan Sulawesi Selatan</i>	1	Jumlah pembangunan sarana penunjang pariwisata	Unit	8
		2	Kegiatan sarana promosi wisata	Kegiatan	2
		3	Jumlah festival dan event daerah dalam menujung promosi wisata	Event	4
24	<i>Meningkatnya kualitas dan fasilitasi layanan investasi untuk menjaga iklim investasi Sulawesi Selatan untuk memaksimalkan Bantaeng sebagai pusat pengembangan Industri di bagian Selatan Sulawesi Selatan</i>	1	Jumlah perusahaan yang berinvestasi dan telah menandatangani MOU	Perusahaan	26
		2	Persentase pertumbuhan industri yang mampu menciptakan lapangan kerja	%	10
		3	Persentase investasi di bidang industri	%	40
25	<i>Berkembangnya wawasan dan perilaku masyarakat dalam mewujudkan kondisi tertib dan aman dalam pelaksanaan pembangunan dan era globalisasi serta Asean Community 2015</i>	1	Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	%	100
		2	Pemeliharaan Kantratibmas dan pencegahan tindakan kriminal	%	100



26	<i>Meningkatnya kualitas dan peran koperasi / BUMDES dalam mendorong usaha UMKM</i>	1	Jumlah pengurus Bumdes yang mengikuti peningkatan kapasitas tentang pengelolaan BUMDES	Orang	46
		2	Peningkatan jumlah koperasi	Unit	10
		3	Persentase Koperasi Sehat	%	65
		4	Jumlah Pengelola KUKM yang terlatih dan memanfaatkan IT	Klp	40
27	<i>Berkembangnya usaha home industry yang memberikan nilai tambah hasil-hasil pertanian</i>	1	PDRB sektor industri	Rupiah	35.690.735
		2	Persentase pemanfaatan lembaga pemasaran industri dan pengolahan hasil industri melalui UPTD Rumah Kemasan dan Show Room Hasil Industri	%	70
28	<i>Berkembangnya kerjasama antar desa dalam pemanfaatan dan pengelolaan Potensi Desa</i>	1	Kemitraan swasta dan UKM di pedesaan	Desa	46
		2	Persentase desa yang memanfaatkan potensi desa dalam membangun desa mandiri	%	43
		3	Persentase desa yang telah melakukan kemitraan dengan pihak swasta dan UKM dalam pembangunan ekonomi desa	%	60
		4	Jumlah kelompok masyarakat yang mengelola dan memanfaatkan SDA dan TTG	KLP	15
		5	Jumlah Usaha Ekonomi Produktif masyarakat yang dikembangkan kelembagaannya	KLP	50
29	<i>Meningkatnya kontribusi swasta / masyarakat dalam upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat</i>	1	Persentase kontribusi swasta dalam upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat	%	60
		2	Persentase kontribusi pengelolaan BUMDES dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat	%	90
30	<i>Terbangunnya kemitraan dengan organisasi social masyarakat dalam pemanfaatan Dana Corporate Sosial Responsibility (CSR)</i>	1	Realisasi penerimaan infaq, sedekah dan zakat yang dilaksanakan BAZDA	Juta	1.000
		2	Jumlah penerimaan bantuan swasta dalam penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bantaeng	Juta	5.000
		3	Persentase SKPD yang bekerjasama dengan pihak swasta dalam penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bantaeng	SKPD	28
31	<i>Terwujudnya Kelembagaan Pemerintah Daerah Yang Sesuai dengan Semangat Reformasi Birokrasi</i>	1	Jumlah SKPD yang kelembagaannya sesuai ketentuan	SKPD	3
		2	Jumlah SKPD yang telah memiliki <i>Job Description</i>	SKPD	5



		3	Persentase Pemeriksaan SKPD dan Desa	%	5
		4	Persentase Hasil Pemeriksaan APIP dan BPK-RI yang ditindak lanjuti	%	100
32	<i>Terwujudnya pengendalian dan perencanaan pembangunan yang berkeadilan berbasis Teknologi</i>	1	Jumlah dokumen data-data statistik pembangunan daerah	Dok	7
		2	Persentase Program RPJMD diakomodir dalam RKPD	%	95
		3	Persentase Program RKPD di akomodir dalam APBD	%	95
		4	Persentase Program Usulan Musrenbang Kabupaten di akomodir dalam APBD	%	100
33	<i>Terwujudnya pelayanan publik dan pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel dan innovative berbasis Teknologi</i>	1	Jumlah aparatur / PNS yang mengikuti Diklat Teknis	Orang	50
		2	Jumlah SKPD yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	Satker	36
		3	Jumlah SKPD yang telah menyusun dokumen Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang di upload secara online	SKPD	13
		4	Presentase pelayanan yang terselenggara sesuai standar	%	100
34	<i>Terwujudnya peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah yang berkelanjutan</i>	1	Jumlah PNS yang mengikuti Pendidikan Tugas belajar S2 dan pendidikan spesialis	Orang	12
		2	Jumlah aparatur pemerintah daerah yang diberikan Bantuan Pendidikan Ikatan Dinas	Orang	24
		3	Jumlah pengadaan PNS Kabupaten Bantaeng	Orang	54
		4	Jumlah CPNS yang diangkat menjadi PNS	Orang	144
35	<i>Meningkatnya kinerja aparat termasuk dalam pemberian pelayanan yang professional kepada pihak-pihak yang membutuhkan pelayanan</i>	1	Jumlah SKPD yang telah menyusun SOP pelayanan	SKPD	36
		2	Persentase kepuasan pengguna layanan terhadap penyelenggara pelayanan	%	80
36	<i>Terwujudnya peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa yang professional dalam menyusun perencanaan dan pengelolaan keuangan desa.</i>	1	Cakupan desa/kelurahan yang menyusun sistem perencanaan pembangunan partisipatif	Desa/kel	67
		2	Cakupan desa yang telah menyusun RPJMDes sebanyak 46 desa	Desa	46
		3	Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan Musrembang dengan tepat waktu	%	100
37	<i>Meningkatnya kekuatan kelembagaan dan kemampuan pemerintah desa melalui proses PILKADES berbasis Teknologi</i>	1	Koordinasi dan sinkronisasi Pemerintah Daerah dengan BPPT terhadap pelaksanaan E-voting Kepala Desa	46	46



		2	Jumlah peserta pelatihan penyusun pendayagunaan data profil desa dan kelurahan	134	134
		3	Jumlah desa/kelurahan yang membentuk BARUGA SAYANG	49	8

**BAB III***Akuntabilitas Kinerja*

Akuntabilitas Kinerja sebagai komponen manajemen kinerja, merupakan klarifikasi *output* dan *outcome* yang disajikan berdasarkan target-target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja sesuai dengan indikator-indikator yang sudah disepakati dalam pengukuran kinerja.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang (seharusnya) terjadi dengan kinerja yang diharapkan. Pengukuran kinerja ini dilakukan secara berkala (triwulan) dan tahunan. Pengukuran dan perbandingan kinerja dalam laporan kinerja harus cukup menggambarkan posisi kinerja instansi pemerintah.

Sedangkan Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan / kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Tujuan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintahan yang baik dan terpercaya.

Laporan Kinerja (LKj) Kabupaten Bantaeng Tahun 2016 disajikan berdasarkan pada hasil pengukuran, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja, yang mencakup perjanjian kinerja tahun 2016, pengukuran pencapaian sasaran yang merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator kinerja sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bantaeng Tahun 2013-2018.

A. KERANGKA PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantaeng sesuai Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang RPJMD Kabupaten Bantaeng 2013-2018, terdapat 5 agenda pembangunan yang ditetapkan dengan 37 sasaran strategis dengan indikator kinerja utama (IKU) untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran RPJMD dimaksud.

Untuk itu, mengingat IKU merupakan komponen yang sangat penting dalam mengukur pencapaian sasaran dalam RPJMD Kabupaten Bantaeng, maka telah ditetapkan dalam Keputusan Bupati Bantaeng Nomor 161/543/IX/2015 tentang Perubahan Keputusan Bupati Bantaeng Nomor Nomor 161/543/XI/2014 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantaeng.

Berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka kinerja Pemerintah Kabupaten Bantaeng diukur berdasarkan tingkat pencapaian sasaran dari program dan kegiatan.

Untuk mengetahui gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran dari pelaksanaan program dan kegiatan dilakukan melalui :



- a. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2016 ;
- b. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2016 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
- c. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2016 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis RPJMD kabupaten Bantaeng tahun 2013-2018;
- d. Membandingkan realisasi kinerja tahun 2016 dengan standar nasional;
- e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
- f. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
- g. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dari program dan kegiatan serta indikator makro yang diberlakukan nilai disertai makna dari nilai tersebut yaitu:

- 80 – 100 = Sangat Baik
- 61 – 79 = Baik
- 51 – 60 = Cukup
- < 50 = Kurang

Untuk pencapaian sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target dengan realisasi indikator sasaran, kemudian dari hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis yang terkait dengan pencapaian visi Kabupaten Bantaeng

***“ Menjadi Pusat Pertumbuhan Ekonomi
dibagian selatan Sulawesi Selatan Tahun 2018”***

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dari program dan kegiatan serta indikator makro yang diberlakukan nilai disertai makna dari nilai tersebut yaitu:

- 80 – 100 = Sangat Baik
- 61 – 79 = Baik
- 51 – 60 = Cukup
- < 50 = Kurang

B. ANALISIS PENGUKURAN

Berdasarkan Capaian Indikator Kinerja tersebut diatas, tergambar bahwa dari 37 capaian sasaran strategis pada tahun pertama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bantaeng 2013-2018, secara umum bermakna baik dan dicapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya hingga akhir tahun 2016, Pemerintah Kabupaten Bantaeng telah melaksanakan hampir seluruh kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya.

Pada target capaian yang tidak tercapai, Pemerintah Kabupaten Bantaeng akan melakukan langkah yang konstruktif dan kongkrit melalui analisis dan evaluasi agar dapat dilakukan perbaikan di masa mendatang.

Adapun hasil analisis pada masing-masing sasaran strategis dapat diuraikan sebagai berikut :



2017

Sasaran 1

Meningkatnya pembinaan mental dan spiritual bagi segenap generasi muda

Tabel 3.1
Evaluasi Pencapaian Sasaran 1

NO	INDIKATOR SASARAN	REALISASI				TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA (%)
		2012	2013	2014	2015	2016	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Menurunnya angka masalah sosial	146	101	89	30	<40	27	67,5
RATA – RATA PENCAPAIAN								67,5%

Berdasarkan tabel tersebut diatas, dapat terlihat bahwa rata-rata tingkat pencapaian kinerja sasaran 1; Meningkatnya pembinaan mental dan spritual bagi segenap generasi muda tahun 2016 sebesar 67,5%. Analisis pencapaian sasaran 1 dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. *Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2016.*

Dalam mengukur pencapaian sasaran meningkatnya pembinaan mental dan spritual bagi segenap generasi muda, indikator kinerja (IKU) yang digunakan adalah **menurunnya angka masalah sosial kurang dari 40 jenis tindakan kriminalitas**. Dari target yang ditetapkan kurang dari 40 tindakan kriminalitas, realisasi di tahun 2016 sebanyak 27 kejadian. Hal ini mengindikasikan bahwa terjadi penurunan angka masalah sosial di tahun 2016.

b. *Perbandingan antara capaian kinerja tahun 2016 dengan capaian kinerja tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.*

Tabel 3.2
Capaian Kinerja Sasaran Tahun Sebelumnya

NO	INDIKATOR SASARAN	REALISASI				TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA (%)
		2012	2013	2014	2015	2016	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Menurunnya angka masalah sosial	146	101	89	30	<40	29	72,5
RATA – RATA PENCAPAIAN								72,5%

Berdasarkan tabel 3.2, dapat dilihat bahwa tahun 2015 angka masalah sosial yang terjadi sebanyak 30 jenis tindakan kriminalitas dengan capaian kinerja sebesar 75%. Sedangkan pada tahun 2016, angka kriminalitas mengalami penurunan hanya terjadi 29 kejadian/tindakan kriminalitas. Jika dibandingkan dengan tahun 2015, terjadi penurunan angka masalah sosial sebanyak 1 kejadian, sehingga dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja menurunnya angka masalah sosial berhasil dilakukan.



c. *Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2016 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis RPJMD kabupaten Bantaeng tahun 2013-2018;*

Pencapaian sasaran meningkatnya pembinaan mental dan spritual bagi segenap generasi muda, dengan indikator kinerja (IKU) yang digunakan adalah menurunnya angka masalah sosial pada tahun 2016 ini, capaian kinerja yang diharapkan sudah sangat baik. Hal ini dapat dilihat pada target jangka menengah yang dituangkan dalam dokumen RPJMD Kabupaten Bantaeng 2013-2018, indikator menurunnya angka masalah sosial yang ditargetkan sampai akhir tahun 2018 kurang dari 40 kejadian, sudah dapat dicapai mulai pada tahun 2015 sebesar 30 kejadian dan pada tahun 2016 menurun menjadi 29 kejadian. Hal ini menunjukkan bahwa menurunnya angka masalah sosial sangat dipengaruhi oleh pembinaan mental dan spritual yang dilakukan pemerintah.

d. *Analisis keberhasilan atau peningkatan kinerja serta program dan kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja sasaran*

Masalah sosial yang terjadi di kabupaten Bantaeng sejak Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2016 berdasarkan data dari Polres Bantaeng mengalami penurunan jenis kriminalitas dan tindakan kekerasan. Hal ini terlihat pada tabel berikut ini :

Tabel. 3.3

Jenis Tindakan Kriminalitas / Kekerasan

No	Jenis Kriminalitas/Kekerasan	TAHUN						
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	Pencurian	24	21	14	9	15	3	8
2	Penipuan	14	10	10	2	1	1	-
3	Perjudian	14	8	3	4	6	4	1
4	Obat Terlarang	4	0	0	11	11	9	1
5	Penganiayaan/Perkelahian	61	60	55	38	23	8	10
6	Pembunuhan	4	2	0	3	1	-	-
7	Pencucian Uang	-	-	-	-	-	-	-
8	Perkosaan	1	4	0	0	-	-	-
9	Kejahatan Konvensional Lain	79	45	59	34	32	5	9
	Jumlah	201	150	146	101	89	30	29

Sumber : Polres Bantaeng Tahun 2016

Berdasarkan tabel 3.3 tersebut diatas, penganiayaan/perkelahian menjadi jenis kriminalitas yang dominan disamping kejahatan konvensional lainnya. Tingginya angka kriminalitas ini disebabkan masih minimnya pembinaan masyarakat yang dilakukan Pemerintah, khususnya pembinaan mental dan spritual. Oleh karena itu peranan Pemerintah Daerah dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan dan kabupaten terhadap pembinaan kemasyarakatan memiliki pengaruh yang strategis dalam menekan tingkat masalah sosial yang ada dimasyarakat.

Salah satu bentuk peranan Pemerintah Daerah dalam pembinaan mental dan spritual adalah dengan mengoptimalkan peran dan fungsi guru mengaji dan imam masjid yang ada ditengah-tengah masyarakat. Keberadaan guru mengaji dan imam masjid masih dianggap tokoh yang memberikan teladan dan panutan yang

baik bagi masyarakat. Dengan adanya kerja sama dari Pemerintah Daerah dengan guru mengaji dan imam masjid ini diharapkan pembinaan mental dan spritual dapat lebih optimal sehingga masalah-masalah sosial yang terjadi dalam masyarakat dapat berkurang.

Perhatian Pemerintah Daerah terhadap peran dan fungsi Guru Mengaji dan Imam Masjid yang tersebar di 8 (delapan) wilayah kecamatan dilakukan melalui pengalokasian insentif bagi mereka setiap tahun dalam APBD Kabupaten Bantaeng yang langsung dikelola oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Bantaeng.

Pada Tahun 2016 Pemerintah Kabupaten Bantaeng mengalokasikan anggaran dalam mendukung pencapaian sasaran ini melalui Kegiatan Fasilitasi Pembinaan dan Peningkatan Pelaksanaan Keagamaan bagi masyarakat sebesar Rp. 4.607.350.000 dan kegiatan Pengelolaan operasional bantuan keagamaan sebesar Rp. 2.520.106.800,-

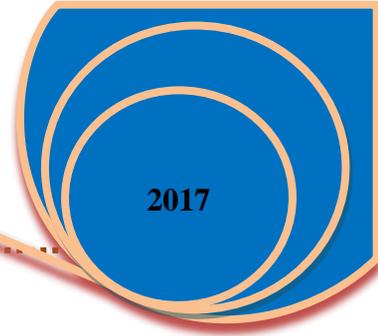
Berdasarkan Keputusan Bupati Bantaeng Nomor 400/255/I/2016 Tanggal 2 Januari 2016 tentang Pemberian Jasa Upah Kerja Kepada Imam Masjid dan Keputusan Bupati Bantaeng Nomor 400/259/I/2016 Tanggal 4 Januari 2016 tentang Pemberian Jasa Upah Kerja Kepada Pimpinan Pondok Pesantren dan BOP Pondok Pesantren di Kabupaten Bantaeng Tahun 2016, jumlah Imam Masjid dan Pendidik TPA/TKA yang menerima insentif adalah berikut :

1. Guru Mengaji sebanyak 1.100 orang
2. Imam Masjid sebanyak 450 orang
3. Pendidik TPA/TKA sebanyak 104 orang

Sedangkan kegiatan kegiatan keagamaan yang rutin dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Bantaeng dalam mendukung pencapaian sasaran meningkatnya pembinaan mental dan spritual bagi segenap generasi muda adalah Kegiatan Festival Anak Shaleh (FASI) Tingkat Kabupaten dan Tingkat Provinsi, Kegiatan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) Tingkat Kabupaten, Provinsi dan Nasional, Kegiatan Safari Ramadhan, Kegiatan Lomba Takbiran dan Miniatur Masjid, Lomba Tabuh Bedug dan Kegiatan Pemberangkatan dan Penjemputan Jamaah Haji yang bekerja sama dengan Departemen Agama Kabupaten Bantaeng

Foto Kegiatan Keagamaan





Sasaran 2	<i>Optimalnya peran majelis taklim desa / kelurahan dalam mendorong penguatan bina mental dan spritual penduduk Bantaeng yang responsif gender</i>
------------------	---

Dalam mencapai sasaran optimalnya peran majelis taklim desa/kelurahan dalam mendorong penguatan bina mental dan spritual penduduk Bantaeng yang responsif gender, telah ditetapkan 2 indikator sasaran yaitu **Indikator Kinerja (IKU) persentase desa/kelurahan yang memiliki kelompok Majelis Taklim** dan Indikator kinerja persentase penduduk perempuan > 17 Tahun yang melek Huruf (Baca Tulis) Alquran. Adapun pencapaian kinerja dapat dilihat sebagaimana pada tabel tersebut di bawah ini :

Tabel 3.4
Evaluasi Pencapaian Sasaran 2

NO	INDIKATOR SASARAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA (%)
		2016	2016	
1	2	7	8	9
1	Persentase Desa / Kelurahan yang memiliki kelompok Majelis Taklim	80	78	97,5
2	Persentase Penduduk Perempuan > 17 tahun yang Melek Huruf (Baca Tulis Alquran)	90	87	96,7
RATA-RATA PENCAPAIAN SASARAN				97.1

a. *Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2016 ;*

Dari tabel evaluasi pencapaian sasaran optimalnya peran majelis taklim desa/kelurahan dalam mendorong penguatan bina mental dan spritual penduduk Bantaeng yang responsif gender dapat diketahui bahwa rata-rata capaian kinerja sudah sangat baik atau sebesar 97,1%. Hal ini dapat diindikasikan melalui realisasi capaian indikator persentase desa/kelurahan yang memiliki kelompok majelis taklim mencapai 97.5% dan persentase penduduk perempuan >17 Tahun yang Melek Huruf (Baca Tulis Alquran) sudah mencapai 96,7%.

b. *Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2016 dengan tahun 2015 dan beberapa tahun terakhir;*

Tabel 3.5
Perbandingan Pencapaian Sasaran Tahun Sebelumnya

NO	INDIKATOR SASARAN	REALISASI				TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA (%)
		2012	2013	2014	2015	2016	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Persentase Desa / Kelurahan yang memiliki kelompok Majelis Taklim	-	40	50	70	80	78	97,5
2	Persentase Penduduk Perempuan > 17 tahun yang Melek Huruf (Baca Tulis Alquran)	-	40	50	80	90	87	96,7
RATA - RATA PENCAPAIAN								97.1



Dari evaluasi pencapaian sasaran sebagaimana pada tabel 3.5, dapat dilihat bahwa realisasi kinerja pada indikator persentase desa/kelurahan yang memiliki kelompok majelis taklim pada tahun 2016 mengalami peningkatan rata-rata sebesar 7% dibandingkan realisasi kinerja 3 tahun terakhir. Begitu juga halnya dengan indikator persentase penduduk perempuan yang melek huruf Alquran dari tahun ke tahun realisasi kinerjanya semakin baik, atau mengalami peningkatan rata-rata sebesar 7% dari tahun tahun sebelumnya.

- c. *Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2016 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis RPJMD kabupaten Bantaeng tahun 2013-2018;*

Tabel 3.6
Perbandingan Pencapaian Sasaran dengan Target RPJMD

NO	INDIKATOR SASARAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA (%)	TARGET RPJMD
		2016	2016		2016
1	2	3	4	5	6
1	Persentase Desa / Kelurahan yang memiliki kelompok Majelis Taklim	80	78	97,5	100
2	Persentase Penduduk Perempuan > 17 tahun yang Melek Huruf (Baca Tulis Alquran)	90	87	96,7	100
RATA-RATA PENCAPAIAN SASARAN				97.1	

Dalam RPJMD Kabupaten Bantaeng Than 2013-2018, capaian kinerja yang diinginkan dalam rangka “optimalnya peran majelis taklim desa/kelurahan dalam mendorong penguatan bina mental dan spritual penduduk Bantaeng yang responsif gender,” sebesar 100% akan mampu dilaksanakan. Hal ini dapat dilihat pada pencapaian indikator sasaran sudah mencapai 97,1% pada tahun 2016. Diharapkan pada tahun 2017 dan 2018, diakhir target RPJMD, pencapaian sasaran ini dapat segera dituntaskan.

- d. *Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;*

Keberhasilan realisasi pencapaian indikator sasaran sebagaimana dilihat pada tabel 3.5 disebabkan oleh aktifnya peran ibu-ibu PKK dalam membina, menyelenggarakan dan mengikuti kegiatan-kegiatan majelis taklim di wilayah kelurahan/desa dan kecamatan. Dengan peran dan keterlibatan ibu-ibu PKK dalam kegiatan keagamaan ini, didesa/kelurahan timbul kesadaran masyarakat untuk membentuk kelompok-kelompok majelis taklim. Disamping itu, peran tenaga penyuluhan yang ikut mensosialisasikan program pemerintah daerah khususnya dalam pembinaan kelompok-kelompok majelis taklim. Berkembangnya kelompok majelis taklim di setiap desa/kelurahan, sehingga pada akhir 2016 jumlah majelis taklim yang tersebar di wilayah kabupaten Bantaeng sebanyak 376 Kelompok.

- e. *Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja*

Pencapaian sasaran “optimalnya peran majelis taklim desa/kelurahan dalam mendorong penguatan bina mental dan spritual penduduk Bantaeng yang responsif gender,” dengan indikator kinerja (IKU) ***persentase desa/kelurahan yang memiliki kelompok majelis taklim*** dan indikator persentase penduduk



perempuan >17 Tahun yang melek huruf Alquran pada tahun 2016 rata-rata pencapaiannya sebesar 97.1%. Pencapaian kinerja ini didukung beberapa program SKPD/Unit Kerja antara lain :

- 1) Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak di Dinas KB dan Pemberdayaan Perempuan sebesar RP. 1.935.069.850 yang direalisasikan sebanyak Rp. 1.870.145.350 atau sebesar 97%;
- 2) Program Peningkatan Peran Serta dan Kesejahteraan Gender dalam pembangunan di Dinas KB dan PP sebesar 184.983.000,- realisasi sebesar Rp. 180.865.200 atau 98%;
- 3) Program Pembinaan Iman dan Takwa yang dianggarkan di Bagian Kesra Setda sebesar RP. 2.520.106.800, direalisasikan sebesar Rp. 2.440.269.450,- atau 96,83%
- 4) Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan di Dinas KB dan Pemberdayaan Perempuan dianggarkan sebesar Rp. 18.031.000

Berdasarkan program SKPD/Unit Kerja yang mendukung pencapaian sasaran, diharapkan pada akhir periode RPJMD Kabupaten Bantaeng, pencapaian sasaran optimalnya peran majelis taklim desa/kelurahan dalam mendorong penguatan bina mental dan spritual penduduk Bantaeng yang responsif gender sudah dapat dituntaskan 100%. Artinya didesa/kelurahan telah terbentuk majelis taklim yang mampu mendorong pembinaan mental dan spritual masyarakat dan anak perempuan didesa/kelurahan sudah mampu membaca tulis huruf Alquran.

Sasaran 3

Optimalnya pelaksanaan program pendidikan diniyah, madrasah dan pesantren

Dalam mendukung pencapaian sasaran optimalnya pelaksanaan program pendidikan diniyah, madrasah dan pesantren telah ditetapkan sebanyak 4 indikator sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatnya Angka Partisipasi Anak Usia Dini (PAUD);
2. Persentase Guru PAUD yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV;
3. Guru PAUD yang bersertifikat pendidik;
4. Angka Kelulusan Sekolah SD/MI.

Tabel 3.7
Evaluasi Pencapaian Sasaran 3

NO	INDIKATOR SASARAN	REALISASI					TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA (%)
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2016	
1	2	3	4	5	6	7	7	8	9
1	Meningkatnya Angka Partisipasi Pendidikan Anak Usia Dini	21,16	20,88	36,44	52,78	67,56	75,88	67,01	88,31
2	Persentase Guru PAUD yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	30,80	42,27	51,40	69,72	69,67	85,00	73,70	86,71
3	Guru PAUD yang bersertifikat Pendidik	13,30	18,90	32,40	35,02	59,40	40,40	46,53	116,33
4	Angka Kelulusan Sekolah SD/MI	100	87,36	100	96,85	100	100	94,27	94,27
RATA - RATA PENCAPAIAN									96.39

Berdasarkan evaluasi pencapaian sasaran optimalnya pelaksanaan program pendidikan diniyah, madrasah dan pesantren pada tahun 2016, dari 5



(lima) indikator kinerja yang ditetapkan sebagai tolok ukur keberhasilan sasaran ini, **indikator meningkatnya angka partisipasi pendidikan anak usia dini dan angka kelulusan Sekolah SD/MI merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU).**

Rata-rata pencapaian indikator kinerja utama sudah sangat baik, hal ini dapat dilihat pada capaian kinerja meningkatnya angka partisipasi PAUD dapat direalisasikan sebesar 88,31% dan capaian kinerja angka kelulusan SD/MI yang dapat direalisasikan sebesar 94,27%. Begitupula halnya dengan indikator lainnya, pencapaian kinerjanya sudah baik. Persentase guru PAUD yang bersertifikat pendidik dapat direalisasikan sebesar 116,33% dan Guru PAUD yang memenuhi kualifikasi S1/DIV mencapai 86,71%

Adapun analisis terhadap pencapaian sasaran optimalnya pelaksanaan program pendidikan diniyah, madrasah dan pesantren dapat dijelaskan sebagai berikut ;

a. *Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2016 ;*

Tabel 3.8
Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja

NO	INDIKATOR SASARAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA (%)
		2016	2016	
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Angka Partisipasi Pendidikan Anak Usia Dini	75,88	67,01	88,31
2	Persentase Guru PAUD yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	85,00	73,70	86,71
3	Guru PAUD yang bersertifikat Pendidik	40,40	46,53	116,33
4	Angka Kelulusan Sekolah SD/MI	100	94,27	94,27
Rata – rata Pencapaian Kinerja				96,39

Berdasarkan perbandingan target dan realisasi kinerja diatas, dapat dilihat bahwa pencapaian realisasi terhadap 4 indikator yang ditetapkan dalam mengukur pencapaian sasaran optimalnya pelaksanaan program pendidikan diniyah, madrasah dan pesantren rata-rata bernilai sangat baik atau sebesar 96,39%.

Dari indikator kinerja yang ditetapkan sebagai tolok ukur keberhasilan sasaran ini, untuk indikator kinerja utama (Angka Partisipasi PAUD dan angka kelulusan SD/MI), realisasi yang dapat dicapai sudah sangat baik. Dari target partisipasi PAUD sebesar 75,88% dapat direalisasikan sebesar 67,01%. Sedangkan Angka Kelulusan sekolah SD/MI dari target 100%, dapat dicapai sebesar 94,27%.

Adapun indikator lainnya yang ditetapkan adalah Guru PAUD yang berkualifikasi S1/D-IV dan Guru PAUD yang bersertifikat pencapaian realisasinya juga sangat baik. Hal ini dapat dilihat pada pencapaian realisasi kinerja guru PAUD yang bersertifikat mencapai 116,33%. Begitu pula halnya capaian kinerja guru PAUD yang berkualifikasi S1/D-IV dapat direalisasikan sebesar 73,70% dari target sebesar 85%. Berdasarkan capaian kinerja yang diperoleh melalui beberapa indikator tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa sasaran optimalnya pelaksanaan program pendidikan diniyah, madrasah dan pesantren rata-rata pencapaian kinerjanya sudah sangat baik.



b. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2016 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;

Tabel 3.9
Perbandingan Pencapaian Sasaran Tahun Sebelumnya

NO	INDIKATOR SASARAN	REALISASI					TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA (%)
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2016	
1	2	3	4	5	6	7	7	8	9
1	Meningkatnya Angka Partisipasi Pendidikan Anak Usia Dini	21,16	20,88	36,44	52,78	67,56	75,88	67,01	88,31
2	Persentase Guru PAUD yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	30,80	42,27	51,40	69,72	69,67	85,00	73,70	86,71
3	Guru PAUD yang bersertifikat Pendidik	13,30	18,90	32,40	35,02	59,40	40,40	46,53	116,33
4	Angka Kelulusan Sekolah SD/MI	100	87,36	100	96,85	100	100	94,27	94,27
RATA - RATA PENCAPAIAN									96,39

Dari indikator kinerja yang ditetapkan sebagai tolok ukur keberhasilan sasaran optimalnya pelaksanaan program pendidikan diniyah, madrasah dan pesantren, untuk indikator kinerja utama (Angka Partisipasi PAUD dan Angka Kelulusan SD/MI), prosentase realisasi pencapaian kinerja sudah sangat baik. Jika dibandingkan dengan capaian Tahun 2015 sebesar 67,56% maka terdapat kenaikan APK PAUD pada Tahun 2016 ini sebesar 88,31%.. Kenaikan APK disebabkan bertambahnya lembaga PAUD dengan jumlah peserta didik sebanyak 3623 pada PAUD formal yang tersebar pada 82 TK/RA dan 1506 orang pada PAUD nonformal (KB, Tempat Penitipan Anak (TPA) dan Satuan PAUD Sejenis).

c. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2016 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis RPJMD kabupaten Bantaeng tahun 2013-2018;

Tabel 3.10
Perbandingan Realisasi Kinerja dengan RPJMD 2013-2018

NO	INDIKATOR SASARAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA (%)	Target
		2016	2016		RPJMD
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Angka Partisipasi Pendidikan Anak Usia Dini	75,88	67,01	88,31	100
2	Persentase Guru PAUD yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	85,00	73,70	86,71	100
3	Guru PAUD yang bersertifikat Pendidik	40,40	46,53	116,33	100
4	Angka Kelulusan Sekolah SD/MI	100	94,27	94,27	100
Rata - rata Pencapaian Kinerja				96,39	

Berdasarkan tabel perbandingan realisasi kinerja dengan target dalam dokumen RPJMD Kabupaten Bantaeng Tahun 2018, pada tahun 2016 ini pencapaian realisasi kinerja sudah cukup baik. Di tahun 2016 rata-rata pencapaian kinerja dari 4 indikator sasaran sebesar 96,39%. Diharapkan pada akhir tahun 2018 sebagai tahun terakhir target RPJMD Kabupaten Bantaeng, pencapaian kinerja sudah dapat dituntaskan 100%.

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Adapun Program dan Kegiatan yang mendukung dalam pencapaian sasaran optimalnya pelaksanaan program pendidikan diniyah, madrasah dan pesantren adalah Program Pendidikan Anak Usia Dini memanfaatkan dana APBD Kabupaten Bantaeng Tahun 2016 sebesar Rp. 1.665.597.500,- dengan rincian:

- a. Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik Kegiatan ini memanfaatkan dana APBD Tahun Anggaran sebesar Rp. 127.187.500,- dengan realisasi sebesar Rp.
- b. Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini. Kegiatan ini dilaksanakan memanfaatkan dana APBD Tahun 2016 sebesar Rp. 245.308.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 239.570.942. atau sebesar 97.66%
- c. Penyelenggaraan Anak Usia Dini, memanfaatkan dana APBD Tahun 2016 sebesar Rp.1.096.796.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.1.072.939.775,- atau sebesar 97.82%.
- d. Program Wajib Belajar Sembilan Tahun dengan memanfaatkan dana APBD Tahun 2016 sebesar Rp.18.269 223.600,- dengan realisasi anggaran sebanyak Rp. 17.173.501.643,- atau sebesar 94%

Foto-foto kegiatan PAUD di Kabupaten Bantaeng



Sasaran 4

Meningkatnya pendidikan kejuruan (skill) yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja dan sesuai dengan potensi lokal daerah

Tabel 3.11
Evaluasi Pencapaian Sasaran 4

NO	INDIKATOR SASARAN	REALISASI				TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA (%)
		2012	2013	2014	2015	2016	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Jumlah sekolah kejuruan yang menyelenggarakan pendidikan berbasis pertanian, kehutanan dan kelautan	1	2	4	3	4	4	100
2	Persentase anak sekolah yang lulus melalui pendidikan kejuruan	93,10	99,08	98,89	100	100	100	100
RATA – RATA PENCAPAIAN								100

Pada sasaran ini, meningkatnya pendidikan kejuruan (skill) yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja dan sesuai dengan potensi lokal daerah, indikator



yang ditetapkan adalah **jumlah sekolah kejuruan yang menyelenggarakan pendidikan berbasis pertanian, kehutanan dan kelautan dan persentase anak sekolah yang lulus melalui pendidikan kejuruan**. Hasil evaluasi pencapaian sasaran tersebut sebagaimana pada tabel diatas, terlihat bahwa rata-rata pencapaian kinerja sudah sangat baik atau sebesar 100%.

a. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2016 ;

Tabel 3.12
Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja

NO	INDIKATOR SASARAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA (%)
		2016	2016	
1	2	3	4	5
1	Jumlah sekolah kejuruan yang menyelenggarakan pendidikan berbasis pertanian, kehutanan dan kelautan	4	4	100
2	Persentase anak sekolah yang lulus melalui pendidikan kejuruan	100	100	100
RATA-RATA PENCAPAIAN KINERJA				100

Berdasarkan tabel perbandingan target dan realisasi kinerja diatas, rata-rata pencapaian sasaran kinerja sudah sangat baik, mencapai 100%. Hal ini dapat dilihat pada pencapaian realisasi indikator jumlah sekolah kejuruan yang menyelenggarakan pendidikan berbasis pertanian, kehutanan dan kelautan dapat direalisasikan sebesar 100% dan indikator persentase anak sekolah yang lulus melalui pendidikan kejuruan dapat direalisasikan sebesar 100%. Hal ini dapat disimpulkan bahwa pencapaian sasaran meningkatnya pendidikan kejuruan (skill) yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja dan sesuai dengan potensi lokal daerah sudah sangat baik.

b. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2106 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;

Tabel 3.13
Perbandingan Pencapaian Sasaran Tahun Sebelumnya

NO	INDIKATOR SASARAN	REALISASI				TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA (%)
		2012	2013	2014	2015	2016	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Jumlah sekolah kejuruan yang menyelenggarakan pendidikan berbasis pertanian, kehutanan dan kelautan	1	2	4	3	4	4	100
2	Persentase anak sekolah yang lulus melalui pendidikan kejuruan	93,10	99,08	98,89	100	100	100	100
RATA - RATA PENCAPAIAN								100

Dengan melihat tabel perbandingan pencapaian sasaran tahun sebelumnya, dapat diketahui bahwa pencapaian sasaran meningkatnya pendidikan kejuruan (skill) yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja dan sesuai dengan potensi lokal daerah, sudah sangat baik.



c. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Berdasarkan tabel evaluasi pencapaian sasaran meningkatnya pendidikan kejuruan (skill) yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja dan sesuai dengan potensi lokal daerah, dapat diketahui bahwa rata-rata tingkat pencapaian sebesar 100%. Dari indikator yang ditetapkan untuk mendukung pencapaian sasaran ini dapat dijelaskan bahwa di Kabupaten Bantaeng terdapat 4 Sekolah Kejuruan yang menyelenggarakan pendidikan berbasis pertanian, perikanan dan kelautan adalah sebagai berikut :

1. SMK Negeri 2 Bantaeng dengan program keahlian :
 - a. Nautika Kapal Penangkap Ikan
 - b. Rekayasa Perangkat Komputer
 - c. Agribisnis Perikanan
2. SMK Negeri 4 Bantaeng dengan program keahlian :
 - a. Agribisnis Tanaman Pangan dan Holtikultura
 - b. Agribisnis Tanaman Perkebunan
 - c. Agribisnis Pembibitan dan Kultur Jaringan
 - d. Administrasi Perkantoran
3. SMK Swasta Darul Ulum Panaikang dengan Program keahlian :
 - a. Agribisnis Tanaman Pangan dan Holtikultura
 - b. Akomodasi Perhotelan
4. SMK Swasta Alfurqan Ereng-ereng
 - a. Teknologi Pengolahan Hasil Pertanian

Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran meningkatnya pendidikan kejuruan (skill) yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja dan sesuai dengan potensi lokal daerah, maka beberapa program/kegiatan yang dilaksanakan di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantaeng adalah sebagai berikut :

1. Program Pendidikan Menengah memanfaatkan dana yang bersumber dari APBD Kabupaten Bantaeng Tahun 2016 sebesar Rp. 5.696.587.750,- atau 92,36% dari alokasi dana APBD sebesar Rp. 6.167.799.050,-. Terdapat pula penyediaan dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) jenjang Pendidikan Menengah sebagai bagian dari Program Pendidikan Gratis Propinsi Sulawesi Selatan dengan alokasi dana dari Pemerintah Propinsi sejumlah Rp. 2.111.819.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.933.203.500,- atau 92,00% dengan rincian:
 - a. Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga kegiatan ini dilaksanakan dengan memanfaatkan Dana APBD Tahun 2016 sebesar Rp. 150.000.000,- atau 100% dengan Alokasi Dana APBD;
 - b. Penyediaan Beasiswa bagi keluarga tidak mampu kegiatan ini dilaksanakan dengan memanfaatkan Dana APBD Tahun 2016 sebesar Rp. 69.586.000,- atau 100% dengan Alokasi dana APBD sebesar Rp. 69.586.000,-
 - c. Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang Pendidikan Menengah dan sederajat. Kegiatan ini dilaksanakan memanfaatkan dana APBD Tahun 2016 Rp. 978.919.450,- atau 76,56% dari alokasi dana APBD sebesar Rp. 1.278.612.250,-
 - d. Penyelenggaraan Ujian Sekolah Kegiatan ini dilaksanakan memanfaatkan dana APBD Tahun 2016 sebesar Rp. 838.227.800,- atau 100% dari alokasi yang disiapkan;
 - e. Uji kompetensi siswa berprestasi. Kegiatan ini dilaksanakan dengan capaian terselenggaranya lomba karya tulis ilmiah, lomba MIPAS, perkampungan



- bahasa Inggris dan Arab, lomba keterampilan siswa SMK serta Olimpiade Sains Nasional (OSN) masing-masing 75 orang memanfaatkan dana APBD Tahun 2016 sebesar Rp. 217.115.500,- atau 96,10% dari alokasi dana yang sebesar Rp. 225.935.500,-
- f. Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMA Negeri Kabupaten Bantaeng. Kegiatan ini dilaksanakan dengan memanfaatkan Dana APBD Tahun 2016 sebesar Rp. 1.187.371.500,-. Dana terealisasi sebesar Rp. 1.093.258.300,- atau 92,07%. Alokasi BOS APBD Propinsi untuk SMA Negeri sebesar Rp. 791.581.000,- dengan serapan Rp. 750.749.500,- atau 95,00%. Total realisasi BOS SMA Negeri (APBD Kab + APBD Prop) adalah Rp. 1.844.007.800,- atau 93,18% dari total anggaran Rp. 1.978.952.500,-
- g. Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMA Swasta Kabupaten Bantaeng. Kegiatan ini dilaksanakan dengan memanfaatkan Dana APBD Tahun 2016 sebesar Rp. 52.041.500,-. Dana terealisasi Rp. 52.039.500,- atau 99,99%. Alokasi BOS APBD Propinsi untuk SMA Swasta sebesar Rp. 26,871,000,- dengan serapan 100%. Total realisasi BOS SMA Swasta (APBD Kab + APBD Prop) adalah Rp. 78.910.500,- atau 99,99% dari total Anggaran Rp. 78.912.500,-.
- h. Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMK Negeri Kabupaten Bantaeng. Kegiatan ini dilaksanakan dengan memanfaatkan Dana APBD Tahun 2016 sebesar Rp. 937.272.000,- Dana terealisasi sebesar Rp. 908.383.800,- atau 97,00%. Alokasi BOS APBD Propinsi untuk SMK Negeri sebesar Rp. 624.848.000,- dengan serapan Rp. 494.281.500,- atau 79,10%. Total realisasi BOS SMK Negeri (APBD Kab + APBD Prop) adalah Rp. 1.402.665.300,- atau 90,00% dari total anggaran Rp. 1.562.120.000,-
- i. Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMK Swasta Kabupaten Bantaeng. Kegiatan ini dilaksanakan dengan memanfaatkan Dana APBD Tahun 2016 sebesar Rp. 216.715.500,- Dana terealisasi sebesar Rp. 216.715.500,- atau 100%. Total realisasi BOS SMK Swasta (APBD Kab + APBD Prop) adalah Rp. 333.761.500,- atau 99,00% dari total anggaran Rp. 337.261.500,-
- j. Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) MA Negeri Kabupaten Bantaeng. Kegiatan ini dilaksanakan dengan memanfaatkan Dana APBD Tahun 2016 sebesar Rp. 91.351.500,- Dana terealisasi sebesar Rp. 70.050.400,- atau 77,00%. Alokasi BOS APBD Propinsi untuk MA Negeri sebesar Rp. 60.901.000,- dengan serapan Rp. 60.901.000,- atau 100%. Total realisasi BOS MA Negeri (APBD Kab + APBD Prop) adalah Rp. 130.951.400,- atau 86,00% dari total anggaran Rp. 152.252.500,-
- k. Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) MA Swasta Kabupaten Bantaeng. Kegiatan ini dilaksanakan dengan memanfaatkan Dana APBD Tahun 2016 sebesar Rp. 730.608.000,- Dana terealisasi sebesar Rp. 713.214.000,- atau 98,00%. Alokasi BOS APBD Propinsi untuk MA Swasta sebesar Rp. 487.072.000,- dengan serapan Rp. 483.354.500,- atau 99,23%. Total realisasi BOS MA Swasta (APBD Kab + APBD Prop) adalah Rp. 1.196.568.500,- atau 98,26% dari total anggaran Rp. 1.217.680.000,-
2. Program Pendidikan Non Formal memanfaatkan dana yang bersumber dari APBD Kabupaten Bantaeng Tahun 2016 sebesar Rp. 1.280.451.761,- atau 99,25% dari alokasi dana APBD sebesar Rp. 1.290.181.500,- yang terdiri atas:
- a. Pembinaan kursus dan kelembagaan. Kegiatan ini dilaksanakan dengan memanfaatkan Dana APBD Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 156.211.500,- atau 96,65% dari Rp. 161.623.500,-



- b. Pengembangan Pendidikan Keaksaraan dengan capaian pendidikan keaksaraan pada 1000 warga belajar memanfaatkan dana APBD sebesar Rp. 736.175.261,- atau 99,96% dana yang disiapkan yaitu Rp. 736.497.000,-
- c. Pengembangan Pendidikan Kecakapan Hidup memanfaatkan dana APBD sebesar Rp. 37.295.000,- atau 96,16% dana yang disiapkan yaitu Rp. 38.785.000,-

Sasaran 5	<i>Meningkatnya sarana dan prasarana pendidikan berbasis IPTEK</i>
------------------	---

Tabel 3.14
Evaluasi Pencapaian Sasaran 5

NO	INDIKATOR SASARAN	REALISASI				TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA (%)
		2012	2013	2014	2015	2016	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Jumlah sarana Sekolah Pendidikan SMK yang dibangun		1	1	2	2	1	50%
RATA - RATA PENCAPAIAN								50%

Untuk mengukur sasaran meningkatnya sarana dan prasarana pendidikan berbasis IPTEK, indikator yang ditetapkan adalah **jumlah sarana Sekolah Pendidikan SMK yang dibangun**. Berdasarkan evaluasi pencapaian sasaran, rata-rata pencapaian realisasi indikator jumlah sarana SMK yang dibangun pada tahun 2016 ini dari target 2 sarana SMK, dapat direalisasikan hanya 1 sarana pendidikan SMK.

Adapun sarana pendidikan SMK yang dibangun adalah sarana pendidikan SMK IT Dongkokang dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 150.000.000,-.

Sasaran 6	<i>Tersedianya kawasan free WiFi pada kawasan strategis Ibu Kota Kecamatan</i>
------------------	---

Tabel 3.15
Evaluasi Pencapaian Sasaran 6

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TAHUN 2016		CAPAIAN KINERJA (%)	
				TARGET	REALISASI		
1	2	3	4	5	6	7	
6	Tersedianya kawasan free WiFi pada kawasan strategis Ibu Kota Kecamatan	1	Persentase kawasan strategis yang telah memiliki akses internet	%	75	9	12,5.
		2	Jumlah sarana jaringan internet yang telah dibangun di ibukota kecamatan	unit	8	1	12,5
Rata-Rata Tingkat Pencapaian						12,5	

Dilihat dari evaluasi pencapaian sasaran tersedianya kawasan free wifi pada kawasan strategis ibukota, dapat diketahui bahwa rata-rata tingkat

pencapaian kinerja masih kurang (12.5%). Dari indikator prosentase kawasan strategis yang memiliki akses internet dan jumlah sarana jaringan internet yang telah dibangun rata-rata pencapaiannya hanya 12%. Hal ini dapat dijelaskan bahwa kawasan strategis di Kabupaten Bantaeng yang dapat diakses jaringan internet terdapat di Kawasan Pantai Seruni Kecamatan Bantaeng, sedangkan kawasan strategis lainnya pada tahun 2016 belum tersedia disebabkan terbatasnya anggaran.

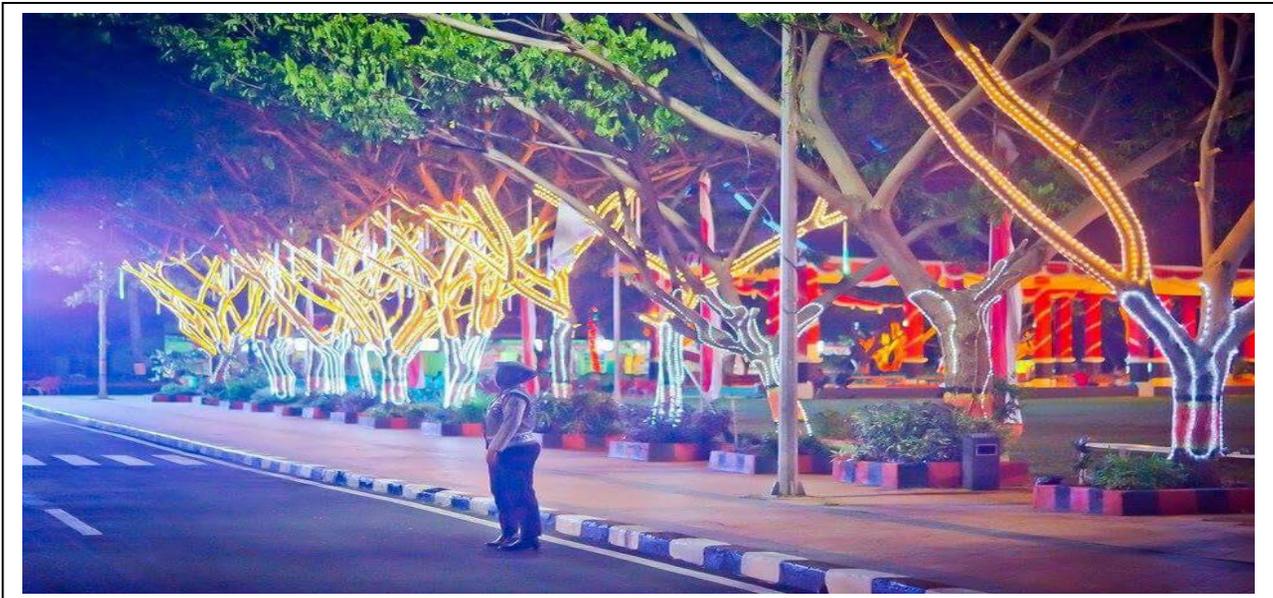
Dalam rangka memberikan pelayanan jaringan internet bagi masyarakat, Dinas Perhubungan dan Infokom Kabupaten Bantaeng telah mendapat bantuan dari Pemerintah Pusat berupa Mobil Internet yang setiap saat dapat diakses oleh masyarakat di kawasan strategis di Kabupaten

Bantaeng seperti Kawasan Tribun Pantai Seruni dan kawasan strategis lainnya. Namun keberadaan mobil Internet ini masih dibatasi waktu penggunaannya hanya sampai dengan jam 17.00, sehingga masyarakat belum terlayani secara maksimal. Oleh karena itu diawal Tahun 2017 ini melalui Dinas Infokom akan memprogramkan kegiatan "Desa DIGITAL", sehingga pelayanan jaringan internet bagi masyarakat dapat terpenuhi sampai ketinggian desa/kelurahan.

Foto kawasan pantai Seruni



Kuliner kawasan Pantai Seruni



Sasaran 7

Meningkatnya peran dan prestasi pemuda dalam keolahragaan

Optimalisasi pembinaan kepemudaan dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara dalam bentuk pengembangan kewirausahaan pemuda, diharapkan membangkitkan kesadaran pemuda akan potensi kewirausahaan yang mereka miliki, mendorong munculnya atau bangkitnya potensi kewirausahaan dan peran aktif pengembangan kewirausahaan pemuda, mengembangkan potensi, bakat, minat serta kemandirian berwirausaha bagi pemuda serta menciptakan lapangan pekerjaan sektor informal.

Penyelenggaraan pelayanan kepemudaan selama 4 (empat) tahun terakhir mengalami pertumbuhan yang membaik. Dilihat dari jumlah organisasi pemuda dan jumlah kegiatan juga mengalami peningkatan. Pelayanan kepemudaan adalah upaya pembinaan dini terhadap pemuda melalui pendekatan



institusional baik melalui institusi pendidikan, sekolah dan pramuka maupun institusi kepemudaan seperti KNPI dan Karang Taruna.

Adapun indikator yang ditetapkan dalam mengukur pencapaian sasaran meningkatnya peran dan prestasi pemuda dalam keolahragaan terdiri dari; persentase tersedianya sarana dan prasarana olahraga dalam meningkatkan prestasi olahraga, jumlah pemuda yang meraih prestasi olahraga dalam kegiatan olahraga tingkat regional dan nasional dan tersedianya gelanggang olahraga/balai remaja, jumlah organisasi kepemudaan, jumlah prestasi olahraga yang diraih di tingkat regional, nasional dan internasional. Adapun pencapaian indikator kinerja optimalisasi pembinaan kepemudaan dan keolahragaan adalah sebagai berikut:

a. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2016 ;

Tabel 3.16
Perbandingan Target dan Realisasi Capaian Sasaran 7

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TAHUN 2016		CAPAIAN KINERJA (%)	
				TARGET	REALISASI		
1	2	3	4	5	6	7	
7	Meningkatnya peran dan prestasi pemuda dalam keolahragaan.	1	Persentase tersedianya sarana dan prasarana olahraga dalam meningkatkan prestasi olahraga	%	75	114	142.50
		2	Jumlah pemuda yang meraih prestasi olahraga dalam kegiatan olahraga tingkat regional dan nasional	orang	120	74	61.66
		3	Jumlah prestasi olahraga yang diraih di tingkat regional, nasional dan internasional	cabor	12	4	33.33
Rata-Rata Tingkat Pencapaian						73.16	

Dari tabel evaluasi pencapaian sasaran meningkatnya peran dan prestasi pemuda, dapat diketahui rata-rata tingkat pencapaian sebesar 73.16%. Dari 3 (tiga) indikator yang ditetapkan untuk mendukung pencapaian sasaran, ditetapkan indikator kinerja utama yaitu persentase tersedianya sarana dan prasarana olahraga dalam meningkatkan prestasi olahraga dan jumlah pemuda yang meraih prestasi olahraga dalam kegiatan olahraga tingkat regional dan nasional. Dari indikator-indikator tersebut terdapat indikator presentase tersedianya sarana dan prasarana olahraga yang realisasinya sudah sangat baik sebesar 142.50%. Hal ini disebabkan beberapa sarana dan prasarana olahraga yang dibangun sudah cukup baik memenuhi standar sarana olahraga yang memadai. Namun dalam pencapaian indikator jumlah pemuda yang meraih prestasi olahraga masih perlu peningkatan. Dari target 120 atlit olahraga, atlit yang berprestasi hanya dapat direalisasikan sebanyak 74 orang dari 4 cabang olahraga yakni Pencak Silat, Panahan, Renang dan Kempo. Sedangkan jumlah cabang olahraga berprestasi diluar kabupaten Bantaeng, masih belum maksimal. dari 12 cabang olahraga hanya dapat direalisasikan sebanyak 4 cabang olahraga yang direalisasikan.



- b. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2106 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;

Tabel 3.17
Perbandingan Realisasi Capaian Sasaran 7 Tahun-Tahun Sebelumnya

NO	INDIKATOR SASARAN	REALISASI				TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA (%)
		2012	2013	2014	2015	2016	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Persentase tersedianya sarana dan prasarana olahraga dalam meningkatkan prestasi olahraga				4	75	114	142.50
2	Jumlah pemuda yang meraih prestasi olahraga dalam kegiatan olahraga tingkat regional dan nasional				43	120	74	61.66
3	Jumlah prestasi olahraga yang diraih di tingkat regional, nasional dan internasional				4	12	4	33.33
RATA – RATA PENCAPAIAN								160.55

Dari tabel perbandingan realisasi capaian sasaran optimalisasi meningkatnya peran dan prestasi pemuda dalam keolahragaan pada tahun 2015 diperoleh gambaran bahwa terjadi peningkatan pencapaian kinerja.

- c. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Selain aspek kepemudaan, arah kebijakan pembangunan bidang pemuda dan olahraga meliputi aktifitas pemuda dalam pembangunan keolahragaan, peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana olahraga, peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga keolahragaan serta peningkatan masyarakat dan prestasi olahraga.

Pembangunan bidang pemuda dan olahraga diarahkan pada terwujudnya generasi yang kuat, sehat, berprestasi dan profesional; terwujudnya generasi muda yang memiliki kepedulian dan partisipasi yang tinggi dalam mewujudkan cita-cita perjuangan bangsa serta terciptanya generasi yang memiliki jiwa kejuangan dan semangat patriotisme yang tinggi.

Pembinaan atlet prestasi daerah mampu memberikan kesempatan sekaligus penghargaan kepada atlet/olahragawan yang berbakat dan potensial dalam salah satu cabang olahraga untuk meningkatkan prestasinya dan mempersiapkan atlet/olahragawan berprestasi untuk dapat dipilih ke tingkat yang lebih tinggi baik regional maupun internasional.

Tabel 3.18
Jumlah Cabang Olahraga dan Jumlah Atlet Kabupaten Bantaeng

No	Kota/Kabupaten	Jumlah				
		Cabor	Atlet Putra	Atlet Putri	Pelatih	Ket
1	Kabupaten Bantaeng	30	259	185	91	



Tabel 3.19
Cabang Olahraga Unggulan Kabupaten Bantaeng

No	Nama Cabor	Jumlah Atlet			Prestasi				Ket
		Putra	Putri	Total	Kab	Prop	Nas	Inter	
1	Pencak Silat	16	12	28	v	v	V	V	
2	Panahan	4	4	8	v	v	V		
3	Renang	8	6	14	v	v			
4	Kempo	15	9	24	v				
	Jumlah	43	31	74					

Selain itu, penyediaan sarana dan prasarana dalam menyongsong pelaksanaan kegiatan event lokal, nasional maupun internasional menjadi prioritas utama dan dibarengi dengan penataan penyelenggaraan kompetisi olahraga secara periodik dan terarah.

Tabel 3.20
Data Sarana dan Prasarana Olahraga Tahun 2016

No	Jenis Sarana/Prasarana	Jumlah
1.	Kolam Renang	2
2.	Lapangan Bola	12
3.	Lapangan Tenis	8
4.	Lapangan Basket	19
5.	Lapangan Takraw	4
6.	Lapangan Voli	18
7.	Lapangan Bilyard	2
8.	GOR Futsal Delima	1
9.	Lapangan Tembak/Panahan	3
10.	Arena Road Race	1
11.	Arena Dayung	1
12.	Arena Panjat Tebing	3
13.	GOR Mallilingi	
14.	- Arena Pencak Silat	1
	- Lapangan Bulutangkis	3
	- Tenis Meja	10
	- Lapangan Volly	1
15.	Stadion Lamalaka	
	- Sepakbola	1
	- Atletik	1
	- Panahan	
	Sport Center Seruni	
	- Sepak Takrow	4
	- Bola Volly	4
	- Bola Volly Pasir	2
	- Bola Basket	1
	- Futsal	1



Ketersediaan sarana dan prasarana olahraga dalam jumlah yang cukup akan mampu mendorong atlet berbakat untuk berlatih maksimal yang akan mendukung pembinaan olahraga di Sulawesi Selatan dan Nasional.

Adapun program dan kegiatan yang menunjang pencapaian sasaran optimalisasi pembinaan kepemudaan dan keolahragaan tahun 2016 adalah sebagai berikut ;

1. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan memanfaatkan dana yang bersumber dari APBD Kabupaten Bantaeng Tahun 2016 sebesar Rp. 3.668.658.200,- atau 94,53% dari alokasi dana APBD sebesar Rp. 3.881.120.750,- dengan rincian:
 - a. Pembinaan Organisasi Kepemudaan memanfaatkan dan APBD Tahun 2016 Rp.388.340.000,- atau 94,75% dari Alokasi Dana APBD sebesar Rp. 409.846.000,-
 - b. Pendidikan dan Pelatihan Dasar Kepemimpinan dilaksanakan dengan capaian terbentuk dan terlaksananya Tim Paskibra memanfaatkan dana APBD Tahun 2016 Rp.2.025.411.050,- atau 93,72% dari alokasi dana APBD sebesar Rp. 2.161.199.850,-, serta;
 - c. Fasilitasi Pembinaan Kreatifitas Kepemudaan memanfaatkan dana APBD Tahun 2016 Rp. 1.254.907.150,- atau 95,79% dari alokasi dana APBD sebesar Rp. 1.310.074.900,-
2. Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga ;
 - a. Pembinaan Manajemen Organisasi Olahraga memanfaatkan dana yang bersumber dari APBD Tahun 2016 sebesar Rp. 32.404.650,- atau 85,80% dari alokasi dana APBD sebesar Rp. 37.769.650,-
3. Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga
 - a. Program Pembinaan dan pemsarakatan olahraga dalam bentuk penyelenggaraan kompetisi olahraga dalam rangka pembinaan atlet berbakat/berprestasi memanfaatkan dana yang bersumber dari APBD Kabupaten Bantaeng Tahun 2016 sebesar Rp.945.943.100,- atau 79,40% dari alokasi dana APBD sebesar Rp. 1.191.459.400,- dengan rincian:Peningkatan Kesegaran Jasmani dan Rekreasi. Kegiatan ini dilaksanakan dengan memanfaatkan dana Rp. 72.440.000,- atau 97,05% dari alokasi sebesar Rp. 74.645.000,-
 - b. Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga dengan memanfaatkan dana Rp. 721.244.500,- atau 86,56% dari alokasi sebesar Rp. 833.226.500,-
 - c. Pemberian Penghargaan Bagi Insan Olahraga yang Berdedikasi dan Berprestasi. Kegiatan ini dilaksanakan dengan memanfaatkan dana sebesar Rp. 57.636.500,- atau 43,52% dari alokasi dana APBD sebesar Rp. 132.444.000,-
 - d. Pembinaan dan Pembibitan Olahragawan Unggulan Daerah. Kegiatan ini dilaksanakan dengan memanfaatkan dana APBD sebesar Rp. 46.649.600,- atau 45,92% dari aloksi dana APBD sebesar Rp. 101.594.400,-
 - e. Pengembangan Olahraga Rekreasi. Kegiatan ini dilaksanakan dengan memanfaatkan dana APBD sebesar Rp. 47.972.500,- atau 96,82% dari alokasi dana APBD sebesar Rp. 49.549.500,-
4. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga
 - a. Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga kegiatan ini dilaksanakan dengan memanfaatkan dana APBD sebesar Rp. 642.115.900 atau 99,92 % dari alokasi dana sebesar Rp. 642.616.650,-



2017

- b. Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olahraga kegiatan ini dilaksanakan dengan memanfaatkan dana APBD sebesar Rp. 787.333.700,- atau 97,79% dari alokasi dana sebesar Rp. 805.149.100,-

Sasaran 8	<i>Meningkatnya pelayanan kesehatan berdasarkan zonasi wilayah untuk peningkatan layanan kesehatan ibu dan anak serta gizi</i>
------------------	---

Dalam mengukur keberhasilan sasaran meningkatnya pelayanan kesehatan khususnya layanan kesehatan ibu dan anak serta gizi, ditetapkan 5 (lima) indikator kinerja, yaitu persentase peningkatan pelayanan kesehatan dasar, persentase peningkatan pelayanan kesehatan gigi, mulut serta kesehatan pra sekolah dan remaja, **persentase pelayanan kesehatan ibu dan anak**, persentase penyediaan pelayanan sarana dan prasarana kesehatan dan **peningkatan status gizi masyarakat**. Dari 5 (lima) indikator kinerja tersebut, 2(dua) indikator merupakan indikator kinerja utama. Adapun penjelasan terhadap pencapaian sasaran meningkatnya pelayanan kesehatan khususnya layanan kesehatan ibu dan anak serta gizi adalah sebagai berikut :

- a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2016

Tabel 3.21
Perbandingan Target dan Realisasi Capaian Sasaran 8

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TAHUN 2016		CAPAIAN KINERJA (%)	
				TARGET	REALISASI		
1	2	3	4	5	6	7	
8	<i>Meningkatnya pelayanan kesehatan berdasarkan zonasi wilayah untuk peningkatan layanan kesehatan ibu dan anak serta gizi</i>	1	Persentase peningkatan pelayanan kesehatan dasar	%	100	100	100
		2	Persentase peningkatan pelayanan kesehatan gigi, mulut serta kesehatan pra sekolah dan remaja	%	80	28	39,4
		3	Persentase peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan anak	%	89	88.98	99.97
		4	Persentase peningkatan penyediaan pelayanan sarana dan prasarana kesehatan	%	75	71.80	95.73
		5	Peningkatan status gizi masyarakat	%	93.33	96.61	103,51
Rata-Rata Tingkat Pencapaian						87.72	

Berdasarkan tabel perbandingan target dan realisasi capaian sasaran meningkatnya pelayanan kesehatan khususnya layanan kesehatan ibu dan anak serta gizi, rata-rata pencapaian 5 (lima) indikator sudah baik. Hal ini dapat dilihat pada pencapaian indikator kinerja **persentase peningkatan pelayanan kesehatan dasar** dapat direalisasikan sebesar 100%, indikator **persentase peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan anak** dapat dicapai sebesar 88,98%, indikator peningkatan status gizi masyarakat realisasinya dapat dicapai sebesar 96.61%. Sedangkan pencapaian indikator persentase peningkatan pelayanan kesehatan gigi, mulut serta kesehatan prasekolah dan remaja hanya dapat direalisasikan sebesar 28%. Demikian pula halnya dengan pencapaian indikator persentase peningkatan penyediaan pelayanan sarana dan prasarana kesehatan, ditargetkan sebesar 75%, namun hanya dapat direalisasikan sebesar 71.80%. Secara



2017

keseluruhan rata-rata tingkat pencapaian kinerja sudah baik, yakni sebesar 87,72%.

b. *Perbandingan antara capaian kinerja tahun 2016 dengan tahun 2015 dan tahun sebelumnya*

Tabel 3.22
Perbandingan realisasi capaian kinerja Tahun ini dengan Tahun sebelumnya

NO	INDIKATOR SASARAN	REALISASI				TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA (%)
		2012	2013	2014	2015	2016	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Persentase peningkatan pelayanan kesehatan dasar	100	100	100	100	100	100	100
2	Persentase peningkatan pelayanan kesehatan gigi, mulut serta kesehatan pra sekolah dan remaja	-	-	69,00	80	80	28	39,4
3	Persentase peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan anak	-	-	88,45	89,17	89	88,98	99,97
4	Persentase peningkatan penyediaan pelayanan sarana dan prasarana kesehatan	-	-	69,32	80	75	71,80	95,73
5	Meningkatnya status gizi masyarakat	-	-	102,66	75	93,33	96,61	103,51
RATA – RATA PENCAPAIAN TAHUN 2016								87,72

Berdasarkan tabel realisasi capaian kinerja tahun ini dibandingkan dengan tahun tahun sebelumnya, dapat diketahui bahwa secara keseluruhan pencapaian dari tahun ke tahun semakin baik. Hal ini dapat dilihat pada realisasi kinerja indikator persentase peningkatan pelayanan kesehatan dasar dari tahun 2015 sampai tahun 2016 ini tetap mencapai 100%.

Persentase peningkatan pelayanan kesehatan dasar menggunakan indikator persentase masyarakat miskin yang mendapat pelayanan kesehatan. Pada tahun 2016 ini persentase masyarakat miskin yang mendapatkan pelayanan kesehatan sebanyak 42.572 jiwa,, dapat direalisasikan sebanyak 42.572 jiwa atau sebesar 100%. Begitu pula persentase masyarakat miskin yang mendapat pelayanan kesehatan tahun 2015 yakni 57.330 jiwa dapat direalisasikan sebanyak 57.330 jiwa masyarakat miskin atau 100 % dan pada tahun 2014 juga masyarakat miskin yang mendapat pelayanan kesehatan sebesar 55.299 jiwa dari 55.299 jiwa masyarakat miskin yang ada atau 100 %. Indikator menunjukkan pencapaian yang telah memenuhi dari target Dinas Kesehatan 100 %.

Indikator yang lain adalah persentase sarana kesehatan dengan kemampuan pelayanan gawat darurat yang dapat diakses masyarakat yakni 13 Puskesmas dari 13 Puskesmas yang ada atau 100 % di tahun 2015 s/d 2016 dan 2014 terdapat 12 Puskesmas mempunyai pelayanan gadar yang dapat diakses masyarakat dari 12 Puskesmas. Indikator menunjukkan pencapaian yang telah memenuhi dari target Dinas Kesehatan 100 %.



2017

Tabel 3.23
Persentase Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dasar

NO	INDIKATOR	Satuan	Target	Realisasi (2014)	Realisasi (2015)	Realisasi (2015)
1	2	3	4	5	6	7
1	Persentase masyarakat miskin yang mendapat pelayanan kesehatan	%	100	100	100	100
2	Persentase sarana kesehatan dengan kemampuan pelayanan gawat darurat yang dapat diakses masyarakat	%	100	100	100	100

Indikator Persentase murid SD/MI yang mendapat pemeriksaan gigi dan mulut di tahun 2016 dapat direalisasikan sebesar 28% dari target sebesar 80%. Pada tahun 2015 dan 2014 mencapai 3.998 dari 10.139 siswa yang dipantau (39,4 %), dimana target Dinas Kesehatan sebesar 100% untuk indikator ini belum tercapai sehingga perlu dimaksimalkan pelayanan petugas kesehatan pada indikator ini.

Untuk indikator keberhasilan peningkatan kesehatan ibu dan anak, Dinas Kesehatan sebagai *leading sector*, menetapkan 6 indikator terdiri dari:

1. Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan;
2. Cakupan kunjungan ibu hamil;
3. Cakupan kunjungan bayi ;
4. Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan;
5. Persentase bayi yang mendapat ASI Eksekutif dan
6. Persentase ibu hamil resiko tinggi dengan komplikasi yang dirujuk mendapat penanganan.

Tabel 3.24
Persentase peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan anak

NO	INDIKATOR SASARAN	REALISASI				TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA (%)
		2011	2012	2013	2014	2016	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8	4+5+6+8/4
1	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	-	95.22	98,1	93,1	90	91.8	94.55
2	Cakupan kunjungan ibu hamil	-	91.23	101,3	95,8	95	90.4	94.68
3	Cakupan kunjungan bayi	-	94.45	104,4	100	89	97.2	99.01
4	Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan	-	100	100	100	100	100	100
5	Persentase bayi yang mendapat ASI eksklusif	-	96.98	68,1	64,9	75	65.2	73.79
6	Persentase ibu hamil resiko tinggi dengan komplikasi yang dirujuk mendapatkan penanganan	-	50.3	100	100	85	89.2	84.87



- a. Indikator Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan tahun 2016 mencapai 3.185 persalinan dari 3.468 persalinan atau 91.8%. Pada tahun 2015 mencapai 3.227 persalinan dari 3.468 persalinan atau 93,1 % dan pada tahun 2014 mencapai 3.242 persalinan dari 3.305 persalinan atau 98,1%. Hal ini menunjukkan target dari Dinas Kesehatan 90 % telah dicapai.
- b. Indikator cakupan kunjungan ibu hamil pada tahun 2016 yakni 3.291 dari 3.639 atau 90.4%. Pada tahun 2015 yakni 3.487 dari 3.639 bumil yang ada atau 95,8 % sedang di tahun 2014 sebanyak 101,3% atau 3.402 kunjungan bumil dari 3.358 bumil yang ada. Hal ini telah mencapai target Dinas Kesehatan sebesar 95 %.
- c. Indikator kunjungan bayi di Tahun 2016 yakni 3.216 dari 3.31. kunjungan atau sebesar 97.2%. Pada Tahun 2015 yakni 3.535 dari 3.535 bayi atau 100 % dan pada tahun 2014 kunjungan mencapai 3.187 dari 3.054 bayi (104,4 %). Ini juga menunjukkan target tahun 2016 sebesar 89 % telah tercapai.
- d. Indikator Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan pada tahun 2016 tidak adanya kasus gizi buruk sehingga kinerja dibidang ini mencapai 100%. Pada 2014 dan 2015 juga tidak adanya kasus gizi buruk menunjukkan kinerja Kesehatan dibidang ini telah mencapai 100 % sehingga telah melampaui target Dinas Kesehatan 90 %.
- e. Indikator Persentase bayi yang mendapat ASI eksklusif pada Tahun 2016 ini sebanyak 981 bayi dari 1.504 bayi yang ada atau sebesar 65.2%. Pada Tahun 2015 yakni 976 bayi dari 1.504 bayi yang ada atau 64,9 % dan 944 bayi dari 1.387 bayi yang ada atau 68,1 % pada tahun 2014. Indikator menunjukkan pencapaian yang belum memenuhi dari target Dinas Kesehatan 75 %. Hal ini diakibatkan tingkat kesadaran ibu menyusui yang belum maksimal mengenai pentingnya ASI Eksklusif disamping trend wanita yang berkarier juga mempunyai kontribusi pada capaian yang ada.
- f. Indikator Persentase ibu hamil resiko tinggi dengan komplikasi yang dirujuk mendapatkan penanganan pada Tahun 2016 ini sebanyak 487 dari 546 bumil resti atau sebesar 89.2%. Pada Tahun 2015 yakni 432 dari 432 bumil resti atau 100 % juga di tahun 2014 yakni 411 dari 411 bumil resti atau 100 %. Indikator menunjukkan pencapaian yang telah memenuhi dari target Dinas Kesehatan 85 %.

Adapun keberhasilan indikator peningkatan penyediaan pelayanan sarana dan prasarana kesehatan, Dinas Kesehatan menetapkan 4 (empat) indikator terdiri dari :

1. Persentase keluarga yang menghuni rumah yang memenuhi syarat kesehatan;
2. Jumlah KK yang memiliki akses terhadap air bersih;
3. Persentase keluarga yang menggunakan jamban memenuhi syarat kesehatan;
4. Persentase tempat-tempat umum yang memenuhi syarat kesehatan.



2017

Tabel 3.25

Indikator keberhasilan meningkatnya penyediaan pelayanan sarana dan prasarana kesehatan

NO	INDIKATOR	REALISASI			TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
		2013	2014	2015	2016	2016	3+4+5+7/4
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Persentase keluarga yang menghuni rumah yang memenuhi syarat kesehatan	69.9	97	71,9	75	71.8	77.65
2	Jumlah KK yang memiliki akses terhadap air bersih	84.8	83,65	86,8	90	85.7	85.23
3	Persentase keluarga menggunakan jamban memenuhi syarat kesehatan	75.1	77	72,4	75	78.3	75.7
4	Persentase tempat-tempat umum yang memenuhi syarat kesehatan	47.5	74,5	63	74.5	64.8	62.45

- Indikator persentase keluarga yang menghuni rumah yang memenuhi syarat kesehatan tahun 2016 mencapai 34.814 rumah yang layak kesehatan dari 48.430 rumah yang dibina atau 71,2 %.
- Indikator Jumlah KK yang memiliki akses terhadap air bersih tahun 2016 yakni 157.251 jiwa dari jumlah penduduk 183.386 jiwa atau 85,7 %, Indikator ini menunjukkan telah mencapai target Dinas Kesehatan yakni 90 %.
- Indikator Persentase keluarga menggunakan jamban memenuhi syarat kesehatan yakni 143.588 jiwa dari 183.386 jiwa atau 78,3 % Hasil capaian target Dinas Kesehatan 75 %.
- Indikator Persentase tempat-tempat umum yang memenuhi syarat kesehatan yakni 175 dari 270 TTU yang ada atau 64.8 % indikator menunjukkan pencapaian belum memenuhi dari target Dinas Kesehatan 74.5 %.

Untuk meningkatkan cakupan status gizi masyarakat, Dinas Kesehatan menetapkan 3 indikator keberhasilan pencapaian kinerja, terdiri dari :

- Cakupan balita mendapat kapsul vitamin A sebanyak 2 kali pertahun;
- Cakupan ibu hamil mendapat tablet tambah darah (FE); dan
- Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada bayi BGM.

Tabel 3.26
Cakupan Status Gizi Masyarakat

NO	INDIKATOR	REALISASI			TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
		2013	2014	2015	2016	2016	2016
1	2	3	4	5	6	7	4+5+7/3
1	Cakupan balita mendapat kapsul vitamin A sebanyak 2 kali pertahun		93,7	86,6	90	93.97	91.42
2	Cakupan ibu hamil mendapat tablet tambah darah (FE)		96,6	95,8	95.85	95.85	96.08
3	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada bayi BGM		100	100	100	100	100

- Indikator Cakupan balita mendapat kapsul Vitamin A sebanyak 2 kali pertahun pada tahun 2016 sebanyak 17.088 dari 18.184 balita atau sebesar 93.97%.



Pada 2015 sebesar 86,6 % (17.051 balita dari jumlah 19,689 balita keseluruhan) sedang pada tahun 2014 yakni 93,7 % (16.909 balita dari jumlah 18.046 balita yang ada). Ini menunjukkan target Dinas Kesehatan 90 % belum dapat dicapai, dimana petugas kesehatan perlu memaksimalkan upaya pencapaian target.

- b. Indikator cakupan ibu hamil mendapat tablet tambah darah (Fe) pada tahun 2016 sebanyak 3.488 dari 3.639 bumil atau 95.85%. Pada 2015 yakni 3.487 ibu hamil mendapatkan tablet Fe dari 3.639 ibu hamil yang ada (95,8 %) dan pada tahun 2014 t merdapat 3.246 ibu hamil memperoleh tablet Fe dari 3.358 ibu hamil yang ada (96,6 %).
- c. Indicator cakupan pemberian makanan pendamping ASI (MP ASI) pada bayi Bawah Garis Merah (BGM) tahun 2016 sebanyak 320 penderita dari 320 penderita atau 100%. Pada 2015sebesar 188 bayi dari 188 bayi BGM (100 %) dan tahun 2014 sebesar 198 bayi dari 198 b yi BGM (100 %). Ini menunjukkan target 100 % dari Dinas Kesehatan telah dapat diraih

Adapun beberapa program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2016 untuk mendukung pencapaian sasaran ini adalah

1. Program Upaya Kesehatan Masyarakat dianggarkan sebesar Rp. 19.237.391.200,- yang direalisasikan sebesar Rp. 17.298.467.490,- atau sebesar 89.92%
2. Program Pengawasan Obat dan Makanan dianggarkan sebesar Rp. 39.252.000 dapat direalisasikan sebesar Rp. 29.742.000,- atau 75.77%
3. Program Perbaikan Gizi Masyarakat yang dianggarkan sebesar Rp.573.424.000,- dan realisasinya sebesar Rp. 568.623.610,- atau 99.16%
4. Program Sosialisasi Kebijakan Lingkungan Sehat dianggarkan sebanyak 137.745.750,- realisasinya sebesar Rp. 110.610.750,- atau 80.30%.
5. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dianggarkan sebanyak Rp. 2.130.691.600,- dapat direalisasikan sebesar Rp. 2.070.996.000,- atau 97.20%.
6. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan dianggarkan sebanyak Rp. 148.874.000,- direalisasikan sebanyak Rp. 117.205.500,- atau 78.73%.
7. Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin dianggarkan sebanyak Rp. 62.150.000,- dapat direalisasikan sebesar Rp. 60.363.000,- atau sebesar 97.13%
8. Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana Puskesmas/Pustu dan jaringannya dianggarkan sebanyak Rp. 12.695.480.854,- direalisasikan sebesar Rp. 12.548.746.639,- atau sebesar 98.84%.
9. Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan dianggarkan sebanyak Rp. 5.067.636.000,- direalisasikan sebesar Rp.3.977.344.000,- atau sebesar 78.49%.
10. Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak dianggarkan sebesar Rp. 32.295.000,- direalisasikan sebesar Rp. 32.295.000,- atau sebesar 100%.

Untuk meningkatkan pelayanan kesehatan ibu dan anak, di Kabupaten Bantaeng telah membuat Inovasi di Bidang Kesehatan yaitu *Health Mobile Service* (BSB) dengan keberadaan sumber daya sebanyak 12 unit Mobil operasional, 20 tenaga dokter, 26 tenaga perawat sehingga pelayanan rujukan yang emergency dapat tercover sedini mungkin (*quick responsif*) sehingga angka kematian ibu, anak dan balita dapat diminimalisir mungkin.

Hasil yang dicapai dengan adanya Brigade Siaga Bencana di Kabupaten Bantaeng adalah :

1. Seluruh masyarakat telah terakses pelayanan kesehatan
2. Kasus-kasus risiko tinggi ibu bersalin menurun secara signifikan

3. Terbentuk sinergitas antara para stakeholder (SKPD, POLRI, Tagana, dll)

4. Peningkatan keterampilan petugas kegawatdaruratan

Telah tercipta suatu kondisi yang menjamin rasa aman bagi masyarakat khususnya dalam penanggulangan kegawatdaruratan sehari-hari maupun saat bencana jika ada.

Foto-foto Personil Kesehatan yang bertugas di Brigade Siaga Bencana



ARMADA BRIGADE SIAGA BENCANA

ARMADA BSB KHUSUS AMBULANCE



ARMADA BSB KHUSUS DAMKAR



Sasaran 9

Terwujudnya pola hidup bersih dan sehat berbasis pemberdayaan sebagai upaya preventif di bidang kesehatan

Untuk mengukur keberhasilan sasaran terwujudnya pola hidup bersih dan sehat berbasis pemberdayaan sebagai upaya preventif di bidang kesehatan, ditetapkan 3 (tiga) indikator sasaran terdiri dari ;

1. Persentase pencegahan dan pemberantasan penyakit;
2. ***Persentase cakupan peningkatan status gizi masyarakat***; dan
3. Persentase peningkatan promosi kesehatan dan pembinaan peran serta masyarakat.

Sedangkan indikator kinerja utama dalam pencapaian sasaran ditetapkan adalah persentase cakupan peningkatan status gizi masyarakat berdasarkan indikator sasaran yang ada dalam RPJMD Kabupaten Bantaeng tahun 2013-2018. Adapun penjelasan pencapaian kinerja sasaran ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2016

Tabel 3.27

Perbandingan target dan realisasi kinerja pencapaian sasaran 9 tahun 2016

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TAHUN 2016		CAPAIAN KINERJA (%)	
				TARGET	REALISASI		
1	2	3	4	5	6	7	
9	<i>Merwujudnya pola hidup bersih dan sehat berbasis pemberdayaan sebagai upaya preventif di bidang kesehatan</i>	1	Persentase pencegahan dan pemberantasan penyakit	%	86.44	84.99	98.32
2		Persentase cakupan peningkatan status gizi masyarakat	%	93,33	96.61	103,5	
3		Persentase peningkatan promosi kesehatan dan pembinaan peran serta masyarakat	%	82.5	83.4	101.1	



2017

Rata-Rata Tingkat Pencapaian

100.97

Melihat tabel perbandingan target dan realisasi tahun 2016 pencapaian sasaran mewujudkan pola hidup bersih dan sehat berbasis pemberdayaan sebagai upaya preventif dibidang kesehatan, dapat diketahui rata-rata tingkat pencapaian kinerja yang sangat baik sebesar 100.97%. Tingginya capaian kinerja sasaran ini dipengaruhi oleh pencapaian indikator sasaran yang rata-rata bernilai baik serta dukungan program dan kegiatan yang memberikan kesadaran kepada masyarakat untuk hidup sehat.

b. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2016 dengan tahun-tahun sebelumnya

Tabel 3.28
Perbandingan Capaian Realisasi Tahun 2016 dengan tahun-tahun sebelumnya

NO	INDIKATOR SASARAN	REALISASI				TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA (%)
		2012	2013	2014	2015	2016	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 6+8/2
1	Persentase pencegahan dan pemberantasan penyakit				83.21	86.44	84.99	84.82
2	Persentase cakupan peningkatan status gizi masyarakat				96.77	93,33	96.61	96.69
3	Persentase peningkatan promosi kesehatan dan pembinaan peran serta masyarakat				81.87	82.5	83.4	82.64
RATA - RATA PENCAPAIAN								88.05

Dari capaian realisasi tahun 2016 dibandingkan dengan tahun tahun sebelumnya rata-rata capaian kinerja sebesar 88.05%. Adapun masing-masing indikator sasaran mewujudkan pola hidup bersih dan sehat berbasis pemberdayaan sebagai upaya preventif dibidang kesehatan dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.29
Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit

NO	INDIKATOR	REALISASI				CAPAIAN KINERJA
		2013	2014	2015	2016	2015
1	2	3	4	5	6	7=4+5+6/3
1	Persentase desa/kel yang mencapai UCI		100	100	100	100
2	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit dan penemuan pasien TB BTA positif		100	80,5	88.4	89.63
3	Cakupan penemuan dan penanganan penderita DBD yang ditangani		100	100	100	100
4	Meningkatnya persentase penanganan desa/kel yang mengalami KLB <24 jam		100	100	100	100
5	Cakupan balita dengan pneumonia yang ditangani		100	100	100	100
6	Persentase rumah/bangunan bebas jentik		24,3	89,3	89.5	67.7
7	Persentase penderita kusta yang selesai berobat		100	93,9	100	97.97
8	Angka penderita HIV- AIDS		-	2	2	133.33



- a. Indikator Persentase desa/kel yang mencapai UCI yakni 67 Desa/Kel dari 67 Desa/Kel di Tahun 2014, 2015 dan 2016. Indikator menunjukkan pencapaian yang telah memenuhi dari target Dinas Kesehatan 100 %.
- b. Indikator Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit dan penemuan pasien TB BTA positif tahun 2016 terdapat 129 kasus dari 146 penderita atau sebesar 84.4%. Pada Tahun 2015 sebanyak 182 dari 226 penderita atau 80,5 % pada tahun 2015 sedangkan pada tahun 2014 pasien TB BTA positif yakni 227 dari 227 penderita atau 100 %. Indikator menunjukkan pencapaian yang belum memenuhi dari target Dinas Kesehatan 100 %. Hal ini di akibatkan penderita TB terkadang jika merasa telah sehat mereka menghentikan konsumsi obat secara sepihak dengan mengabaikan jangka waktu pengobatan seharusnya. Akibatnya penyakit TB yang di derita belum sembuh.
- c. Indikator Cakupan penemuan dan penanganan penderita DBD tahun Tahun 2016 sebanyak 168 penderita. Pada 2015 yakni 79 dari 79 penderita atau 100 % dan pada tahun 2014 yakni 169 kasus dari 169 kasus yang ada (100%). Indikator menunjukkan pencapaian yang telah memenuhi dari target Dinas Kesehatan 100 %.
- d. Indikator persentase penanganan desa/kel yang mengalami KLB <24 jam tahun 2015, yakni 3 desa dari 3 desa yang mengalami KLB atau 100 % sedang terdapat 2 desa yang tertangani dari seluruh desa yang mengalami KLB sebanyak 2 Desa (100 %). Indikator menunjukkan pencapaian yang telah memenuhi dari target Dinas Kesehatan 100 %.
- e. Indikator Cakupan balita dengan pneumonia yang ditangani pada tahun 2016 sebanyak 75 penderita. Pada Tahun 2015 lalu yakni 218 dari 218 penderita atau 100 % di Tahun 2015 dan pada tahun 2014 cakupan yang ditangani 255 kasus dari 255 kasus yang ada. Indikator menunjukkan pencapaian yang telah memenuhi dari target Dinas Kesehatan 100 %.
- f. Indikator persentase rumah/bangunan bebas jentik pada Tahun 2016 sebanyak 2.224 rumah dari 2.483 rumah yang diperiksa atau sebesar 89.5%. Pada Tahun 2015 sebanyak 2.035 rumah dari 2.280 rumah yang diperiksa atau 89,3% pada 2015 dan sebanyak 396 rumah dari 1.630 rumah yang diperiksa atau 24,3% pada 2014. Indikator menunjukkan pencapaian memenuhi dari target Dinas Kesehatan 80 %.
- g. Indikator Persentase penderita kusta yang selesai berobat pada tahun 2016 sebanyak 32 penderita. Pada Tahun 2015 yakni 31 penderita dari 33 penderita atau 100% dan pada tahun 2014 juga 100% (40 pasien selesai berobat dari 40 kasus yang ada).
- h. Indikator Angka penderita HIV- AIDS di 2016 ada 2 kasus HIV dan telah memperoleh pengobatan pada VCT Makassar (100 % tertangani) sedang di tahun 2015 sebanyak 2 kasus dan 2014 tidak ada kasus .

Dinas Kesehatan Tahun 2016 telah berupaya melaksanakan indikator kinerja sasaran dengan melakukan kegiatan sebagai berikut :

- a. Penyemprotan/fogging sarang nyamuk
- b. Pengadaan vaksin penyakit menular
- c. Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah
- d. Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular
- e. Pencegahan penyakit menular endemic/epidemic
- f. Peningkatan imunisasi
- g. Peningkatan surveilensi epidemiologi dan penanganan wabah



Adapun Target dan indikator sasaran keberhasilan meningkatnya promosi kesehatan dan pembinaan peran serta masyarakat sebagai berikut :

Tabel 3.30
Peningkatan promosi kesehatan dan pembinaan PSM

NO	INDIKATOR	Satuan	Target	Realisasi (2015)	Realisasi (2014)	Tingkat Capaian (2015)	Tingkat Capaian (2014)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Persentase rumah tangga ber PHBS	%	65	63,4	72,79	97,54 %	111,9
2	Cakupan desa siaga aktif	%	100	100	100	100 %	100

- Indikator Persentase rumah tangga ber PHBS tahun 2016 ini mencapai 9.476 dari 14.181 jumlah rumah tangga yang dipantau atau sebesar 66.8%. Pada tahun 2015 mencapai 9.824 dari 15.494 jumlah rumah tangga yang dipantau atau 63,4 % dan tahun 2014 yakni 10.587 rumah dari 14.545 rumah yang dipantau atau 72,8 %. Hal ini menunjukkan target dari Dinas Kesehatan 65 % hampir dicapai. Kegiatan promosi kesehatan harus terus dilaksanakan secara kontinyu mengingat masalah perilaku hidup bersih dan sehat tidak dapat berubah secara signifikan dalam waktu singkat
- Indikator Cakupan desa siaga aktif yakni pada tahun 2016 dan 2015 terdapat 67 Desa/Kelurahan dari 67 Desa/Kelurahan yang ada atau 100%. Indikator ini menunjukkan target Dinas Kesehatan telah tercapai

Dinas Kesehatan Tahun 2016 telah berupaya melaksanakan indikator kinerja sasaran dengan melakukan kegiatan sebagai berikut :

- Peningkatan pendidikan tenaga penyuluh kesehatan
- Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas di jaringannya
- Peningkatan kesehatan penduduk miskin di Puskesmas jaringannya
- Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan
- Penyelenggaraan penyehatan lingkungan

Sasaran 10	<i>Berkembangnya layanan rumah sakit bertaraf international dalam mewujudkan Bantaeng sebagai pusat Jasa Layanan Kesehatan</i>
-------------------	---

Sasaran berkembangnya layanan rumah sakit bertaraf international dalam mewujudkan Bantaeng sebagai pusat jasa layanan kesehatan, diukur melalui 6 (enam) indikator kinerja sebagai berikut :

- Peningkatan jumlah kunjungan 10% pertahun;*
- Pencapaian Status RSUD menjadi BLUD;
- Jumlah pelayanan kesehatan masyarakat miskin;
- Pencapaian peralatan kesehatan sesuai SPM;
- Jumlah complain jasa pelayanan rumah sakit;
- Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan ;



2017

Dari indikator indikator tersebut, ditetapkan indikator kinerja utama adalah **peningkatan jumlah kunjungan 10% pertahun**. Adapun penjelasan pencapaian kinerja sasaran melalui indikator sasaran adalah sebagai berikut:

a. Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2016

Tabel 3.31
Perbandingan capaian target dan realisasi kinerja tahun 2016

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TAHUN 2016		CAPAIAN KINERJA (%)	
				TARGET	REALISASI		
1	2	3	4	5	6	7	
10	<i>Berkembangnya layanan rumah sakit bertaraf international dalam mewujudkan Bantaeng sebagai pusat jasa layanan kesehatan</i>	1	Peningkatan Jumlah kunjungan 10% pertahun	Orang	93.330	86.615	92.80
		2	Pencapaian Status RSUD menjadi BLUD	%	100	100	100
		3	Jumlah Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin	pasien	35.000	37.152	106.14
		4	Persentase Pencapaian peralatan kesehatan sesuai SPM	%	65.40	50.59	77.35
		5	Jumlah complain jasa pelayanan rumah sakit	kali	<10	4	100
		6	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan berjenjang secara linier	%	60	80	133.33
Rata-Rata Tingkat Pencapaian						101.60	

Berdasarkan tabel perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2016, dapat disimpulkan bahwa rata-rata pencapaian kinerja sudah sangat baik atau sebesar 101.60%. Hal ini dapat dilihat pada pencapaian realisasi indikator jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan berjenjang secara linier, jumlah pelayanan kesehatan masyarakat miskin, pencapaian status RSUD menjadi BLU, jumlah complain jasa pelayanan dan peningkatan jumlah kunjungan 10% pertahun, masing-masing dapat direalisasikan sebesar >100%. Adapun pencapaian kinerja yang masih dibawah 100% adalah persentase pencapaian peralatan kesehatan sesuai SPM hanya dapat direalisasikan sebesar 50.59 dari target sebesar 65.40 atau 77.35%.

b. Perbandingan capaian realisasi kinerja tahun 2016 dengan tahun sebelumnya.

Tabel 3.32
Perbandingan capaian realisasi kinerja dengan tahun sebelumnya



2017

NO	INDIKATOR SASARAN	REALISASI				TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA (%)
		2012	2013	2014	2015	2016	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=5+6+8/3
1	Peningkatan Jumlah kunjungan 10% pertahun			47.720	84.845	93.330	86.615	73.060
2	Pencapaian Status RSU menjadi BLUD			50	100	100	100	83.33
3	Jumlah Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin			16.124	37.152	35.000	37.152	30.142
4	Persentase Pencapaian peralatan kesehatan sesuai SPM			50,59	50,59	65.40	50.59	50.59
5	Jumlah complain jasa pelayanan rumah sakit			4	4	<10	4	100
6	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan berjenjang secara linier			37	85	60	80	67.33

Berdasarkan tabel perbandingan capaian realisasi kinerja tahun 2016 dengan tahun-tahun sebelumnya rata-rata capaian kinerja sudah cukup baik. Pencapaian indikator kinerja yang sudah cukup baik terjadi pada peningkatan jumlah kunjungan 10% pertahun dan indikator jumlah complain jasa pelayanan rumah sakit masih dibawah angka 5 kali pertahun.

Pada indikator indeks peningkatan jumlah kunjungan per tahun tidak mencapai target 10% yang diharapkan, dimana dari 93.330 orang yang ditargetkan hanya dapat 86.615 orang, hal ini disebabkan karena system pelayanan kesehatan rujukan di Kabupaten Bantaeng sudah berjalan dengan maksimal, dimana hanya betul-betul pasien yang membutuhkan pelayanan kesehatan rujukan yang sampai ke Rumah Sakit, selebihnya berada di fasilitas pelayanan pertama (dasar) yakni puskesmas. Ini juga menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan bahwa Rumah Sakit tidak lagi menjadi sebuah puskesmas raksasa di kabupaten.

Pencapaian indikator sasaran dari table diatas sebesar 100%, ini didasarkan dengan Keputusan Bupati Bantaeng Nomor 061/372/IX/2015 tentang Penetapan RSUD.Prof.Dr.H.M. Anwar Makkatutu Bantaeng sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) yang isinya menyatakan bahwa Rumah Sakit dengan status BLUD secara Penuh.

Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat miskin di Rumah Sakit Bantaeng dapat dilihat dari jumlah pasien yang menggunakan status Jamkesda tahun 2015 jumlah pasien dengan status Jamkesda sebesar 37.152 orang melebihi target yang telah ditentukan sebesar 35.000 orang.

Peralatan Rumah Sakit sebagaimana dalam Standar pelayanan Minimal mengacu pada Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 340 tahun 2010, RSUD.Prof.Dr.H.M. Anwar Makkatutu Kabupaten Bantaeng sebagai Rumah Sakit Kelas C, dari 65,40% peralatan yang ditargetkan tetapi hanya mampu direalisasikan sebesar 50,59%, hal ini dikarenakan terbatasnya penganggaran untuk pengadaan peralatan melalui APBD, sehingga pengadaan peralatan khususnya peralatan medik dan non medik terbatas hanya melalui Tugas Pembantuan (TP) dan Dana Alokasi Khusus (DAK), dimana kedua sumber dana tersebut mempunyai menu tersendiri sehingga menyulitkan Rumah Sakit dalam fleksibilitas pemilihan alat.



Sarana prasarana Rumah Sakit sebagaimana dalam Standar pelayanan Minimal mengacu pada Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 340 tahun 2010, RSUD.Prof.Dr.H.M. Anwar Makkatutu Kabupaten Bantaeng sebagai Rumah Sakit Kelas C, dimana dalam SPM tersebut terdapat 29 jenis ruangan minimal yang harus dipenuhi, dan adapun jenisnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.33
Pemenuhan Sarana Prasarana Rumah Sakit
Tahun 2016

No	Sarana Prasarana	Standar Kelas C	Kondisi (2015)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Ruang Gawat Darurat	Ada	Ada
2	Ruang Rawat Jalan	Ada	Ada
3	Ruang Rawat Inap	Ada	Ada
4	Ruang Bedah	Ada	Ada
5	Ruang Rawat Intensif	Ada	Ada
6	Ruang Isolasi	Ada	Ada
7	Ruang Radiologi	Ada	Ada
8	Ruang Laboratorium Klinik	Ada	Ada
9	Ruang Farmas	Ada	Ada
10	Ruang Rehab Medik	Ada	Ada
11	Ruang Pemeliharaan Sarana Prasarana	Ada	Ada
12	Bangunan Pengelolaan Limbah	Ada	Ada
13	Ruang Sterilisasi	Ada	Ada
14	Ruang Laundry	Ada	Tidak Ada
15	Ruang Pemulasaran Jenazah	Ada	Tidak Ada
16	Ruang Administrasi	Ada	Ada
17	Ruang Gudang	Ada	Ada
18	Ruang Sanitasi	Ada	Ada
19	Ruang Dinas Asrama	Ada	Ada
20	Ambulans	Ada	Ada
21	Ruang Komite Medik	Ada	Ada
22	Ruang PKMRS	Ada	Ada
23	Sistem Informasi Rumah Sakit	Ada	Tidak Ada
24	Listrik	Ada	Ada
25	Air	Ada	Ada
26	Gas Medik	Ada	Ada
27	Penanganan Kebakaran	Ada	Ada
28	Perangkat Komunikasi	Ada	Ada
29	Tempat Tidur	Ada	Ada
	Total Bobot	89,66 %	

Kalibrasi Rumah Sakit sebagaimana dalam Standar pelayanan Minimal mengacu pada Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 340 tahun 2010, RSUD.Prof.Dr.H.M. Anwar Makkatutu Kabupaten Bantaeng sebagai Rumah Sakit Kelas C, dimana telah ditargetkan persentase kalibrasi alat per ruangan sebesar 7% sebagaimana dalam SPM tetapi hanya mampu direalisasikan sebesar 5,5% per ruangan, hal ini dikarenakan minimnya anggaran pemeliharaan/ kalibrasi yang dialokasikan dalam APBD sedangkan jumlah item alat dari tahun ke tahun bertambah.

**Foto Pembangunan RSUD Prof.Dr.H.M. Anwar Makkatutu
Kabupaten Bantaeng**



Sasaran 11 *Terkendalinya pertumbuhan penduduk*

Untuk mengukur keberhasilan sasaran terkendalinya pertumbuhan penduduk, ditetapkan indikator sasaran sebagai berikut :

1. Jumlah pencapaian Akseptor KB baru;
2. Persentase penurunan angka kelahiran total;
3. Persentase cakupan peserta KB Aktif; dan
4. Persentase evaluasi kegiatan kependudukan.

Dari indikator-indikator tersebut, ditetapkan indikator kinerja utama adalah jumlah pencapaian akseptor KB Baru. Adapun penjelasan pencapaian kinerja sasaran adalah sebagai berikut :

a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2016

Tabel 3.31
Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2016

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TAHUN 2016		CAPAIAN KINERJA (%)	
				TARGET	REALISASI		
1	2	3	4	5	6	7	
11	Terkendalinya Pertumbuhan Penduduk	1	Jumlah pencapaian Akseptor KB Baru	Orang	4.842	3.824	78.9
		2	Persentase penurunan angka kelahiran total	%	2.89	2.87	99.89



		3	Persentase Cakupan Peserta KB Aktif	%	75	80	106.7
		4	Persentase evaluasi kegiatan kependudukan	%	90	85	94.44
Rata-Rata Tingkat Pencapaian							94,98

Berdasarkan tabel perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2016, nampak bahwa rata-rata capaian kinerja sasaran terkendalanya pertumbuhan penduduk dari 4 indikator sudah sangat baik. Keberhasilan pencapaian sasaran ini sangat dipengaruhi oleh pencapaian kinerja dari indikator persentase cakupan peserta KB Aktif yang dapat direalisasikan sebanyak 33,816 atau sebesar 106.7%. Pada tahun 2016 jumlah peserta KB Aktif yang ditargetkan sebesar 25.084 orang dapat direalisasi sebanyak 33.816 orang. Begitu pula halnya pada pencapaian kinerja dari indikator penurunan angka kelahiran total yang dapat direalisasikan sebesar 2.87% atau sekitar 99.89%.

b. *Perbandingan capaian realisasi kinerja tahun 2016 dengan tahun sebelumnya.*

Tabel 3.32
Perbandingan realisasi kinerja tahun 2016 dengan tahun sebelumnya

NO	INDIKATOR SASARAN	TAHUN 2013		TAHUN 2014		TAHUN 2015		TAHUN 2016	
		TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Jumlah pencapaian Akseptor KB Baru	6.417	5.416	5.751	5.751	3.773	4.165	4.842	3.824
2	Persentase penurunan angka kelahiran total	2.1	2.4	2.1	2.4	2.89	2.87	2.89	2.87
3	Persentase Cakupan Peserta KB Aktif	70,81	81.00	60.72	80.72	80	78.29	75	80
4	Persentase evaluasi kegiatan kependudukan			85	82	85	85	90	85

Berdasarkan tabel perbandingan realisasi tahun 2016 dengan tahun tahun sebelumnya, dapat dilihat bahwa pencapaian indikator sasaran semakin baik dari tahun ketahun.

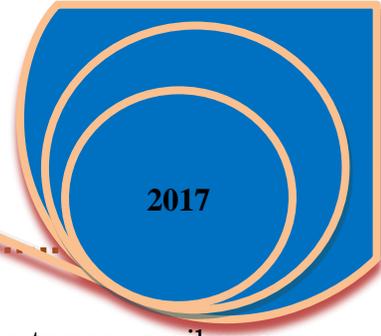
Adapun program dan kegiatan yang mendukung keberhasilan pencapaian sasaran terkendalanya pertumbuhan penduduk adalah sebagai berikut ;

1. Program Keluarga Berencana dianggarkan sebanyak Rp. 1.054.352.800,- dan dapat direalisasikan sebesar 1.025.213.354,- atau sebesar 97%
2. Program Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri dianggarkan sebanyak Rp. 472.308.700,- dan direalisasikan sebanyak Rp. 385.868.700,- atau sebesar 82%.
3. Program Pelayanan Kontasepsi dianggarkan sebanyak Rp. 130.100.500,- dan direalisasikan sebanyak Rp, 107.117.500,- atau sekitar 75%

Sasaran 12	<i>Meningkatnya produktivitas hasil-hasil pertanian, kehutanan serta perikanan dan kelautan</i>
-------------------	--

Dalam mengukur keberhasilan pencapaian sasaran meningkatnya produktivitas hasil-hasil pertanian, kehutanan serta perikanan dan kelautan, ditetapkan indikator pencapaian sasaran sebagai berikut :

1. Jumlah produksi pertanian Tanaman Pangan Padi dan Jagung ;



2. Jumlah peningkatan produktifitas hasil-hasil pertanian, kehutanan perikanan dan kelautan

Dari indikator-indikator pencapaian sasaran tersebut, ditetapkan indikator kinerja utama yaitu *jumlah produksi pertanian tanaman padi dan jagung*. Penjelasan pencapaian kinerja sasaran dimaksud adalah sebagai berikut :

Tabel 3.33
Perbandingan antara target dan realisasi kinerja sasaran 12

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TAHUN 2016		CAPAIAN KINERJA (%)	
				TARGET	REALISASI		
1	2	3	4	5	6	7	
12	Meningkatnya produktivitas hasil pertanian, kehutanan, perikanan dan kelautan	1	Jumlah Produksi Pertanian Tanaman Pangan Padi dan Jagung	Ton	263.405	278.376	105,68
		2	Jumlah Peningkatan produktifitas hasil-hasil pertanian, kehutanan, perikanan dan kelautan	Ton	150	180	120
Rata-Rata Tingkat Pencapaian						112,84	

Dari tabel perbandingan pencapaian antara target dan realisasi tahun 2016, terlihat bahwa rata-rata tingkat pencapaian kinerja sudah sangat baik. Dari pencapaian indikator indikator yang ditetapkan, dapat direalisasikan melebihi 100%.

Secara rinci pencapaian sasaran ini dapat dilihat pada kinerja Dinas Pertanian dan Peternakan yang merupakan leading sektor, dengan pencapaian sasaran sebagai berikut :

Tabel 3.34
Capaian Kinerja Dinas Pertanian dan Peternakan Tahun 2016

No	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	%	Ket
1	Peningkatan produksi komoditas tanaman pangan, hortikultura, dan peternakan	<i>Tercapainya produksi :</i>				
		- Padi (Ton)	90.114	98.833	109,68	Sangat tinggi
		- Jagung (Ton)	173.291	179.543	103,61	Sangat tinggi
		- Buah-buahan (Ton)	12.722	11.664	91,68	Sangat Tinggi
		- Sayuran (Ton)	38.655	34.894	90,27	Tinggi
2	Peningkatan produksi benih tanaman pangan, hortikultura, dan peternakan berbasis teknologi	- Daging sapi (Ton)	300	270	90,00	Tinggi
		Tersedianya benih tanaman pangan, hortikultura, dan peternakan (Ton)	150	180	120	Sangat tinggi
3	Peningkatan produksi olahan hasil pertanian dan peternakan	Bertambahnya hasil olahan pertanian dan peternakan (jenis)	10	10	100	Sangat tinggi
4	Peningkatan jaringan pasar produk olahan hasil pertanian dan peternakan	Terpromosi hasil produksi pertanian/ peternakan daerah (Kali)	6	6	100	Sangat tinggi
5	Peningkatan sumber daya petani	Terlaksananya sistem insentif dan disinsentif bagi petani/ kelompok tani dan penyuluhan	1 kegiatan	1 kegiatan	100	Sangat tinggi



2017

		pertanian (Ya/Tidak)				
6	Peningkatan sumber daya dan pelayanan aparatur pertanian dan peternakan	Prosentase pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (%)	1	1	100	Sangat tinggi
		Tingkat kelancaran pelayanan aparatur pertanian dan peternakan (%)	80	80	100	Sangat tinggi
Rata-Rata (%)					100,48	Sangat tinggi

Dari 11 indikator di atas, kinerja yang dicapai menunjukkan bahwa 72,73 persen telah memenuhi kriteria kinerja sangat tinggi, sedangkan 27,27 persen telah memenuhi kriteria kinerja tinggi. Analisis keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja khususnya indikator kinerja sasaran akan dijelaskan pada analisis capaian kinerja sasaran strategis di bawah ini;

a. *Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2016*

Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	%	Ket
Peningkatan produksi komoditas tanaman pangan, hortikultura, dan peternakan	Tercapainya produksi :				
	- Padi (Ton)	90.114	98.833	109,68	Sangat tinggi
	- Jagung (Ton)	173.291	179.543	103,61	Sangat tinggi
	- Buah-buahan (Ton)	12.722	11.664	91,68	Sangat Tinggi
	- Sayuran (Ton)	38.655	34.894	90,27	Tinggi
	- Daging sapi (Ton)	300	270	90,00	Tinggi
Rata-Rata Capaian				97,05	Sangat tinggi

Dari 5 (lima) indikator kinerja yang mendukung sasaran strategis ini, 2 (dua) indikator kinerja sasaran mencapai target dan 3 (tiga) indikator kinerja sasaran yang tidak mencapai target. Tetapi secara umum rata-rata pencapaian sasaran *pencapaian produksi komoditas tanaman pangan, hortikultura, dan peternakan* berhasil mencapai 97,05 persen yang berarti masuk kriteria kinerja sangat tinggi. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu produksi padi dapat terealisasi 109,68 % (kriteria kinerja sangat tinggi) serta produksi jagung juga dapat terealisasi 103,61 % (kriteria kinerja sangat tinggi).

b. *Perbandingan realisasi kinerja sasaran tahun 2016 dengan tahun sebelumnya*

Indikator	Satuan	Capaian (%)			
		2014	2015	2016	
1	Produksi Padi	Ton	95,93	80,55	109,68
2	Produksi Jagung	Ton	108,34	90,78	103,61
3	Produksi Buah-buahan	Ton	93,75	121,86	91,68
4	Produksi Sayuran	Ton	83,49	79,75	90,27
5	Produksi Daging sapi	Ton	106,98	97,18	90,00
Rata-Rata			97,69	94,02	97,05

Jika dibandingkan capaian kinerja tahun ini dengan tahun 2015, maka rata-rata capaian kinerja pada sasaran *pencapaian produksi komoditas tanaman pangan, hortikultura, dan peternakan* ini mengalami peningkatan sebesar 3,03 persen meskipun jika dibandingkan dengan capaian kinerja pada tahun 2014 mengalami penurunan 0,64 persen.

c. *Perbandingan realisasi kinerja dengan target RPJMD*



2017

	Indikator	Satuan	Target Jangka Menengah	Realisasi Hingga Tahun Ini	Capaian (%)
1	Produksi Padi	Ton	263.397	272.116	103,31
2	Produksi Jagung	Ton	499.464	505.716	101,25
3	Produksi Buah-buahan	Ton	37.252	38.698	103,88
4	Produksi Sayuran	Ton	116.885	105.518	90,28
5	Produksi Daging sapi	Ton	830	809,55	97,54

Jika melihat perbandingan rata-rata realisasi indikator kinerja sampai dengan tahun 2016 terhadap target kinerja jangka menengah yang terdapat dalam Renstra Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Bantaeng, maka terdapat 3 indikator yang telah mencapai target jangka menengah dan 2 indikator yang belum mencapai target jangka menengah namun kedua indikator yang belum mencapai target tersebut dioptimalkan agar pada tahun 2017 target tersebut dapat dicapai.

d. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Capaian kinerja pada tahun 2016 mengalami peningkatan 3,03 persen bila dibandingkan dengan tahun 2015 karena kondisi iklim pada tahun 2016 lebih baik dibandingkan pada tahun 2015. Pada tahun 2015, kondisi pertanian mengalami banyak gagal panen akibat perubahan iklim yang sangat signifikan yaitu terjadinya kemarau yang panjang. Penyebab capaian kinerja tahun 2016 lebih rendah 0,64 persen bila dibandingkan dengan tahun 2014 karena pertama, kondisi lahan pertanian dan tanaman yang mengalami kerusakan akibat kekeringan pada tahun 2015 dan perlu pemulihan dan peremajaan kembali. Kedua, target produksi daging sapi yang masih sulit dicapai karena harga daging yang selalu mengalami fluktuasi.

e. Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya.

Anggaran yang direncanakan pada tahun 2016 untuk pencapaian sasaran *pencapaian produksi komoditas tanaman pangan, hortikultura, dan peternakan* ini adalah sebesar Rp. 13.340.050.200 dan dari anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp. 12.127.989.811 atau 90,91 persen. Dibandingkan rata-rata capaian kinerja sebesar 97,07 persen berarti tingkat efisiensi sebesar 6,16 persen.

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran *pencapaian produksi komoditas tanaman pangan, hortikultura, dan peternakan* ini adalah :

- 1) Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian /Perkebunan)
 - a) Penyusunan database potensi produksi pangan
 - b) Pengembangan diversifikasi tanaman
 - c) Pengembangan pertanian pada lahan kering
 - d) Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk pertanian



- 2) Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan
 - a) Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna
 - b) Pengadaan Sarana/ Prasarana dan Teknologi Pengembangan/ Optimasi Jaringan Irigasi Pertanian
 - c) Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan Irigasi Pertanian/Perkebunan
- 3) Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak
 - a) Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak
 - b) Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
 - c) Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat

Analisis pencapaian indikator Jumlah Peningkatan produksi benih tanaman pangan, hortikultura, dan peternakan berbasis teknologi, dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. *Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.*

Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	%	Ket
Peningkatan produksi benih tanaman pangan, hortikultura, dan peternakan berbasis teknologi	Tersedianya benih tanaman pangan, hortikultura, dan peternakan (Ton)	150	180	120	Sangat tinggi

Indikator kinerja sasaran *peningkatan produksi benih tanaman pangan, hortikultura, dan peternakan berbasis teknologi* yang termasuk ke dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) berhasil mencapai realisasi 120 persen yang berarti masuk kriteria kinerja sangat tinggi.

Varietas benih tanaman pangan diproduksi oleh UPTD Balai Benih Daerah diantaranya untuk varietas padi adalah Inpari Sidenuk, Diah Suci, Mira 1, Suluttan Unsrat 2, Situ Gintung, Situ Bagendit, Membramo, IR 64, Inpari 7, Inpari 23, Inpari 6, Inpari 30, Inpari 7, Cisantana, Mekongga, Ciherang, sedangkan untuk varietas benih jagung diantaranya adalah BR-4, BI-3, BIMA URI-19, dan BIMA URI-20.

Benih hortikultura yang diproduksi oleh UPTD Hortikultura diantaranya kentang, bawang merah, talas, bibit mangga, bibit rambutan, dan bibit durian. Benih/bibit peternakan yang diproduksi oleh UPTD ternak unggul diantaranya kambing, ayam kampung, dan sapi.

b. *Perbandingan antara capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu.*

Indikator	Satuan	Capaian (%)		
		2014	2015	2016
1 Tersedianya benih tanaman pangan, hortikultura, dan peternakan	Ton	100	100	120

Jika dibandingkan capaian kinerja tahun ini dengan tahun 2015 dan tahun 2014, maka capaian kinerja pada sasaran *peningkatan produksi benih tanaman pangan, hortikultura, dan peternakan berbasis teknologi* ini mengalami peningkatan sebesar 20 persen.



c. *Perbandingan kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.*

	Indikator	Satuan	Target Jangka Menengah	Realisasi Hingga Tahun Ini	Capaian (%)
1	Tersedianya benih tanaman pangan, hortikultura, dan peternakan	Ton	300	300	100

Jika melihat perbandingan realisasi indikator kinerja sampai dengan tahun 2016 terhadap target kinerja jangka menengah yang terdapat dalam Renstra Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Bantaeng, maka indikator telah mencapai target jangka menengah.

d. *Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.*

Capaian kinerja pada tahun 2016 mengalami peningkatan 20 persen bila dibandingkan dengan tahun 2015 dan 2014. Keberhasilan ini disebabkan oleh :

1. Kondisi iklim pada tahun 2016 lebih baik dibandingkan pada tahun 2015. Pada tahun 2015, kondisi pertanian mengalami banyak gagal panen akibat perubahan iklim yang sangat signifikan yaitu terjadinya kemarau yang panjang.
2. Dinas Pertanian dan Peternakan bekerjasama dengan Balai Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) dalam bentuk kerjasama Technopark yang memiliki visi pengembangan perbenihan di Kabupaten Bantaeng. Technopark memberikan peningkatan pengembangan sumberdaya manusia pertanian, baik SDM aparatur maupun SDM petani penangkar serta Technopark memberikan kajian aplikasi teknologi pada pengembangan benih tanaman pangan, hortikultura dan peternakan.
3. Penambahan sarana Green House Hortikultura sebanyak 3 unit di Desa Bonto Lojong, Kecamatan Uluere.
4. Penerapan Inseminasi Buatan (IB) pada Kambing untuk menghasilkan kambing unggul dengan tingkat keberhasilan \pm 80 persen.

e. *Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya.*

Anggaran yang direncanakan pada tahun 2016 untuk pencapaian sasaran *peningkatan produksi benih tanaman pangan, hortikultura, dan peternakan berbasis teknologi* ini adalah sebesar Rp. 9.885.921.000 dan dari anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp. 8.411.798.275 atau 85,09 persen. Dibandingkan rata-rata capaian kinerja sebesar 120 persen berarti tingkat efisiensi sebesar 34,91 persen.

f. *Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.*

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran *peningkatan produksi benih tanaman pangan, hortikultura, dan peternakan berbasis teknologi* ini adalah



- 1) Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian /Perkebunan)
 - a) Pengembangan perbenihan/pembibitan
- 2) Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan
 - a). Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan
 - b). Pembangunan sarana/prasarana dan pembibitan hortikultura
 - c). Pembangunan sarana/prasarana dan pembibitan tanaman pangan
- 3) Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
 - a) Pembangunan sarana dan prasarana pembibitan ternak
 - b) Pembibitan dan perawatan ternak

Sasaran 13 Berkembangnya Usaha Perbenihan Masyarakat

Dalam mengukur keberhasilan pencapaian sasaran berkembangnya usaha perbenihan masyarakat, indikator kinerja yang ditetapkan adalah jumlah produksi benih berbasis teknologi yang dihasilkan melalui UPTD Tanaman Pangan. Indikator ini sekaligus menjadi indikator kinerja utama. Adapun penjelasan terhadap pencapaian kinerja ini dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.35
Perbandingan antara target dan realisasi pencapaian Sasaran 13

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TAHUN 2016		CAPAIAN KINERJA (%)
				TARGET	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	7
13	<i>Berkembangnya Usaha Perbenihan Masyarakat</i>	1 Jumlah produksi benih berbasis teknologi yang dihasilkan melalui UPTD Tanaman Pangan	varietas	17	17	100
Rata-Rata Tingkat Pencapaian						100

Berdasarkan tabel perbandingan target dan realisasi, terlihat bahwa bahwa rata-rata tingkat pencapaian kinerja sasaran sangat baik dengan nilai 100%. Hal ini didukung oleh pencapaian beberapa indikator kinerja yang mencapai 100% diantaranya Jumlah Produksi benih berbasis teknologi yang dihasilkan UPTD Tanaman Pangan, Jumlah Produksi Benih/Bibit Berbasis teknologi yang dihasilkan UPTD Holtikultura dan Jumlah Produksi Peternakan.

Tabel 3.36
Perbandingan realisasi kinerja tahun 2016 dengan tahun sebelumnya

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	REALISASI		KET
				2015	2016	
1	2	3	4	5	6	7
13	<i>Berkembangnya Usaha Perbenihan Masyarakat</i>	1 Jumlah produksi benih berbasis teknologi yang dihasilkan melalui UPTD Tanaman Pangan	varietas	17	17	

Adapun varietas benih berbasis teknologi UPTD Tanaman Pangan adalah Inpari Sidenuk, Diah Suci, Mira 1, Suluttan Unsrat 2, Situ Bagendit, Membrano (BP), Situ Gintung, IR 64, Inpari 7 (BP), Inpari 23, Inpari 6, Inpari 30, Inpari 7 (BR), Cisanta, Membramo (BR), Mekongga, Ciharang.



Sedangkan beberapa Paket sarana UPTD Peternakan yang dilaksanakan terdiri dari :

1. Pengadaan peralatan pembibitan
2. Pembangunan Kandang Indukan Ayam Lokal
3. Pembangunan Kandang Pembesaran Ayam Lokal
4. Pembuatan Box Indukan Ayam Lokal

Sedangkan Komoditas UPTD Holtikultura yang berhasil dikembangkan di Kabupaten Bantaeng terdiri dari Kentang, Talas, Tanaman Hias, Strowberi, Cabe, Bawang Merah, Wortel, Apel

Upaya upaya lain yang dilakukan dalam rangka mengembangkan benih berkualitas diantaranya :

1. Pada tahun 2016 pelaksanaan Pengembangan Demplot Talas hasil Ex-Vitro dikembangkan di Kel. Tanah Loe dengan 2 titik lokasi perkembangan masing-masing 0,25 are, Desa BT. Daerng dengan luas pengembangan 0,75 are, Desa BT. Marannu dengan luas pengembangan 0,25 are. Jadi luas penanaman talas tahun 2016 adalah 1,50 hektar yang tersebar di 4 titik lokasi.
2. Pelaksanaan kegiatan Demplot Jagung Manis yang dilaksanakan di Kab. Bantaeng pada tahun 2016 ini masih terbatas dalam pengembangannya. Adapun bibitnya berasal dari Balitsereal-Maros. Pengembangan Demplot Jagung Manis (Proses Perbenihan) dilaksanakan di Desa BT. Atu Kec. Bissappu, Jl. Pemuda Kec. Bantaeng, Kel. Lembang Gantarang Keke, Kel. Lamalaka Kec. Bantaeng, dan Desa Kaloling Gantarang Keke;
3. Pada tahun 2016, Kabupaten Bantaeng melakukan kegiatan Adopsi Teknologi Klengkeng dan Jambu Madu dengan melakukan kerjasama dengan TELAGA NURSERY-Budidaya Kelengkeng dan Jambu Madu yang di kelola oleh H. Isto Suwarno. Adapun Lokasi Budidaya Kelengkeng dan Jambu Madu adalah Kampung Kacidu Kel. Lembang Gantarang Keke Kec. Tompobulu dan di semua BP3K se Kab. Bantaeng.

Sasaran 14***Berkembangnya Penguasaan dan Pendayagunaan IPTEKIN secara bersistem***

Untuk sasaran berkembangnya penguasaan dan pendayagunaan IPTEKIN secara bersistem, ditetapkan 2 indikator kinerja yaitu persentase pemanfaatan teknologi dalam pengembangan pertanian dan jumlah produk unggulan yang telah menggunakan teknologi. Adapun penjelesan secara rinci pencapaian kinerja masing-masing indikator sasaran adalah sebagai berikut :

Tabel 3.37
Perbandingan antara target dan realisasi pencapaian Sasaran 14

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TAHUN 2016		CAPAIAN KINERJA (%)
				TARGET	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	7
14	<i>Berkembangnya Penguasaan dan Pendayagunaan IPTEKIN secara bersistem.</i>	1 Persentase pemanfaatan teknologi dalam pengembangan pertanian	%	75	70	93.33
		2 Jumlah produk unggulan yang telah menggunakan teknologi	produk	10	10	100



2017

Rata-Rata Tingkat Pencapaian

91.33

Berdasarkan tabel evaluasi pencapaian berkembangnya penguasaan dan pendayagunaan IPTEKIN secara sistematis, terlihat bahwa rata-rata tingkat pencapaian kinerja sebesar 91.33%. Pencapaian kinerja sasaran ini didukung oleh pencapaian kinerja indikator pemanfaatan teknologi dalam pengembangan pertanian sebesar 93.33 %, jumlah kegiatan pengembangan teknologi dengan pihak ketiga dalam menunjang usaha pertanian dapat direalisasikan sebanyak 3 kegiatan dan jumlah produk unggulan yang menggunakan teknologi dapat dicapai sebesar 100 %.

Pemanfaatan Teknologi Pertanian diarahkan ke teknologi perbenihan berbasis teknologi diantaranya pada perbaikan tanaman pangan di Kecamatan Bissapu, perbaikan hortikultura di Kecamatan Uluere. Teknologi yang lain adalah teknologi Inseminasi Buatan (IB) pada ternak sapi di Kecamatan Pajukukang.

Persentase ketersediaan benih berbasis teknologi yang ditargetkan sebesar 10 %. Luas areal perluasan kakao pada tahun 2014 50 Ha dimana kebutuhan bibit/benih sudah terpenuhi sebanyak 3000 pohon atau 7,5 Ha sehingga masih dibutuhkan sebanyak 17.000 bibit/benih dengan luas 42,5 Ha. Pada tahun 2015, sudah terpenuhi kebutuhan bibit/benih kakao sebanyak 5.000 bibit dengan luas 12,5 Ha sehingga masih tersisa lahan seluas 22,5 Ha yang masih membutuhkan bibit/benih. Untuk cengkeh (tanaman tua) pada tahun 2016 seluas 30 Ha dan kopi (tanaman tua) seluas 62 Ha sehingga total luas areal perluasan kakao, cengkeh (tanaman tua) dan kopi (tanaman tua) 114,5 Ha yang membutuhkan benih/bibit sebanyak 45.800 benih/bibit pada jarak tanam 5 x 5 meter. Pada tahun 2016, ditargetkan kebutuhan benih/bibit bisa terpenuhi 10 % atau 4.580 benih/bibit. Target tersebut tidak dapat tercapai disebabkan oleh masih minimnya dukungan anggaran dari APBD II dan hanya mencapai 9,82 % atau 4.500 bibit yang terdiri atas kakao 1.500 bibit, cengkeh 1.500 bibit dan kopi 1.500 bibit.

Sasaran 15 Berkembangnya wirausaha benih

Pencapaian sasaran berkembangnya wirausaha benih diharapkan dapat dicapai melalui penetapan indikator jumlah produk olahan hasil pertanian dan peternakan yang dihasilkan melalui unit pengolahan. Adapun penjelasan indikator ini dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.38
Perbandingan pencapaian target dan realisasi kinerja tahun 2016

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TAHUN 2016		CAPAIAN KINERJA (%)
				TARGET	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	7
15	<i>Berkembangnya wirausaha benih.</i>	1 Jumlah Produk Olahan Hasil Pertanian dan Peternakan yang dihasilkan melalui Unit Pengolahan	produk	10	10	100



Rata-Rata Tingkat Pencapaian	100
-------------------------------------	------------

Berdasarkan tabel evaluasi pencapaian sasaran berkembangnya wirausaha benih rata-rata tingkat pencapaian sudah sangat baik sebesar 100%. Hal ini didukung oleh capaian kinerja indikator sasaran jumlah produk olahan hasil pertanian dan peternakan dan indikator jumlah sarana pendukung unit pengolahan sebesar 100%.

Pencapaian indikator sasaran ini didukung oleh pencapaian indikator yang ditetapkan oleh Dinas Pertanian dan Peternakan dengan mengacu pada indikator sasaran yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Bantaeng.

Indikator kinerja sasaran peningkatan produksi olahan hasil pertanian dan peternakan berhasil mencapai 100 persen yang berarti target 10 jenis olahan dapat dicapai dan masuk kriteria kinerja sangat tinggi. Olahan yang diproduksi diantaranya kerupuk wortel, chips jagung, bawang goreng, jagung marning, keripik talas, teng-teng, keripik pisang, pisang sale goreng, kerupuk bawang, dan kerupuk jagung muda.

Tabel 3.39
Perbandingan antara capaian kinerja tahun ini dengan tahun sebelumnya

	Indikator	Satuan	Capaian (%)		
			2014	2015	2016
1	Bertambahnya hasil olahan pertanian dan peternakan	Jenis	100	100	100

Capaian kinerja pada sasaran *peningkatan produksi olahan hasil pertanian dan peternakan* tidak mengalami peningkatan. Namun, semua target tiap tahun dapat tercapai.

Jika melihat perbandingan realisasi indikator kinerja sampai dengan tahun 2016 terhadap target kinerja jangka menengah yang terdapat dalam Renstra Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Bantaeng, maka indikator telah mencapai target jangka menengah. Dinas Pertanian dan Peternakan menargetkan 5 (lima) jenis olahan yang dapat diproduksi pada tahun 2014 dan 8 (delapan) jenis olahan pada tahun 2015 dan pada tahun 2016 ditargetkan 10 (sepuluh) jenis olahan yang dapat diproduksi oleh UPTD Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian serta Kelompok-Kelompok Binaan.

Adapun Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan. Capaian kinerja pada tahun 2016 mencapai 100 persen disebabkan oleh :

1. UPTD Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian ditargetkan menghasilkan produk olahan pertanian berupa kerupuk wortel, kerupuk jagung muda, dan chips jagung yang akan dipasarkan ke masyarakat dan menjadi sumber pendapatan asli daerah..
2. Seksi Bina Usaha pada Bidang Hortikultura dan Bidang Tanaman Pangan terus berkoordinasi dengan UPTD Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian untuk secara berkala dan kontinu membina para Kelompok Wanita Tani (KWT) untuk menciptakan kreasi olahan baru (diversifikasi) serta melaksanakan pembinaan peningkatan SDM berupa pelatihan-pelatihan olahan orientasi bisnis.

Anggaran yang direncanakan pada tahun 2016 untuk pencapaian sasaran *peningkatan produksi olahan hasil pertanian dan peternakan* ini adalah

sebesar Rp. 218.269.000 dan dari anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp. 167.379.000 atau 76,68 persen. Dibandingkan rata-rata capaian kinerja sebesar 100 persen berarti tingkat efisiensi sebesar 23,32 persen.

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran *peningkatan produksi olahan hasil pertanian dan peternakan* ini adalah Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian /Perkebunan) dengan kegiatan penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian

Sasaran 16 *Berkurangnya penduduk miskin yang bekerja di sektor pertanian*

Untuk mengukur pencapaian sasaran, berkurangnya penduduk miskin yang bekerja disektor pertanian ditetapkan indikator kinerja utama *persentase kenaikan pendapatan rata-rata petani perkebunan*. Adapun pencapaian kinerja indikator dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 3.40
Perbandingan antara target dan realisasi sasaran tahun 2016

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TAHUN 2016		CAPAIAN KINERJA (%)
				TARGET	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	7
16	<i>Berkurangnya penduduk miskin yang bekerja di sektor pertanian</i>	1 Persentase kenaikan pendapatan rata-rata petani perkebunan	%	25	18,05	72,20
Rata-Rata Tingkat Pencapaian						90.73

Berdasarkan tabel perbandingan target dan realisasi pencapaian sasaran berkurangnya penduduk miskin yang bekerja disektor pertanian dapat diketahui bahwa rata-rata tingkat pencapaian kinerja sasaran ini sebesar 90.73%

Indikator kinerja pertama tentang kenaikan pendapatan rata-rata petani perkebunan yang ditargetkan sebesar 20 % dan hanya terealisasi sebesar 18,05 %. Hal ini dilihat dari data statistic yang menunjukkan kenaikan pendapatan rata-rata petani perkebunan. Target yang tidak tercapai sebagai akibat dari adanya program nasional pada tahun 2013, beberapa komoditi yang mengganti tanaman yang sudah lama dengan tanaman baru sehingga tanaman baru tersebut belum menghasilkan pada tahun berjalan. Disamping itu, komoditi kapas dan tembakau yang nanti panen pada tahun 2015 yang sangat mempengaruhi pendapatan rata-rata petani.

Sasaran 17 *Meningkatnya konservasi, dan rehabilitasi hutan dan lahan berbasis pemberdayaan*

Untuk keberhasilan pencapaian sasaran meningkatnya konservasi dan rehabilitasi hutan dan lahan berbasis pemberdayaan, digunakan 3 indikator. Adapun masing masing indikator tersebut adalah persentase luas lahan kritis terhadap luas wilayah, persentase luas lahan kritis yang direhabilitasi dan persentase jumlah pohon yang tumbuh terhadap jumlah pohon yang ditanam.



Pengertian indikator pertama adalah luas lahan kritis diketahui dari luas lahan kritis yang belum direhabilitasi dibagi luas wilayah Kabupaten Bantaeng dikali 100. Indikator kedua adalah Luas lahan kritis yang direhabilitasi pada tahun berjalan dibagi dengan luas lahan kritis di wilayah Kabupaten Bantaeng dikali 100. Sedangkan indikator ketiga adalah Jumlah pohon yang tumbuh dibagi jumlah pohon yang ditanam pada tahun berjalan dikali 100.

Untuk melihat pencapaian sasaran ini dapat diuraikan melalui tabel sebagai berikut :

Tabel 3.41
Perbandingan antara target dan realisasi kinerja sasaran Tahun 2016

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TAHUN 2015		CAPAIAN KINERJA (%)	
				TARGET	REALISASI		
1	2	3	4	5	6	7	
17	Meningkatnya konservasi, dan rehabilitasi hutan dan lahan berbasis pemberdayaan	1	Persentase luas lahan kritis terhadap luas wilayah	%	15	19.99	75,04
		2	Persentase luas lahan kritis yang direhabilitasi	%	1.49	1.49	100
		3	Persentase jumlah pohon yang tumbuh terhadap jumlah pohon yang ditanam	%	90	78,40	102,17
Rata-Rata Tingkat Pencapaian						92,04	

Berdasarkan perbandingan target dan realisasi tahun 2016 terhadap pencapaian sasaran meningkatnya konservasi dan rehabilitasi hutan dan lahan berbasis pemberdayaan, dapat diketahui bahwa rata-rata tingkat pencapaian kinerja sasaran sangat baik sebesar 92.04%. Pencapaian kinerja pada sasaran ini dipengaruhi oleh 3 indikator yang berkinerja baik.

Tabel 3.42
Perbandingan realisasi kinerja sasaran Tahun 2016 dengan tahun sebelumnya

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	REALISASI		KET	
				2015	2016		
1	2	3	4	5	6	7	
17	Meningkatnya konservasi, dan rehabilitasi hutan dan lahan berbasis pemberdayaan	1	Persentase luas lahan kritis terhadap luas wilayah	%	20.72	19.99	
		2	Persentase luas lahan kritis yang direhabilitasi	%	6.87	1.49	
		3	Persentase jumlah pohon yang tumbuh terhadap jumlah pohon yang ditanam	%	91,95 %	78.40	

Untuk indikator pertama mengenai persentase luas lahan kritis terhadap luas wilayah ditargetkan untuk tahun 2016 sebesar 15 %. Angka ini apabila semakin sedikit pertanda bahwa luas lahan kritis yang ada di Kabupaten Bantaeng juga semakin menurun. Dari total luas wilayah Kabupaten Bantaeng 39.585 Ha terdapat lahan kritis sebanyak 8.034 Ha (20,29 %) pada tahun 2015. Pada tahun 2016 dilakukan rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan seluas 120 Ha sehingga jumlah lahan kritis berkurang menjadi 7.914 Ha atau 19,99 % terhadap luas wilayah. Target sebesar 15 % tidak dapat terealisasi karena terkendala anggaran yang minim yang hanya dianggarkan dari DAK (Dana Alokasi Khusus)



untuk kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan. Lahan kritis tersebut dari tahun ke tahun diharapkan akan semakin menipis dan bahkan sampai pada angka 0 %.

Indikator kinerja kedua tentang persentase luas lahan kritis yang direhabilitasi yang ditargetkan sebanyak 1,49 % dari total luas lahan kritis 8.034 Ha. Target 1,49 % atau seluas 120 Ha lahan kritis yang harus direhabilitasi di tahun 2016 melalui program rehabilitasi hutan dan lahan. Capaian pada indikator ini mencapai target yaitu 1,49 % atau seluas 120 Ha dengan persentase capaian kinerja 100 %. Hal tersebut tercapai karena adanya dukungan anggaran oleh Kementerian Lingkungan Hidup Kehutanan melalui DAK Sub Bidang Kehutanan. Pada program ini dilakukan penanaman bambu seluas 20 Ha, dan pengkayaan hutan rakyat seluas 100 Ha yang lokasi penanamannya tersebar pada 12 lokasi dan secara spot-spot, tidak dalam satu hamparan. Luas lahan kritis yang direhabilitasi pada tahun 2016 seluas 120 Ha atau 1,49 % dari total lahan kritis (8.034 Ha).

Indikator kinerja ketiga tentang persentase jumlah pohon yang ditanam dan tumbuh ditargetkan 90 %. Dari dua sub kegiatan yang dilaksanakan yaitu penanaman bambu seluas 20 Ha dan pengkayaan hutan rakyat seluas 120 Ha, target yang telah ditetapkan tidak dapat terealisasi dan hanya mencapai dengan capaian 87,11 % berdasarkan hasil evaluasi tanaman, rata-rata persen tumbuh tanaman masing-masing item kegiatan adalah 78,40 %. Target tersebut tidak dapat tercapai disebabkan oleh musim kemarau kurang lebih satu bulan kemudian setelah penanaman dilaksanakan. Meskipun persentase tumbuh tanaman hanya mencapai 78,40 % tapi bisa dikategorikan berhasil dan itu bisa tercapai berkat dukungan dan kerja sama dari pihak terkait antara lain pelaksana swakelola, penyedia bibit, pemerintah desa dan masyarakat setempat.

Untuk indikator pertama mengenai persentase luas lahan kritis terhadap luas wilayah ditargetkan untuk tahun 2015 sebesar 15 %. Angka ini apabila semakin sedikit pertanda bahwa luas lahan kritis yang ada di Kabupaten Bantaeng juga semakin menurun. Dari total luas wilayah Kabupaten Bantaeng 39.585 Ha terdapat lahan kritis sebanyak 8.807 ha (22,25 %) pada tahun 2013. Pada tahun 2014 dilakukan rehabilitasi seluas 605 Ha sehingga jumlah lahan kritis berkurang menjadi 8.202 Ha atau 20,72 % terhadap luas wilayah. Target sebesar 15 % tidak dapat terealisasi karena terkendala anggaran untuk kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan. Lahan kritis tersebut dari tahun ke tahun diharapkan akan semakin menipis dan bahkan sampai pada angka 0 %.

Indikator kinerja kedua tentang persentase luas lahan kritis yang direhabilitasi yang ditargetkan sebanyak 3,25 % dari total luas lahan kritis 8.807 Ha. Target 3,25 % atau seluas 286,2 Ha lahan kritis yang harus direhabilitasi di tahun 2014 melalui program rehabilitasi hutan dan lahan. Capaian pada indikator ini melampaui target yaitu 6,87 % atau seluas 605 Ha dengan persentase capaian kinerja 211,38 %. Hal tersebut dapat tercapai karena adanya dukungan anggaran oleh Kementerian Kehutanan melalui DAK Bidang Kehutanan. Pada program ini dilakukan pemeliharaan reboisasi pengkayaan seluas 50 Ha, pembuatan hutan rakyat seluas 120 Ha, reboisasi 60 Ha dan Kebun Bibit Rakyat (KBR) seluas 375 Ha. Luas lahan kritis yang direhabilitasi seluas 605 ha atau 6,87 % dari total lahan kritis (8.807 Ha).

Indikator kinerja ketiga tentang persentase jumlah pohon yang ditanam dan tumbuh ditargetkan 90 %. Target tersebut dapat terealisasi 102,17 % berdasarkan hasil evaluasi tim dari dinas kehutanan dan perkebunan yang menunjukkan rata-rata persen tumbuh tanaman masing-masing item kegiatan adalah 91,95 %. Capaian tersebut didapat berkat dukungan dan kerja sama dari



pihak terkait seperti kontraktor pelaksana, pemerintah desa dan masyarakat setempat.

Sasaran 18 *Meningkatnya fungsi hutan non kayu untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar kawasan hutan*

Untuk mengukur pencapaian sasaran meningkatnya fungsi hutan non kayu untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar kawasan hutan, ditetapkan indikator sasaran yaitu persentase kenaikan rata-rata pendapatan masyarakat pengelola hutan desa dan persentase kenaikan rata-rata pendapatan masyarakat pengelola hutan kemasyarakatan (HKm).

Pengertian indikator sasaran yang pertama adalah pendapatan rata-rata masyarakat pengelola hutan desa pada tahun berjalan dikurangi pendapatan rata-rata masyarakat pengelola hutan desa tahun lalu dibagi pendapatan rata-rata masyarakat pengelola hutan desa tahun lalu dikali 100. Sedangkan pengertian indikator sasaran kedua adalah pendapatan rata-rata masyarakat pengelola HKm pada tahun berjalan dikurangi pendapatan rata-rata masyarakat pengelola HKm tahun lalu dibagi pendapatan rata-rata masyarakat pengelola HKm tahun lalu dikali 100.

Adapun pencapaian sasaran ini dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.43
Perbandingan antara target dan realisasi pencapaian sasaran tahun 2016

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TAHUN 2016		CAPAIAN KINERJA (%)	
				TARGET	REALISASI		
1	2	3	4	5	6	7	
18	<i>Meningkatnya fungsi hutan non kayu untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar kawasan hutan.</i>	1	Persentase kenaikan rata-rata pendapatan masyarakat pengelola hutan desa	%	5	4,2	84
		2	Persentase kenaikan rata-rata pendapatan masyarakat pengelola Hutan Kemasyarakatan (HKm)	%	0	0	0
Rata-Rata Tingkat Pencapaian						84	

Berdasarkan tabel evaluasi pencapaian sasaran meningkatnya fungsi hutan non kayu untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar kawasan hutan, dapat terlihat bahwa rata-rata tingkat pencapaian kinerja sebesar 84%.

Indikator pertama, persentase kenaikan rata-rata pendapatan masyarakat pengelola hutan desa dengan target 5 %. Jumlah produksi madu pada tahun 2016 sebanyak 521 liter dengan jumlah petani lebah madu sebanyak 80 orang. Dari produksi sebanyak 521 liter diperoleh pendapatan petani/tahun sebesar Rp. 814.063,00 pada harga Rp. 125.000,00/liter. Dari pendapatan sebesar Rp. 814.063,00 diperoleh kenaikan rata-rata pendapatan masyarakat pengelola hutan desa sebesar 4,2 % dari tahun 2015 yang perolehan pendapatan petani sebesar Rp. 781.250,00. Target persentase kenaikan rata-rata pendapatan masyarakat pengelola hutan desa sebesar 5 % belum tercapai disebabkan oleh cepatnya pergantian musim kemarau ke musim hujan pada awal bulan September dimana lebah madu tidak dapat memproduksi sebagaimana mestinya bila intensitas hujan tinggi.



Indikator kedua, persentase kenaikan rata-rata pendapatan masyarakat pengelola hutan kemasyarakatan (HKm) belum ada capaian disebabkan oleh belum adanya Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm) dari Kementerian Kehutanan sehingga belum terbuka akses untuk masyarakat dalam mengelola Hutan Masyarakat. Potensi yang bisa dikembangkan dalam Hutan Kemasyarakatan (HKm) adalah lebah madu dan air namun sampai pada akhir tahun 2016, belum ada izin pemanfaatan. Yang ada baru pada tahap penataan areal kerja Hutan Kemasyarakatan (HKm).

Tabel 3.44
Perbandingan realisasi kinerja sasaran tahun 2016 dengan tahun sebelumnya

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	REALISASI		KET
				2015	2016	
1	2	3	4	5	6	7
18	<i>Meningkatnya fungsi hutan non kayu untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar kawasan hutan.</i>	1 Persentase kenaikan rata-rata pendapatan masyarakat pengelola hutan desa	%	0	4,2	
		2 Persentase kenaikan rata-rata pendapatan masyarakat pengelola Hutan Kemasyarakatan (HKm)	%	0	0	

Indikator pertama, persentase kenaikan rata-rata pendapatan masyarakat pengelola masyarakat pengelola hutan desa dengan target 5 %. Pada tahun 2015, kenaikan rata-rata pendapatan hutan desa belum bisa dihitung karena lebah madu yang dikembangkan di Desa Labbo, Desa Pattaneteang dan Kelurahan Campaga baru berproduksi pada tahun tersebut. Jumlah produksi madu pada tahun 2016 sebanyak 521 liter dengan jumlah petani lebah madu sebanyak 80 orang. Dari produksi sebanyak 521 liter diperoleh pendapatan petani/tahun sebesar Rp. 814.063,00 pada harga Rp. 125.000,00/liter. Dari pendapatan sebesar Rp. 814.063,00 diperoleh kenaikan rata-rata pendapatan masyarakat pengelola hutan desa sebesar 4,2 % dari tahun 2015 yang perolehan pendapatan petani sebesar Rp. 781.250,00. Target persentase kenaikan rata-rata pendapatan masyarakat pengelola masyarakat pengelola hutan desa sebesar 5 % belum tercapai disebabkan oleh cepatnya pergantian musim kemarau ke musim hujan pada awal bulan September dimana lebah madu tidak dapat berproduksi sebagaimana mestinya bila intensitas hujan tinggi.

Indikator kedua, persentase kenaikan rata-rata pendapatan masyarakat pengelola hutan kemasyarakatan (HKm) belum ada capaian disebabkan oleh belum adanya Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm) dari Kementerian Kehutanan sehingga belum terbuka akses untuk masyarakat dalam mengelola Hutan Masyarakat. Potensi yang bisa dikembangkan dalam Hutan Kemasyarakatan (HKm) adalah lebah madu dan air namun sampai pada akhir tahun 2016, belum ada izin pemanfaatan. Yang ada baru pada tahap penataan areal kerja Hutan Kemasyarakatan (HKm).

Adapun dukungan program/kegiatan dalam keberhasilan pencapaian sasaran ini dilakukan oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan yang mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 4.101.577.500,00. Pada APBD Perubahan yang disahkan pada bulan Oktober 2016, jumlah anggaran menjadi Rp. 4.258.457.500,00. Dukungan anggaran untuk pencapaian sasaran tersedianya sarana dan prasarana perkebunan serta teknologi pertanian/ perkebunan tepat guna bertambah sebesar Rp. 150.000.000,00. Adapun realisasi penyerapan



2017

anggaran yang per 31 Desember 2016 sebesar Rp. 4.115.466.325,00 atau 96,64 %.

Tabel 3.45
Realisasi Anggaran pencapaian sasaran tahun 2016

No.	Sasaran Strategis	Program	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian Keuangan (%)
1.	Terjaminnya keberadaan hutan dengan luasan yang cukup dan sebaran yang proporsional	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan	998.330.700,00	988.375.700,00	99,00
		Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan	1.087.434.800,00	990.649.814,00	91,10
		Program Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan	45.449.000,00	45.429.000,00	99,96
		Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan	134.944.000,00	134.552.000,00	99,71
2.	Pulihnya kondisi hutan dan lahan	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan	998.330.700,00	988.375.700,00	99,00
3.	Meningkatnya pendapatan masyarakat sekitar kawasan hutan	Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan	134.944.000,00	134.552.000,00	99,71
4.	Tersedianya sarana dan prasarana perkebunan serta teknologi perkebunan tepat guna	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	50.081.500,00	49.881.500,00	99,60
		Program Peningkatan Ketahanan Pangan	78.813.000,00	78.763.000,00	99,94
		Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan	178.449.500,00	166.367.238,00	93,20
		Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan	850.582.000,00	845.145.000,00	99,36
		Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	257.153.500,00	251.683.500,00	97,87

Sasaran 19 *Meningkatnya kapasitas jalan dan jembatan*

Dalam mengukur keberhasilan pencapaian sasaran meningkatnya kapasitas jalan dan jembatan, indikator yang ditetapkan adalah panjang kondisi jalan rusak yang diperbaiki dan jumlah jembatan yang dibangun. Kedua indikator ini menjadi indikator kinerja utama yang ditetapkan untuk keberhasilan pencapaian sasaran.

Adapun penjelasan pencapaian sasaran ini dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.46
Perbandingan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2016

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TAHUN 2014		CAPAIAN KINERJA (%)
				TARGET	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	7
19	<i>Meningkatnya kapasitas jalan dan jembatan.</i>	1 Panjang Kondisi Jalan Rusak yang diperbaiki	Meter	10.000	9.146	91.46
		2 Jumlah Jembatan yang dibangun	Unit	2	2	100
Rata-Rata Tingkat Pencapaian						94.43

Dari hasil evaluasi pencapaian sasaran sebagaimana pada tabel 3.32, terlihat bahwa rata rata tingkat pencapaian sudah sangat baik yakni sebesar 94.43%. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa pencapaian indikator yang mampu direalisasikan dengan baik.

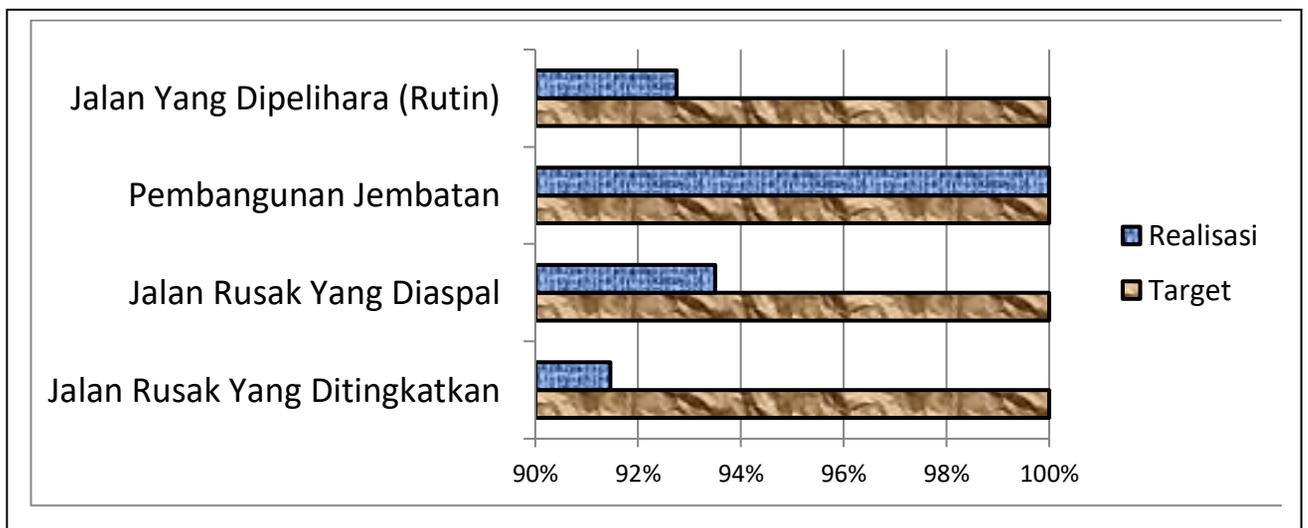
Dari indikator kondisi jalan rusak yang diperbaiki dari target 10.000 meter dapat direalisasikan sepanjang 9.146 m. Begitu pula halnya dengan indikator panjang jalan yang diaspal dapat direalisasikan sepanjang 1.496 meter dari target sepanjang 1.600 meter.

Sedangkan jumlah jembatan yang dibangun sebanyak 2 unit dan panjang jalan dan jembatan yang dipelihara dapat direalisasikan sepanjang 7.420 meter dari target sepanjang 8.000 meter.

Berdasarkan data jalan yang digambarkan pada tabel diatas bahwa pada tahun 2014, keadaan jalan yang rusak berat mencapai 38,07 km. Jika dibandingkan dengan tahun 2013, terjadi perbaikan sehingga jalan yang rusak mengalami pengurangan 5,3 km.

Begitu pula halnya dengan kondisi jalan yang baik, jika dibandingkan dengan tahun 2014 sepanjang 409.87 km terjadi peningkatan pada tahun 2015 sepanjang 420,47 km.

Grafik Kinerja Bidang Bina Marga
Dinas PU & Kimpraswil Kab. Bantaeng 2015



Tabel 3.47
Perbandingan Pencapaian Kinerja Sasaran 19

INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TAHUN 2016		CAPAIAN KINERJA (%)	TAHUN 2016		CAPAIAN KINERJA (%)	
		TARGET	REALISASI		TARGET	REALISASI		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Panjang Kondisi Jalan Rusak yang diperbaiki	Meter	10.000	9.146,00	91,46	10.000	9.146	91.46
2	Panjang Jenis Permukaan jalan batu/kerikil/tanah yang diaspal	Meter	1.000	746	85,04	1600	1496	93.50
3	Jumlah Jembatan yang dibangun	Unit	0	0	0	2	2	100
4	Panjang Jalan dan Jembatan yang dipelihara	meter	5000	42000	85,47	8000	7420	92.75
Rata-Rata Tingkat Pencapaian				65.50				94.43

Berdasarkan tabel perbandingan pencapaian kinerja sasaran meningkatnya kapasitas jalan dan jembatan pada tahun 2014, terlihat bahwa capaian kinerja indikator masih relatif belum baik bila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2015. Capaian kurang terlihat pada indikator jumlah jembatan yang dibangun pada tahun 2014 tidak ditargetkan. Hal ini ikut mempengaruhi capaian kinerja peningkatan kapasitas jalan dan jembatan tahun 2013.

Sasaran 20 *Optimalnya pelaksanaan pembangunan pelabuhan Bantaeng*

Tabel 3.48
Evaluasi Pencapaian Sasaran 20

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TAHUN 2016		CAPAIAN KINERJA (%)	
				TARGET	REALISASI		
1	2	3	4	5	6	7	
20	<i>Optimalnya pelaksanaan pembangunan pelabuhan Bantaeng</i>	1	Jumlah dokumen DLKp dan DLKr Pelabuhan Bantaeng	dok	7	6	85.71
		2	Persentase peningkatan operasional pelabuhan laut Bantaeng	%	12.57	12.57	100
		3	Persentase peningkatan pembangunan sarana dan prasarana sekitar kawasan pelabuhan Bantaeng	%	61	61	100
Rata-Rata Tingkat Pencapaian						95.24	

Dari tabel evaluasi pencapaian sasaran optimalnya pelaksanaan pembangunan Pelabuhan Bantaeng, terlihat rata-rata tingkat pencapaian kinerja sudah baik yakni sebesar 96.24%. Pencapaian kinerja ini dilakukan melalui capaian indikator sasaran sebanyak 3 indikator, jumlah dokumen DLKp dan DLKr Pelabuhan Bantaeng yang capaiannya sebesar 85.71%, indikator persentase peningkatan operasional dan pembangunan pelabuhan Bantaeng mencapai 100%.

Perencanaan Pembangunan Pelabuhan Bantaeng dilakukan melalui penyusunan Studi Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan (DLKp) dan Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan (DLKr) dengan menghasilkan beberapa dokumen yaitu :

1. Dokumen Perencanaan Pendahuluan (*Inception Report*).
2. Laporan Antara (*Interin Report*)
3. Laporan Akhir Sementara (*Draft Final Report*)
4. Laporan Akhir (*Final Report*)
5. Dokumen Gambar Pelabuhan
6. Soft Copy Laporan ES Pelabuhan

Sedangkan Operasional Pelabuhan Laut Kabupaten Bantaeng telah dapat dilalui Kapal Perintis MITRA PAPUA secara rutin antara 2-3 hari sebagai bagian dari Rute Pelayaran PP Makassar-Bantaeng_Selayar-Kayuadi-Maumere-Manggarai. Selain itu pelabuhan laut telah melaksanakan kegiatan bongkar muat yang rata-rata dilakukan oleh Kapal-Kapal Perintis dengan muatan sebesar 50 Ton.

Foto-Foto Kegiatan Pelabuhan Laut Bantaeng





Sasaran 21 *Berkembangnya pasar berbasis Kecamatan pada kawasan strategis*

Tabel 3.49
Evaluasi Pencapaian Sasaran 21

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TAHUN 2016		CAPAIAN KINERJA (%)	
				TARGET	REALISASI		
1	2	3	4	5	6	7	
21	<i>Berkembangnya pasar berbasis Kecamatan pada kawasan strategis</i>	1	Jumlah desa yang telah memiliki pasar desa	Desa	25	22	87
		2	Persentase pengembangan pasar dan distribusi barang/produk	%	85	85	100
Rata-Rata Tingkat Pencapaian						93.5	

Berdasarkan tabel evaluasi pencapaian sasaran berkembangnya pasar berbasis kecamatan pada kawasan strategis, tergambar bahwa rata-rata tingkat pencapaian kinerja sasaran sebesar 93.50%. Pencapaian kinerja sasaran ini didukung oleh pencapaian kinerja indikator jumlah desa yang memiliki pasar desa sebanyak 22 desa atau 87% dan pencapaian kinerja indikator persentase pengembangan pasar dan distribusi barang dan produk yang mencapai 100%.

Sasaran 22 *Berkembangnya usaha-usaha berbasis home industry olahan hasil-hasil sumber daya alam, berbasis karakteristik desa/kelurahan*

Tabel 3.50
Evaluasi Pencapaian Sasaran 22

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TAHUN 2016		CAPAIAN KINERJA (%)	
				TARGET	REALISASI		
1	2	3	4	5	6	7	
22	<i>Berkembangnya usaha-usaha berbasis home industry olahan hasil-hasil sumber daya alam, berbasis karakteristik desa/ kelurahan.</i>	1	Pertumbuhan usaha sektor industri	Unit	474	350	73.90
		2	Pertumbuhan sentra IKM baru	Sentra	1	1	100
		3	Jumlah Jenis Produk yang telah memiliki kemasan	Unit	35	35	100
Rata-Rata Tingkat Pencapaian						94.4	

Dengan melihat tabel evaluasi pencapaian sasaran berkembangnya usaha-usaha berbasis *home industry* olahan hasil-hasil sumber daya alam berbasis karakteristik desa/kelurahan, nampak bahwa rata-rata tingkat pencapaian



kinerja sasaran bernilai sangat baik atau sebesar 94.4%. Capaian kinerja sasaran ini didukung oleh pencapaian kinerja 6 (enam) indikator yang bernilai baik.

Jumlah Koperasi yang mendapatkan bantuan Fasilitas Modal dari Pemerintah pada tahun 2014 sebanyak 4 Koperasi mendapatkan bantuan dari Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia, dan dari 45 Kelompok yang mengikuti Pelatihan Wirausaha Desa sebanyak 23 Kelompok Wirausaha Desa yang mendapatkan penghargaan berupa bantuan modal dari Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Selatan masing – masing sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah)

Dari data diatas dapat diuraikan bahwa Jumlah Pengelola Koperasi dan UKM yang mengikuti Pelatihan terealisasi sebanyak 45 Kelompok UKM sementara target Kinerja 40 KUKM, hal ini menunjukkan bahwa perbandingan target kinerja dengan capaian kinerja sebesar 112,5%. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bantaeng dengan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulawesi Selatan melalui program Pengembangan Wirausaha Desa. Sumber anggaran dari APBD Provinsi Sulawesi Selatan. Dan dari 45 Kelompok yang mengikuti pelatihan sebanyak 23 Kelompok mendapatkan penghargaan dalam bentuk bantuan permodalan sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) setiap Kelompok.

Sasaran 23

Terwujudnya Bantaeng menjadi Daerah tujuan wisata di bagian selatan Sulawesi Selatan

Tabel 3.51
Evaluasi Pencapaian Sasaran 23

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TAHUN 2015		CAPAIAN KINERJA (%)
				TARGET	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	7
23	<i>Terwujudnya Bantaeng menjadi Daerah tujuan wisata di bagian selatan Sulawesi Selatan</i>	1 Jumlah pembangunan sarana penunjang pariwisata	unit	8	8	100
		2 Kegiatan sarana promosi wisata	kegiatan	2	1	50
		3 Jumlah festival dan event daerah dalam menunjang promosi wisata	event	4	4	100
Rata-Rata Tingkat Pencapaian						83.33

Dari tabel evaluasi pencapaian sasaran terwujudnya Bantaeng menjadi daerah tujuan wisata di bagian selatan Sulawesi Selatan, terlihat bahwa rata-rata tingkat pencapaian sudah baik dengan nilai 83.33 %. Pencapaian kinerja sasaran ini didukung oleh pencapaian indikator jumlah sarana penunjang pariwisata, kegiatan sarana promosi wisata dan jumlah festival dan event dalam menunjang promosi wisata.

Beberapa objek wisata yang berada di Kabupaten Bantaeng dapat dibagi dalam beberapa kategori, diantaranya :

1. Objek Wisata Tirta / alam

- a. Air Terjun Salluang Desa Bonto Salluang Kec. Bissappu.
- b. Air Terjun Bantimurung Desa Bonto Salluang Kec. Bissappu.
- c. Air Terjun Sungai Bialo Desa Patteneteang Kec. Tompobulu.
- d. Air Terjun Muntea Desa Bonto Lojong Kec. Uluere.
- e. Air Terjun Pa'bentengan Desa Pa'bentengang Kec. Eremerasa.



- f. Permandian Mata Air Eremerasa (Kolam Ermes) Desa Kampala
- 2. Wisata Pantai – Laut (Marine – Tourism) terdiri dari :**
- Pantai Pasir Putih Marina Korong Batu Desa Baruga Kec.Pa'jukukang.
 - Pantai Seruni Kel. Pallantikang Kec. Bantaeng
 - Pantai Lamalaka Kel. Lembang Kec. Bantaeng.
 - Lokasi Penyelaman (Diving).
 - Areal Lahan Rumput Laut.
 - Kawasan Kolam Mancing Pantai Marina Korong Batu Desa Baruga.
 - Pelabuhan Mattoanging Desa Bonto Jai Kec. Bissappu.
- 3. Wisata Agro (Agro Tourism) terdiri dari :**
- Kawasan Holtikultura (Kebun Wortel, Kentang, Kol/Kubis, Bawang Merah).
 - Kawasan Perkebunan (Kebun Kopi, Cengkeh, Durian, Apel, Rambutan, Langsung, Manggis, Strawberry).
 - Green House Loka Desa Bonto Marannu Kec. Uluere.
- 4. Kawasan Eko Wisata (Eco – Tourism) terdiri dari :**
- Hutan Lindung Campaga Kel. Campaga Kec. Tompobulu.
 - Area Konservasi Hutan Bakau (Mangrove) pesisir pantai.
 - Kawasan Eko Wisata Pantai Marina Desa Baruga Kec. Pajukukang.
- 5. Obyek dan Daya Tarik Wisata Budaya.**
- Rumah Adat Balla Lompoa Kel. Letta Kec. Bantaeng
 - Rumah Adat Balla Lompoa Lantebung Kel. Letta Kec. Bantaeng
 - Balla Tujua Onto Kel. Onto Kec. Bantaeng.
 - Kawasan Adat Gantarang Keke Kec. Gantarangkeke.
 - Gua Batu Ejayya Campagaloe Kel. Bonto Jaya Kec. Bissappu.
 - Pangnganreang Tudea Ejayya Kel. Bonto Jaya Kec. Bissappu.
 - Masjid Jami Tompong Kel. Letta Kec. Bantaeng
 - Makam Datuk Pakkalimbungan Kec. Bissappu
 - Makam Tau Tetea ri Je"ne Kel. Letta Kec. Bantaeng.
 - Makam Bonto Bonto Desa Ulugalung Kec. Bantaeng.
 - Kompleks Makam La Tenri Ruwa Kel. Pallantikang .
 - Kompleks Pekuburan Belanda Kel. Pallantikang Kec. Bantaeng
 - Pesta Adat Gantarangkeke Kel. Gantarangkeke
 - Atraksi Pepe Pepeka Kel. Karatuang Kec. Bantaeng.
 - Hari Jadi Bantaeng 7 Desember setiap tahun.
- 6. Obyek dan Daya Tarik Wisata Buatan/Minat Khusus.**
- Loka Camp Resort and Outbound Desa Bonto Marannu
 - Taman Bermain Anak Pantai Seruni Kel. Tappanjeng .
 - Pasar Cakar Pantai Seruni Kel. Tappanjeng Kec. Bantaeng.
 - Road Race dan Drag Race (Balap Motor dan Mobil) Kel. Bonto
 - Wisata Kuliner / Jajanan Kel. Lembang Kec. Bantaeng.
 - Anjungan Pantai Seruni Kel. Pallantikang Kec. Bantaeng.

Sedangkan pencapaian target indikator kinerja jumlah sarana promosi wisata dicapai melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata, kegiatan ini menitik beratkan pada pengadaan sarana dan prasarana objek wisata pantai marina dan sarana promosi pariwisata berupa Iklan Bando Billboard dan dan Elektronik Layar Lebar.
- Pengembangan Jenis dan Paket Unggulan, kegiatan ini menitik beratkan pada petugas objek wisata yaitu untuk biaya operasional petugas kebersihan,

- kolekter, petugas taman, petugas toilet dai petugas TIC di objek wisata Pantai Marina,Permandian Alam Eremerasa dan air Terjun Bissappu.
3. Pelaksanaan Koordinasi Pembangunan Objek Pariwisata dengan Lembaga /Dunia Usaha, kegiatan menitik beratkan pada fasilitasi pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilihan Duta Wisata yaitu pemilihan Dara dan Daeng dan pemeilihan putri pariwisata mulai dari pemilihan tingkat kabupaten sampai tingkat provinsi.
 4. Pengembangan Daerah Tujuan Wisata Unggulan, kegiatan diperuntukkan untuk pengadaan Gasebo berjumlah 5 unit dan AC standing sebanyak 3 unit untuk objek wisata marina

Foto-foto Potensi Objek Wisata Kabupaten Bantaeng





2017

Sasaran 24

Meningkatnya kualitas dan fasilitasi layanan investasi untuk menjaga iklim investasi Sulawesi Selatan untuk memaksimalkan Bantaeng sebagai pusat pengembangan Industri di bagian Selatan Sulawesi Selatan

Tabel 3.52
Evaluasi Pencapaian Sasaran 24

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TAHUN 2016		CAPAIAN KINERJA (%)	
				TARGET	REALISASI		
1	2	3	4	5	6	7	
24	<i>Meningkatnya kualitas dan fasilitasi layanan investasi untuk menjaga iklim investasi Sulawesi Selatan untuk memaksimalkan Bantaeng sebagai pusat pengembangan Industri di bagian Selatan Sulawesi Selatan</i>	1	Jumlah perusahaan yang berinvestasi dan telah menandatangani MOU	Perusahaan	26	26	100
		2	Persentase pertumbuhan industri yang mampu menciptakan lapangan kerja	%	10	5	50
		3	Persentase investasi di bidang industry	%	40	37.100	100
Rata-Rata Tingkat Pencapaian						83.3	

Berdasarkan tabel evaluasi pencapaian sasaran meningkatnya kualitas dan fasilitasi layanan investasi untuk menjaga iklim investasi Sulawesi Selatan untuk memaksimalkan Bantaeng sebagai pusat pengembangan industri di bagian selatan Sulawesi Selatan, terlihat bahwa rata-rata tingkat pencapaian sebesar 87,50%. Capaian kinerja masing-masing indikator sasaran rata-rata mencapai 100%, hanya indikator persentase pertumbuhan industri yang mampu menciptakan lapangan kerja yang belum mencapai realisasi sesuai target yang ditetapkan.

Sasaran 25

Berkembangnya wawasan dan perilaku masyarakat dalam mewujudkan kondisi tertib dan aman dalam pelaksanaan pembangunan dan era globalisasi serta Asean Community 2015

Tabel 3.53
Evaluasi Pencapaian Sasaran 25

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TAHUN 2016		CAPAIAN KINERJA (%)	
				TARGET	REALISASI		
1	2	3	4	5	6	7	
25	<i>Berkembangnya wawasan dan perilaku masyarakat dalam mewujudkan kondisi tertib dan aman dalam pelaksanaan pembangunan dan era globalisasi serta Asean Community 2015</i>	1	Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	%	100	99.69	99.69
		2	Pemeliharaan Kantratibmas dan pencegahan tindakan kriminal	%	100	99.75	99.75
Rata-Rata Tingkat Pencapaian						99.81	

Dokumen Kontrak 132 orang anggota Satuan Polisi Pamong Praja tersebut di tuangkan dalam Keputusan Bupati Bantaeng Nomor : 342/65/I/2014 tanggal



07 Januari 2014 dan diubah dikarenakan 1 orang anggota kontrak melakukan tindakan indisipliner dalam Keputusan Bupati Bantaeng Nomor : 342/201/III/2014, tanggal 20 Maret 2014, kemudian sebanyak 133 orang. Surat Keputusan ini kembali diubah dikarenakan kembali adanya Anggota Kontrak yang mengundurkan diri sehingga jumlahnya berkurang menjadi 132 orang yang dituangkan dalam Surat Keputusan Nomor : 342/432/X/2014 pada tanggal 01 Oktober 2014.

Dalam melaksanakan tugas, tenaga Kontrak tersebut diberikan upah kontrak sesuai anggaran yang tersedia dalam APBD Tahun Anggaran 2014. Artinya Kantor Satuan Polisi Pamong Praja harus mempersiapkan Anggaran sebesar **Rp.804.075.000** di Tahun 2014 guna Penyiapan Tenaga Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan dengan rincian 1 tenaga kontrak mendapat gaji/honor sebesar **Rp. 500.000,- x 132 orang = Rp. 66.000.000,-**. Total realisasi Anggaran untuk Tenaga Pengendalian pada Bulan Desember 2014 **Rp. 790.000.000,-**.

Sasaran 26 *Meningkatnya kualitas dan peran koperasi / BUMDES dalam mendorong usaha UMKM*

Tabel 3.54
Evaluasi Pencapaian Sasaran 26

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TAHUN 2016		CAPAIAN KINERJA (%)
				TARGET	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	7
26	Meningkatnya kualitas dan peran koperasi / BUMDES dalam mendorong usaha UMKM	1 Jumlah pengurus Bumdes yang mengikuti peningkatan kapasitas tentang pengelolaan BUMDES	orang	46	46	100
		2 Peningkatan jumlah koperasi	unit	5	5	100
		3 Persentase Koperasi Sehat	%	64,62	65.00	100.58
		4 Jumlah Pengelola KUKM yang terlatih dan memanfaatkan IT	Orang	40	45	112.50
Rata-Rata Tingkat Pencapaian						103.27

Berdasarkan data capaian diatas dapat diuraikan bahwa Pencapaian target kinerja persentase KSP/USP Sehat, dimana target kinerja yang ditetapkan pada tahun anggaran 2014 sebesar 5% atau sebanyak 6 (Enam) Buah Koperasi sementara capaian kinerja tahun 2014 sebesar 38,46%. Ini didapatkan Perbandingan Jumlah KSU/USP sebanyak 104 Unit. Sedangkan yang sehat sebanyak 40 KSP/USP. Hal ini menunjukkan bahwa Pengelolaan Koperasi Simpan Pinjam / Unit Simpan Pinjam rata – rata dalam konsisi keuangan yang sehat sehingga dapat melayani kebutuhan anggotanya dengan baik



2017

Tabel 3.55
Data Keadaan Koperasi di Kabupaten Bantaeng

No	Uraian	Tahun		Peningkatan	Persentase Peningkatan
		2013	2014		
1	Jumlah Koperasi	212	217	5	2 %
2	Jumlah Anggota	23.157	27.221	4.068	18 %
3	Modal Sendiri	59.173.615.090,85	64.043.313.269,00	4.869.698.178,04	8 %
4	Modal Luar	18.334.482.456,31	17.862.896.839,00	(42.950.302)	(0.24)%
5	Volume Usaha	68.094.971.018,46	75.068.355.630,00	17.537.738.435	30 %
6	Sisa Hasil Usaha	4.181.817.249,04	5.456.420.257,00	1.309.400,07	30,48 %

Sasaran 27

Berkembangnya usaha home industry yang memberikan nilai tambah hasil-hasil pertanian

Tabel 3.56
Evaluasi Pencapaian Sasaran 27

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TAHUN 2014		CAPAIAN KINERJA (%)
				TARGET	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	7
27	<i>Berkembangnya usaha home industry yang memberikan nilai tambah hasil-hasil pertanian</i>	1 PDRB sektor industri	rupiah	34.000	29.903.	87.95
2		Persentase pemanfaatan lembaga pemasaran industri dan pengolahan hasil industri melalui UPTD Rumah Kemasan dan Show Room Hasil Industri	%	75	50	66.66
3		Jumlah kegiatan promosi usaha home industry berskala nasional yang diikuti	kegiatan	5	3	60.00
Rata-Rata Tingkat Pencapaian						71.53

Sasaran 28

Berkembangnya kerjasama antar desa dalam pemanfaatan dan pengelolaan Potensi Desa

Tabel 3.57
Evaluasi Pencapaian Sasaran 28

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TAHUN 2015		CAPAIAN KINERJA (%)	
				TARGET	REALISASI		
1	2	3	4	5	6	7	
28	<i>Berkembangnya kerjasama antar desa dalam pemanfaatan dan pengelolaan Potensi Desa</i>	1	Kemitraan swasta dan UKM di pedesaan	desa	46	20	43.48
		2	Persentase desa yang memanfaatkan potensi desa dalam membangun desa mandiri	%	75	50	66.66
		3	Persentase desa yang telah melakukan kemitraan dengan pihak swasta dan UKM dalam pembangunan ekonomi desa	%	60	30	50
Rata-Rata Tingkat Pencapaian						53.38	

Dari hasil evaluasi pencapaian sasaran berkembangnya kerjasama antar desa dalam pemanfaatan dan pengelolaan potensi desa dapat dilihat bahwa rata-rata tingkat pencapaian kinerja sasaran masih kurang atau hanya mencapai 53.38%. Beberapa indikator yang ditetapkan untuk mendukung pencapaian sasaran ini belum memenuhi realisasi sebagaimana yang ditargetkan. Indikator yang dianggap kurang mencapai target yang mempengaruhi pencapaian kinerja sasaran ini adalah kemitraan swasta dengan UKM di pedesaan masih sebesar 43.48%, persentase desa yang memanfaatkan potensi desa dalam membangun desa mandiri masih kurang (66,66%) dan persentase desa yang melakukan kemitraan dengan swasta dalam membangun ekonomi desa masih 50%.

Masih kurangnya pencapaian beberapa indikator ini dipengaruhi oleh kurangnya desa dalam melakukan pengelolaan sumber daya sehingga menjadi daya tarik bagi investasi swasta dalam membangun desanya. Disamping itu pula potensi sumber daya yang ada di desa masih dikelola secara tradisional, sehingga daya saing produksinya belum memberikan hasil yang ekonomis. Oleh karena itu perlu adanya fasilitasi bagi masyarakat desa oleh Pemerintah Daerah dalam memaksimalkan potensi sumber daya desa dalam bentuk mengajak pihak swasta untuk bekerjasama dalam membangun desa.

Sasaran 29	<i>Meningkatnya kontribusi swasta / masyarakat dalam upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat</i>
-------------------	---

Tabel 3.58
Evaluasi Pencapaian Sasaran 29

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TAHUN 2016		CAPAIAN KINERJA (%)	
				TARGET	REALISASI		
1	2	3	4	5	6	7	
29	<i>Meningkatnya kontribusi swasta / masyarakat dalam upaya pemberdayaan</i>	1	Persentase kontribusi swasta dalam upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat	%	60	30	50

	<i>ekonomi masyarakat</i>	2	Persentase kontribusi pengelolaan BUMDES dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat	%	90	85	94.44
		3	Jumlah pengurus BUMDES yang mengikuti peningkatan kapasitas pengelolaan BUMDES	Orang	46	46	100
Rata-Rata Tingkat Pencapaian							81.48

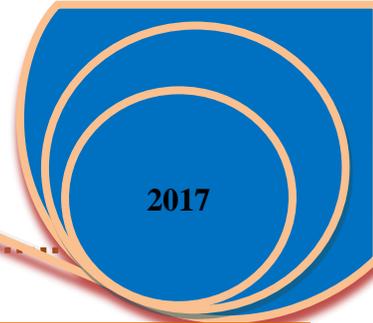
Dari tabel hasil evaluasi pencapaian sasaran meningkatnya kontribusi swasta / masyarakat dalam upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat dapat dilihat bahwa rata-rata tingkat pencapaian kinerja sudah baik dengan persentase sebesar 81.48%. Capaian yang cukup tinggi dihasilkan melalui indikator jumlah pengurus BUMDES yang mengikuti peningkatan kapasitas pengelolaan BUMDES sebesar 100% dan persentase kontribusi pengelolaan BUMDES dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat yang cukup baik atau sebesar 94.44%.

Sasaran 30	<i>Terbangunnya kemitraan dengan organisasi social masyarakat dalam pemanfaatan Dana Corporate Sosial Responsibility (CSR)</i>
-------------------	---

Tabel 3.59
Evaluasi Pencapaian Sasaran 30

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TAHUN 2016		CAPAIAN KINERJA (%)	
				TARGET	REALISASI		
1	2	3	4	5	6	7	
30	<i>Terbangunnya kemitraan dengan organisasi social masyarakat dalam pemanfaatan Dana Corporate Sosial Responsibility (CSR)</i>	1	Realisasi penerimaan infaq, sedekah dan zakat yang dilaksanakan BAZDA	juta	1,000	940.364	94.07
		2	Jumlah penerimaan bantuan swasta dalam penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bantaeng	juta	5.000	3.000	60.00
		3	Persentase SKPD yang bekerjasama dengan pihak swasta dalam penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bantaeng	SKPD	28	5	17.85
Rata-Rata Tingkat Pencapaian						57.31	

Berdasarkan tabel hasil evaluasi pencapaian sasaran terbangunnya kemitraan dengan organisasi social masyarakat dalam pemanfaatan Dana Corporate Sosial Responsibility (CSR) dapat dilihat bahwa rata-rata tingkat pencapaian kinerja masih kurang dengan persentase sebesar 57.31%. Rendahnya pencapaian kinerja sasaran ini lebih disebabkan oleh indikator rendahnya persentase SKPD yang bekerjasama dengan pihak swasta dalam penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bantaeng.



Sasaran 31 *Terwujudnya Kelembagaan Pemerintah Daerah Yang Sesuai dengan Semangat Reformasi Birokrasi*

Tabel 3.60
Evaluasi Pencapaian Sasaran 31

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TAHUN 2016		CAPAIAN KINERJA (%)	
				TARGET	REALISASI		
1	2	3	4	5	6	7	
31	<i>Terwujudnya Kelembagaan Pemerintah Daerah Yang Sesuai dengan Semangat Reformasi Birokrasi</i>	1	Jumlah SKPD yang kelembagaannya sesuai dengan ketentuan	SKPD	3	2	66.67
		2	Jumlah SKPD yang telah memiliki Job Description	SKPD	5	5	100
		3	Penyusunan dokumen penataan ketatalaksanaan	Dok	5	5	100
Rata-Rata Tingkat Pencapaian						88.89	

Berdasarkan tabel evaluasi pencapaian sasaran terwujudnya kelembagaan Pemerintah Daerah yang sesuai dengan semangat Reformasi Birokrasi, terlihat bahwa rata-rata pencapaian kinerja sasaran bernilai cukup sebesar 88.89%. Hal ini dipengaruhi oleh tidak tercapainya target dari indikator Penyusunan Naskah Akademik Penataan Kelembagaan SKPD hanya sebesar 66.67%.

Pada Tahun 2015, Pemerintah Kabupaten Bantaeng telah menargetkan penataan/pembentukan kelembagaan perangkat daerah yang baru terdiri dari :

1. Pembentukan Kelembagaan Badan Penanaman Modal dan Perijinan ;
2. Peningkatan Status Kelembagaan Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah
3. Pembentukan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bantaeng.

Dari ketiga kegiatan tersebut, yang belum terlaksana adalah kegiatan Pembentukan Kelembagaan Badan Penanaman Modal dan Perijinan, disebabkan belum adanya dukungan dana dalam proses Penyusunan Kajian Akademik dan Proses Legislasi di DPRD. Sedangkan kegiatan Peningkatan status kelembagaan Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah sudah dalam tahap Proses Legislasi di DPRD Kabupaten Bantaeng.

Adapun Pembentukan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bantaeng sudah dilakukan pengusulan ke Badan Narkotika Nasional di Jakarta dan diharapkan di Tahun 2016 dapat direalisasikan pembangunan gedung kantor BNN Kabupaten Bantaeng.

Indikator Penyusunan Peraturan Bupati tentang Pembentukan UPT Dinas/ Badan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantaeng, pada Tahun 2015 Pemerintah Kabupaten Bantaeng melalui Bagian Organisasi Sekretariat Daerah telah menyelesaikan Perbup Pembentukan UPT sebanyak 5 Perbup terdiri dari :

1. Peraturan Bupati Bantaeng tentang Pembentukan Organisasi dan Tata kerja UPTD Balai Benih Holtikultura Pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Bantaeng
2. Peraturan Bupati Bantaeng tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja UPTD Balai Benih Daerah Tanaman Pangan Pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Bantaeng
3. Peraturan Bupati Bantaeng tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja UPTD Perbibitan Ternak Unggul Pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Bantaeng.
4. Peraturan Bupati Bantaeng tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja UPTD Kawasan Pantai Marina Pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata



- Peraturan Bupati Bantaeng tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja UPTD Pada Dinas Perdagangan, Perindustrian, Pertambangan dan Energi Kabupaten Bantaeng.

Sedangkan indikator penyusunan dokumen penataan ketatalaksanaan, melalui kerjasama dengan Pihak Ketiga telah dapat diselesaikan dokumen sebagai berikut :

- Dokumen Standar Pelayanan Minimal 15 Bidang
- Dokumen Evaluasi Jabatan 8 SKPD
- Dokumen SOP 15 SKPD
- Dokumen Perbup tentang Pakaian Dinas Lingkup Pemerintah Kabupaten Bantaeng.
- Dokumen Laporan Kinerja 2014 dan Penetapan Kinerja Tahun 2015.

Sasaran 32 *Terwujudnya pengendalian dan perencanaan pembangunan yang berkualitas berbasis Teknologi*

Dalam mengukur keberhasilan pencapaian sasaran terwujudnya pengendalian dan perencanaan pembangunan yang berkualitas berbasis teknologi, ditetapkan indikator kinerja terdiri dari : jumlah dokumen data-data statistik pembangunan daerah, persentase rekomendasi tindak lanjut hasil pemeriksaan Inspektorat, persentase program RKPD di akomodir dalam APBD dan persentase program usulan Musrembang di akomodir dalam APBD.

Tabel 3.61
Perbandingan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2016

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TAHUN 2016		CAPAIAN KINERJA (%)	
				TARGET	REALISASI		
1	2	3	4	5	6	7	
32	<i>Terwujudnya pengendalian dan perencanaan pembangunan yang berkualitas berbasis Teknologi</i>	1	Jumlah dokumen data-data statistik pembangunan daerah	dok	7	6	100
		2	Persentase rekomendasi tindak lanjut hasil pemeriksaan Inspektorat	%	99,46	99,5	100
		3	Persentase Program RKPD di akomodir dalam APBD	%	95	95	100
		4	Persentase Program Usulan Musrembang Kabupaten di akomodir dalam APBD	%	60	45	75
Rata-Rata Tingkat Pencapaian						93,75	

Berdasarkan tabel perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2016, dapat diketahui bahwa rata-rata tingkat pencapaian sasaran terwujudnya pengendalian dan perencanaan pembangunan yang berkualitas berbasis teknologi sudah sangat baik atau sebesar 93,75%.

Sedangkan pencapaian sasaran pengendalian yang dilakukan Inspektorat Kabupaten melalui pencapaian indicator kinerja sebagaimana tabel berikut ini;

Tabel 3.61
Pencapaian indikator kinerja sasaran pengendalian

INDIKATOR KINERJA		SAT	TAHUN 2015	TAHUN 2016		Capaian Kinerja thn (2016) %
			REALISASI	TARGET	REALISASI	
1	Persentase SKPD yang bebas dari temuan kerugian Negara	%	100	100	100	
2	Persentase Sekolah yang bebas dari temuan kerugian Negara	%	4.1	25	30	
3	Persentase desa yang bebas dari temuan kerugian Negara	%	100	100	100	
4	Persentase rekomendasi tindaklanjut hasil pemeriksaan BPK RI	%	74,50	74,50	74,50	
5	Persentase rekomendasi tindaklanjut hasil pemeriksaan Itprov	%	57,34	57,34	57,34	
6	Persentase rekomendasi tindaklanjut hasil pemeriksaan ItKab	%	99,5	99,46	99,5	

1. Persentase SKPD yang bebas temuan kerugian negara

Dari hasil evaluasi terhadap Indikator kinerja Persentase SKPD yang bebas dari temuan kerugian negara, ditargetkan sebesar 100% dan terealisasi sebesar 100%. Tingkat capaian ini didasarkan dari hasil pemeriksaan yang telah dilakukan pada 36 SKPD. Adapun uraian Obrik yang diperiksa sebagai berikut :

- a. Pemeriksaan Opname Kas dan Persediaan pada SKPD
- b. Pemeriksaan Belanja dan Pertanggungjawaban keuangan Semester I dan Semester II
- c. Pemeriksaan/Evaluasi Kewajaran Nilai HPS (DAK) SKPD
- d. Pemeriksaan Pendapatan Daerah (PAD)

Faktor pendorong keberhasilan sasaran ini adalah :

- a. Telah dilakukan pemeriksaan sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT).
- b. Telah dilakukan pemeriksaan dengan tepat waktu sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
- c. Keterlibatan semua SDM Aparat Inspektorat baik struktural maupun fungsional dalam melakukan pemeriksaan.

Faktor penghambat

- a. Kemungkinan adanya perbedaan obrik yang akan diperiksa disebabkan adanya kebijakan-kebijakan dari Pimpinan.
- b. Menindaklanjuti permintaan pemeriksaan dari pimpinan SKPD dalam rangka perbaikan administrasi tata kelola kas, persediaan, asset dan belanja modal, sedangkan jumlah dana yang tersedia dalam DPA sangat terbatas.
- c. Keterbatasan kualitas SDM yang ada di SKPD dapat memperlambat penyiapan data-data yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pemeriksaan.

Strategi Pemecahan

- a. Melakukan pemeriksaan sesuai Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)
- b. Obyek Pemeriksaan yang akan diperiksa dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan resiko masing-masing.
- c. Dilakukan Pelatihan Subtantif atas kelemahan-kelemahan yang ada.

2. Persentase Sekolah yang bebas dari kerugian negara.

Berdasarkan evaluasi terhadap Indikator Kinerja Persentase Sekolah yang bebas dari temuan kerugian negara, pencapaian indikatornya hanya sebesar



30,04%. dimana ditargetkan sebesar 25% yang diperiksa dan terealisasi sebanyak 7,51%.

Faktor penghambat pencapaian sasaran ini adalah :

- a. Minimnya Anggaran yang tersedia untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pemeriksaan pada Sekolah sehingga belum semua sekolah dapat diperiksa dari jumlah sekolah yang ada.
- b. Kualitas dan kuantitas SDM Inspektorat masih sangat terbatas, sehingga belum semua permintaan dari SKPD dapat dipenuhi.

Faktor Perbaikan yang dilakukan :

- a. Mengusulkan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) agar Anggaran Kegiatan ini dapat diakomodir dalam DPA.

3. *Persentase Desa yang bebas dari temuan kerugian negara*

Dari hasil evaluasi terhadap indikator kinerja Persentase Desa yang bebas dari temuan kerugian negara, terealisasi sebesar 100% dari yang ditargetkan sebesar 100%. Tingkat capaian ini berdasarkan dari hasil pemeriksaan yang telah dilakukan dari 46 Desa yang diperiksa, dengan uraian pemeriksaan sebagai berikut :

- a. Pemeriksaan Akhir masa jabatan (AMJ) Kepala Desa
- b. Pemeriksaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (PPD)

Faktor pendorong keberhasilan sasaran ini adalah :

- a. Telah dilakukan pemeriksaan sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT).
- b. Telah dilakukan pemeriksaan dengan tepat waktu sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
- c. Tidak dijumpai adanya penolakan dari pihak auditan.

Faktor penghambat

- a. Keterbatasan kualitas SDM pengelola kegiatan yang ada di Desa sehingga pertanggungjawaban penggunaan dana menjadi terlambat.

Strategi pemecahan

- a. Melakukan pemeriksaan sesuai Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)
- b. Melakukan Pelatihan bagi Aparat Desa dalam rangka percepatan dan peningkatan kualitas pertanggungjawaban dana Desa.

4. *Persentase rekomendasi tindaklanjut hasil pemeriksaan BPK-RI yang tuntas*

Berdasarkan evaluasi terhadap indikator Persentase rekomendasi tindaklanjut hasil pemeriksaan BPK-RI yang tuntas, realisasi tercapai 77,47% dari target 74,5%. Jumlah temuan BPK-RI sebanyak 213 temuan, Sampai dengan Tahun 2016 jumlah total rekomendasi hasil pemeriksaan sebanyak 506 rekomendasi dan Selesai (TS) sebanyak 392 rekomendasi, Dalam Proses (TB) 94 rekomendasi, Belum Ditindaklanjuti (BT) 0 rekomendasi, Tidak dapat Ditindaklanjuti 20 rekomendasi. Rekomendasi dari temuan pemeriksaan BPK-RI yang dilaporkan merupakan tanggungjawab dari Pimpinan SKPD dan berkoordinasi dengan Bagian hukum selaku sekretaris Tindaklanjut Pemerintah Daerah.

Faktor pendorong keberhasilan sasaran ini adalah :

- a. Komitmen dari Pimpinan SKPD untuk menindaklanjuti rekomendasi temuan serta memahami bahwa rekomendasi hasil pemeriksaan merupakan solusi bagi SKPD dalam mengambil tindakan koreksi kesalahan yang terjadi.
- b. Adanya Kerjasama yang baik dengan Tim tindaklanjut Pemerintah Daerah dengan SKPD yang terkait.



- c. Koordinasi secara intens antara Pimpinan SKPD dengan Tim Tindaklanjuti Pemerintah Daerah untuk penyelesaian tindaklanjuti sebelum batas waktu yang ditentukan.

Faktor Penghambat

- a. Kurangnya Koordinasi dengan Tim Tindaklanjuti
- b. Masih adanya rekomendasi temuan yang belum ditindaklanjuti

Strategi Pemecahan

Mengundang setiap SKPD yang masih memiliki temuan untuk melakukan pembahasan dalam setiap temuan yang belum selesai.

5. *Persentase rekomendasi tindaklanjuti hasil pemeriksaan ITPROV yang tuntas*

Dari hasil evaluasi terhadap indikator Persentase rekomendasi tindaklanjuti hasil pemeriksaan Itprov yang tuntas, Indikator sasaran ini ditargetkan sebesar 57,34% dan terealisasi sebesar 57,34%. sesuai hasil temuan Inspektorat Provinsi sampai dengan tahun 2016 sebanyak 286 rekomendasi temuan yang harus ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah khususnya SKPD yang terkait sebagai penanggungjawab dan telah ditindaklanjuti sebanyak 164 rekomendasi. Pimpinan SKPD hendaknya intens berkoordinasi dengan Tim tindaklanjuti Pemerintah Daerah dalam rangka penanganan dan penyelesaian tindaklanjuti temuan sebelum batas waktu yang telah ditentukan.

Faktor Pendorong keberhasilan sasaran ini adalah :

- a. Komitmen dari Pimpinan SKPD untuk menindaklanjuti rekomendasi temuan serta memahami bahwa rekomendasi hasil pemeriksaan merupakan solusi bagi SKPD dalam mengambil tindakan koreksi kesalahan yang terjadi.
- b. Adanya Kerjasama yang baik dengan Tim tindaklanjuti Pemerintah Daerah dengan SKPD yang terkait.
- c. Koordinasi secara intens antara Pimpinan SKPD dengan Tim Tindaklanjuti Pemerintah Daerah untuk penyelesaian tindaklanjuti sebelum batas waktu yang ditentukan.

Faktor Penghambat

- a. Kurangnya Koordinasi dengan Tim Tindaklanjuti
- b. Masih adanya rekomendasi temuan yang belum ditindaklanjuti

Strategi Pemecahan

- a. Mengundang setiap SKPD yang masih memiliki temuan untuk melakukan pembahasan dalam setiap temuan yang belum selesai.

6. *Persentase rekomendasi tindaklanjuti hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten yang tuntas.*

Berdasarkan evaluasi terhadap Persentase rekomendasi tindaklanjuti hasil pemeriksaan Inspektorat yang tuntas, terealisasi sebesar 98,40% dari target sebesar 99,46%. Realisasi ini sesuai dengan hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten pada beberapa Obyek Pemeriksaan sebanyak 377 rekomendasi temuan dan sebanyak 371 rekomendasi yang telah ditindaklanjuti oleh Obyek Pemeriksaan.

Faktor Pendorong Keberhasilan Sasaran ini adalah :

- a. Telah dibentuk Tim Tindaklanjuti dalam Lingkup Inspektorat Kabupaten Bantaeng sehingga memudahkan Obyek menindaklanjuti hasil rekomendasi temuan didalam Laporan Hasil Pemeriksaan.

Faktor Penghambat

- a. Kurangnya Koordinasi dengan Tim Tindaklanjuti
- b. Masih adanya rekomendasi temuan yang belum ditindaklanjuti



Strategi Pemecahan

a. Mengundang setiap Obyek Pemeriksaan yang masih memiliki temuan untuk melakukan pembahasan dalam setiap temuan yang belum selesai.

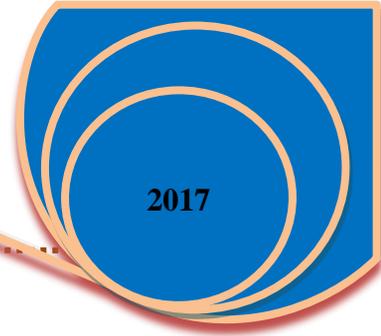
Adapun dokumen perencanaan yang berhasil direalisasikan dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Dokumen Litbang perencanaan wilayah terdiri dari :
 - a. Dokumen Penetapan Kawasan Pemukiman Tepian Sungai Calendu
 - b. Dokumen Studi Pengembangan Jaringan Transportasi Pendukung Kawasan Agrowisata
 - c. Dokumen Masterplan Pengembangan Kawasan EkoWisata Marina Korong Batu
 - d. Dokumen Masterplan Pengendalian Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup
 - e. Dokumen Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah
 - f. Dokumen Kelembagaan Irigasi Program WISMP
2. Dokumen Statistik Pembangunan Daerah terdiri dari :
 - a. Dokumen Analisis Data Statistik Daerah
 - b. Dokumen Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten
 - c. Dokumen IPM Kabupaten
 - d. Dokumen Profil Kabupaten
 - e. Dokumen Profil Anak
 - f. Dokumen Informasi Pembangunan Daerah
3. Dokumen Perencanaan terdiri dari :
 - a. Dokumen RPJMD Kabupaten Bantaeng Tahun 2013-2018
 - b. Dokumen RKPD
 - c. Dokumen RENJA

Sasaran 33	<i>Terwujudnya pelayanan publik dan pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel dan innovative berbasis Teknologi</i>
-------------------	--

Tabel 3.62
Evaluasi Pencapaian Sasaran 33

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TAHUN 2016		CAPAIAN KINERJA (%)	
				TARGET	REALISASI		
1	2	3	4	5	6	7	
33	<i>Terwujudnya pelayanan publik dan pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel dan innovative berbasis Teknologi</i>	1	Jumlah aparatur / PNS yang mengikuti Diklat Teknis	Orang	50	25	50
		2	Jumlah SKPD yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	Satker	36	36	100
		3	Jumlah SKPD yang telah menyusun dokumen Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang di upload secara online	SKPD	12	12	100
		4	Presentase pelayanan yang terselenggara sesuai standar	%	100	100	100
Rata-Rata Tingkat Pencapaian						87.5	



Sasaran 34 *Terwujudnya peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah yang berkelanjutan*

Tabel 3.63
Evaluasi Pencapaian Sasaran 34

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TAHUN 2016		CAPAIAN KINERJA (%)	
				TARGET	REALISASI		
1	2	3	4	5	6	7	
34	<i>Terwujudnya peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah yang berkelanjutan</i>	1	Jumlah PNS yang mengikuti Pendidikan Tugas belajar S2 dan pendidikan spesialis	Orang	12	12	100
		2	Jumlah aparatur pemerintah daerah yang diberikan Bantuan Pendidikan Ikatan Dinas	Orang	24	24	100
		3	Jumlah pengadaan PNS Kabupaten Bantaeng	Orang	54	45	83.33
		4	Jumlah CPNS yang diangkat menjadi PNS	Orang	144	142	99.00
Rata-Rata Tingkat Pencapaian						95.58	

Berdasarkan tabel evaluasi pencapaian sasaran terwujudnya peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah yang berkelanjutan, diperoleh gambaran bahwa rata-rata tingkat pencapaian kinerja sasaran sudah sangat baik dengan capaian sebesar 95.58%. Pencapaian kinerja sasaran ini didukung oleh pencapaian kinerja indikator jumlah PNS yang mengikuti Pendidikan Tugas belajar S2 dan pendidikan spesialis dan indikator jumlah aparatur pemerintah daerah yang diberikan Bantuan Pendidikan Ikatan Dinas yang bermakna sangat baik atau sebesar 100%. Adapun indikator pengadaan CPNS yang ditargetkan 54 orang hanya dapat direalisasikan sebanyak 45 orang atau sebesar 83.33 %. Hal ini disebabkan karena terdapat beberapa formasi kosong yang tidak mendapatkan pelamar sesuai formasi yang dipersyaratkan. Sedangkan indikator jumlah CPNS yang diangkat menjadi PNS tidak sesuai dengan target, hal ini disebabkan terdapat CPNS yang meninggal dunia.

Sasaran 35 *Meningkatnya kinerja aparat termasuk dalam pemberian pelayanan yang professional kepada pihak-pihak yang membutuhkan pelayanan*

Tabel 3.64
Evaluasi Pencapaian Sasaran 35

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TAHUN 2016		CAPAIAN KINERJA (%)	
				TARGET	REALISASI		
1	2	3	4	5	6	7	
35	<i>Meningkatnya kinerja aparat termasuk dalam pemberian pelayanan yang</i>	1	Jumlah SKPD yang mengikuti Bimbingan Pelaporan SPJ Keuangan Daerah	Satker	36	36	100



<i>professional kepada pihak-pihak yang membutuhkan pelayanan</i>	2	Jumlah SKPD yang telah menyusun SOP pelayanan	SKPD	36	15	41,67
	3	Persentase kepuasan pengguna layanan terhadap penyelenggara pelayanan	%	80	80	100
Rata-Rata Tingkat Pencapaian						80.57

Dari tabel evaluasi pencapaian sasaran meningkatnya meningkatnya kinerja aparat termasuk dalam pemberian pelayanan yang professional kepada pihak-pihak yang membutuhkan pelayanan dapat disimpulkan bahwa rata-rata tingkat pencapaian kinerja yang dapat direalisasikan melalui 3 indikator hanya sebesar 80.57 %. Adapun indikator yang belum sesuai target yang diharapkan adalah jumlah SKPD yang telah menyusun Standar Operasional Prosedur masih dibawah 50 %, artinya masih terdapat SKPD yang belum membuat dokumen SOP dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasinya. Oleh karena itu perlu adanya program/kegiatan lanjutan dalam rangka penyusunan SOP ini.

Sasaran 36	<i>Terwujudnya peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa yang professional dalam menyusun perencanaan dan pengelolaan keuangan desa</i>
-------------------	---

Tabel 3.65
Evaluasi Pencapaian Sasaran 36

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TAHUN 2016		CAPAIAN KINERJA (%)	
				TARGET	REALISASI		
1	2	3	4	5	6	7	
36	<i>Terwujudnya peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa yang professional dalam menyusun perencanaan dan pengelolaan keuangan desa.</i>	1	Cakupan desa/kelurahan yang menyusun sistem perencanaan pembangunan partisipatif	Desa/ Kel	67	67	100
		2	Cakupan desa yang telah menyusun RPJMDes	Desa	46	46	100
		3	Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan Musrebang dengan tepat waktu	%	100	100	100
Rata-Rata Tingkat Pencapaian						100	

Berdasarkan tabel evaluasi pencapaian sasaran terwujudnya peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa yang professional dalam menyusun perencanaan dan pengelolaan keuangan desa, nampak bahwa rata-rata tingkat pencapaian kinerja sudah sangat baik dengan nilai 100%. Pencapaian ini didukung oleh pencapaian kinerja masing-masing indikator yang bernilai sangat baik.

Di Kabupaten Bantaeng yang terdiri dari 48 desa, semuanya telah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan ikut melaksanakan Musrebang dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan di desa. Pemerintah Daerah melalui SKPD terkait secara rutin ikut menilai kinerja pemerintah desa khususnya dalam memfasilitasi pemerintah desa dalam membuat perencanaan yang berkualitas. Salah satu program yang

dilaksanakan oleh SKPD terkait adalah dengan mengikutsertakan aparatur desa dalam pelatihan manajemen pemerintahan desa baik melalui kerjasama dengan pihak Pemerintah Provinsi Sulsel maupun dengan pihak Pemerintah Daerah sendiri. Disamping itu pula pemerintah daerah secara rutin melakukan pembinaan kepada kelompok masyarakat pembangun desa melalui kegiatan PNPM pada tatanan peningkatan kapasitas masyarakat dan kelembagaan pemerintah desa.

Sasaran 37 *Meningkatnya kekuatan kelembagaan dan kemampuan pemerintah desa melalui proses pemilihan Kepala Desa berbasis Teknologi*

Tabel 3.66
Evaluasi Pencapaian Sasaran 37

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TAHUN 2016		CAPAIAN KINERJA (%)	
				TARGET	REALISASI		
1	2	3	4	5	6	7	
37	<i>Meningkatnya kekuatan kelembagaan dan kemampuan pemerintah desa melalui proses pemilihan Kepala Desa berbasis Teknologi</i>	1	Koordinasi dan sinkronisasi Pemerintah Daerah dengan BPPT terhadap pelaksanaan E-voting Kepala Desa	Keg	2	2	100
		2	Jumlah peserta pelatihan penyusun pendayagunaan data profil desa dan kelurahan	Orang	134	134	100
		3	Jumlah desa/kelurahan yang membentuk BARUGA SAYANG	Desa/kel	49	8	16.33
Rata-Rata Tingkat Pencapaian						72.11	

Berdasarkan tabel evaluasi pencapaian sasaran meningkatnya kekuatan kelembagaan dan kemampuan pemerintah desa melalui proses pemilihan Kepala Desa berbasis Teknologi terlihat bahwa tingkat pencapaian kinerja sasaran masih bermakna kurang atau hanya sebesar 72.11%. Kurangnya pencapaian kinerja ini lebih disebabkan masih kurangnya Desa/Kelurahan yang membentuk Balai rujukan keluarga dan pusat layanan pembangunan (BARUGA SAYANG).

Program BARUGA SAYANG merupakan program pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dengan tujuan untuk mendukung perencanaan pembangunan yang bersifat *boton up*. Lembaga Baruga Sayang ini berfungsi sebagai pusat informasi masyarakat yang diharapkan dapat mengakselerasi pemenuhan sepuluh hak dasar yang diapresiasi oleh komunitas mulai dari masalah ketersediaan pangan, layanan pendidikan dan kesehatan, perumahan dan sanitasi, akses air bersih, kesempatan kerja dan lapangan usaha, kepastian pemilikan dan



penguasaan tanah, sumber daya alam dan lingkungan hidup, rasa aman dan tentram pada masyarakat.

B. ANALISIS CAPAIAN KEUANGAN

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Bantaeng Tahun 2016 dibiayai dengan anggaran yang tertuang dalam APBD Tahun 2016 yang secara garis besar terdiri dari tiga bagian yaitu, pendapatan, belanja dan pembiayaan. Pendapatan diuraikan menurut sumber-sumber perolehan dana, belanja diuraikan menurut penggunaan dana, sedangkan pembiayaan diuraikan menurut penerimaan dan pengeluaran daerah. Garis besar APBD Tahun 2016 dan realisasinya berdasarkan *penerbitan SPMU nya* adalah seperti tertera pada Tabel berikut :

Analisis Atas Capaian Keuangan

Nomor urut	Uraian	2016		%
		Target	Realisasi	
1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	70.431.365.667,56	30.368.597.371,10	43,12
1.1	Hasil Pajak Daerah	12.901.975.558.00	8.018.004.306.00	62,15
1.2	Hasil Retribusi Daerah	7.778.035.359.00	5.206.192.003.00	66,93
1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	8.808.296.978,82	5.653.277.495,00	64,18
1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	40.943.057.771,74	11.491.126.367,10	28,07
2	DANA PERIMBANGAN	819.264.045.000.00	808.530.364.185.00	98,69
2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	18.056.456.000.00	24.506.180.278,00	135,71
2.2	Dana Alokasi Umum	497.448.542.000,00	497.448.542.000.00	100,00
2.3	Dana Alokasi khusus	303.759.047.000.00	286.575.642.207.00	94,34
3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	220.295.657.875	170.253.635.609.00	96,00
3.1	Pendapatan Hibah	830.439.000.00	-	0,00
3.2	Dana Darurat	0.00	0.00	0,00
3.2	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	57.664.545.375.00	34.778.410.318	60,31
3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	156.198.503.000.00	130.327.461.200.00	83,44
3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	5.602.170.500,00	5.147.764.091,00	91,89
JUMLAH PENDAPATAN		1.109.991.068.542,56	1.009.152.600.265,10	90,92

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa Pendapatan Asli Daerah hanya direalisasi sebesar 43,12% dari target pendapatan sebesar Rp. **70.431.365.667,56**. Tidak tercapainya target Pendapatan Asli Daerah tersebut dipengaruhi oleh tidak tercapainya target pendapatan dari Hasil Retribusi Daerah dan kurang pendapatan dari komponen lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah



2017

hanya sebesar 28,07% . Kondisi tersebut mengharuskan Pemerintah Kabupaten Bantaeng lebih intensif melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah.

Khusus pendapatan daerah dari Dana Perimbangan, dari target sebesar Rp. **819.264.045.000.00**, yang dapat direalisasikan sampai akhir Tahun 2016 sebesar Rp. **808.530.364.485.00** atau 98,69%. Belum sesuai target pendapatan daerah dari sumber dana perimbangan disebabkan kurangnya realisasi dari komponen dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak dari target sebesar Rp. 57.664.545.375.00 yang dapat direalisasikan hanya sebesar Rp. 34.778.410.318.00 atau 60,31%.

Sedangkan target pendapatan dari pendapatan daerah yang sah hanya dapat direalisasikan sebesar Rp. **135.475.225.291** dari target pendapatan sebesar Rp. **162.631.112.500** atau 80,30%. Kurangnya realisasi pendapatan ini dipengaruhi oleh komponen Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya yang ditargetkan sebesar Rp. 6.432.609.500, diakhir Tahun 2016 hanya dapat direalisasikan sebesar Rp. 5.147.764.091.00 atau 80,03%.

Target dan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Bantaeng TA. 2016

Nomor urut	Uraian	2016		%
		Target	Realisasi	
1	2	3	4	5
A	BELANJA	826.182.159.433.76	775.024.021.801.89	93,81
	BELANJA OPERASI	663.939.807.506,08	597.500.176.251,63	89,99
1	Belanja Pegawai	372.413.080.774,08	354.077.807.302,00	95,08
2	Belanja Barang	285.167.912.648,00	237.258.769.077,00	99,62
3	Belanja Bunga	56.414.084.00	56.199.872,63	99,62
4	Belanja Subsidi	0.00	0.00	0,00
5	Belanja Hibah	6.017.400.000.00	5.837.400.000.00	97,01
6	Belanja Bantuan Sosial	285.000.000.00	270.000.000.00	94,74
	BELANJA MODAL	420.571.093.753,00	395.662.702.041,00	94,08
1	Belanja Tanah	6.396.541.900,00	5.762.472.910,00	90,09
2	Belanja Peralatan dan Mesin	77.053.637.202,00	63.804.316.349,00	82,81
3	Belanja Gedung dan Bangunan	82.691.159.000,00	81.830.028.421,00	98,96
4	Belanja Jalan,Irigasi dan Jaringan	253.250.238.351,00	243.123.856.861,00	96,00
5	Belanja Aset tetap lainnya	1.179.517.300,00	1.142.027.500,00	96,82
6	Belanja Aset lainnya	0,00	0,00	0,00
	BELANJA TAK TERDUGA	250.000.000,00	176.116.842,00	70,45
1	Belanja tak terduga	250.000.000,00	176.116.842,00	70,45
	TRANSFER/BAGI HASIL KEDESA	2.016.352.960,00	712.820.189,00	35,35



2017

Nomor urut	Uraian	2016		%
		Target	Realisasi	
1	Bagi hasil Pajak	1.280.447.582,00	306.388.999,00	23,93
2	Bagi hasil Retribusi	0,00	0,00	0,00
3	Bagi hasil Pendapatan lainnya	735.905.378,00	406.431.190,00	55,23
	TRANSFER BANTUAN KEUANGAN	58.630.843.999,00	58.557.258.464,00	99,87
1	Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	58.255.855.000,00	58.255.855.000,00	100,00
2	Bantuan Keuangan lainnya	374.988.999,00	301.403.164,00	80,38
	PEMBIAYAAN			
	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	35.761.682.013,52	35.761.682.013,52	100,00
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SILPA)	35.761.682.013,52	35.761.682.013,52	100,00
	Pencairan Dana Cadangan	0.00	0.00	0.00
	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	0.00	0.00	0.00
	Penerimaan Pinjaman Daerah	0.00	0.00	0.00
	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0.00	0.00	0.00
	Penerimaan Piutang Daerah	0.00	0.00	0.00
	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	344.652.338,00	261.912.573,71	75,99
	Pembentukan Dana Cadangan	0.00	0.00	0.00
	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	0.00	0.00	0.00
	Pembayaran Pokok Utang	344.652.338,00	261.912.573,71	75,99
	Pemberian Pinjaman Daerah	0.00	0.00	0.00
	JUMLAH PEMBIAYAAN netto	35.417.029.675,52	35.499.769.439,81	99,77



2017

BAB IV

Penutup

A. KESIMPULAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) berisikan dokumen pernyataan komitmen kinerja yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten Bantaeng dengan jajarannya pada tahun 2015. Selain itu juga berisikan laporan pencapaian sasaran organisasi pemerintah daerah dalam merealisasikan target-target yang telah ditetapkan dan diarahkan pada pencapaian RPJMD Kabupaten Bantaeng 2013-2018.

Dalam pelaksanaan satu tahun RPJMD Kabupaten Bantaeng Tahun 2013-2018, telah dievaluasi 37 (tiga puluh tujuh) pencapaian sasaran strategis dengan menggunakan 89 (delapan puluh sembilan) indikator kinerja utama sebagai sebagai alat ukur dalam pencapaian sasaran kinerja organisasi. Indikator kinerja tersebut telah diformalkan dalam bentuk Keputusan Bupati Bantaeng Nomor 161/543/IX/2015 tentang Perubahan Keputusan Bupati Bantaeng Nomor Nomor 161/543/XI/2014 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantaeng.

Berdasarkan hasil evaluasi pengukuran pencapaian kinerja masing-masing sasaran sesuai RPJMD Kabupaten Bantaeng Tahun 2013-2018, melalui evaluasi target dan realisasi indikator kinerja sasaran/utama, diperoleh gambaran bahwa rata-rata tingkat pencapaian sasaran sudah sangat baik dengan persentase sebesar **89.65 % dengan predikat kinerja Memuaskan (A = 85 - 100)**. Pencapaian kinerja ini merupakan akumulasi dari evaluasi pencapaian 37 sasaran dengan menggunakan 133 indikator.

Berdasarkan analisis pengukuran kinerja dari 37 sasaran yang ditetapkan tersebut terdapat beberapa pencapaian kinerja sasaran yang masih kurang.

Adapun indikator yang dianggap masih kurang capaian kinerjanya adalah sebagai berikut :

Tabel 4.1.
Prosentase Pencapaian Sasaran
dengan Indikator Kinerja Sasaran di Bawah 80 Persen

INDIKATOR SASARAN		SATUAN	TAHUN 2015		CAPAIAN KINERJA (%)	KET
			TARGET	REALISASI		
3		4	5	6	7	8
1	Persentase kenaikan pendapatan rata-rata petani perkebunan	%	25	18,05	72,20	
2	Persentase luas lahan kritis terhadap luas wilayah	%	15	20.72	72,39	
3	Persentase kenaikan pendapatan rata-rata petani perkebunan	%	25	18,05 %	72,20	
4	Persentase kenaikan rata-rata pendapatan masyarakat pengelola Hutan Kemasyarakatan (HKm)	%	5	0	0	
5	Pertumbuhan usaha sektor industri	Unit	474	350	73.90	
6	Jumlah KUKM yang difasilitasi mendapat bantuan Modal dari Pemerintah	Unit	5	4	80	
7	Kegiatan sarana promosi wisata	Kegiatan	2	1	50	
8	Persentase pertumbuhan industri yang mampu menciptakan lapangan kerja	%	10	5	50	
9	Persentase pemanfaatan lembaga pemasaran industri dan pengolahan hasil industri melalui UPTD Rumah Kemasan dan Show Room Hasil Industri	%	75	50	66.66	
10	Jumlah kegiatan promosi usaha home industri berskala nasional yang diikuti	Kegiatan	5	3	60.00	
11	Kemitraan swasta dan UKM di pedesaan	Desa	46	20	43.48	
12	Persentase desa yang memanfaatkan potensi desa dalam membangun desa mandiri	%	75	50	66.66	
13	Persentase desa yang telah melakukan kemitraan dengan pihak swasta dan UKM dalam pembangunan ekonomi desa	%	60	30	50	
14	Persentase kontribusi swasta dalam upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat	%	60	30	50	
15	Jumlah penerimaan bantuan swasta dalam penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bantaeng	juta	5.000	3.000	60.00	



16	Persentase SKPD yang bekerjasama dengan pihak swasta dalam penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bantaeng	SKPD	28	5	17.85	
17	Penyusunan dokumen Naskah Akademik Penataan Kelembagaan SKPD	Dok	3	2	66.67	
18	Jumlah aparatur / PNS yang mengikuti Diklat Teknis	Orang	50	25	50	
19	Jumlah SKPD yang telah menyusun SOP pelayanan	SKPD	36	15	41,67	
20	Jumlah desa/kelurahan yang membentuk BARUGA SAYANG	Desa/kel	49	8	16.33	

B. SARAN – SARAN

Dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran RPJMD 2008-2013 Kabupaten Bantaeng melalui pencapaian beberapa indikator, maka disarankan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengingat masih ada beberapa sasaran strategis yang persentase capaiannya masih bermakna kurang, maka diharapkan SKPD terkait dapat mengoptimalkan kinerjanya dengan mengusulkan perubahan anggaran dan menyusun rencana kerja tahun 2015 yang akan datang dengan program dan kegiatan yang langsung menunjang pencapaian sasaran atau yang berkaitan dengan pemenuhan indikator kinerja sasaran;
2. Diharapkan SKPD yang bertanggung jawab pada program dan kegiatan yang prosentase capaian target indikator kinerjanya dibawah 50 persen (dinilai kurang), agar lebih bekerja keras dalam memacu kinerjanya.
3. Diharapkan pemerintah pusat (KemenPAN dan RB), agar dapat melakukan evaluasi dan penilaian terhadap LAKIP Tahun 2015 dan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Bantaeng Tahun 2016, sehingga dapat diketahui kekurangan/kelemahan dan kelebihan/keunggulan kinerja perangkat pemerintah daerah kabupaten Bantaeng, agar dapat dilakukan perbaikan dan penyempurnaan dimasa yang akan datang.

Demikianlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Bantaeng ini disusun dan disajikan sebagai bahan pelaporan pengukuran pencapaian kinerja sasaran strategis yang tertuang dalam Rencana



2017

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bantaeng 2013 – 2018.

Semoga Laporan ini dapat menggambarkan kondisi aktual kinerja para SKPD dalam jajaran pemerintah Kabupaten Bantaeng guna membangun Masyarakat dan daerah Bantaeng menjadi PUSAT PERTUMBUHAN EKONOMI DI BAGIAN SELATAN SULAWESI SELATAN TAHUN 2018, menuju daerah dan masyarakat yang adil, damai dan sejahtera. Amin.

Bantaeng, Maret 2017

BUPATI BANTAENG

Prof.DR.H.M. NURDIN ABDULLAH, M.Agr



2017

**PERJANJIAN KINERJA (PK) TAHUN 2017
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTAENG**

Kegiatan	Anggaran
1 Pengembangan pendidikan Anak Usia Dini	54,749,000
2 Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini	806,505,000
3 Pengembangan Kurikulum, Bahan Ajar dan Model Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini	42,203,500
4 BOP PAUD TK Negeri Pembina	36,000,000
5 BOP PAUD TK Negeri Pertiwi Bissappu	36,000,000
6 BOP PAUD TK Negeri Idhata	35,200,000
7 BOP PAUD TK Negeri Pertiwi Bantaeng	36,000,000
8 BOP PAUD TK Negeri Pertiwi Letta	36,000,000
9 BOP PAUD TK Negeri Pertiwi Banyorang	36,000,000
10 BOP PAUD TK Negeri Pertiwi Biangkeke	36,000,000
11 BOP PAUD TK Negeri Pertiwi Pullawweng	36,000,000
12 BOP PAUD TK Negeri Kartini	36,000,000
13 Pembangunan Sarana dan Prasarana Sekolah	3,369,000,000
14 Pengadaan Buku-buku dan Alat Tulis Siswa	895,254,100
15 Pengadaan Alat Praktek dan Peraga Siswa	480,485,700
16 Pengadaan Mebeluer Sekolah	459,427,800
17 Pengadaan Perlengkapan Sekolah	935,521,200
18 Rehabilitasi Sedang/berat ruang Kelas Sekolah	3,042,891,000
19 Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta Pesantren Salafiya	1,970,979,000
20 Penyelenggaraan Paket A Setara SD	52,007,000
21 Penyelenggaraan Paket B Setara SMP	59,372,000
22 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	344,344,000
23 Penyelenggaraan Akreditasi Sekolah Dasar	63,601,000
24 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	106,375,000
25 Program Pendidik Non Formal	621,987,500
26 Pemberdayaan Tenaga Pendidik Non Formal	278,738,000
27 Pembinaan Pendidikan Kursus dan Kelembagaan	310,034,500
28 Pengembangan Pendidikan kecakapan Hidup	33,215,000
29 Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan	896,688,000
30 Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik	44,590,000
31 Pelaksanaan Uji Kompentensi Pendidik dan Tenaga Pendidik	98,563,500



2017

32	Pengembangan Mutu dan Kualitas Program Pendidikan dan Pelatihan Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan	345,096,000
33	Pengembangan Sistem Penghargaan dan Perlindungan Terhadap Profesi Pendidik	91,223,500
34	Pengembangan Sistem Perencanaan dan Pengendalian Program Profesi Pendidik dan Tenaga Kependidikan	317,215,000
35	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	276,044,200
36	Penerapan Sistem dan Manajemen Pendidikan	248,633,200
37	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	27,411,000
38	Program Penilaian Mutu/Kemampuan Anak Didik	2,525,843,000
39	Pelaksanaan Ujian Akhir Sekolah (UAS) SMP/SMA	2,525,843,000
40	Program Pengembangan Nilai Budaya	262,189,500
41	Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah	262,189,500
42	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	317,380,300
43	Fasilitasi Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Kekayaan Budaya	123,491,300
44	Pengelolaan dan Pengembangan Pesertarian Peninggalan Sejarah Purbakala, Museum dan Peninggalan Bawa	193,889,000
45	Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah	250,782,000
46	Fasilitasi Pengembangan Keragaman Kebudayaan Daerah	57,503,100
47	Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin di Puskesmas Jaringannya	262,287,120
48	Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas dan Jaringannya	1,216,307,350
49	Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan	13,678,204,000
50	Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan	5,652,875,000
51	Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan	442,805,000
52	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Sekolah	72,587,500
53	Pelaksanaan Akreditasi Puskesmas	612,500,000
54	Fasilitasi Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas Bissappu	682,500,000
55	Fasilitasi Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas Loka	295,000,000
56	Fasilitasi Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas Campaloe	276,537,500
57	Fasilitasi Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas Sinoa	399,000,000



58	Fasilitasi Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas Kota	561,750,000
59	Fasilitasi Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas Lasepang	221,133,000
60	Fasilitasi Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas Ulugalung	540,750,000
61	Fasilitasi Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas Banyorang	610,000,000
62	Fasilitasi Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas Kassi-Kassi	540,750,000
63	Fasilitasi Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas Baruga	598,500,000
64	Fasilitasi Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas Moti	341,250,000
65	Fasilitasi Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas Dampang	278,250,000
66	Fasilitasi Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas Pajukukang	246,750,000
67	Peningkatan Pemberdayaan Komsumen/Masyarakat di bidang Obat dan Makanan	3,390,000
68	Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya	11,000,000
69	Peningkatan Kapasitas Laboratorium Pengawasan Obat dan Makanan	6,844,000
70	Program promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	158,400,000
71	Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat	158,400,000
72	Pemberian Tambahan Makanan dan Vitamin	12,000,000
73	Penanggulangan Kurang Energi Protein(KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY), K	491,897,000
74	Penyemprotan/Fogging Sarang Nyamuk	363,320,000
75	Pengadaan Vaksin Penyakit Menular	150,000,000
76	Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	469,448,750
77	Pencegahan Penularan Penyakit Endemik/Epidemik	256,180,000
78	Peningkatan Imunisasi	31,425,000
79	Peningkatan Surveillance Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah	200,190,000
80	Pelayanan Kesehatan Calon Jemaah haji	20,905,000
81	Pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular	187,553,400
82	Pencegahan dan penanggulangan penyakit DBD	60,520,000
83	Pembinaan Bidan Desa Dalam Upaya Peningkatan Kesehatan Masyarakat	79,116,000
84	Rehabilitasi Puskesmas	350,000,000



2017

85	Pembangunan Rumah Sakit	50,532,230,172
86	Pemeliharaan Rutin/berkala Mobil Ambulance/Jenazah	18,000,000
87	Kemitraan Pelayanan Kesehatan JKN	5,078,436,000
88	Pelayanan Kesehatan BLUD Rumah Sakit	32,000,000,000
89	Pendidikan dan Pelatihan Dasar Kepemimpinan	1,679,685,700
90	Fasilitasi Pembinaan Kreatifitas Kepemudaan	102,759,700
91	Pembinaan dan Pembibitan Olahragawan Unggulan Daerah	171,464,650
92	Peningkatan Kesegaran Jasmani dan Rekreasi	46,149,450
93	Pemberiaan Penghargaan Bagi Insan Olahraga yang berdedikasi dan Berprestasi	180,241,000
94	Pengembangan Olahraga Rekreasi	46,045,150
95	penyelenggaraan Kompetisi Olahraga/kejurda	244,427,950
96	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga	1,341,877,900
97	Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	796,950,000
98	Pemeliharaan Ruti/Berkala Sarana dan Prasarana Olahraga	544,927,900
99	Pembangunan dan pengoperasian SIAK secara terpadu	133,308,900
100	Implementasi Sistem Admintrasi Kependudukan (membangun. updating dan pemeliharaan)	136,162,650
101	Koordinasi pelaksanaan kebijakan Kependudukan	21,818,850
102	Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan	33,107,600
103	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	301,029,700
104	Penyediaan informasi yang dapat diakses masyarakat	10,136,400
105	Pengendalian Validasi Sinkronasi Data Penduduk Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan	59,908,550
106	Peningkatan Pelayanan Dokumen dan Pencatatan Sipil	263,500,000
107	Peningkatan Pengelolaan SIAK	425,879,000
108	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	127,324,550
109	Peningkatan Layanan Pencatatan Kelahiran	107,015,000
110	Peningkatan Pelayanan Publik Perkawinan	63,090,400
111	Pelayanan Lapangan Pencatatan Sipil	104,506,200



2017

112	Sosialisasi Kebijakan Kependudukan dan Pencatatan Sipil	19,450,000
113	Peningkatan Layanan Pencatatan Kematian	62,984,800
114	Peningkatan Pelayanan Publik Perceraian	52,443,500
115	Koordinasi Dalam Pemecahan Masalah-masalah Daerah	160,856,500
116	Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar	914,187,150
117	Koordinasi perencanaan penanganan perumahan	509,225,000
118	Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan	404,962,150
119	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	1,266,569,050
120	Penyelenggaraan musrenbang RKPD	780,571,200
121	Monitoring, evaluasi, pengendalian, dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah	485,997,850
122	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	797,537,500
123	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	797,537,500
124	Program Perencanaan Sosial dan Budaya	823,496,800
125	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya	823,496,800
126	Program Perencanaan Presarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	854,897,000
127	Koordinasi Penyusunan Masterplan Pengendalian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	854,897,000
128	Program Kerjasama Pembangunan	795,870,000
129	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	93,610,500
130	Koordinasi Bidang Penelitian dan Pengembangan	702,259,500
131	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	331,085,000
132	Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik	331,085,000
133	Program Fasilitas Pindah / Purna Tugas PNS	83,234,500



2017

134	Pengelolaan Pemberhentian /Pensiun PNS	83,234,500
135	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	61,045,000
136	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	42,168,000
137	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	18,877,000
138	Program peningkatan pengembangan sistem perencanaan capaian kinerja dan keuangan	52,109,000
139	Penyusunan Perencanaan Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD	52,109,000
140	Program Pendidikan Kedinasan	243,810,000
141	Pendidikan Penjurangan Struktural	243,810,000
142	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	103,845,000
143	Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Bagi calon PNS Daerah	103,845,000
144	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	1,503,967,000
145	Penyusunan Pembinaan Karier PNS	272,540,000
146	Seleksi Penerimaan Calon PNS	76,931,000
147	Penempatan PNS	82,851,000
148	Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis PNS	102,130,500
149	Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah	23,925,500
150	Penyusunan Instrumen Analisis Jabatan PNS	57,443,000



2017

151	Pemberian Penghargaan Bagi PNS yang Berprestasi	83,165,000
152	Proses Penanganan Kasus-kasus Pelanggaran Disiplin PNS	79,591,500
153	Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas	562,805,000
154	Pemberian Bantuan Penyelenggaraan Penerimaan Mahasiswa Ikatan Dinas	51,463,500
155	Pengelolaan Arsip Kepegawaian	11,897,500
156	Penyelenggaraan Sistem Kepegawaian	99,223,500
157	Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	402,945,500
158	Penanganan Pasca Bencana	45,950,000
159	Fasilitas Perbaikan (Rehabilitasi) Sarpras Umum, Fasilitas Pemerintah, Lingkungan dan Rumah Penduduk	356,995,500
160	Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana	23,810,000
161	Pemantauan Potensi Bencana	23,810,000
162	Program Kedaruratan dan Logistik Penanggulangan Bencana	400,306,650
163	Operasionalisasi Pos Komando/Siaga Tanggap Darurat Bencana	239,329,150
164	Pengadaan Logistik, Peralatan dan Perlengkapan PB	160,977,500
165	Penyusunan Standar Satuan Harga	77,250,000
166	Penyusunan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah	139,507,500
167	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD	883,020,000
168	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBD	612,285,000
169	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD	692,740,000
170	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Perubahan APBD	682,855,000
171	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	399,020,000
172	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	318,650,000



173	Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	671,630,000
174	Bimbingan Teknis Implementasi Paket Regulasi Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	736,700,000
175	Peningkatan Manajemen Aset/barang Daerah	520,297,500
176	Revaluasi/apresiasi Aset/barang Daerah	194,703,500
177	Intensifikasi dan Ektensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah	1,464,788,500
178	Verifikasi DPA SKPD dan DPPA SKPD	325,895,000
179	Rekonsiliasi Pendapatan Asli Daerah	194,540,000
180	Fasilitasi Kegiatan Belanja dan Pembiayaan	228,360,000
181	Pendataan dan Penilaian Pendapatan Daerah	790,150,000
182	Fasilitasi Kegiatan Perbendaharaan Umum Daerah	852,020,500
183	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Pemerintah Daerah	636,816,500
184	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir tahun Pemerintah Daerah	712,235,000
185	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengelolaan Dana Transfer	124,672,000
186	Penyusunan pedoman Pengelolaan Keuangan Desa	138,565,000
187	Pembinaan dan Pengembangan Sumberdaya Komunikasi dan Informasi	154,792,000
188	Pelatihan SMD Dalam Bidang Komunikasi dan Informasi	39,205,000
189	Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah	152,758,000
190	Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	57,055,000
191	Pengolahan, Updating dan Analisis Data dan Statistik Daerah	415,570,000
192	Fasilitas Penyelenggaraan Administrasi Persandian	84,520,000
193	Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	330,759,000
194	Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan	4,442,204,000
195	Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura	285,117,500
196	Peningkatan Konservasi Daerah Tangkapan Air dan Sumber-Sumber Air	111,197,500
197	Pengujian Kadar Polusi Limbah Padat dan Limbah Air	192,329,500
198	Penataan RTH	490,981,500
199	Pemeliharaan RTH	212,828,500
200	Pengembangan Taman Rekreasi	2,149,264,000



2017

201	Peningkatan Pelayanan Pemeliharaan Lampu Taman & Penerangan Jalan	884,252,000
202	Pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan	666,217,000
203	Pengembangan jaringan kerja sarana promosi pariwisata	26,958,900
204	Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri	77,250,000
205	Pengembangan Statistik Kepariwisata	34,259,500
206	Pelatihan pemandu wisata terpadu	42,433,150
207	Pengembangan objek pariwisata unggulan	3,115,319,000
208	Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata	8,655,650,550
209	Pengembangan jenis dan paket wisata unggulan	337,300,150
210	Pelaksanaan koordinasi pembangunan objek pariwisata dengan lembaga/dunia usaha	34,150,000
211	Pengembangan daerah tujuan wisata	406,485,750
212	Pengembangan SDM di bidang kebudayaan dan pariwisata bekerjasama dengan lembaga lainnya	73,570,900
213	Peningkatan Koordinasi dan Kerjasama di Bidang Penanaman Modal Dengan Instansi Pemerintah dan Dunia	14,690,000
214	Peningkatan Kegiatan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	27,180,000
215	Penyelenggaraan Pameran Investasi	27,920,000
216	Memfasilitasi dan Koodinasi Kerjasama di Bidang Investasi	24,025,000
217	Pengembangan Sistem Informasi Penanaman Modal	11,272,500
218	Penyederhanaan Prosedur Perijinan dan Peningkatan Pelayanan Penanaman Modal	20,640,000
219	Pelayanan Sistem Informasi Pelayanan Terpadu Satu Atap	127,193,000
220	Penyusunan Standar Pelayanan Publik	13,217,000
221	Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin	87,416,500
222	Pembinaan Keluarga Berencana	950,890,000
223	Pengadaan sarana mobilitas tim KB keliling	1,311,477,000
224	Penyuluhan Penanggulangan Narkoba, PMS dan HIV / AIDS	26,257,500
225	Pengadaan Alat Kontrasepsi	95,511,500
226	Fasilitasi Pembentukan kelompok Masyarakat Peduli KB	29,894,200



2017

227	Pengolahan Data dan Informasi Program KB	694,867,000
228	Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan surgai, Danau dan Penyeberangan	172,810,000
229	Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan Darat	495,235,000
230	Kegiatan Peningkatan Disiplin Masyarakat Menggunakan Angkutan	173,664,000
231	Kegiatan Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan Raya	823,305,000
232	Kegiatan Pengawasan Peralatan Keamanan Dalam Keadaan Darurat dan Perlengkapan Pertolongan Pertama	122,155,000
233	Pengembangan sarana dan prasarana Pelayanan Angkutan	428,651,000
234	Pengadaan Pagar Pengaman Jalan	197,011,000
235	Pemeliharaan Rambu-Rambu Lalu Lintas	71,400,000
236	Pembinaan kelompok ekonomi masyarakat pesisir	86,069,250
237	Pengembangan bibit ikan unggul	386,865,000
238	Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan	72,560,000
239	Pembinaan dan pengembangan perikanan	223,180,000
240	Pendampingan Pengembangan Kawasan Budidaya Perikanan	1,211,531,750
241	Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap	1,353,050,000
242	Pembangunan tempat pelelangan ikan	1,103,979,000
243	Pengembangan lembaga usaha perdagangan perikanan tangkap	135,726,000
244	Kajian sistem penyuluhan perikanan	60,985,000
245	Kajian optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan	171,261,000
246	Penanganan pasca panen dan diversifikasi produk hasil-hasil perikanan	80,270,000
247	Kajian kawasan budidaya laut air payau dan air tawar	92,536,000
248	Penguatan kemampuan industri berbasis teknologi	626,420,000
249	Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan kluster industri	22,511,866,000
250	Perluasan penerapan SNI untuk mendorong daya saing industri manufaktur	229,425,500
251	Penyediaan sarana informasi yang dapat diakses masyarakat	199,004,500



2017

252	Pemasyarakatan Minat dan Kebiasaan Membaca Untuk mendorong Terwujudnya Masyarakat Pembelajar	57,738,500
253	Supervisi, Pembinaan dan Stimulasi dapa Perpustakaan daerah, Perpustakaan Khusus, perpustakaan Sekol	276,513,500
254	Publikasi dan Sosialisasi minat dan budaya Baca	33,426,500
255	Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Umum Daerah	100,725,000
256	Pendataan dan Penataan Dokumen/arsip Daerah	38,075,000
257	Penduplikatan dokumen/arsip daerah dalam bentuk informatika	43,695,000
258	Pemeliharaan Rutin/berkala Arsip Daerah	26,490,000
259	Penyusunan dan Penerbitan Sumber Naskah Arsip	102,280,000
260	Peningkatan kemampuan lembaga petani	181,333,000
261	Peningkatan sistem insentif dan disinsentif bagi petani/kelompok tani	112,167,000
262	Penyusunan data base potensi produksi pangan	186,956,000
263	Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian	163,274,000
264	Pengembangan diversifikasi tanaman	162,892,000
265	Pengembangan pertanian pada lahan kering	90,276,000
266	Pengembangan pembenihan/pembibitan Tanaman Pangan	1,741,988,000
267	Pengembangan sistem informasi pasar	125,602,000
268	Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk perkebunan, produk pertanian	404,507,000
269	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	234,955,000
270	Pengembangan Pembenihan/Pembibitan Perkebunan	126,559,000
271	Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggulan daerah	71,904,000
272	Penelitian dan pengembangan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna	372,821,080



2017

273	Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna	139,638,000
274	Kegiatan penyuluhan penerapan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna	-
275	Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Pengembangan /Optimasi Jaringan Irigasi Pertanian	10,308,885,000
276	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan Irigasi Pertanian/Perkebunan	1,331,397,000
277	Penyuluhan peningkatan produksi pertanian/perkebunan	124,066,000
278	Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan	1,662,425,000
279	Sertifikasi bibit unggul pertanian/perkebunan	447,613,000
280	Pembangunan Sarana/Prasarana dan Pembibitan Holtikultura	40,827,000
281	Pembangunan Sarana/Prasarana dan Pembibitan Tanaman Pangan	204,551,700
282	Peningkatan kesejahteraan tenaga penyuluh pertanian/perkebunan	1,057,061,000
283	Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak	163,564,500
284	Pembangunan sarana dan prasarana pembibitan ternak	144,042,000
285	Pembibitan dan perawatan ternak	911,874,000
286	Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat	690,444,000
287	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemakaman	309,966,250
288	Penataan penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	3,210,600,000
289	Perumusan kebijakan peningkatan kualitas hidup perempuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi	93,105,000
290	Fasilitas pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2)	129,266,000
291	Pemetaan potensi organisasi dan lembaga masyarakat yang berperan dalam pemberdayaan perempuan dan anak	472,443,900
292	Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	260,858,000
293	Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak	438,003,500



2017

294	Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak	41,645,000
295	Pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan di daerah	293,271,100
296	Kegiatan penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera.	238,648,000
297	Workshop peningkatan peran perempuan dalam pengambilan keputusan	628,169,500
298	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	242,032,000
299	Penyelenggaraan Diseminasi Informasi Bagi Masyarakat Desa	111,355,000
300	Pelatihan Keterampilan Manajemen Badan Usaha Milik Desa	55,983,300
301	Fasilitas Permodalan Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Pedesaan	65,586,500
302	Fasilitas Kemitraan Swasta dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Perdesaan	191,152,000
303	Pembinaan Manajemen Badan Usaha Milik Desa	118,565,200
304	Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa	196,241,600
305	Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa	166,014,000
306	Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	82,914,600
307	Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Bidang Pengolaan Keuangan Desa	73,178,000
308	Fasilitasi Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintah Tingkat Bawah	2,497,327,000
309	Pembangunan Jalan	10,554,250,250
310	Pembangunan Jembatan	2,884,100,000
311	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	78,237,500
212	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong	12,551,326,500
313	Rehabilitasi/pemeliharaan Jalan	45,862,767,250
314	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	502,630,000
315	Penyusunan Sistem Informasi/data Base Jalan	376,101,250



2017

316	Rehabilitasi/pemeliharaan Jaringan Irigasi	9,457,087,250
317	Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi yang telah dibangun	3,343,680,000
318	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	45,530,700
319	Pembangunan Peningkatan Jaringan Irigasi	5,932,876,250
320	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Air	336,039,500
321	Fasilitasi Pengembangan Teknik Pengolahan Air Limbah	262,037,650
322	Pengendalian Banjir pada Daerah Tangkapan Air dan Badan-badan Sungai	4,082,296,450
323	Penataan Lingkungan Pemukiman Penduduk Pedesaan	13,581,976,500
324	Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan	1,960,564,750
325	Revisi rencana tata ruang	435,947,900
326	Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	471,713,550
327	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemanfaatan Ruang	52,148,000
328	Fasilitasi manajemen usaha bagi keluarga miskin	13,490,000
329	Pelatihan keterampilan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial	67,650,000
330	pendampingan program keluarga harapan (pkh)	46,772,000
331	Pelayanan dan Perlindungan Sosial, Hukum bagi Korban Eksploitasi, Perdagangan Perempuan dan Anak	71,856,000
332	Pelayanan Psikologi bagi PMKS di Trauma centre Termasuk bagi Korban Bencana	142,504,300
333	Peningkatan kualitas Pelayanan sarana dan Prasarana Rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS	372,921,000
334	Pendampingan dan monitoring Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	37,100,000
335	Peningkatan Jejaring Kerjasama Pelaku-pelaku Usaha Kesejahteraan Sosial Masyarakat	224,120,000
336	Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat	52,673,000
337	Pengembangan Model Kelembagaan Perlindungan Sosial	54,540,000
338	Fasilitasi Operasional Kegiatan Kepahlawanan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Kepahlawanan	58,300,000
339	Koordinasi dan pembinaan karang taruna	69,456,000
340	Pelaksanaan Pegawai Internal Secara Berkala	853,388,000
341	Penanganan kasus pengaduan di lingkungan Pemerintah Daerah	115,690,750



2017

342	Penanganan Kasus Pada Wilayah Pemerintah Daerah	391,140,000
343	Inventarisasi Temuan Pengawasan	7,142,500
344	Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan	86,282,600
345	Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif	200,902,350
346	Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan	9,150,500
347	Pemeriksaan Khusus/Tujuan Tertentu	169,740,000
348	Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksaan dan aparaturnya	91,725,400
349	Pengendalian Keamanan Lingkungan	182,008,000
350	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	116,348,000
351	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	135,463,000
352	Fasilitasi Pencapaian Halaqoh dan berbagai Forum Keagamaan Lainnya Dalam Upaya Peningkatan Wawasan	190,206,000
353	Seminar, Talk Show, Diskusi, Peningkatan Wawasan Kebangsaan	160,425,700
354	Penyusunan Data Base Partai Politik	53,755,000
355	Penyiapan Tenaga Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	2,071,200,000
356	pengendalian Keamanan Lingkungan Dan Apel siaga	222,070,000
357	Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	98,175,000
358	Peningkatan Kerjasama Dengan Aparat Keamanan dalam Teknis Pencegahan Kejahatan	82,850,000
359	Penegakan dan Penindakan Pelanggaran Peraturan Daerah	957,270,000
360	Pengamanan / Pengawasan dan Patroli Wilayah	189,935,000
361	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencehan Bahaya Kebakaran	90,075,000
362	Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran	1,962,091,000
363	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	1,155,072,000
364	Hearing/dialog dan Koordinasi Dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/tokoh Agama	27,788,400
365	Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan	1,690,651,800
366	Rapat-rapat Paripurna	141,652,400
367	Kegiatan Reses	788,790,000



2017

368	Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Daerah	52,800,000
369	Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	1,989,750,000
370	Pelantikan Anggota Pengganti Antar Waktu DPRD Kab. Bantaeng	22,524,500
371	Penyusunan Penetapan Kinerja	49,165,000
372	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	74,800,000
373	Penyusunan Laporan Keterangan Perjanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah	102,932,000
374	Fasilitasi Penyiapan Data Pelaksanaan Ekonomi dan Pembangunan	119,324,000
375	Penyusunan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD)	50,000,000
376	Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP)	198,477,000
377	Program peningkatan pengembangan sistem perencanaan capaian kinerja dan keuangan	104,630,000
378	Penyusunan Perencanaan Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD	104,630,000
379	Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/departemen/lembaga Pemerintah Non Departemen /Luar Negeri	1,050,000,000
380	Rapat Kaordinasi Pejabat Pemerintah Daerah	104,406,000
381	Koordinasi Dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya	3,813,040,000
382	Penyediaan Bahan Logistik Rumah Jabatan Bupati dan Wakil Bupati	1,000,000,000
383	Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH	105,324,000
384	Inventarisasi Temuan Pengawasan	236,047,000
385	Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan	162,389,000
386	Fasilitasi Koordinasi Pemantauan dan Pengendalian Ekonomi	120,282,000
387	Fasilitasi Koordinasi Pemantauan dan Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan	29,215,000
388	Pengendalian Inflasi Daerah	105,897,000
389	Fasilitasi Koordinasi Pemantauan dan Pengendalian Aktifitas Pembangunan Ekonomi	35,620,000
390	Legistasi Rancangan Peraturan Perundang-undangan	411,264,500
391	Publikasi Peraturan Perundang-undangan	778,681,000
392	Kajian Peraturan Perundang-undangan Daerah Terhadap Peraturan Perundang-undangan Yang Baru, Lebih Ti	82,485,500
393	Pembuatan lembaran Daerah/Berita Daerah dan Himpunan Lembaran Daerah/Berita Daerah	74,995,000



2017

394	Fasilitasi Pemantapan SOTK Pemerintah Daerah Otonom	116,570,000
395	Fasilitasi Keprotokoleran Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	1,041,047,000
396	Fasilitasi Peliputan dan Dokumentasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	1,241,771,000
397	Program Pembinaan Iman dan Taqwa	5,274,406,400
398	Fasilitasi Pembinaan dan Peningkatan Pelaksanaan Keagamaan bagi Masyarakat	2,350,629,600
399	Visualisasi dan Penyampaian Pesan-Pesan Keagamaan	17,500,000
400	Pengelolaan Operasional Bantuan Keagamaan	2,906,276,800
401	Pengawasan Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	25,680,000
402	Fasilitasi Operasional Unit Pelayanan Pengadaan	77,881,000
403	Fasilitasi Operasional Pengadaan Barang/Jasa Secara Terpadu	235,212,000
404	Fasilitasi Pembinaan dan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga	5,052,000
405	Fasilitasi Pembinaan Keamanan dan Ketertiban	68,880,000
406	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	30,060,000
407	Fasilitasi Operasional Pemerintahan Kelurahan Tappanjeng	200,000,000
408	Fasilitasi Operasional Pemerintahan Kelurahan Pallantikang	200,000,000
409	Fasilitasi Operasional Pemerintahan Kelurahan Letta	200,000,000
410	Fasilitasi Operasional Pemerintahan Kelurahan Lembang	200,000,000
411	Fasilitasi Operasional Pemerintahan Kelurahan Lamalaka	200,000,000
412	Fasilitasi Operasional Pemerintahan Kelurahan Mallilingi	200,000,000
413	Fasilitasi Operasional Pemerintahan Kelurahan Karatuang	200,000,000
414	Fasilitasi Operasional Pemerintahan Kelurahan Onto	200,000,000
415	Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tentang APB Desa	7,758,250
416	Penyusunan pedoman Pengelolaan Keuangan Desa	33,475,450
417	Fasilitasi Penyiapan Data Potensi	36,723,800
418	Fasilitasi Pembinaan dan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga	30,000,000
419	Fasilitasi Pembinaan dan Peningkatan Pelaksanaan Keagamaan bagi Masyarakat	5,000,000



2017

420	Fasilitas Pembinaan Keamanan dan Ketertiban	36,248,000
421	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	27,469,700
422	Fasilitas Operasional Pemerintahan Kelurahan Bonto Jaya	200,000,000
423	Fasilitas Operasional Pemerintahan Kelurahan Bonto Langkasa	200,000,000
424	Fasilitas Operasional Pemerintahan Kelurahan Bonto Manai	200,000,000
425	Fasilitas Operasional Pemerintahan Kelurahan Bonto Lebang	200,000,000
426	Fasilitas Operasional Pemerintahan Kelurahan Bonto Sunggu	200,000,000
427	Fasilitas Operasional Pemerintahan Kelurahan Bonto Atu	350,000,000
428	Fasilitas Operasional Pemerintahan Kelurahan Bonto Rita	200,000,000
429	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan ADD	61,889,000
430	Fasilitas Penyiapan Data Potensi	18,600,000
431	Fasilitas Penyiapan Sarana dan Prasarana Transportasi Masyarakat Wilayah Terpencil	113,250,000
432	Fasilitas Pembinaan dan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga	15,150,000
433	Fasilitas Pembinaan Keamanan dan Ketertiban	55,800,000
434	Fasilitas Pembinaan Keamanan dan Ketertiban	60,155,000
435	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	35,312,000
436	Fasilitas Operasional Pemerintahan Kelurahan Gantarangkeke	350,000,000
437	Fasilitas Operasional Pemerintahan Kelurahan Tanah Loe	200,000,000
438	Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tentang APB Desa	11,100,000
439	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan ADD	28,200,000
440	Fasilitas Pembinaan dan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga	17,720,000
441	Fasilitas Pembinaan Keamanan dan Ketertiban	40,200,000
442	Fasilitas Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemerintah Daerah Tingkat Bawah	30,000,000
443	Fasilitas Pembinaan Keamanan dan Ketertiban	52,740,000
444	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	41,325,000



2017

445	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan ADD	39,396,500
446	Fasilitasi Penyiapan Sarana dan Prasarana Transportasi Masyarakat Wilayah Terpencil	82,200,000
447	Fasilitasi Pembinaan dan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga	21,775,000
448	Fasilitasi Pembinaan Keamanan dan Ketertiban	62,880,000
449	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	54,930,000
450	Fasilitasi Operasional Pemerintahan Kelurahan Lembang Gantarangeke	200,000,000
451	Fasilitasi Operasional Pemerintahan Kelurahan Banyorang	191,500,000
452	Fasilitasi Operasional Pemerintahan Kelurahan Campaga	200,000,000
453	Fasilitasi Operasional Pemerintahan Kelurahan Ereng-Ereng	189,000,000
454	Fasilitasi Penyiapan Sarana dan Prasarana Transportasi Masyarakat Wilayah Terpencil	84,440,000
455	Fasilitasi Pembinaan dan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga	14,510,000
456	Fasilitasi Pembinaan Keamanan dan Ketertiban	35,821,500
457	Fasilitasi Sitem Informasi Data Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Masyarakat	26,476,300
	Jumlah	423,249,743,072

Bantaeng, 6 Maret 2017

BUPATI BANTAENG

Prof.DR.H.M. NURDIN ABDULLAH, M.Agr

